

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan							
	Fokus Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia							
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1 2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik SD/MI kelas 1	24 40	25 55	26 50	27 55	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1.Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf)	75	80	85	90	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1. Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK)	9.715	9.715	9.715	9.715	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fokus Prioritas: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak								
4	Pembinaan Gizi Masyarakat	1.Jumlah balita gizi kurang yang ditangani	300.000	350.000	400.000	450.000	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
Fokus Prioritas : Pembedayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan								
5	Pembedayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan	3	3	3	3	Pusat Promosi Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota	80	80	80	80		
		3. Jumlah model intervensi promosi kesehatan	1	1	1	1		

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fokus Prioritas : Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi								
6	Penyehatan Lingkungan	1. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	35	40	45	50	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase pengawasan kualitas air minum	30	35	40	45		
		3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	50	52	54	56		
		4. Jumlah kab/kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)	5	15	20	35		
		5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan	10	15	21	28		
		6. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	31	37	43	49		
		7. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat	350	360	370	380		
		8. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu	10	20	40	60		

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fokus Prioritas : Peningkatan pengawasan obat dan makanan								
7	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	82.632	82.632	82.632	82.632	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM
		2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana)	58	63	63	63		
		3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana)	25	30	30	30		
8	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	1. Jumlah dokumen Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori "Early Warning" ☐	5	5	5	5	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM
		2. Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan	100	100	100	100		
9	Penilaian Makanan	1. Jumlah Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu (berkas)	10.028	10.028	10.137	10.137	Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	Prioritas : Perkuatan Ketahanan Pangan							
	Fokus Prioritas : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
1	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa mandiri yang diberdayakan (desa)	429	108	172	223	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementerian Pertanian
		2. Jumlah kawasan mandiri pangan yang diberdayakan (kawasan)	144	141	188	97		
		3. Jumlah sistem Kewaspadaan pangan (SKPG) dan gizi yang dikembangkan (laporan)	456	456	456	456		
		4. Laporan kajian kerawanan pangan (laporan)	35	35	35	35		
		5. Pemantauan. Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri pangan (laporan)	35	35	35	35		
		6. Laporan Hasil Penyusunan FSVA (laporan)	35	35	35	35		
		7. Laporan kajian ketersediaan pangan dan akses pangan (laporan)	35	35	35	35		

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	1.vPendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) (Desa)	2.600	5.500	6.100	6.900	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementerian Pertanian
		2. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan)	35	35	35	35		
		3. Laporan Promosi P2KP (Laporan)	35	35	35	35		
		4. Situasi Komsumsi Pangan Penduduk (Laporan)	35	35	35	35		
		5. Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan)	135	135	185	185		
		6. Pengembangan Pangan Lokal (Laporan)	11	12	12	13		
III	Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan							
Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal								
1.	Penyediaan Layanan PAUD	1. Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan <i>parenting education</i> (persen)	70	75	80	85	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	Kementerian Pendidikan Nasional
		2. Persentase angka partisipasi kasar (APK) PAUD	70	71	73	75		

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV Prioritas : Pengendalian Kuantitas Penduduk								
Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga								
1.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	6	6	6	12	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
		2. Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	16	16	16	16		
2.	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan	4	4	4	4		
		2. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif)	81,5 (dari 5,05 juta anggota aktif)	82,0 (dari 5,65 juta anggota aktif)	82,0 (dari 5,65 juta anggota aktif)		
		3. Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll)	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit		

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial							
Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan								
1.	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	1. Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial

MATRIKS BUKU 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
A Fokus Prioritas: Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif										
1	Bantuan Tunai Bersyarat	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri (jiwa)	148.778	148.778	149.582	150.588	153.600	156.672	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
3	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri (jiwa)	47.204	47.204	48.760	49.689	50.682	51.696	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
4	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri (jiwa)	50.491	50.491	51.310	52.337	53.384	54.451	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
5	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	75.000	75.000	130.000	141.413	141.413	141.413	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
6	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	21.473	21.473	27.000	30.000	35.000	40.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
7	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	111.940 3.200	111.940 3.200	111.090 3.200	111.090 3.200	111.090 3.200	111.090 3.200	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
8	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH	53.100 2.200	53.100 2.200	53.300 2.200	53.300 2.300	53.300 2.300	53.300 2.300	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
9	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) Pemberian jaminan hidup (KK)	2.122 4.782	2.122 4.782	2.064 6.609	2.064 6.609	2.064 6.609	2.064 6.609	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
10	Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	15.530.897	15.530.897	15.530.897	14.838.440	12.078.489	8.972.310	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
B Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan										
1	Peningkatan pembinaan kesetaraan ber-KB jalur pemerintah	Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)	3,97 12,8	3,97 12,8	4,60 12,6	4,6 13	4,6 14	4,6 14	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
2	Peningkatan Kesetaraan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	Persentase kesetaraan ber-KB PUS di wilayah dan sasaran khusus	-	-	30	30	30	30	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
3	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	75,5% (dari 2.000.000)	75,5% (dari 2.000.000)	75,5% (dari 1.100.000)	75,5% (dari 2.075.000)	75,5% (dari 2.105.000)	75,5% (dari 2.150.000)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan	BKKBN

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
4	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (pembinaan kesertaan ber-KB, Advokasi-KIE KB, dan Pembangunan Keluarga)	Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi	33	33	33	33	33	33	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
5	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa Miskin	8.062.561	8.062.561	6.046.921	6.046.921	6.046.921	6.046.921	Program Pendidikan Dasar	Kemendikbud
6	Penjaminan Kepastian Layanan SMP	Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa Miskin	2.893.187	2.893.187	2.169.890	2.169.890	2.169.890	2.169.890	Program Pendidikan Dasar	Kemendikbud
7	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin	759.975	759.975	425.033	425.033	425.033	425.033	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
8	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin	937.000	937.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
9	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi	214.640	214.640	182.292	182.292	182.292	182.292	Program Pendidikan Tinggi	Kemendikbud
10	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan madrasah	Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin	1.436.228	1.436.228	819.467	860.440	903.462	948.635	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin	950.291	950.291	765.491	803.766	843.954	886.152		
		Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin	392.729	392.729	354.929	372.675	391.309	410.874		
11	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	6.420	6.420	12.546	8.426	5.550	3.330	Program Pendidikan Islam	Kemenag
12	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Program Listrik Murah dan Hemat	95.100	95.100	93.323	88.889	88.889	88.889	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kemen ESDM
13	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
14	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	180.000	200.000	64.850	64.850	64.850	64.850	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kementerian Perumahan Rakyat
C Fokus Prioritas: Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan										
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	Keswadayaan Masyarakat:	1.189	1.189	1.189	865	614	758	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen PU
		Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan								
		Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan)								
		Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan pemberdayaan) - kecamatan								
2	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Cakupan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan:	5.100	5.100					Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
		Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan			4.723	4.003	3.003	3.574		
		- Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan			577	1.297	2.297	1.726		
		- Kegiatan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan			577	1.297	2.297	1.726		
3	Facilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kecamatan)	500	500	499	499	499	499	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE)	238 Kec	238 Kec	237 Kec	237 Kec	237 Kec	237 Kec	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen PU
		Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	4.667 Desa	4.667 Desa	1.000 Desa	1.000 Desa	1.000 Desa	1.000 Desa		
5	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Jumlah bidang tanah yang di redistribusi	142.750 bidang	154.075 bidang	107.150 bidang	142.750 bidang	142.750 bidang	142.750 bidang	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
6	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan			12	12	12	12		
		Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP			423	423	423	423		
7	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Jumlah desa wisata	561	561	837	837	837	-	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenparekraf
8	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok)	-	-	2.500	2.520	2.540	2.550	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	KKP
		Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit)	-	-	100	287	363	429		
9	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB)	-	-	2.000	2.100	2.200	2.300	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP
10	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok usaha pembudidayaan ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok)	-	-	630	662	695	729	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP
		Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok)	-	-	100	120	140	160		

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
11	Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan	Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar)	-	-	60	60	60	60	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP
		Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (Entitas Usaha)	-	-	1.340	1.500	1.600	1.700		
D Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan										
1	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura	Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang pertanian pangan dan hortikultura	34 Koperasi	34 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
2	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan	7 Koperasi	7 Koperasi	7 Koperasi	7 Koperasi	8 Koperasi	9 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
3	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan	Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang perikanan dan peternakan	16 Koperasi	16 Koperasi	14 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	27 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Koperasi penerima dukungan penguatan usaha Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)	-	-	4 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	6 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
4	Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM	Penguatan Kapasitas Lembaga dan Pendanaan KSP Konvensional/ Syariah	100 KSP/KSP Syariah	100 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
5	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Wirausaha pemula yang mendapat start up capital	1651 Wirausaha Pemula	1651 Wirausaha Pemula	3400 Wirausaha Pemula	3750 Wirausaha Pemula	4100 Wirausaha Pemula	4550 Wirausaha Pemula	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Koperasi yang diperkuat permodalannya	1100 Koperasi	1100 Koperasi	600 Koperasi	725 Koperasi	800 Koperasi	875 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
6	Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri	PKL yang Terfasilitasi	4000 Umi	4000 Umi	1000 Umi	1210 Umi	1330 Umi	1460 Umi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
7	Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	Pemasyarakatan kewirausahaan	3000 Orang	3000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM	TPKU yang Difasilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
9	Perluasan KUR	Koordinasi program KUR	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Sosialisasi Program KUR	33 Provinsi	33 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR	27520 UMKM	27520 UMKM	27520 UMKM	27520 UMKM	27520 UMKM	27520 UMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
10	Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM	Pengembangan dan Pembinaan LKM	100 LKM	100 LKM	360 LKM	200 LKM	200 LKM	200 LKM	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
11	Pengembangan Keanggotaan Koperasi	Pengembangan Anggota Koperasi Melalui Penyuluhan dan Kaderisasi	690 Orang	690 Orang	740 Orang	740 Orang	740 Orang	740 Orang	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
E Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku										
1	Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan	2		2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2	Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	3		2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3	Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	3		2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan dan kemitraan	3		2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
5	Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang keuangan mikro dan penguatan TTG	4		2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut										
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar)	23; 53; 48	23; 53; 49	25; 55; 50	25; 55; 50	25; 55; 50	25; 55; 50	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan
		Pembangunan SBNP	242	242	217	217	217	217		
		Unit perangkat radio SSB (unit)	100	100	100	100	100	100		
		Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya	7	7	7	7	7	7		
		Suku Cadang SROP (paket)	1	1	1	1	1	1		
		unit CCTV Pemantauan Kapal (unit)	2	2	2	2	2	2		
		Unit AIS (paket)	5	5	5	5	5	5		
		Dermaga kapal kenavigasian (lokasi)	3 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan)	4 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan)	3	3	3	3		
		Kapal inspeksi navigasi (unit)	5	5	5	5	5	5		
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit)	12	12	12	12	12	12	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan
		Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran (paket)	3	3	3	3	3	3		
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan	Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit)	0	0	7	7	7	7	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersediannya kapal penyebrangan perintis (unit)	15	15	10	10	10	10	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan
		Tersediannya subsidi perintis angkutan laut (lintas)	0	0	80	85	90	95		
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemen. Perhubungan
		Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)	24	24	26	26	26	26		
6	Penyelenggaraan Angkutan Perintis	Jumlah pesawat perintis	0	0	0	0	10	10	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemen. Perhubungan
B Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari										
1	Penelitian Oceanografi	Jumlah publikasi yang dihasilkan	1	1	1	1	1	1	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI
		Jumlah jaringan data sistem informasi dan penelitian terumbu karang dan ekosistem terkait	1	1	1	1	1	1		
2	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80%	-	-	10 pelabuhan	10 pelabuhan	10 pelabuhan	10 pelabuhan	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
3	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan	-	-	10 Hari	10 Hari	7 Hari	7 Hari	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)	2	2	4	4	4	4	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan (paket)	2	2	3	3	3	3		
		Jumlah Inovasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)	6	6	5	5	5	5		
		Jumlah Data dan /atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim (paket)	0	0	2	2	2	2		
		Jumlah Data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Paket)	0	0	4	4	4	4		
		Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (buah)	0	0	1	1	1	1		
		Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	0	0		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket)	3	3	8	8	8	8	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket)	2	2	3	3	3	3		
		Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP)	7	7	5	5	5	5		
		Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP)	2	2	5	5	5	5		
		Jumlah Dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan Pesisir dan Laut (paket)	3	3	5	5	5	5		
		Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil litbang sumberdaya laut dan pesisir (buah)	0	0	1	1	1	1		
6	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI berbasis IPTEK (paket)	4	4	7	7	7	7	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI (paket)	2	2	4	4	4	4		
		Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP)	4	4	2	2	2	2		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Recana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (PUD)	8	8	8	8	8	8		
		Jumlah Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya (KKP)	6	6	3	3	3	3		
		Jumlah data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan	0	0	10	10	10	10		
		Jumlah teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi SDI (paket)	0	0	3	3	3	3		
7	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
		Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar	-	-	406	431	456	481		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Recana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pendidikan kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6.108	6.108	6.250	6.500	6.500	6.500	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)	-	-	110	110	110	110		
C Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Perecepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir										
1	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu
		Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders	1	1	1	1	1	1		
		Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders.	1	1	1	1	1	1		
		Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat	1	1	1	1	1	1		
2	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	-	-	36	54	54	37	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	-	-	3	4	4	2		
		Jumlah dokumen Tata Ruang WP3K di Wilayah Nasional dan Lintas Wilayah yang telah dievaluasi substansinya (dokumen)	-	-	-	39	58	58		
		Jumlah dokumen RZWP3K yang diakselerasi legalitasnya (dokumen)	-	-	5	72	90	50		
		Jumlah dokumen final RZWP3K kab/kota dan prov yang telah dievaluasi substansinya (lokasi)	-	-	72	90	50	50		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	65	65	50	50	50	30		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Recana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	Peta Lingkungan Pantai	54 NLP	54 NLP	58 NLP	61 NLP	64 NLP	66 NLP	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
		Peta Kelautan	4 NLP	4 NLP	14 NLP	16 NLP	16 NLP	17 NLP		
		Peta Lingkungan Pantai dan kelautan yang dimutakhirkan	20 NLP	20 NLP	20 NLP	20 NLP	20 NLP	20 NLP		
		Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, sinergi, diseminasi dan sosialisasi Pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai.	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK		
		Dokumen NSPK & kajian pemetaan Kelautan & Lingkungan Pantai.	0 DOK	0 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK		
		Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Kelautan dan Lingkungan Pantai Nasional	0 DOK	0 DOK	1 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK		
4	Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	Tersedianya Sarana dan Prasarana prioritas dukungan hankam dan penegakan hukum (Gakum) batas wilayah laut dan udara	12 unit	13 unit	-	-	12 unit	5 unit	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	BNPB
5	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi)	-	-	11	15	18	20	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	KKP

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut										
1	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia	12 kali	13 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla
2	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut	Terbangunnya sarana & prasarana beserta fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di Daerah	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla
3	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	90%	95,35%	96,31 %	97,27 %	98,24 %	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	90%	89,61%	90,46 %	93,17 %	95,97 %		
		Persentase Ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	80%	80,00%	91,25 %	92,37 %	93,5 %		
		Persentase Ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	80%	75,37%	80,23 %	84,74 %	88,96 %		
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif Dalam Pengawasan SDKP	800	800	1.128	1.539	1.585	1.632		
		Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan	-	-	90,00%	92%	94%	96%		
		Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan	-	-	30,50%	33%	35%	38%		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Recana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Operasional Pengawasan Sumber Daya Pemanfaatan Kelautan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan)	-	-	5	6	7	8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah jenis ikan yang dilindungi, yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	-	-	6	8	10	14		
		Jumlah Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perijinan yang diberikan	0	0	30	40	50	60		
		Persentase penurunan tingkat pencemaran akibat aktifitas perikanan [UPI] (%)	28	28	60	72	78	84		
		Persentase survey BMKT yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perijinan yang diberikan (%)	-	-	45	55	60	75		
		Jumlah usaha garam yang sesuai ketentuan perijinan yang diberikan (usaha garam)	-	-	70	80	90	100		
		Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	-	-	100	100	100	100		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas	90 Hari operasi	90 Hari operasi	116 hari operasi	73 hari operasi	73 hari operasi	75 hari operasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Kapal Pengawas yang siap Beroperasi	-	-	27 unit	31 Unit	31 unit	32 unit		
		Jumlah Awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi	-	-	108 orang	124 orang	124 orang	128 orang		
6	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SD kelautan dan perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan akuntabel (unit)	-	-	6	3	3	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator], Gudang barang bukti, Rumah penampungan sementara ABK Non Justitia, Pos Pengawas) (unit)	20	20	10	10	10	10		
		Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	-	-	75%	80%	85%	90%		
		Kawasan konservasi yang dapat dipantau (lokasi)	-	-	12	24	36	48		
7	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu	79%	79%	80%	82%	85%	90%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik secara akuntabel	79%	79%	80%	82%	85%	90%		
		Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Inpres 15 tahun 2011)	-	-	80%	80%	80%	80%		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Recana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan baru yang kompeten (orang)	60	60	30	30	30	30		
E Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil										
1	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk terfasilitasi sarpras dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau)	64 ppk, 5 ppkt	64 ppk, 5 ppkt	15	16	21	26	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau)	-	-	7	20	35	55		
		Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (Gugus Pulau)	-	-	3	5	7	9		
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya (pulau)	5	5	5	30	60	90		
		Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau)	-	-	750	500	250	-		
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau)	21	21	20	70	120	170		

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Fasilitasi peningkatan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal	86 Paket	86 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
3	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal	Fasilitasi peningkatan infrastruktur energi di daerah tertinggal	3500 Paket	3500 Paket	5.020 Paket	5.020 Paket	5.020 Paket	5.020 Paket	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal	Fasilitasi peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal	43 Paket	43 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
5	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan	Fasilitasi pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal	35 Paket	35 Paket	27 Paket	27 Paket	27 Paket	27 Paket	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
6	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal	Fasilitasi kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terluar	67 Paket	67 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
F Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan										
1	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut	-	-	2 Kebijakan/Ketentuan	2 Kebijakan/Ketentuan	2 Kebijakan/Ketentuan	2 Kebijakan/Ketentuan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

MATRIKS 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terselenggaranya fasilitasi provinsi/kab/kota yang ingin mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan lautan	-	-	10 Daerah yang di fasilitasi	10 Daerah yang di fasilitasi	10 Daerah yang di fasilitasi	10 Daerah yang di fasilitasi		
2	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha)	300000	300000	500000	600000	800000	900000	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan)	4.5 jt Ha	4.5 jt Ha	10	28	30	33		
		Jumlah kawasan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan)	-	-	10	20	25	30		
		Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)	15	15	10	15	19	19		
		Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring)	-	-	300%	300%	300%	500%		
3	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk)	3	3	2	4	5	6	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin)	-	-	4	10	15	20		
		Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan)	22	22	22	65	80	95		
		Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan)	-	-	7	20	30	40		
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan)	-	-	7	15	20	25		
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasarannya	-	-	3	10	15	20		

MATRIK 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1	Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	70%	71%	73,00%	75,00%		
		2. APM SD/MI	90,63%	90,37%	90,83%	93,00%		
		3. APK SMP/SMPLB/Paket B	81,6%	82,47%	82,46%	79,44%		
		4. APM SMP/MTs	80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		5. APK MI	12,99%	13,14%	13,26%	13,37%		
		6. APK MTs	22,13%	22,48%	22,62%	22,09%		
		7. APK MA	8,64%	8,87%	9,09%	9,32%		
		8. Cakupan kunjungan neonatal pertama	91	92	93	94		
		9. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	91	91.5	92	92.5		
1.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹⁾	1. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf)	75	80	85	90	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)	95	96	96	96		
1.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak ¹⁾	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	91	92	93	94	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1	24	25	26	27		
		3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	75	78	81	83		
1.3	Pembinaan Gizi Masyarakat ¹⁾	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah balita gizi kurang yang ditangani	100	100	100	100		
1.4	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra ¹⁾	1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	91	91.5	92	92.5	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak	90	90	90	90		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.5	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	1. Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional	60	62	64	66	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase Kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah	49	55	62	70		
1.6	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ¹⁾	Persentase Angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar	52.5	54	56	58	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
1.7	Penyehatan Lingkungan ¹⁾	Persentase pengawasan kualitas air minum	50	55	60	65	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
1.8	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ¹⁾	1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan	3	3	3	3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota	80	80	80	80		
		3. Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan	1	1	1	1		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.9	Pembinaan Ketahanan Remaja ¹⁾	Persentase Pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang KB dan Kesehatan	75	75	75	75	Program Kependudukan,	BKKBN
1.10	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak ¹⁾	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif)	81,5 (dari 5,05 juta anggota aktif)	82 (dari 5,65 juta anggota aktif)	82(dari 5,65 juta anggota aktif)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan	BKKBN
1.11	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	50	50	50	50	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan	BKKBN
1.12	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN ⁴⁾	1. Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka	140 Kali	145 Kali	150 Kali	155 Kali	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		2. Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional	4 Media	5 Media	6 Media	7 Media		
		3. Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik	24 Kali	30 Kali	36 Kali	42 Kali		
		4. Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru	12 Kali	15 Kali	18 Kali	21 Kali		
		5. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
1.13	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ⁴⁾	1. Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	100 Lembaga	105 Lembaga	110 Lembaga	115 Lembaga	Program P4GN	BNN
		2. Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL	33 Lembaga	36 Lembaga	40 Lembaga	44 Lembaga		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		3. Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		4. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
1.14	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat ⁴⁾	1. Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	100 Lembaga	105 Lembaga	110 Lembaga	115 Lembaga	Program P4GN	BNN
		2. Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman		
1.15	Penyediaan layanan PAUD ¹⁾	1. APK PAUD usia 3-6 tahun	70%	71%	73%	75%	Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan Kebudayaan
		2. % janin sampai 3 tahun memperoleh layanan parenting	2	4	5	8		
		3. % desa memiliki minimal satu layanan PAUD	70%	75%	80%	85%		
		4. Jumlah lembaga PAUD menerapkan kurikulum 2013	2	5	8	12		
		5. % kabupaten/kota yang mempunyai pusat rujukan PAUD	24%	29%	35%	41%		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.16	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	1. APM SD/MI	90,63%	90,37%	90,83%	93%	Program Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APK SD/SDLB/PAKET A	97,07%	96,41%	96,63%	98,90%		
		3. Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	100%	100%	100%	100%		
		4. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	26.454.575	26.492.965	26.753.156	27.592.576		
		5. Persentase SD yang memenuhi SPM	100%	100%	100%	100%		
		6. Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin	6.046.921	6.046.921	6.046.921	6.046.921		
1.17	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP ¹⁾	1. APK SMP/SMPLB/Paket B	81,60%	82,47%	82,46%	79,44%	Program Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APM SMP/MTs	80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		3. Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB	100%	100%	100%	100%		
		4. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	10.920.866	10.920.866	10.920.866	10.920.866		
		5. Persentase SMP yang memenuhi SPM	100	100	100	100		
		6. Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin	2.169.890	2.169.890	2.169.890	2.169.890		
		7. Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	0,009	0,009	0,009	0,009		
1.18	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB ¹⁾	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu SDLB	0	0	0	0	Program Pendidikan Dasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.19	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK ¹⁾	1. APK SMK Nasional	35,70%	37,28%	38,57%	39,47%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah siswa SMK sasaran BOS	4.725.078	4.949.681	5.136.752	5.269.447		
		3. Persentase SMK memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	75	80	85	90		
		4. Persentase SMK menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar pengelolaan	65	70	75	80		
		5. Persentase SMK menerapkan pendidikan karakter	100	100	100	100		
		6. Jumlah siswa SMK penerima bantuan siswa miskin	550.000	550.000	550.000	550.000		
		7. Persentase siswa SMK mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional	8,5	8,5	8,5	8,5		
		8. Persentase SMK berkemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri	44,2%	48,0%	48,0%	48,0%		
		9. Jumlah SMK menyediakan layanan pembinaan kewirausahaan	95	105	105	105		
		10. Persentase SMK menerapkan kurikulum 2013	67	100	100	100		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.20	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾	1. APK SMA nasional	35,32%	36,88%	38,17%	39,07%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. APK Paket C Nasional	2,99%	3,18%	3,31%	3,37%		
		3 . Rasio kesetaraan gender SMA/SMLB	1	1	1	1		
		4. Jumlah siswa SMA sasaran BOS	4.674.158	4.896.940	5.083.736	5.216.783		
		5. Persentase SMA memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	75	80	85	90		
		6. Persentase SMA/ Paket C menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan dan standar pengelolaan	65	70	75	80		
		7. Persentase SMA menerapkan pendidikan berkarakter	100	100	100	100		
		8. Jumlah siswa SMA penerima bantuan siswa miskin	425.033	425.033	425.033	425.033		
		9. Persentase SMA menerapkan kurikulum 2013	67	100	100	100		
		10. Persentase siswa SMA mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional	7,5	7,5	7,5	7,5		
1.21	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB ¹⁾	1. APK PLK Nasional	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Persentase SMLB memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	45%	50%	55%	60%		
		3. Persentase SMLB menerapkan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan	45%	50%	55%	60%		
		4. Persentase SMLB menerapkan pendidikan karakter	100%	100%	100%	100%		
		5. Persentase siswa SMLB mengikuti olimpiade, festival, lomba, dan debat tingkat nasional maupun internasional	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
1.22	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan ¹⁾	1. Jumlah penganggur usia produktif yang mendapatkan layanan kursus dan keterampilan yang bermutu	60.000	130.000	210.000	300.000	Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi	51.773	61.773	71.773	81.773		
		3. Jumlah standar program kursus dan pelatihan	45	50	55	60		
		4. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar	8.967	10.467	11.967	14.967		
1.23	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah ¹⁾	APM SD/MI	90,63%	90,37%	90,83%	93,00%	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
		APK MI	12,99%	13,14%	13,26%	13,37%		
		APM AMP/MTs	80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		APK MTs	22,13%	22,48%	22,62%	22,09%		
		APK MA	8,64%	8,87%	9,09%	9,32%		
		Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MI	1	1	1	1		
		Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs	1	1	1	1		
		Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA	1	1	1	1		
		Siswa MI/PPS Ula penerima BOS	3.616.758	3.797.596	3.987.476	4.186.849		
		Siswa MTs/PPS Wustha penerima BOS	3.377.950	3.546.848	3.724.190	3.910.399		
		Siswa MA penerima BOS	1.221.144	1.282.201	1.346.311	1.413.627		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		Siswa MI penerima bantuan miskin	819.467	860.440	903.462	948.635		
		Siswa MTs penerima bantuan miskin	765.491	803.766	843.954	886.152		
		Siswa MA penerima bantuan miskin	354.929	372.675	391.309	410.874		
		Siswa MTs penerima bantuan beasiswa bakat dan prestasi	750	1.000	1.500	2.000		
		Siswa MA penerima bantuan beasiswa bakat dan prestasi	750	1.000	1.500	2.000		
1.24	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ³⁾	Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri
		Jumlah daerah melaksanakan penguatan karakter bangsa	10 Prov	8 Prov	7 Prov	5 Prov		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)		
1.25	Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih ³⁾	Jumlah pusat pendidikan pemilih	9 Provinsi	18 Provinsi	27 Provinsi	33 Provinsi	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum
1.26	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) ¹⁾	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
2	Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Diskriminasi	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	100%	100%	100%	100%		
2.1	Penanggulangan Krisis Kesehatan 1)	meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya dalam penanggulangan krisis kesehatan	11	11	11	11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan
2.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik 3)	Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya	80%	80%	80%	80%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri
2.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah 3)	Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking.	100%	100%	100%	100%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri
2.4	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak 2)	1. penarikan pekerja anak dari tempat kerja dan BPTA	16.000 pekerja anak	17.250 pekerja anak	19.838.000 pekerja anak	22.813 pekerja anak	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kemenakertrans
		2. peningkatan perusahaan yang menerapkan norma kerja anak	90 pengawasan ketenagakerjaan	90 pengawasan ketenagakerjaan	90 pengawasan ketenagakerjaan	90 pengawasan ketenagakerjaan		
2.5	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1)	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak disabilitas dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	149.582	150.588	153.600	153.600	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
2.6	Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan ⁵⁾	1. Jumlah UPT masyarakatan yang melaksanakan pelayanan terhadap kelompok rentan dan resiko tinggi sesuai standar.	30	60	90	120	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM
2.7	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak ⁵⁾	1. Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan dan assessment anak sesuai standar	7	7	9	11	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM
		2. Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	10	11	12	13		
		3. Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	2	4	6	8		
		4. Jumlah divisi masyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan masyarakatan dan pengentasan anak oleh UPT PAS di wilayah masing-masing	3	3	3	3		
		5. Jumlah standar pembimbingan masyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat	5	5	5	5		
3	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak	Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan	100%	100%	100%	100%		
3.1	Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi ⁵⁾	pengelolaan data statistik kriminal berdasarkan jenis penanganan perkara dan pengembangan teknologi sistem informasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kejaksaan Agung
3.2	Kegiatan Kerjasama dan Instrumen HAM ⁵⁾	Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	16	16	16	16	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
3.3	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu	20%	40%	60%	80%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
3.4	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	Persentase penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	20%	40%	60%	80%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
3.5	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	11	15	15	10	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (40 Kebijakan)	20	40	60	80		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Model)	-	3	2	-		
		4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (28 kab/kota)	-	4	8	8		
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (14 kab/kota)	14	36	50	64		
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi (60 Lembaga, 600 SDM)						
		Lemb	0	25	50	75		
		SDM	20	40	60	80		
		7. Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Laporan)	1	1	1	1		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		8. Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (1 Sub Sistem)	50	50	100	100		
		9. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)	1	2	1	2		
3.6	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	15	17	27	27	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan)	25	55	70	85		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (5 Model)	2	3	-	-		
		4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (28 Kab/Kota)	4	8	8	8		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (14 Kab/Kota)	-	21	43	64		
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM)	Lemb	-	30	50		
			SDM	10	30	50		
		7. Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (4 lap)	1	1	1	1		
		8. Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (2 Sub Sistem data)	50	50	100	100		
		9. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)	1	2	1	2		
3.7	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak	1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	1	1	1		Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (46 Kebijakan)						
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (5 Model)						
		4. Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (40 kab/kota)						
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (20 Kab/Kota)						
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi (8 Lembaga, 200 SDM)	Lemb	1	1	1		
			SDM	8	8	8		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		7. Jumlah laporan survei anak bidang Partisipasi Anak (5 laporan)	1	1	1			
		8. Persentase sub sistem data Partisipasi Anak (1 Sub Sistem)	5	5	5			
		9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)	-	-	-			
3.8	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	15	20	31	22	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan)	25	55	70	85		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (5 Model)	2	3	-	-		
		4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (10 Kab/Kota)	0	10	10	10		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM)						
		Lemb	0	27	50	80		
		SDM	5	30	55	85		
		6. Jumlah laporan survei anak bidang Lingkungan dan PNLL (4 Laporan)	1	1	1	1		
		7. Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL (3 sub sistem)	50	50	100	100		
		8. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)	1	2	1	2		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana	
				2016	2017	2018			
3.9	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	11	30	31	31	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA	
		2. Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 Kebijakan)	20	40	60	80			
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (5 Model)	2	3	-	-			
		4. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (100 kab/kota)	5	25	25	25			
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi (100 lembaga ; 400 SDM)	Lemb	10	40	70			90
			SDM	10	40	70			90
		6. Jumlah laporan survei anak bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (4 laporan)	1	1	1	1			
		7. Persentase sub-sistem data Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (1 sub sistem data)	50	50	100	100			
		8. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan)	1	2	1	2			

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
3.10	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	5	2	2	-	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan)	20	40	60	80		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	1	5	2	-		
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	K/L 1	5	5	5		
			Pemda 1	12	14	14		
		5. Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM)	24	48	73	100		
		6. Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak	3	5	5	5		
		7. Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem)	17	38	54	75		
		8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu	2	4	2	4		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
3.11	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	3	4	3	4	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan)	20	40	60	80		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	-	3	3	-		
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	K/L Pemda	-	4	4		
				-	6	8		
		5. Persentase lembaga penyedia layanan penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi (8 lembaga)	13	25	50	75		
		6. Jumlah laporan survei bidang Penanganan Masalah Sosial Anak	2	2	2	2		
		7. Persentase sub sistem data bidang penanganan masalah sosial anak (4 subsistem)	25	50	75	100		
3.12	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ¹⁾	8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang	1	2	1	2	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		1. Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	3	2	1	1		
		2. Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 kebijakan)	20	40	60	80		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	-	2	2	2		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	KL	-	-	2	2	
			Prov	-	-	4	4	
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (2 Lembaga dan SDM=100)	Lemb	-	50	50	100	
			SDM	25	50	75	100	
		6. Jumlah Laporan survei bidang Penanganan ABH		1	1	1	1	
		7. Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH (4 Sub sistem)		20	40	60	80	
		8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu		1	1	1	1	
3.13	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		1	1	1	1	Program Perlindungan Anak
		2. Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda (4 Kebijakan)		20	40	60	80	
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus		-	2	-	-	
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	K/L	2	2	4	4	
			Pemda	4	6	8	8	
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM	Lemb	50	50	100	100	
			SDM	25	50	75	100	

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
		6. Jumlah laporan survei bidang penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	1	1	1	1		
		7. Persentase sub sistem data bidang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (4 Sub Sistem)	0	25	50	75		
		8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang diselesaikan tepat waktu	1	1	1	1		
3.14	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak ¹⁾	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	5	1	1	1	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan)	20	40	60	80		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	-	3	-	-		
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	K/L	3	3	3		
			Pemda	10	10	10		
		5. Persentase lembaga dan penyedia layanan pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi (2 Lembaga)	-	50	50	78		
		6. Jumlah laporan survei bidang pemenuhan hak Sipil anak	2	2	2	2		
		7. Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak Sipil anak (Sub sistem)	25	50	75	100		
		8. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu	1	3	2	3		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2015	Prakiraan maju			Program	Pelaksana
				2016	2017	2018		
3.15	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) ¹⁾	1. Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA	9	15	20	26	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	KPAI
		2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA	9	15	20	26		
		3. Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden	2	2	2	2		
		4. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (150 pengaduan)	20	40	60	80		
Keterangan: ¹⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) ²⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi) ³⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik) ⁴⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan) ⁵⁾ kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)								

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
KEGIATAN ADAPTASI										
BIDANG KESEHATAN										
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional			60	62	64	66	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1.000 pada tahun 2019			340,0	360,0	375,0	390,0		
		Persentase Angka Kematian kasus Leptospirosis pada Manusia menjadi <15% Tahun 2019			30	24	21	18		
2	Penyehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Jumlah = 16.000 desa	Jumlah = 16.000 desa	35	40	45	50	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		Persentase pengawasan kualitas air minum			50	55	60	65		
		Jumlah daerah yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)			5	15	20	35		
		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat			350	360	370	380		
		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu			10	20	40	60		
BIDANG EKONOMI										
1	Koordinasi Kebijakan Pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	80	80	85	85	85	85	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
BIDANG SARANA DAN PRASARANA										
1	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah buah waduk yang dibangun	30 waduk dilaksanakan, 7 diantaranya selesai	30 waduk dilaksanakan, 7 diantaranya selesai	21 waduk dilaksanakan	40 waduk dilaksanakan	59 waduk dilaksanakan	54 waduk dilaksanakan	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum
		Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun	511 buah	511 buah	195 buah	397 buah	447 buah	465 buah		
		Jumlah buah waduk yang direhabilitasi	10 buah	10 buah	13 buah	6 buah	8 buah	7 buah		
		Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi	74 buah	74 buah	31 buah	202 buah	129 buah	153 buah		
		Jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara	1.207 buah	1.207 buah	1.207 buah	1.207 buah	1.598 buah	1.118 buah		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

REKAPITULASI DATA BIDANG KETAHANAN PANGAN										
NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi	12 kawasan	12 kawasan	15 kawasan	127 kawasan	80 kawasan	64 kawasan	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum
		Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	43.742 ha	43.742 ha	33.299 ha	123.724 ha	151.328 ha	134.179 ha		
		Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi	158.343 ha	158.343 ha	38.183 ha	496.862 ha	256.761 ha	370.976 ha		
		Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	2.479.412 ha	2.479.412 ha	2.479.412 ha	2.035.341 ha	2.026.552 ha	2.050.311 ha		
		Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ ditingkatkan	42.121 ha	42.121 ha	10.158 ha	34.249 ha	27.433 ha	18.954 ha		
		Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi	89.902 ha	89.902 ha	13.800 ha	56.065 ha	68.614 ha	90.815 ha		
3	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara	1.275.352 ha	1.275.352 ha	1.275.352 ha	1.444.227 ha	1.486.897 ha	1.513.192 ha	Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air	Kemen. Pekerjaan Umum
		Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun	185,17 km	185,17 km	125 km	1.329 km	1.161 km	1.200 km		
		Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi	192,83 km	192,83 km	15 km	480 km	393 km	615 km		
		Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	2.092 km	2.092 km	2.092 km	12.920 km	11.258 km	12.546 km		
		Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun	54 buah	54 buah	20 buah	159 buah	67 buah	117 buah		
		Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi	11 buah	11 buah	6 buah	35 buah	6 buah	12 buah		
		Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara	293 buah	293 buah	293 buah	514 buah	507 buah	533 buah		
		Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun	49,22 km	49,22 km	22,46 km	1.094,78 km	1.233,09 km	691,58 km		
		Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi	3,32 km	3,32 km	0,00 km	22,19 km	47,65 km	17,47 km		
		Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara	142,03 km	142,03 km	142,03 km	2.231,13 km	2.267,68 km	2.332,09 km		
BIDANG KETAHANAN PANGAN										
1	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha)	23.596	23.596	23.596	23.596	23.596	23.596	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	1	1	1		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem Informasi)	7	7	7	7	7	9	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta)	60	60	60	60	60	60		
		Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi)	9	9	9	10	15	16		
		Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji da instrument lainnya) yang ramah lingkungan (Formula)	9	9	9	9	11	6		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi)	6	6	6	6	6	6		
		Jumlah database dan informasi sumberdaya pertanian (Database)	10	10	10	12	13	14		
		Jumlah model pengembangan pertanian terpadu berbasis agroekologi/tipologi lahan (Model)	2	2	2	2	2	2		
		Dukungan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
3	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Jumlah (KM) Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	500	500	500	500	500	500		
		Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Jumlah (Ha) Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
		Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/ pasca sertifikasi	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
		Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian	50	50	50	50	50	50		
		Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit)	50	50	50	50	50	50		
		Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971		
		Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	300	300	300	300	300	300		
		Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	550	550	550	550	550	550		
		Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket)	1	1	1	1				
		Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan)	12	12	12	12	12	12		
5	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu	Terlaksannya Penerapan dan pengembangan peramalan OPT (Provinsi)	24	24	24	24	24	24	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Terlaksannya Informasi Peramalan Serangan OPT (Informasi)	48	48	48	48	48	48		
		Terlaksannya Teknologi Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT (Model)	12	12	12	12	12	12		
6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	75	75	75	75	75	75	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045		
		SLPHT (Kelompok)	660	660	660	660	660	660		
		Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)	310	310	310	310	310	310		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
7	pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa)	429	429	429	108	172	223	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan)	144	144	144	141	188	97		
		Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan (Laporan)	456	456	456	456	456	456		
		Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan (Laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan (Laporan)	35	35	35	35	35	35		
8	Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pendampingan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa)	2.600	2.600	2.600	5.500	6.100	6.900	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan
		Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP (laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Laporan Promosi P2KP (laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Situasi Konsumsi Pangan Penduduk (Laporan)	35	35	35	35	35	35		
		Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan)	135	135	135	135	185	185		
		Pengembangan Pangan Lokal (Laporan)	11	11	11	12	12	13		
		Pengembangan Pangan Lokal (Laporan)	11	11	11	12	12	13		
9	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Akses)	1.340	1.340	1.340	1.340	1.350	1.350	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur)	18	18	18	19	22	23		
		Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi)	5	5	5	5	5	5		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi)	2	2	2	2	2	2		
		Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
10	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Jagung (GAP) (Ha)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	1	1	1		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
11	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai)	32	32	32	32	32	32	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	1	1	1		
12	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun)	16	16	16	16	16	16	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi)	34	34	34	34	34	34		
		Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)	11.675	11.675	11.675	13.905	14.235	14.570		
		Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang)	21.000	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi)	5	5	5	5	5	5		
		Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
13	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Pengembangan Pakan Hijauan (stek)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.143.505	3.300.680	3.458.568	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis	Kementan
		Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton)	60.000	60.000	60.000	62.870	66.014	72.615		
		Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratorium Pakan (sampel)	4.250	4.250	4.250	4.453	4.676	5.000		
14	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Teknologi)	13	13	13	15	17	19	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model)	2	2	2	2	2	3		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (Rekomendasi)	3	3	3	3	3	3		
		Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
15	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Pemberdayaan perangkat (Unit)	74	74	74	74	74	74	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		SL-PHT Perkebunan (KT)	198	198	198	198	198	198		
		Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen)	45	45	45	45	45	45		
		Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha)	16.698	16.698	16.698	16.698	16.698	16.698		
		Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang)	984	984	984	984	984	984		
		Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan)	12	12	12	12	12	12		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
16	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi)	2	2	2	2	3	3	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi)	7	7	7	7	8	8		
		Jumlah prototipe alsintan yang siap didiseminasikan (Unit)	20	20	20	25	30	35		
		Dukungan penelitian/ perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
BIDANG SISTEM PENDUKUNG DAN KETAHANAN EKOSISTEM										
1	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan			72%	72%	75%	75%	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Tingkat akurasi prakiraan musim			70%	70%	70%	70%		
		Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan			20 Hari	10 Hari	10 Hari	10 Hari		
		Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan			15 Hari	10 Hari	10 Hari	10 Hari		
		Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan perlabuhan			10 Hari	10 Hari	7 Hari	7 Hari		
2	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter			24 Jam	12 Jam	6 Jam	3 Jam	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Kecepatan layanan informasi kualitas udara			3 Bulan	2 Bulan	1 Bulan	20 Hari		
		Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat	6 jenis	6 jenis	3 Ragam	6 Ragam	9 Ragam	12 Ragam		
		Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim			2 Ragam	4 Ragam	6 Ragam	8 Ragam		
3	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
		Jumlah Rencana Kontinjensi	24 Dokumen	24 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen		
		Jumlah Pedoman Kesiapsiagaan Sistem Peringatan	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman		
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	Jumlah Relawan	9 kegiatan	9 kegiatan	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
		Jumlah Desa Tangguh	60 desa	60 desa	82 Desa	164 Desa	164 Desa	164 Desa		
5	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah Fasilitas Pengurangan Risiko Bencana	156 lokasi	156 lokasi	30 lokasi	30 lokasi	30 lokasi	30 lokasi	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
		Jumlah Pedoman Pengurangan Risiko Bencana	2 Pedoman	2 Pedoman	5 pedoman	5 pedoman	5 pedoman	5 pedoman		
6	Peta Tematik Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Tematik terkait prioritas pembangunan nasional			54 NLP	56 NLP	56 NLP	56 NLP	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Terselenggaranya fasilitasi provinsi/ kabupaten/ kota yang ingin mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	10 kabupaten/ kota	10 kabupaten/ kota	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi		
2	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal	4 kebijakan/ ketentuan	4 kebijakan/ ketentuan	4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional	4 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/ rekomendasi yang menjadi acuan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi	400 orang/ lembaga	400 orang/ lembaga	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan		
		Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP			20 jenis kompetensi/ protokol	30 jenis kompetensi/ protokol	50 jenis kompetensi/ protokol	60 jenis kompetensi/ protokol		
3	Adaptasi Perubahan Iklim	Terfasilitasinya sektor dan daerah dalam melaksanakan kajian kerentanan dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan	5 sektor	5 sektor	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim (termasuk SPARC-UNDP)	100 lokasi	100 lokasi	0 lokasi	100 lokasi	100 lokasi	100 lokasi		
4	Pendayagunaan pesisir dan lautan	Jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan)	22	22	22	65	80	95	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
5	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah data dan/atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim	0	-	2	2	2	2	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
KEGIATAN MITIGASI										
BIDANG EKONOMI										
1	Koordinasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi	75%	75%	75%	80%	80%	80%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
4	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya fasilitas/infrastruktur pengembangan industri hijau	4		6	6	6		Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri	Kementerian Perindustrian
		Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi sektor industri	4		10	10	10			
BIDANG SARANA DAN PRASARANA										
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	Peraturan pengembangan PPLP	9 NSPK	9 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Ditjen Cipta Karya, Kemen. PU
		Infrastruktur air limbah	709 kawasan	709 kawasan	450764	677 kawasan	629 kawasan	240 kawasan		
		Infrastruktur drainase perkotaan	59 kab/kota	59 kab/kota	53 kab/kota	40 kab/kota	40 kab/kota	40 kab/kota		
		Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	70 kab/kota	70 kab/kota	41 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota		
		Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R	40 kawasan	40 kawasan	127 kawasan	40 kab/kota	40 kab/kota	40 kab/kota		
2	Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan	24	24	24	27	30	30	Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat	Kemen. Perhubungan
		Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	3	3	5	8	9	9		
		Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
3	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Panjang km jalur KA yang direhabilitasi	75,2	75,2	82,7	82,7	82,7	82,7	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan
		Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi	46	46	46	46	46	46		
		Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya	244,7	244,7	257,0	257,0	257,0	257,0		
		Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5		
		Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan	31	31	32	32	32	32		
		Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi	18	18	19	19	19	19		
		Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	18	18	18	18	18	18		
		Jumlah km'sp pengadaan rel	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34		
		Jumlah unit pengadaan wesel	200	200	200	200	200	200		
		Jumlah paket pengadaan, peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian	20	20	20	20	20	20		
		Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional	14	14	14	14	14	14		
		Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang	57	57	57	57	57	57		
		Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan/DED/STD/AMDAL bidang prasarana KA	38	38	38	38	38	38		
		Terselenggaranya paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	1	1	1	1	1	1		
4	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan	39	39	39	39	5	5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemen. Perhubungan
		Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian	20	20	20	20	20	20		
		Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang keselamatan perkeretaapian	20	20	20	20	20	20		
		Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket)	1	1	1	1	1	1		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
5	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km)	17,6	17,6	25,0	35,0	40,0	40,0	Program Penyelenggaraan Jalan	Kemmen. Perhubungan
		Jumlah jalan yang dibangun (Km)	147,6	147,6	518,4	818,4	1.118,4	1.118,4		
		Jumlah jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun/dilebarkan (Km)	195,8	195,8	432,6	632,6	782,6	782,6		
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										
1	Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota	9 kebijakan/ ketentuan 45 kota	9 kebijakan/ ketentuan 45 kota	6 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA	1 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA	0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA	0 rumusan yang menjadi acuan nasional 382 kota melalui program ADIPURA	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
2	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir	Tersedianya pedoman pelaksanaan MRV dan inventarisasi profil emisi GRK kegiatan tertentu nasional dan dijadikan acuan Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim			2 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi	0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi	0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi	0 pedoman 10 daerah prioritas yang difasilitasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Terlaksananya penghapusan BPO			3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis		
		Kapasitas optimal verifikasi laporan inventori GRK daerah dan sektor agar memenuhi standar			0 laporan profil emisi GRK/tahun	5 laporan profil emisi GRK/tahun	10 laporan profil emisi GRK/tahun	20 laporan profil emisi GRK/tahun		
3	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah	Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan	32 provinsi	32 provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan	32 provinsi	32 provinsi	0 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi		
		Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup	32 provinsi	32 provinsi	0 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah rumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati dan genetik	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	1 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas optimal pemberian rekomendasi keamanan hayati/genetik	10 rekomendasi	10 rekomendasi	5 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/ tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur		
5	Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem hutan dan lahan	202 kabupaten	202 kabupaten	200 kabupaten sebagai peserta program MIH	202 kabupaten	202 kabupaten	202 kabupaten	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Terlaksananya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL			40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL		
		Pembuatan Tanaman hutan Kota dan pemeliharanya seluas 1.000 Ha	1.362 Ha	1.362 Ha	200 Ha	400 Ha	600 Ha	800 Ha		
		Peningkatan Produksi dan Ragam HHHK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014	1%	1%	0,11	0,12	0,13	0,14		
		Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 juta m3			15 juta m3	34 juta m3	56 juta m3	78 juta m3		
		Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit	500.000 Ha	500.000 Ha	100 Unit	200 Unit	300 Unit	400 Unit		
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS	3 DAS	3 DAS	36 DAS	72 DAS	108 DAS	144 DAS		
		Tersedianya data dan informasi kinerja 108 DAS	36 DAS	36 DAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS		
		Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS			34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR			27 juta Batang	54 juta Batang	81 juta Batang	108 juta Batang		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional			12 Unit	22 Unit	34 Unit	45 Unit	Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen			30 Rencana Pengelolaan	31 Rencana Pengelolaan	32 Rencana Pengelolaan	33 Rencana Pengelolaan		
		Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi	2%	2%	3 KEE	6 KEE	10 KEE	13 KEE		
		Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar	1 lokasi	1 lokasi	50.000 Ha	100.000 Ha	150.000 Ha	200.000 Ha		
7	Pengendalian Kebakaran Hutan	Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun	67,2%	67,2%	17.464 HS	17.107 HS	16.751 HS	16.394 HS	Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.475,2 Ha dalam 5 tahun	50%	50%	3.784 Ha	3.706 Ha	3.629 Ha	3.552 Ha		
		Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun	6 DAOPS	6 DAOPS	600 Orang	1.200 Orang	1.800 Orang	2.400 Orang		
		Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun			20 Brigade	40 Brigade	60 Brigade	80 Brigade		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
8	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Bbm)			1	1	1	1	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Jumlah Laporan Produksi (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang Migas)			1	1	1	1		
		Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan			4	4	4	4		
		Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng, Cng Serta Hasil Olahan			17,0	17,0	17,0	17,0		
		Volume LPG dan BBM Bersubsidi			5.107.943 / 51,663	5.455.283 / 53,730	5.826.243 / 55,342	6.222.427 / 56,448		
		Penambahan Jaringan Gas Kota (Kota/Sambungan Rumah)			2	2	2	2		
		Jumlah Laporan Kapasitas Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas)			1	1	1	1		
9	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Cbm	Laporan Kegiatan Penilaian Kontrak Kerjasama dan Pengembangan Lapangan Migas			4	4	4	4	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi pemroduksian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan data eksplotasi.			3	3	3	3		
		Laporan kegiatan pelayanan dan pemantauan usaha survei umum, eksplorasi, dan koordinasi pengelolaan data eksplorasi untuk peningkatan penemuan cadangan baru			4	4	4	4		
		Laporan kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas			4	4	4	4		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
10	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	Laporan keteknikan yang baik dan meminimalkan terjadinya dampak negatif kegiatan usaha migas terhadap lingkungan			0	0	0	0,0	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Jumlah perusahaan usaha penunjang migas yg memiliki kualifikasi, kompetensi, dan berdaya saing.			80	90	100	110,0		
		Jumlah Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia Untuk Kegiatan Usaha Migas			3	4	5	6,0		
		Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) kegiatan hilir migas			70	80	90	100,0		
		Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan kegagalan operasi (unplanned shutdown) kegiatan hulu migas			150	175	200	225,0		
		Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan			1	0	0	0,0		
11	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP dan WP) dan status wilayah keprospekan sumber daya			3	3	3	3	Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi	KESDM
		Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Panas Bumi			22	22	22	22		
		Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Batubara dan Cbm			13	13	13	13		
		Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Gambut dan Bitumen Padat dan Shale			2	2	2	2		
		Jumlah Lokasi Penyelidikan Status Keprospekan Sumber Daya Mineral			23	23	23	23		
		Jumlah rekomendasi optimalisasi, nilai tambah dan pemanfaatan sumber daya geologi			10	10	10	10		
		Jumlah Kajian, Rancang Bangun, Rekayasa Bidang Sumber			2	2	2	2		
		Pemutakhiran basis data, neraca, atlas dan peta sumber daya geologi			7	7	7	7		
		Jumlah Kegiatan pengelolaan informasi			22	22	22	22		
		Terselenggaranya layanan perkantoran			12	12	12	12		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
12	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Program Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan			16	16	16	16,0	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Jumlah Laporan Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan			3	3	3	3,0		
		Jumlah Laporan Investasi dan Kerjasama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan			11	11	11	11,0		
		Jumlah Laporan Pelayanan dan Pengawasan Aneka EBT			23	23	23	23,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan			10	10	10	10,0		
		Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan			94	94	94	94,0		
13	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi			4	4	4	4,0	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Jumlah Draf Regulasi Bidang Konservasi Energi			4	4	4	4,0		
		Jumlah Laporan Penyiapan Program Pemanfaatan Energi			7	7	7	7,0		
		Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi			10	10	10	10,0		
		Jumlah Laporan Penyiapan Tekno Ekonomi Energi			6	6	6	6,0		
		Jumlah Laporan Penerapan Teknologi Bersih dan Efisien			5	5	5	5,0		
14	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	Jumlah Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi			9	9	9	9,0	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Jumlah Laporan Pembinaan Investasi dan Kerjasama Panas Bumi			10	10	10	10,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi			6	6	6	6,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lindungan Lingkungan			11	11	11	11,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksplotasi			11	11	11	11,0		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Laporan Pembinaan Penyiapan Program Panas Bumi			7	7	7	7,0		
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi			251	853	938	1.032,0	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Perencanaan Bioenergi			42	42	42	42,0		
		Jumlah Draft Regulasi dan Perencanaan Program Bioenergi			4	4	4	4,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi			15	15	15	15,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Investasi dan Kerjasama Bioenergi			7	7	7	7,0		
		Jumlah Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi			15	15	15	15,0		
16	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	Jumlah NSPK di bidang usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara pertambangan	25	25	25	25	25	25,0	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	KESDM
		Jumlah NSPK di bidang standardisasi mineral dan batubara			100	100	100	100,0		
		Jumlah evaluasi laporan usaha jasa nasional dan lainnya yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara			100	100	100	100,0		
		Jumlah laporan perusahaan jasa yang telah memenuhi kewajiban terkait dengan investasi, nilai kontrak, tenaga kerja dan kontribusi penerimaan negara			100	100	100	100,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah menerapkan standardisasi			20	25	30	35,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi aspek teknis pertambangan			40	40	45	45,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan tata batas			40	40	45	45,0		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

REDAKSI LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM										
NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Tingkat kekerapan kecelakaan (Frequency Rate/FR) dan Tingkat keparahan kecelakaan (Severity Rate/SR) pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara			0,5	0,49	0,48	0,5		
		Persentase jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi baku mutu lingkungan			98	98	98	98,0		
		Luas area reklamasi lahan bekas tambang			6600	6700	6800	6.900,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang mendapat persetujuan rencana pascatambang			20	20	4	2,0		
		Persentase terselesaikannya permasalahan lingkungan pertambangan mineral dan batubara			100	100	100	100,0		
		Jumlah perusahaan yang meraih penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara			33	35	37	39,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dievaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungannya			78	78	78	78,0		
		Jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang melakukan pendataan sisa hasil pengolahan			15	15	15	15,0		
		Recovery penambangan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara			85	87	90	93,0		
		Recovery pengolahan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara			79	79	81	81,0		
		Terevaluasinya Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan			2	4	6	8,0		
KEGIATAN PENDUKUNG										
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI										
1	Pengembangan Kebun Raya Daerah	jumlah kebun daerah	3	3	3	3	3	3	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI
2	Penelitian Geoteknologi	Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim	1	1	1	1	1	1	Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	LIPI

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG										
1	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	Jumlah Raperpres RTR Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan	35 Raperpres	35 Raperpres	19 Pulau/KSN	16 Pulau/KSN	7 Pulau/KSN	6 Pulau/KSN	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum
		Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan	2 laporan	2 laporan	5 laporan	8 laporan	9 laporan	6 laporan		
2	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelayanan Data dan Informasi Bidang Penataan Ruang	37 laporan	37 laporan	37 laporan	42 laporan	44 laporan	44 laporan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum
3	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	Pendampingan legalisasi 20 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten	Pendampingan legalisasi 20 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten	11 materi teknis/ NSPK	11 materi teknis/ NSPK	11 materi teknis/ NSPK	11 materi teknis/ NSPK	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum
4	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	Pendampingan legalisasi 50 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten	Pendampingan legalisasi 50 Raperda RTRW Kabupaten dan Persetujuan Substansi rencana rinci 20 Kabupaten	5 Materi teknis/NSPK	6 Materi teknis/NSPK	5 Materi teknis/NSPK	5 Materi teknis/NSPK	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum
5	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan, dan kerjasama teknologi perdesaan			Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten	Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten	Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten	Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 Provinsi 82 Kabupaten	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
		Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan			10 Provinsi, 70 Kab/Kota	10 Provinsi, 70 Kab/Kota	10 Provinsi, 70 Kab/Kota	10 Provinsi, 70 Kab/Kota		
		Penguatan kelembagaan pengelola dan peningkatan pelayanan sarpras permukiman perdesaan yang berkelanjutan			PAMSIMAS 220 Kab/Kota 32 Provinsi, Target AMPL 497 Kab/Kota 34 Provinsi, Target Sarpras Perkim 150 Kab/Kota 30 Provinsi	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumberdaya lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpadu berbasis masyarakat			30 Provinsi 60 Kab10 desa	30 Provinsi 60 Kab10 desa	30 Provinsi 60 Kab10 desa	30 Provinsi 60 Kab10 desa		
6	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kawasan Transmigrasi yang sudah disusun rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana			8SP/3 KPB/0 Kawasan	8SP/3 KPB/1 Kawasan	8SP/3 KPB/2Kawasan	8SP/3 KPB/3 Kawasan	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kawasan Transmigrasi yang sudah diterapkan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana			8SP/3 KPB/0 Kawasan	8SP/3 KPB/1 Kawasan	8SP/3 KPB/2Kawasan	8SP/3 KPB/3 Kawasan		
7	Fasilitasi Penataan Perkotaan	Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Perkotaan	15 Kota		15 Kota	15 Kota	15 Kota	15 Kota	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										
1	Pengelolaan Sampah	Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional	6 dokumen	6 dokumen	6 rumusan yang menjadi acuan nasional	1 rumusan yang menjadi acuan nasional	0 rumusan yang menjadi acuan nasional	0 rumusan yang menjadi acuan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota	382 kota	382 kota	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Prakiraan Maju				PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan sungai			13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan gambut dan ekosistem lahan basah			5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut		
		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan danau			2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas		
4	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan	3	3	8	8	8	8	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan pesisir dan laut	2	2	5	5	5	5		
		Jumlah Kawasan Pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP)	7	7	5	5	5	5		
5	Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim	21	21	20	70	120	170	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP

MATRIKS 2.2.A ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
A	Pola Produksi Berkelanjutan									
1	Kajian Kesiapan Pasar dalam Penerapan <i>Sustainable Public Procurement</i> (SPP)	Dokumen Kajian	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penyedia untuk Mengimplementasikan SPP	1	1	-	-	-	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	LKPP
2	Layanan kereyayaan Teknologi Hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon	penerapan produk inovasi teknologi hijau untuk konservasi sumberdaya alam dan lingkungan	jumlah konservasi		1	1	1	1		BPPT
		penerapan produk inovasi teknologi hijau oleh industri mitra menuju green industrv	Jumlah teknologi		1	1	1	1		
		penerapan produk inovasi teknologi infrastruktur hijau mendukung implementasi green city	Jumlah teknologi		1	1	1	1		
3	Pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup	Jumlah Kebijakan Konservasi Energi dan Penurunan Emisi GRK (kebijakan)	Kebijakan		5	5	5	5		KEMENPERIN
		Meningkatnya infratraktur industri hijau	Infrastruktur		6	6	6	6		
		Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau	industri		100	100	100	100		
		Tersedianya SDM yang kompeten di bidang Industri Hijau	orang		100	100	100	100		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau	pertemuan		10	10	10	10		
		Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH	bulan layanan		12	12	12	12		
4	Kaji Ulang dan SNI kategorisasi SNI green product	SNI terkategori yang memenuhi ketentuan SCP dan tidak	SNI terkategori yang memenuhi ketentuan SCP dan tidak	50% SNI telah dapat dikategorisasi	kaji ulang SNI yang tersisa	usulan dan revisi parameter SNI (25% dari total SNI yang harus diselaraskan/revisi)	usulan dan revisi parameter SNI (25% dari total SNI yang harus diselaraskan/revisi)	usulan dan revisi parameter SNI (25% dari total SNI yang harus diselaraskan/revisi)		BSN
5	Fasilitasi SNI	mendorong memasukkan unsur S menuju "green SNI"	Fasilitasi adopsi Standard Internasional yang sudah green standard	10 SNI	20 SNI baru	25 standard	25 SNI baru	25 SNI baru		BSN
6	Sosialisasi Kriteria SNI untuk "green product"	sosialisasi kategori item/bahan syarat mutu SNI yang non green product ke konseptor	jumlah konseptor yang paham dan peduli terhadap item dan konsep SCP	50 orang	150 orang	250 orang	250 orang	250 orang		BSN
7	Sosialisasi dan mendorong pertumbuhan LS yang pro SCP	jumlah sosialisasi ke instansi yang peduli terhadap standard dan peduli untuk jadi LS	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan		BSN
8	Pengembangan infrastruktur baru LPK untuk SNI pro SCP	inventarisasi standard dan institusi yang potensial jadi LS	50 % teridentifikasi	50% teridentifikasi	pengembangan infrastruktur mutu 1 buah	pengembangan infrastruktur mutu 1 buah	pengembangan infrastruktur mutu 1 buah	pengembangan infrastruktur mutu 1 buah		BSN
9	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal	6 dokumen	6 dokumen	4 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	4 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi			400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan		
		Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP			20 jenis kompetensi/ protokol	30 jenis kompetensi/ protokol	50 jenis kompetensi/ protokol	60 jenis kompetensi/ protokol		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
16	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	Infrastruktur Air Limbah (Kawasan)	709	709	764	677	629	240	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum
		Infrastruktur Drainase Perkotaan (Kab/Kota)	59	59	53	40	40	50		
		Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Kab/Kota)	70	70	41	35	35	45		
		Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (Kawasan)	40	40	127	40	40	50		
17	pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa)	429	429	429	108	172	223	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementerian Pertanian
18	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai)	32	32	32	32	32	32	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
19	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha)	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementerian Pertanian

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
20	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)	5.553	5.553	5.553	5.553	5.553	5.553	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementerian Pertanian
21	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementerian Pertanian
		Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000		
22	Peningkatan Produksi Ternak	Pengembangan Budidaya Ternak Potong (kelompok)	470	470	470	585	730	910	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
		Pengembangan Budidaya Ternak Perah (kelompok)	75	75	75	95	115	145		
		Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok)	255	255	255	320	400	500		
		Penguatan Usaha dan Kelembagaan Budidaya Ternak (kelompok)	250	250	250	264	277	290,91		
23	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	Pengembangan Tanaman Sagu (Ha)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
24	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Pengembangan Pakan Hijauan (stek)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.143.505	3.300.680	3.458.567,73	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
25	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis)	4.800.000	4.800.000	4.800.000	5.040.000	5.292.000	5.557.000	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
		Peningkatan Bibit Ternak (ekor)	312.260	312.260	312.260	327.873	344.267	361.479,98		
		Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok)	268	268	268	281	295	310		
		Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi)	32	32	32	32	32	32		
26	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika (Tanaman)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
		Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (Kg)	35.000	35.000	35.000	36.500	38.000	39.500		
27	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (Varietas)	7	7	7	10	8	6	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
28	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem	16	16	16	16	16	16	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
		Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)	11.675	11.675	11.675	13.905	14.235	14.570		
29	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB)	11	11	11	11	12	12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
		Jumlah produksi benih sumber padi, sereal, serta kacang dan umbi (Ton)	88	88	88	89	97	97		

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
B	Pola Konsumsi Berkelanjutan									
1	Pelatihan dan Sosialisasi <i>Life Cycle Costing</i>	Jumlah Satker/PPK/ULP/Pokja yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan	Mendorong Implementasi SPP dalam Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I dan Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pengadaan dalam Menerapkan SPP	20	-	20	20	20	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
2	Peningkatan <i>Capacity Building</i> bagi <i>Stakeholder</i> Pengadaan			20	-	20	20	20	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
3	<i>Pilot Project</i> Penerapan <i>Green Procurement</i> (GPP/SPP) Tahap I			3	-	-	3	-	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
4	<i>Pilot Project</i> Penerapan <i>Green Procurement</i> (GPP/SPP) Tahap II			3	-	-	-	3	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
5	Rancangan Peraturan tentang Implementasi <i>Sustainable Public Procurement</i> (SPP)	Dokumen Rancangan Peraturan	Menyiapkan <i>Draft</i> Peraturan tentang Pengimplementasian SPP dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik	1	-	-	-	-	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Penghematan penggunaan sumber daya (material input, energi, air) industri	Jumlah Kebijakan Konservasi Energi dan Penurunan Emisi GRK (kebijakan)			5	5	5	5		KEMENPERIN
		Meningkatnya infratraktur industri hijau			6	6	6	6		
		Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau			100	100	100	100		
		Tersedianya SDM yang kompeten di bidang Industri Hijau			100	100	100	100		
		Terwujudnya kerjasama dan sosialisasi penerapan industri hijau			10	10	10	10		
		Meningkatnya kualitas dan layanan manajemen kinerja PPIHLH			12	12	12	12		
7	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa)	2.600	2.600	2.600	5.500	6.100	6.900	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementerian Pertanian
8	Peningkatan <i>Public Awareness</i> tentang <i>Sustainable Public Procurement (SPP)</i>	Jumlah K/L/D/I yang Mendapatkan Sosialisasi		34	34	-	-		Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	LKPP

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Prioritas: Pengendalian Kuantitas Penduduk									
A	Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga									
1	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB	1 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95	98% (media massa) dan 52% (media luar ruang)	98% (media massa) dan 52% (media luar ruang)	99% (media massa) dan 54% (media luar ruang)	99% (media massa) dan 56% (media luar ruang)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD)	65	65	80	80	80	80		
2	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	1 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis melalui JKN-BPJS	-	-	58,9 % dari PUS peserta BPJS	60,7 % dari PUS peserta BPJS	72 % dari PUS peserta BPJS	72% dari PUS peserta BPJS	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)	3,97	3,97	4,6	4,6	4,6	4,6		
		3 Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)	12,8	12,8	12,60	13,00	14,00	14,00		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1 Persentase kesertaan berKB PUS di wilayah dan sasaran khusus	-	-	20,8	21,0	21,3	21,7	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA)	-	-	4,20	4,23	4,26	4,28		
4	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta	1 Persentase Fasyankes swasta yang memberikan pelayanan KB dan kerja sama dengan BPJS	-	-	40%	40%	50%	50%	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Persentase Peserta KB Aktif Swasta	51% (peserta kb mandiri)	51% (peserta kb mandiri)	47,0	48,0	49,0	50,0		
		3 Jumlah Peserta KB Baru Swasta (dalam Juta)	3,6 (peserta kb mandiri)	3,6 (peserta kb mandiri)	3,2	3,3	3,4	3,5		
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	1 Persentase pengetahuan tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR promosi dan konseling kesehatan reproduksi	80	80	80	80	80	80	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
6	Pembinaan Ketahanan Remaja	1 Persentase Pengetahuan dan pemahaman remaja tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga melalui program Genre	75% (KB-KR)	75% (KB-KR)	10 % (dari 66 juta penduduk remaja)	20% (dari 66,3 juta penduduk remaja)	30%(dari 66,6 juta penduduk remaja)	40% (dari 66,9 juta penduduk remaja)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	1 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif)	80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif)	80 (dari 4 juta anggota)	81,5 (dari 4,2 juta anggota)	82 (dari 4,4 juta anggota)	82 (dari 4,7 juta anggota)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
8	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	75,5% (dari 2.000.000)	75,5% (dari 2.000.000)	75,5% (dari 1.100.000)	75,5% (dari 2.075.000)	75,5% (dari 2.105.000)	75,5% (dari 2.150.000)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
9	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	1 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia	90,5 (dari 2,1 juta)	90,5 (dari 2,1 juta)	87,5 (dari 168.100)	89 (dari 196.115)	90 (dari 224.130)	90 (dari 252.145)	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
10	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (pembinaan kesertaan ber-KB, Advokasi-KIE KB, dan Pembangunan Keluarga)								Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		1 Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi	34	34	33	33	33	33		
		2 Pembangunan keluarga di Provinsi	34	34	33	33	33	33		
		3 Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi	34	34	33	33	33	33		
		4 Penguatan Advokasi dan Penggerakan di Provinsi	34	34	33	33	33	33		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B. Fokus Prioritas : Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk										
1	Kerjasama Pendidikan kependudukan	1 Jumlah Materi pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan	7 modul	7 modul	22 materi	25 materi	25 materi	25 materi	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
2	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	1 Jumlah materi/panduan/pedoman pemaduan penyerasian pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan	2 grand desind kpdk	3 grand desind kpdk	8	8	8	8	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
3	Analisis Dampak Kependudukan	1 Jumlah kajian dampak kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas)	4	4	4	4	4	4	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
4	Perencanaan Pengendalian Penduduk	1 Jumlah parameter Kependudukan yang terpetakan dengan memanfaatkan TI (GIS)	2 parameter K dan KB (1 pusat dan 33 provinsi)	2 parameter K dan KB (1 pusat dan 33 provinsi)	1	1	1	1	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (Kebijakan Pengendalian Penduduk)	1 Penyusunan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk di provinsi	34	34	33	33	33	33	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi	34	34	33	33	33	33		
6	Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	1 Pedoman pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan.(K/L)	4 juknis	4 juknis	4 juknis	4 juknis	4 juknis	4 juknis	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri
		2 Cakupan Pembinaan (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.	25 provinsi	25 provinsi	25 provinsi	25 provinsi	25 provinsi	25 provinsi		
C	Fokus Prioritas: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan dan KB									
1	Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri
		2. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	-	-	2.000.000 keping e-KTP Reguler	13.777.358 keping e-KTP Reguler	13.777.358 keping e-KTP Reguler	13.777.358 keping e-KTP Reguler		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengelolaan Informasi Kependudukan	1. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri
3.	Penyediaan dan pengembangan statistik distribusi	1. Terlaksananya kegiatan sensus dan survei	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)	BPS
4	Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB	1 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb	13	13	13	13	13	13	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
5	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	1 Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit)	24	24	8	8	8	8	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (Data dan Informasi)	1 Penguatan Data dan Informasi	34	34	33	33	33	33	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
D Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan KB										
1	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah	1 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan lintas sektor (MOU, mitra kerja, stakeholders)	50	50	50	75	80	80	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
2	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	1 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten	2.650	2.650	3.743	4.743	4.243	4.243	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan	BKKBN
3	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi (kelembagaan)	1 Dukungan Lini Lapangan	34	34	33	33	33	33	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	BKKBN
		2 Penguatan Kemitraan Provinsi	34	34	33	33	33	33		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan									
A	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia									
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1. Jumlah provinsi yang mencapai target KN1* 2. Persentase sekolah yang melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik SD/MI kelas 1	-	-	24	25	26	27	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf)*	-	-	75	80	85	90	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1. Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK)	9.536	9.536	9.715	9.715	9.715	9.715	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
4	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia*	-	-	10	20	35	50	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan
5	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90	90	91	91,5	92	92,5	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
B	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat									
1	Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Jumlah balita gizi kurang yang ditangani*	-	-	300.000	350.000	400.000	450.000	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
C	Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan									
1	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	1. Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon*	-	-	80	85	90	95	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Penemuan kasus "discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk*	-	-	> 2	> 2	> 2	> 2		
		3. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra*	-	-	78	80	82	84		
		4. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan*	-	-	80	85	90	95		
		5. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara*	-	-	60	70	75	80		
		6. Persentase rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah*	-	-	50	60	70	80		
		7. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di wilayah*	-	-	10	15	19	22		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	1. Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional	59	59	60	62	64	66	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah kab/kota dengan API <1/1.000 pada tahun 2019	337	337	340	360	375	390		
		3. Jumlah kasus konfirmasi flu burung pada manusia kurang dari 11 pada tahun 2019	10	10	20	17	15	13		
		4. Persentase jumlah kab/kota endemis rabies yang mempunyai Rabies Center	22	22	25	40	55	70		
		5. Persentase angka kematian kasus Leptospirosis pada manusia menjadi <15 persen tahun 2019	30	30	30	24	21	18		
		6. Jumlah kasus Antraks pada manusia menjadi <14 Tahun 2019	27	27	24	22	19	16		
		7. Jumlah kasus Pes pada manusia menjadi <1 Tahun 2019	2	2	2	2	2	1		
		8. Kab/kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi Filariasis	98	98	118	128	143	163		
		9. Persentase kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah	34	34	49	55	62	70		
		10. Prevalensi Schistosomiasis pada manusia	2,9	2,9	1,5	1,3	1,1	1		
		11. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu	30	35	40	50	60	70		
3	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada bumil dan kelompok beresiko*	-	-	5	10	30	60	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling beresiko*	-	-	2,5	5	10	20		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		3. Persentase kab/kota yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral aktif*	-	-	20	40	70	90		
		4. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar*	-	-	52,5	54	56	58		
		5. Persentase cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi beresiko*	-	-	75	78	80	82		
		6. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan penemuan pneumonia balita minimal 80 persen*	-	-	20	30	40	50		
		7. Cakupan pemeriksaan kontak dari indeks kasus kusta baru*	-	-	95	95	95	95		
		8. Proporsi kabupaten/kota endemis frambusia yang melakukan pengobatan massal*	-	-	20	40	60	80		
		9. Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85 persen*	-	-	78	81	84	87		
4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera*	-	-	10	20	30	40	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase kelompok khusus (Haji, PO Bus, Sekolah, Tempat Kerja) yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera*	-	-	2	4	6	8		
		3. Persentase jumlah perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (IVA dan atau Papsmear untuk Ca Serviks dan CBE untuk Ca Payudara)*	-	-	2	4	6	8		
		4. Persentase penduduk usia >15 tahun yang melakukan pemeriksaan gula darah*	-	-	10	20	30	40		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		5. Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan Cedera*	-	-	10	20	30	40		
		6. Persentase penduduk usia >15 tahun yang melakukan pemeriksaan tekanan darah*	-	-	5	15	30	50		
		7. Persentase kasus Hipertensi yang berobat ke fasilitas pelayanan primer*	-	-	10	20	30	40		
		8. Persentase kasus DM yang berobat ke fasilitas pelayanan primer*	-	-	10	20	30	40		
		9. Persentase kab/kota memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*	-	-	30	40	50	60		
		10. Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok*	-	-	10	20	35	55		
		11. Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian kecelakaan*	-	-	10	20	30	40		
		12. Persentase obesitas pada penduduk usia > 15 tahun*	-	-	15,2	14,9	14,6	14,3		
		13. Persentase perokok usia 15 tahun atau lebih	36,3	36,3	35,94	35,57	35,21	34,85		
5	Penyehatan Lingkungan	1. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM*	-	-	35	40	45	50	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase pengawasan kualitas air minum	100	100	30	35	40	45		
		3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	85	85	50	52	54	56		
		4. Jumlah kab/kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)*	-	-	5	15	20	35		
		5. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan*	-	-	10	15	21	28		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		6. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	75	31	37	43	49		
		7. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kawasan sehat*	-	-	350	360	370	380		
		8. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu*	-	-	10	20	40	60		
		9. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)*	-	-	72	77	82	87		
D	Fokus Prioritas: Peningkatan Tersedianya Obat yang Bermutu serta Terjaminnya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Sesuai dengan Standar dan Persyaratan bagi Pelayanan Kesehatan di Setiap Tahap Kehidupan (<i>continuum of care</i>)									
1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1. Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin	100	100	80	85	90	95	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
E	Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko									
1	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 (3.600 pegawai)*	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	1. Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa*	-	-	5	5	5	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
3	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis*	-	-	82.632	82.632	82.632	82.632	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana)	42	42	58	63	63	63		
		3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana)	22	22	25	30	30	30		
4	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	1. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi*	-	-	500	550	600	650	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1.300 temuan ketidaksesuaian)	90	90	90	90	90	92		
5	Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1. Jumlah Sarana Distribusi Produk Terapeutik (PBF) yang ditingkatkan kemampuannya untuk memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)*	-	-	250	275	300	350	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
6	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)*	-	-	70	73	75	78	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		2. Persentase permohonan rekomendasi Analisis Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu*	-	-	80	81	82	83		
		3. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan*	-	-	45	50	55	60		
7	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (40 sarana)*	-	-	50	52	54	56	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan (200 sampel)*	-	-	87	88	89	90		
8	Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1. Persentase Peningkatan Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik pada industri farmasi (dihitung dari 40 industri farmasi)*	-	-	70	75	85	90	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
9	Penilaian Makanan	1. Jumlah Keputusan Penilaian pangan olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu (berkas)*	-	-	10.028	10.028	10.137	10.137	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
10	Penilaian Obat dan Produk Biologi	1. Jumlah keputusan penilaian Obat dan Produk Biologi yang diselesaikan tepat waktu*	-	-	4.700	4.700	4.800	4.800	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
11	Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen	1. Jumlah keputusan penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu*	-	-	20.600	20.600	20.850	20.850	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
12	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	1. Jumlah regulasi, pedoman, standar, dan kajian obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen yang disusun*	-	-	40	40	40	40	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen tepat waktu*	-	-	4	5	5	6		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
13	Standardisasi Makanan	1. Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan	10	10	14	18	18	18	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
14	Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT	1. Jumlah standar yang disusun dalam rangka menjamin mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik dan PKRT yang beredar*	-	-	10	10	10	10	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
15	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	1. Jumlah dokumen Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori “Early Warning”	2	2	5	5	5	5	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan*	-	-	100	100	100	100		
16	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	1. Persentase pemenuhan parameter uji dalam ruang lingkup pengujian BB/BPOM terhadap parameter uji dalam Standar Ruang Lingkup (dihitung dari 4.000 parameter uji)*	-	-	65	70	75	80	Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu (dihitung terhadap sampel yang diterima 3.600)	90	90	70	75	80	85		
F	Fokus Prioritas: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1. Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level provinsi dan kab/kota*	-	-	30	30	30	30	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan*	-	-	1	1	1	1		
G	Fokus Prioritas: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional									
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1. Tersalurnya dana PBI Kesehatan*	-	-	100	100	100	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Kesehatan
H	Fokus Prioritas: Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	90	90	90	90	90	90	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji	1. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran*	-	-	92	93	94	95	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
3	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (kumulatif)	9.500	9.500	7.000	8.000	9.000	9.500	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan
4	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	1. Jumlah perundangan/regulasi yang selaras terkait pendidikan tenaga kesehatan*	-	-	5	5	5	5	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan
5	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (kumulatif)*	-	-	6	14	21	31	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan pemerintah (Kemenkes)	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship	4.000	4.000	7.000	7.500	8.000	8.500	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
I	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas									
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer*	-	-	150	250	500	1000	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer di daerah terpencil dan sangat terpencil	38	38	70	85	100	115		
J	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas									
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1. Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai standar*	-	-	20	40	60	80	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Terwujudnya Pusat Rujukan Nasional*	-	-	2	4	6	9		
		3. Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS*	-	-	240	480	720	960		
		4. Jumlah RS yang memenuhi standar keselamatan pasien*	-	-	61	241	541	1141		
		5. Terbentuknya Badan Pengawas RS (BPRS) di provinsi*	-	-	10	20	29	34		
		6. Jumlah RS Pratama di DTPK*	-	-	10	10	10	10		
		7. Persentase penduduk yang berobat di UPT Vertikal mendapatkan pelayanan kesehatan*	-	-	100	100	100	100		
K	Fokus Prioritas: Memperkuat Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi									
1	Penanggulangan Krisis Kesehatan	1. Tersedianya alokasi operasional upaya penanggulangan krisis kesehatan*	-	-	34	34	34	34	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan*	-	-	3	3	3	3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Kohort PTM dan tumbuh kembang, perubahan iklim, registrasi vital statistik, dan penyebab kematian)	11	11	23	25	25	25	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang teknologi intervensi Kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik Nasional dan Internasional	17	17	33	33	33	33		
4	Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Hukum dan Etika Kesehatan, Sosekbud Kesehatan, Analisis Kebijakan Kesehatan, Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat)	18	18	23	23	24	24	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kementerian Kesehatan

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimuat di Media Cetak dan atau Elektronik Nasional dan Internasional	22	22	25	25	25	25		
5	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	1. Tersedianya Tanaman Obat terstandar	3	3	12	7	6	5	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kementerian Kesehatan
		2. Tersedianya Bahan Jamu terstandar	3	3	3	3	3	3		
		3. Tersedianya formula jamu saintifik	3	3	2	2	2	2		

Catatan: *merupakan indikator baru dalam RKP 2015 (belum terdapat dalam RKP 2014)

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	Prioritas: Reformasi Pembangunan Pendidikan									Kemdikbud, Kemenag, 16 K/L lain
A	Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata	APK SMP/MTs/Paket B	109,58%	109,58%	103,73%	104,95%	105,08%	101,53%	Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Islam	Kemdikbud, Kemenag
		APM SMP/MTs	65,51%	65,51%	80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		APM SD/MI	0,00%	0,00%	90,63%	90,37%	90,83%	93,00%		
		Jumlah siswa SD/MI/SMP/MTs/ PPS Ula/PPS Wustha sasaran BOS	6946000	6946000	44370149	44758275	45385688	46610690		
		Jumlah siswa SD/MI/SMP/MTs penerima Bantuan Siswa Miskin	13342267	13342267	9801769	9881017	9964227	10051598		
		Persentase SD yang memenuhi SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase SMP yang memenuhi SPM	75%	75%	100%	100%	100%	100%		
		Madrasah yang terakreditasi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
A.1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	APK SMP/SMPLB/PAKET B	85,47%	85,47%	81,60%	82,47%	82,46%	79,44%	Program Pendidikan Dasar	Kemdikbud
		APM SMP/MTs	65,51%	65,51%	80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		Rasio Kesetaraan Jender SMP/SMPLB	98%	98%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS		0	10920866	10920866	10920866	10920866		
		Persentase SMP yang memenuhi SPM	75%	75%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa Miskin	2893187	2893187	2169890	2169890	2169890	2169890		
		PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH	0,01	0,01	0,009	0,009	0,009	0,009		
A.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	APM SD/MI			90,63%	90,37%	90,83%	93,00%	Program Pendidikan Dasar	Kemdikbud
		APK SD/SDLB/PAKET A			97,07%	96,41%	96,63%	98,90%		
		Rasio kesetaraan Jender SD/SDLB	98%	0,98	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS		0	26454575	26492965	26753156	27592576		
		Persentase SD yang memenuhi SPM	100%	1	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa Miskin	8062561	8062561	6046921	6046921	6046921	6046921		
A.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	Meningkatnya APM SD/MI			90,63%	90,37%	90,83%	93,00%	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		APK MI	13,60%	13,60%	12,99%	13,14%	13,26%	13,37%		
		APM SMP/MTs			80,79%	81,48%	81,37%	78,34%		
		APK MTs	24,11%	24,11%	22,13%	22,48%	22,62%	22,09%		
		Siswa MI/PPS Ula Penerima BOS	3593000	3593000	3.616.758	3.797.596	3.987.476	4.186.849		
		Siswa MTs/PPS Wustha Penerima BOS	3353000	3353000	3.377.950	3.546.848	3.724.190	3.910.399		
		Siswa MI Penerima Bantuan Siswa Miskin	1436228	1436228	819.467	860.440	903.462	948.635		
		Siswa MTs Penerima Bantuan Siswa Miskin	950291	950291	765.491	803.766	843.954	886.152		
		Madrasah yang terakreditasi	3000	3000	3.000	3.000	3.000	3.000		
A.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	Penyelenggaraan Paket A & B	32	32	32	32	32	32	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Penyelenggaraan PPS Program Wajardikdas pada Pontren	33	33	34	34	34	34		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)	APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C	89,16%	89,16%	82,72%	86,28%	89,21%	91,30%		Kemdikbud, ..
		Jumlah siswa SMA/SMK/MA sasaran BOS	9823227	9823227	10620380	11128822	11566799	11899857		
		Jumlah siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan siswa miskin	2089704	2089704	1329962	1347708	1366342	1385907		
B.1	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	APK SMA NASIONAL	38,29%	38,29%	35,32%	36,88%	38,17%	39,07%	Program Pendidikan Menengah	Kemdikbud
		APK PAKET C NASIONAL	2,22%	2,22%	2,99%	3,18%	3,31%	3,37%		
		Rasio kesetaraan jender SMA/SMLB		0	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah siswa SMA sasaran BOS	4384026	4384026	4674158	4896940	5083736	5216783		
		PERSENTASE SMA MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI SNP		0	75	80	85	90		
B.2	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin	759975	759975	425033	425033	425033	425033	Program Pendidikan Menengah	Kemdikbud
		APK SMK NASIONAL	40,00%	40,00%	35,70%	37,28%	38,57%	39,47%		
		Jumlah siswa SMK sasaran BOS	4303201	4303201	4725078	4949681	5136752	5269447		
		PERSENTASE SMK MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA SESUAI SNP	70	70	75	80	85	90		
		Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin	937000	937000	550000	550000	550000	550000		
B.3	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	APK SMLB			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%		
B.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	APK MA	8,65%	8,65%	8,64%	8,87%	9,09%	9,32%	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Rasio APK peserta didik perempuan: laki laki pada MA	1	1	1	1	1	1		
		Siswa MA Penerima BOS	1136000	1136000	1.221.144	1.282.201	1.346.311	1.413.627		
		Siswa MA Penerima Bantuan Siswa Miskin	392729	392729	354.929	372.675	391.309	410.874		
		Pembangunan MA Insan Cendekia-PMU (Lanjutan Tahap 1)	15	15	15	-	-	-		
		Pembangunan MA Insan Cendekia-PMU (Lanjutan Tahap 2)	5	5	5	-	-	-		
B.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Sarana Prasarana Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)	0	0	14	14	14	14	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kemenag
		Bantuan Peningkatan Mutu dan Sarana SMAK	0	0	14	14	14	14		
		Beasiswa siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)	0	0	500	500	500	500		
C	Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi	APK PT/PTA	30,00%	30,00%	29,68%	31,03%	32,61%	34,58%		Kemdikbud, Kemenag
		Jumlah dosen berkualifikasi S2/S3	752	752	180551	30671	30471	29721		
		Jumlah dosen memiliki sertifikat profesi	801	801	71996	71996	72000	71253		
		Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi	221060	221060	195078	191028	188222	186072		
		Jumlah PT penerima BOPTN	95	95	100	100	100	100		
		Jumlah mahasiswa PTA penerima BOPTN	53	53	5870	7053	7553	8053		
C.1	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	Jumlah PT baru yang didirikan (PT/penergian PTS/ Politeknik/Institut/Akademi Komunitas)	11	11	96	150	150	150	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
C.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu	Jumlah dosen PTN/PTS program sarjana berkualifikasi minimal S2	97,5%	97,5%	149909	150	150	150	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
		Jumlah dosen PTN/PTS program pascasarjana berkualifikasi minimal S3	30,0%	30,0%	29571	29571	29571	29571		
		Jumlah dosen PTN/PTS bersertifikat pendidik	60,0%	60,0%	71237	71237	71237	71237		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C.3	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah dosen dengan publikasi nasional	10310	10310	10310	10310	10310	10310	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
		Jumlah dosen dengan publikasi internasional	793	793	793	793	793	793		
C.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN	6	6	6	6	6	6	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
C.5	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	APK PT usia 19-23 tahun	26,70%	26,70%	26,72%	27,92%	29,24%	30,84%	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
		Rasio Kesetaraan Jender PT		0	104%	103%	102%	101%		
		Jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi	214640	214640	182292	182292	182292	182292		
		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi		0	1962	1962	1962	1962		
		Jumlah prodi memenuhi standar mutu sarana dan prasarana	11500	11500	11500	11500	11500	11500		
C.6	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi	Jumlah PT penerima BOPTN	95	95	100	100	100	100	Program Pendidikan Tinggi	Kemdikbud
C.7	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	APK PTA	3,30%	3,30%	2,96%	3,11%	3,37%	3,74%	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA	1,04	1,04	1	1	1	1		
		Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin	64000	64000	64000	69000	74000	79000		
		Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	6420	6420	12546	8426	5550	3330		
		Jumlah PTAI Penerima BOPTN	53	53	53	53	53	53		
		Dosen Penerima Beasiswa S3	751	751	1071	950	750	0		
		Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	2440	2440	2990	2990	2990	2990		
		Dosen yang Tersertifikasi PTAI	750	750	750	750	750	0		
		Sarana Prasarana PTAI *	54	54	54	54	54	54		
		Penelitian pada PTAI untuk Penguatan Prodi	54	54	54	54	54	54		
		Pemagangan Mahasiswa pada Dunia Industri	500	500	500	500	500	500		
		Jumlah Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	510	510	644	744	844	944		
C.8	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pembiayaan yang bersumber PNPB	7	7	7	7	7	7	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kemenag
C.9	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	Kualitas dan Sarana Pendidikan Tinggi	7	7	7	7	7	7	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kemenag
C.10	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Pembinaan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Katolik	5	5	5	5	5	5	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kemenag
		Sertifikasi Dosen		0	5	5	5	5		
		Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi		0	21	21	21	21		
		Bantuan Peningkatan Mutu dan Sarana PTAKS		0	21	21	21	21		
		Penelitian untuk Penguatan Prodi		0	10	10	10	10		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C.11	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	BOPTN		0	5817	7000	7500	8000	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kemenag
		Penerima Beasiswa Pasca Sarjana	50	50	97	200	50	100		
		Bidikmisi		0	240	310	380	450		
		Beasiswa Mahasiswa Miskin	3500	3500	1000	1000	1000	1000		
		Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		0	4	4	8	11		
		Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional		0	11	11	7	4		
		PNBP		0	1	1	1	1		
C.12	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama yang memenuhi standar		0					Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Kemenag
		- Bantuan Pengembangan PTAB Swasta		0	14 lokasi	14 lokasi	14 lokasi	14 lokasi		
		- Pengelolaan dan Pembinaan STABN	2	2	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi		
		Dosen PTAB Yang Berdaya Saing								
		- Sertifikasi Dosen	50	50	50 ORG	50 ORG	50 ORG	50 ORG		
		- Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS		0	100 ORG	100 ORG	100 ORG	100 ORG		
		- Tunjangan Profesi Dosen Swasta		0	21 ORG	21 ORG	21 ORG	21 ORG		
		- Orientasi Dosen PTAB	1	1	4 KEG	4 KEG	4 KEG	4 KEG		
		Bantuan Mahasiswa Miskin								
		- Bantuan Mahasiswa Miskin	500	500	600 ORG	600 ORG	600 ORG	600 ORG		
		Dosen PTA yang berkualifikasi								
		- Penilaian Angka Kredit Dosen		0	1 TIM	1 TIM	1 TIM	1 TIM		
		Pendidikan Tinggi Yang Bermutu								
		- BOPTN			356 ORG	356 ORG	356 ORG	356 ORG		
		Beasiswa Mahasiswa Berprestasi		0	48 ORG	48 ORG	48 ORG	48 ORG		
D	Fokus Prioritas: Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D-IV		0	1994729	2174729	2354231	2532981		Kemdikbud, Kemenag
		Jumlah guru memiliki sertifikat profesi pendidik		0	1831901	1930064	2028827	2127590		
D.1	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi minimal S1/D-IV	98,00%	0,98	1029115	1119115	1209115	1299115	Program Pendidikan Dasar	Kemdikbud
		Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi minimal S1/D-IV	98,00%	0,98	504015	564015	624015	684015		
		Jumlah PTK dikdas penerima tunjangan khusus		0	50100	50100	50100	50100		
D.2	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah	Jumlah guru SMA/SMLB berkualifikasi minimal S1/D-IV	98,00%	0,98	251901	271901	291901	311901	Program Pendidikan Menengah	Kemdikbud
		Jumlah guru SMK berkualifikasi minimal S1/D-IV	98,00%	0,98	201700	211700	221700	231700		
		Jumlah PTK dikmen penerima tunjangan khusus		0	6469	6469	6469	6469		
D.3	Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Pendidik PAUDNI Berkualifikasi S1/D4	6,5	6,5	10565	11898	13231	14564	Program PAUDNI	Kemdikbud
		Jumlah guru TK penerima tunjangan khusus		0	1900	1900	1900	1900		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D.4	Peningkatan Layanan Pendidik Untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti	Jumlah guru TK memiliki sertifikat profesi pendidik	69,86%	69,86%	133867	155973	178079	200185	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Kemdikbud
		Jumlah guru SD/SDLB memiliki sertifikat profesi pendidik	75,00%	75,00%	970191	1005199	1040207	1075215		
		Jumlah guru SMP/SMPLB memiliki sertifikat profesi pendidik	90,00%	90,00%	379377	398809	418241	437673		
		Jumlah guru SMA/SMLB memiliki sertifikat profesi pendidik	75,00%	75,00%	183118	191382	199646	207910		
		Jumlah guru SMK memiliki sertifikat profesi pendidik	90,00%	90,00%	117201	131054	144907	158760		
		Persentase Guru TK Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb)	55,00%	55,00%	60%	70%	80%	90%		
		Persentase Guru SD/SDLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb)	55,00%	55,00%	60%	70%	80%	90%		
		Persentase Guru SMP/SMPLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb)	55,00%	55,00%	60%	70%	80%	90%		
		Persentase Guru SMA/SMLB Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb)	55,00%	55,00%	60%	70%	80%	90%		
		Persentase Guru SMK Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan (Ppb)	55,00%	55,00%	60%	70%	80%	90%		
D.5	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	Guru Madrasah penerima beasiswa S2	250	250	250	250	250	250	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Guru Madrasah penerima bantuan belajar S1	5350	5350	3.500	3.500	3.500	3.500		
		Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	162155	162155	95.847	90.977	90.977	90.977		
		Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus			3.500	3.500	3.500	3.500		
		Guru Non-PNS penerima Tunjangan Fungsional	520637	520637	485.912	534.503	587.954	646.749		
D.6	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	Guru Madrasah yang Tersertifikasi			10.000	10.000	10.000	10.000	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Guru yang Tersertifikasi	38500	38500	35.000	35.000	35.000	35.000		
		Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan			500	500	500	500		
D.7	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	Kualifikasi S1 GPAI	3091	3091	2.248	2.248	1.750	500	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Peningkatan Kompetensi Guru Agama pada Sekolah (angkatan)			5	5	5	5		
D.8	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Jumlah Guru yang Menerima Tunjangan Profesi Non PNS	1036	1036	1.490	1.800	2.100	2.500	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kemenag
		Jumlah Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	510	510	644	744	844	944		
		Jumlah Kualifikasi Guru Program S1	1000	1000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Umum		0	239	245	251	251		
D.9	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Tunjangan Profesi Guru Non PNS	1525	1525	1.043	1.043	1.043	1.043	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kemenag
		Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Katolik	100	100	338	338	338	338		
		Guru yang Tersertifikasi	1329	1329	850	850	850	850		
		Kualifikasi Guru Program S1		0	1.000	1.000	1.000	1.000		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D.10	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	79	79	88	97	106	115	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kemenag
		Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional	179	179	179	179	179	179		
		Sertifikasi Guru Agama Hindu		0	600	0	0	0		
D.11	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha	Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang terbina							Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Kemenag
		- Bantuan Pembinaan Guru Dhamma Sekha	455	455	500	500	500	500		
		- Bantuan Pembinaan Guru SMB	2334	2334	2.300	2.300	2.300	2.300		
		- Bantuan Pembinaan Guru Non PNS	464	464	464	464	464	464		
		- Tunjangan Profesi Guru Non PNS	553	553	553	553	553	553		
		- Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Buddha	1	1	2	2	2	2		
E	Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal			0						Kemdikbud, Kemenag
				0						
E.1	Penyediaan Layanan Paud	APK PAUD usia 3-6 tahun	45,05	45,05	70,00	71,00	73,00	75,00	Program PAUDNI	Kemdikbud
		% Desa Memiliki Minimal satu Layanan PAUD		0	70	75	80	85		
		% Kabupaten/Kota yang mempunyai pusat rujukan PAUD		0	24	29	35	41		
E.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA		0	34	34	34	34	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA		0	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Bantuan Peningkatan Mutu dan Kurikulum RA/BA		0	100	100	100	100		
		Bantuan Pemberdayaan Organisasi/ Kelembagaan RA/BA		0	100	100	100	100		
		Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA		0	100	100	100	100		
E.3	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	Jumlah penganggur usia produktif yang mendapatkan layanan kursus dan keterampilan yang bermutu	19,00%	0,19	60000	130000	210000	300000	Program PAUDNI	Kemdikbud
		Jumlah peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi		0	51773	61773	71773	81773		
		Jumlah standar program kursus dan pelatihan		0	45	50	55	60		
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar	20,00%	0,2	8967	10467	11967	14967		
E.4	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Persentase buta aksara usia 15-64 tahun	4,2	4,2	5,5	4,9	4,6	4,3	Program PAUDNI	Kemdikbud
		Penduduk Tuna Aksara Mendapatkan Layanan Pendidikan Keaksaraan		0	245725	317172	407567	491578		
		Penduduk Usia Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kesetaraan Dasar dan Menengah Vokasional		0	30755	32808	45013	57370		
		Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan program pendidikan keoragntuan		0	80	90	90	90		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
F	Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan			0						Kemenag
F.1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	Percepatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Agama	1	1	1	1	1	1	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Implementasi Kurikulum PAI Tahun 2013 pada Sekolah (paket)	34	34	34	34	34	34		
		Bantuan Sarana Pembelajaran PAI (paket)		0	100	100	100	100		
		Kualitas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	34	34	34	34	-	-		
		Pentas PAI (paket)	1	1	1	1	1	1		
F.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	Percepatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Keagamaan	1	1	1	1	1	1	Program Pendidikan Islam	Kemenag
		Pengembangan Pend. Keagamaan Terpadu di Wil. Perbatasan		0	10	10	10	10		
		Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan	34	34	34	34	34	34		
		Beasiswa S1 Santri Berprestasi	1700	1700	1.700	2.000	2.300	2.600		
		Pengembangan Agribisnis di Pontren		0	100	100	100	100		
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah Takmiliah	34	34	34	34	34	34		
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah	34	34	34	34	34	34		
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Al Qur'an	34	34	34	34	34	34		
F.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pembiayaan yang bersumber PNPB	7	7	7	7	7	7	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kemenag
F.4	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan		0	209	209	209	209	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kemenag
		Bimbingan Teknis Kurikulum 2013		0	77	77	77	77		
F.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Implementasi Kurikulum 2013		0	600	600	0	0	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kemenag
		Peserta Didik yang dibina	1600	1600	500	500	500	500		
		Buku Pelajaran Agama Hindu		0	2.000	2.000	2.000	2.000		
		Fasilitasi Lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan		0	246	246	246	246		
F.6	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha	Lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan Terbina							Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Kemenag
		- Bantuan Sekolah Minggu Buddhis (SMB)	400	400	250 LKS	250 LKS	250 LKS	250 LKS		
		- Bantuan Pelaksanaan Pendidikan Pabbaja Tinggkat Dasmen	36	36	6 LKS	6 LKS	6 LKS	6 LKS		
		Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama dan keagamaan Yang Memenuhi Standar								
		- Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Dhamma Sekha	35	35	11 LKS	11 LKS	11 LKS	11 LKS		
		- Pengadaan Buku ajar kurikulum 2013 pendidikan Agama Buddha	50000	50000	80000 Exp	80000 Exp	80000 Exp	80000 Exp		
		- Pengadaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha		0	50000 Set	50000 Set	50000 Set	50000 Set		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pendidikan Agama dan keagamaan Yang Bermutu		0	5 KEG	5 KEG	5 KEG	5 KEG		
		- Workshop Penyusunan kurikulum sekolah Minggu Buddha								
		- Sippa Dhamma Samaja Tingkat Nasional VI	1	1	1 KEG	1 KEG	1 KEG	1 KEG		
		- Sosialisasi Kurikulum Dhamma sekha	3	3	5 KEG	5 KEG	5 KEG	5 KEG		
G	Fokus Prioritas: Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan	Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang)	4,8	4,8	5	5	5	5		Perpusnas
		Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)	5001	5001	5128	5304	5480	5656		
		Perpustakaan Umum dan Khusus Yang Dikembangkan dan Dibina	290	290	295	295	300	300		
		Tenaga Perpustakaan yang sesuai Kompetensi	800	800	830	830	830	830		
G.1	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	Karya cetak dan karya rekam terbitan Nasional dan Internasional yang Terkelola (eksemplar)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) yang diterbitkan (naskah)	4	4	4	4	4	4		
		Katalog Induk Nasional (KIN) yang diterbitkan (naskah)	4	4	4	4	2	2		
		Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen)	4	4	4	4	4	4		
G.2	Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Fasilitasi Peningkatan Layanan Perpustakaan Nasional (bimbingan pemustaka dan pustakawan, promosi/pameran) (even)	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia) (naskah)	10	10	10	10	10	10		
		Fasilitasi kerjasama layanan antar perpustakaan (kegiatan)	2	2	2	2	2	2		
		Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (unit perpustakaan)	50	50	50	50	50	50		
		Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen)	2	2	2	2	2	2		
G.3	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Peserta Diklat Perpustakaan (orang)	830	830	830	830	830	830	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Kurikulum dan Bahan Ajar Program Diklat Administrasi, Teknis, dan Fungsional Perpustakaan (naskah)	61	61	61	61	61	61		
		Laporan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen)	2	2	2	2	2	2		
G.4	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	Akuisisi Bahan Perpustakaan (ribu eksemplar)	100	100	143	143	143	143	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Pengolahan Bahan Perpustakaan (ribu eksemplar)	25	25	25	25	25	25		
		Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen)	2	2	2	2	2	2		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
G.5	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Fasilitasi Akreditasi Perpustakaan (unit perpustakaan)	70	70	73	89	111	133	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (unit perpustakaan)	290	290	295	295	300	300		
		Fasilitasi Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi (unit perpustakaan)	500	500	500	500	550	600		
		Pengkajian Minat Baca (kali)	2	2	2	2	2	2		
		Fasilitasi Pemasarakatan Minat Baca (roadshow, duta baca, publikasi) (kali)	130	130	130	130	135	140		
		Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (m2)	50.445	50.445	50.445	50.445	0	0		
		Laporan Pemantauan Dan Evaluasi (dokumen)	2	2	2	2	2	2		
G.6	Pengembangan Pustakawan	Tenaga Pustakawan yang disertifikasi (orang)	100	100	100	100	100	100	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Pengkajian dan pengembangan Tenaga Pustakawan (naskah)	6	6	6	6	6	6		
		Dokumentasi Laporan Pemantauan dan Evaluasi	2	2	2	2	2	2		
G.7	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Pelestarian Fisik Bahan Pustaka	14.000	14.000	14.700	16.300	17.500	18.700	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Bahan Pustaka yang direprografi	700	700	730	750	780	800		
		Bahan Pustaka yang di Transformasi Digital	7.500	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000		
		Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi	2	2	2	2	2	2		
G.8	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Proklamator Bung Karno (ribu orang)	600	600	600	650	700	750	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno (eksemplar)	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044		
		Pengelolaan ketatausahaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	12	12	12	12	12	12		
		Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi	7	7	7	7	7	7		
		Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12	12		
G.9	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (ribu orang)	100	100	100	102,5	105	107,50	Program Pengembangan Perpustakaan	Perpusnas RI
		Kerjasama dan Promosi Perpustakaan	9	9	9	10	11	12		
		Koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		Pengelolaan Tata Usaha Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	12	12	12	12	12	12		
		Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi	3	3	3	3	3	3		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
H	Fokus Prioritas: Peningkatan Pendidikan Karakter			0						Kemdikbud
H.1	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	PERSENTASE SMA MENERAPAKAN PENDIDIKAN KARAKTER	100	100	100	100	100	100		
H.2	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	PERSENTASE SMK MENERAPAKAN PENDIDIKAN KARAKTER	100	100	100	100	100	100		
I	Fokus Prioritas: Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Anggaran Pendidikan			0						16 K/L lain
I.1	Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	Persentase Lulusan Program Diploma Keuangan dengan predikat minimal Baik	88%	88%	90%	90%	90%	90%	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		Persentase Layanan BLU	90%	90%	95%	95%	95%	95%		
I.2	Pendidikan Menengah Pertanian	Generasi Muda Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian (Orang)	18230	18230	18.230	18.230	18.230	18.230	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Kementerian Pertanian
		Kelembagaan SMK SPP Yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Unit)	384	384	84	84	84	84		
		Ketenagaan SMK SPP Yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	596	596	125	596	596	596		
		Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten di Bidang Industri	1.460	1.460	1630	1730	1830	1930		
I.3	Peningkatan Kualitas SDM Industri	Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi			14.920	15.920	15.920	15.920	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian
		Terfasilitasinya Pengembangan SDM Industri			12	24	24	24		
		Penguatan Infrastruktur Kelembagaan			9	10	10	10		
		Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai			12	12	12	12		
		Tersedianya Laporan Evaluasi			20	40	40	40		
		Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	78	78	80	80	80	80		
		Jumlah NSPK Diklat yang Ditetapkan dan Diberlakukan	134	134	171	166	179	91		
I.4	Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan Kemampuannya	223	223	290	290	290	290	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Kementerian ESDM
		Prosentase Tingkat Kinerja Organisasi	24	24	24	24	24	24		
		Jumlah Publikasi Karya Ilmiah	8	8	3	3	3	3		
		Jumlah Karva Ilmiah	11	11	3	4	5	6		
		Jumlah Jenis Diklat Yang Dibutuhkan	17	17	15	15	15	15		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	6	6	4	4	4	4		
		Jumlah Kerjasama Diklat Yang Diimplementasikan	10	10	9	9	9	9		
		Jumlah Kegiatan Promosi Diklat	13	13	13	13	13	13		
		Jumlah Sistem Informasi Yang Diimplementasikan	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan Kemampuannya	223	223	290	290	290	290		
		Prosentase Tingkat Kinerja Organisasi	24	24	24	24	24	24		
		Jumlah Publikasi Karya Ilmiah	8	8	3	3	3	3		
		Jumlah Karva Ilmiah	11	11	3	4	5	6		
		Jumlah Jenis Diklat Yang Dibutuhkan	17	17	15	15	15	15		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	6	6	4	4	4	4		
		Jumlah Kerjasama Diklat Yang Diimplementasikan	10	10	9	9	9	9		
		Jumlah Kegiatan Promosi Diklat	13	13	13	13	13	13		
		Jumlah Sistem Informasi Yang Diimplementasikan	4	4	4	4	4	4		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.5	Pendidikan Perhubungan Darat	Lulusan diklat perhubungan darat (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional	5615	5615	6279	8290	7863	7850	Program Pengembangan SDM Perhubungan	Kementerian Perhubungan
I.6	Pendidikan Perhubungan Laut	Lulusan diklat perhubungan laut (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional	146055	146055	205457	199878	203914	210238	Program Pengembangan SDM Perhubungan	Kementerian Perhubungan
I.7	Pendidikan Perhubungan Udara	Lulusan diklat perhubungan udara (pembentukan, penjenjangan dan keterampilan/teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional	4733	4733	6313	7390	7445	7219	Program Pengembangan SDM Perhubungan	Kementerian Perhubungan
I.8	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (kumulatif)	9500	9500	7000	8000	9000	9500	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
I.9	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	Jumlah perundangan/regulasi yang selaras terkait pendidikan tenaga kesehatan*)	-	-	5	5	5	5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
I.10	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (kumulatif)*			6	14	21	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan	Kementerian Kesehatan
		Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan pemerintah (Kemendiknas)	17000	17000	20000	20000	20000	20000		
I.11	Pelaksanaan <i>Internship</i> Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan <i>internship</i>	4000	4000	7000	7500	8000	8500	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
I.12	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan minimal 2.300 orang lulusan	285	285	280	980	1400	1850	Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Kementerian Kehutanan

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.13	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6108	6250	6500	6500	6500	6500	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)		110	110	110	110	110		
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP		100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah lulusan UPT pendidikan tinggi kepariwisataan		1440	1490	1490	1490	1490		
I.14	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir							Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		- Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV Teknologi Nuklir	75	75	350	350	350	350		
		Jumlah bulan operasional kantor	12	12	12	12	12	12		
		Indeks kepuasan pelanggan	80	80	80	80	80	80		
I.16	Pengembangan Tenaga Kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	1	1	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah tenaga kepemudaan tingkat nasional, provinsi, kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi.	1.000	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
I.17	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.	66	66	34	34	34	34		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	2	2	2	2		
I.18	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda.	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.19	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda.	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.20	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.21	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri.	37	37	6	6	6	6		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.22	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pelayanan kepemudaan.	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
		Jumlah organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi kepemudaan.	140	140	170	170	170	170		
1.23	Pengembangan Kepramukaan	Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah naskah kebijakan pengembangan Kepramukaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan.	5.600	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
		Jumlah organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi.	-	-	34	34	34	34		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kepramukaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.24	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Jumlah naskah kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.25	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	Jumlah naskah kebijakan peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	7	7	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki.	66	66	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.26	Peningkatan Wawasan Pemuda	Jumlah naskah kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum.	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan wawasan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.27	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah fasilitas prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.	716	716	34	34	34	34		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.28	Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah modul pendidikan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta pendidikan kepemudaan dan keolahragaan.	33	33	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.29	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta olahraga usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan.	1.000	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
		Jumlah pelatih, instruktur, pembina olahraga khusus yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas			1.000	1.000	1.000	1.000		
		Fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus			1	1	1	1		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.30	Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta olahraga di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal.	250	250	1.500	1.500	1.500	1.500		
		Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi dasar di satuan-satuan pendidikan			500	500	500	500		
		Fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan			1	1	1	1		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga pendidikan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.31	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata.	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
		Fasilitasi kejuaraan olahraga rekreasi			1	1	1	1		
		Jumlah pengunjung museum olahraga.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
1.32	Pengembangan Sentra Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi.	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan.	54	54	34	34	34	34		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.33	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	2	2	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi.	25	25	68	68	68	68		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
I.34	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.	550	550	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Jumlah fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan.	5	5	1	1	1	1		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
I.35	Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah standardisasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.	32	32	4	4	4	4		
		Jumlah peserta penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.	5	5	500	500	500	500		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
I.36	Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga	Jumlah modul penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga	33	33	500	500	500	500		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
I.37	Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga	Jumlah naskah kebijakan peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Jumlah uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga.	10	10	4	4	4	4		
		Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.38	Pengembangan Pembibitan Olahragawan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah peserta pemanduan dan pengembangan olahragawan berbakat di satuan-satuan pendidikan. Jumlah fasilitas olahragawan ikut serta pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun tepat waktu.	- 400 12 -	- 400 12 -	1 1.500 400 1 1	1 1.500 400 1 1	1 1.500 400 1 1	1 1.500 400 1 1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
I.39	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan. Jumlah pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun tepat waktu.	- 400 -	- 400 -	1 2.000 1	1 2.000 1	1 2.000 1	1 2.000 1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
I.40	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	Pranata Akademik sesuai standar World Class University (WCU) (jumlah dokumen kebijakan akademik) Ketersediaan infrastruktur pembangunan Proses pendidikan berdasarkan tri dharma (jumlah mahasiswa peserta)	1 dokumen Pembangunan 50.000 M2 87 orang	1 dokumen Pembangunan 50.000 M2 87 orang	1 dokumen Perpindahan ke sentul 87 orang	1 dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang	1 dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang	1 dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 87 orang	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan / TNI	Kementerian Pertahanan
I.41	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Bina Lattas	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	15.600	15.600	41.000	43.050	45.203	47.463	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemenakertrans
I.42	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga Kepelatihan Bina Lattas	Jumlah Instruktur yang ditingkatkan kompetensinya	849	849	2.154	2.175	2.200	2.230	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemenakertrans
I.43	Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	120.980	120.980	55.772	60.720	63.100	65.040	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemenakertrans

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV	Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga									
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan									
		1. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda.	3.000	3.000	2.426	2.426	2.426	2.426		
		3. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
A.1	Pengembangan Tenaga Kepemudaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	1	1	1	1	1	1		
		2. Jumlah tenaga kepemudaan tingkat nasional, provinsi, kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi.	1.000	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.2	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		3. Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.	66	66	34	34	34	34		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	2	2	2	2		
A.3	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda.	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.4	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda.	3.000	3.000	2.426	2.426	2.426	2.426		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.5	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.6	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah, daerah, dan luar negeri.	37	37	6	6	6	6		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kerjasama dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.7	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pelayanan kepemudaan.	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
		3. Jumlah organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi kepemudaan	140	140	170	170	170	170		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.8	Pengembangan Kepramukaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan Kepramukaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam pendidikan Kepramukaan.	5.600	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
		3. Jumlah organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi.	-	-	34	34	34	34		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kepramukaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.9	Peningkatan Kapasitas Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.10	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	7	7	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki.	66	66	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan potensi sumber daya pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.11	Peningkatan Wawasan Pemuda								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pemuda (kader) yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum.	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan wawasan pemuda yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.	716	716	34	34	34	34		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
A.13	Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah modul pendidikan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta pendidikan kepemudaan dan keolahragaan.	33	33	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga									
		1. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata.	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		2. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi.	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
		4. Jumlah olahragawan andalan nasional	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
B.1	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta olahraga usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan.	1.000	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah pelatih, instruktur, pembina olahraga khusus yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas			1.000	1.000	1.000	1.000		
		4. fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus			1	1	1	1		
		5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga layanan khusus yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.2	Pengembangan Olahraga Pendidikan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta olahraga di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal.	250	250	1.500	1.500	1.500	1.500		
		3. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi dasar di satuan-satuan pendidikan			500	500	500	500		
		4. fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan			1	1	1	1		
		5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga pendidikan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.3	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan, dan wisata.	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
		3. fasilitasi kejuaraan olahraga rekreasi			1	1	1	1		
		4. Jumlah pengunjung museum olahraga.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
		5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.4	Pengembangan Sentra Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta olahraga di sentra olahraga pendidikan, dan sentra olahraga rekreasi.	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan.	54	54	34	34	34	34		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan sentra keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.5	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	2	2	1	1	1	1		
		2. Jumlah fasilitasi prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi.	25	25	68	68	68	68		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan yang disusun tepat waktu.	, -	, -	1	1	1	1		
B.6	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah penerima penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.	550	550	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan.	5	5	1	1	1	1		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi, dan penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.7	Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah standardisasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.	32	32	4	4	4	4		
		3. Jumlah peserta penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.	5	5	500	500	500	500		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan standardisasi kepemudaan dan keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.8	Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah modul penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga	33	33	500	500	500	500		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.9	Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga.	10	10	4	4	4	4		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan penerapan iptek olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.10	Pengembangan Pembibitan Olahragawan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah peserta pemanduan dan pengembangan olahragawan berbakat di satuan-satuan pendidikan.	400	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
		3. Jumlah fasilitasi olahragawan ikut serta pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional.	12	12	400	400	400	400		
		4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga junior/pelajar bertaraf regional, nasional dan internasional.			1	1	1	1		
		5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembibitan olahragawan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.11	Pengembangan Tenaga Keolahragaan								Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan.	400	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
		3. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan tenaga keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.12	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan								Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3. Jumlah organisasi olahraga prestasi, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standard minimal organisasi keolahragaan.	10	10	68	68	68	68		
		4. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi			8	8	8	8		
		5. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan organisasi keolahragaan yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.13	Pengembangan Industri Olahraga								Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan industri olahraga yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah pengelola industri olahraga yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha.	400	400	500	500	500	500		

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah sentra industri jasa olahraga, dan sentra industri produk olahraga yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan.	3	3	34	34	34	34		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan industri olahraga yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		
B.14	Pengembangan Olahraga Prestasi								Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Kemenpora
		1. Jumlah naskah kebijakan pengembangan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan.	-	-	1	1	1	1		
		2. Jumlah olahragawan andalan nasional	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
		3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional (SEA Games, ASEAN Para Games)	5	5	5	5	5	5		
		4. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan olahraga prestasi yang disusun tepat waktu.	-	-	1	1	1	1		

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama									
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama	Penyuluh agama (orang)	90.947	90.947	90.192	90.192	90.192	90.192		
1	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam, Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pemberdayaan Wakaf dan Zakat	Penyuluh agama Islam (Orang)	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama
		Penyuluh agama yang mendapat tunjangan (orang)	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313		
		Penyuluh agama yang mendapat pembinaan (orang/lokasi)	112.565	112.565	-	-	-	-		
		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan (lokasi)	22.063	22.063	281	289	299	309		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional (lokasi)	437	437	100	100	100	100		
		Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar/lokasi)	1.269.262	1.269.262	7.602	8.102	8.602	9.102		
		Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga)	-	-	4.160	600	700	800		
		Dokumen Layanan Keagamaan (Dokumen/ Lokasi)	5.608	5.608	100	100	100	100		
		Biaya Operasional KUA	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382 Lokasi		
		Fasilitasi sarana layanan keagamaan di KUA	1.510	1.510	1.570	1.570	1.570	1.570		
		Fasilitasi prasarana layanan keagamaan di KUA	672	672	100	100	100	100		
2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Penyuluh agama Kristen (Orang)	8.558	8.558	5.500	5.500	5.500	5.500	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama
		Penyuluh agama yang mendapat tunjangan	8.558	8.558	5.500	5.500	5.500	5.500		
		Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi	34	34	34	34	34	34		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan	34	34	34	34	34	34		
		Fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional	-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar)	34	34	34	34	34	34		
		Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga)	-	-	100	100	100	100		
		Dokumen Layanan Keagamaan	50	50	-	-	-	-		
3	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Penyuluh agama Katolik (Orang)	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama
		Penyuluh agama yang mendapat tunjangan	2.700	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
		Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi	0	0	301	301	301	301		
		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan	80	80	80	80	80	80		
		Fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga)	146	146	146	146	146	146		
		Dokumen Layanan Keagamaan	0	0	0	0	0	0		
4	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Penyuluh agama Hindu (Orang)	2.800	2.800	2.779	2.779	2.779	2.779	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama
		Penyuluh agama yang mendapat tunjangan	2.800	2.800	2.779	2.779	2.779	2.779		
		Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi	500	500	500	500	500	500		
		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan	50	50	50	50	50	50		
		Fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional	1	1	1	1	1	1		
		Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar)	1	1	1	1	1	1		
		Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga)	200	200	200	200	200	200		
		Dokumen Layanan Keagamaan	28	28	28	28	28	28		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	Penyuluh agama Budha (Orang)	1.476	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	Program Bimbingan Masyarakat Budha	Kementerian Agama
		Penyuluh agama yang mendapat tunjangan	1.476	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500		
		Penyuluh agama yang mendapat peningkatan kualifikasi	300	300	32	32	32	32		
		Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapat fasilitasi pembinaan	10	10	1.086	1.086	1.086	1.086		
		Fasilitasi penyelenggaraan event keagamaan nasional	1	1	6	6	6	6		
		Fasilitasi sarana Keagamaan (eksemplar)	81.000	81.000	7.017	7.017	7.017	7.017		
		Fasilitasi prasarana keagamaan (lembaga)	76	76	1.269	1.269	1.269	1.269		
		Dokumen Layanan Keagamaan	-	-	207	207	207	207		
6	Pembinaan Urusan Agama Khonghucu	Penyuluh agama Khonghucu (Orang)	100	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag	Kementerian Agama

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama	1. Operasional FKUB (unit)	494	494	512	512	512	512		
		2. Jumlah FKUB yang dibangun (unit)	40	40	40	40	40	40		
1	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Operasional FKUB Tkt provinsi	33	33	33	33	33	33	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Kementerian Agama
		Operasional FKUB Tkt Kabupaten	461	461	479	479	479	479		
		Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota	40	40	40	40	40	40		
		Pembinaan dan Pengembangan KUB (kegiatan)	15	15	205	205	205	205		
C	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas	Pelaksanaan Ibadah Haji yang Tertib dan Lancar (Jemaah)	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kementerian Agama
1	Pelayanan Haji dan Umrah Dalam Negeri	Pelayanan pendaftaran haji (lokasi)	506	506	506	506	506	506		
		Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji (lokasi)	4	4	6	6	7	8		
2	Pelayanan Haji dan Umrah Luar Negeri	Penyediaan akomodasi jemaah haji (orang)	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279		
		Penyediaan katering jemaah haji (orang)	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penyediaan transportasi darat jemaah haji (orang)	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279	157.279		
		Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di luar negeri (orang)	1	1	1	1	1	1		
2	Pengelolaan Dana Haji	Laporan Keuangan Operasional Haji (Dok)	40	40	40	40	40	40		
3	Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	Bimbingan Perjalanan Ibadah Haji (orang)	211.000	167.000	211.000	211.000	211.000	211.000		
		Pembinaan dan Operasional PPIH Arab Saudi (Org)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490		
		Pembinaan dan Operasional PPIH Embarkasi (Org)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
		Operasional Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi (Org)	619	619	589	589	589	589		
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHU									
		Pengolaan database, jaringan, dan informasi haji (lokasi)	40	40	35	35	35	35		
5	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji								Program Dukungan	Kementerian Kesehatan

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji sesuai standar (persentase) ^{*)}			100	100	100	100	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	

*) Merupakan indikator baru yang belum terdapat pada RKP 2014

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VI	Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya									
A	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.									
1	Peningkatan Sensor Film	1 Film/Video/Iklan yang lulus sensor	46.000	46.000	46.000	47.000	48.000	48.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kemdikbud
2	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kepercayaan dan Pelestarian Nilai Kepercayaan dan Tradisi	3	3	8	8	8	8	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi (naskah)	80	80	83	84	84	84		
		3 Even pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi	20	20	16	16	16	16		
		4 Desa Adat yang direvitalisasi	15	15	-	7	7	7		
		5 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat	1.000	1.000	1.105	1.105	1.105	1.105		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		6 Komunitas Budaya yang difasilitasi	100	100	120	150	150	150		
		7 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	7	7	7	7	7	7		
3	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	1 Naskah Rumusan Kebijakan dan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	1	1	1	1	1	1		
		2 Buku Sejarah dan Nilai Budaya	9	9	8	10	10	10		
		3 Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya	21.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
		4 Buku Sejarah dan Nilai BudayaBuku Hasil Verifikasi dan Perumusan Nilai	2	2	2	2	2	2		
		5 Dokumen Sumber Sejarah dan Nilai Budaya	9	9	10	11	12	13		
		6 Even sejarah dan pemberdayaan nilai budaya yang difasilitasi	33	33	33	33	33	33		
		7 Atlas Sejarah yang disusun	1	1	1	1	1	1		
		8 Naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	2	2	2	2	2	2		
		9 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang Sejarah dan nilai budaya	7	7	7	7	7	7		
B	Peningkatan apresiasi karya budaya.									

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	1 Naskah Rumusan Kebijakan Pembinaan Kesenian dan Perfilman	2	2	4	4	4	4	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Apresiasi Karya Seni Oleh Masyarakat	18	18	130	130	30	30		
		3 Apresiasi Film Oleh Masyarakat	5	5	38	38	38	38		
		4 Taman Budaya yang direvitalisasi	15	15	2	2	2	2		
		5 Karya Seni Yang Dilestarikan	3	3	3	3	3	3		
		6 Produksi Film Yang Di Fasilitasi	3	3	3	3	3	3		
		7 Pengkayaan Materi Ajar Seni Dan Film	0	0	10	10	10	10		
		8 Data Kesenian dan Perfilman yang Dikelola	0	0	5	5	5	5		
		7 Taman Budaya yang dibangun	0	0	0	5	5	5		
2	Pengembangan Galeri Nasional	8 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang kesenian dan perfilman	7	7	7	7	7	7	Program Pelestarian Budaya	
		1 Karya Seni Rupa yang dipamekan	1.350	1.350	400	400	400	400		Kemdikbud
		2 Karya Seni Rupa yang dikelola	1.776	1.776	1.788	1.788	1.788	1.788		
		3 Karya Seni Rupa yang Diakuisisi	10	10	12	12	12	12		
C	Peningkatan diplomasi budaya	4 Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi	24	24	9	9	9	9		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	1 Naskah Rumusan Kebijakan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	1	1	2	2	2	2	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Kekayaan Budaya yang Dicatat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		3 Kekayaan Budaya yang Ditetapkan	50	50	55	105	100	100		
		4 Diplomasi Budaya Indonesia yang Dillaksanakan di Luar Negeri	40	40	40	60	65	70		
		5 Diplomasi Budaya yang Dillaksanakan di Dalam Negeri	4	4	4	7	8	9		
		6 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang Diusulkan dan Dikelola	8	8	9	10	11	12		
D	Peningkatan pengelolaan warisan budaya									
1	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1 Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum	1	1	1	1	1	1	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat	12	12	12	12	12	12		
		3 Cagar Budaya yang diregistrasi	515	515	515	515	515	515		
		4 Museum yang dibangun	7	7	1	1	1	1		
		5 Cagar Budaya yang dilindungi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		6 Cagar Budaya yang direvitalisasi	8	8	8	8	8	8		
		7 Cagar budaya yang didokumentasi	3	3	5	5	5	5		
		8 Museum yang distandarisasi	10	10	8	12	12	12		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		6 Koleksi museum yang didokumentasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		7 Cagar Budaya Bawah Air yang dieksplorasi	4	4	5	4	4	4		
		8 Naskah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum	5	5	11	5	5	5		
		9 Museum penerima bantuan revitalisasi	6	6	-	6	6	6		
2	Pengelolaan Permuseuman	1 Koleksi Museum yang Dikelola	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Masyarakat yang Mengapresiasi Museum	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000		
		3 Koleksi Museum yang Direinventarisasi	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
		4 Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum	150	150	150	150	150	150		
		5 Kajian Pengembangan Museum	24	24	24	24	24	24		
		6 Koleksi Museum yang diakuisisi	3	3	6	8	8	8		
		7 SOP tentang Pengelolaan Museum	-	-	6	6	6	6		
3	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Cagar Budaya yang dilestarikan	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Cagar budaya yang dikelola	124	124	124	124	124	124		
		3 Cagar budaya yang diinventarisasi	716	716	716	716	716	716		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		4 Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	95	95	95	95	95	95		
		5 Peserta Internalisasi Cagar Budaya	118.993	118.993	119.000	119.000	119.000	119.000		
		6 Dokumen pelestarian cagar budaya	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331		
4	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	1 Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya	124	124	124	124	124	124	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Dokumen pelestarian nilai budaya	168	168	168	168	168	168		
		3 Karya budaya yang diinventarisasi	975	975	975	975	975	975		
		4 Peserta internalisasi nilai budaya	17.075	17.075	17.100	17.100	17.100	17.100		
		5 Peserta Bintek Pelestarian Nilai Budaya	220	220	220	220	220	220		
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	1 Dokumen layanan bidang hukum	2	2	2	2	2	2	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Dokumen Bidang Perencanaan dan evaluasi program	13	13	14	14	14	14		
		3 Dokumen Bidang Keuangan	13	13	11	11	11	11		
		4 Dokumen Kepegawaian	9	9	9	9	9	9		
		5 Dokumen kerjasama antar lembaga	3	3	3	3	3	3		
		6 Dokumen Bidang Kehumasan	6	6	6	6	6	6		
		7 Dokumen Data dan Statistik Kebudayaan	5	5	5	5	5	5		
		8 Dokumen Penyuluh budaya	150	150	150	150	150	150		
E	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan									

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	1 Naskah rumusan kebijakan Pengembangan SDM Kebudayaan	5	5	5	7	7	7	Program Pengembangan Profesi PTK dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Kemdikbud
		2 SDM Bidang Kebudayaan yang tersertifikasi	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
		3 Modul Pelatihan dan SKKNI Bidang Kebudayaan	10	10	10	10	10	10		
		4 SDM Kebudayaan yang difasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kebudayaan	40	40	40	50	50	50		
		5 Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	7	7	7	7	7	7		
2	Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Budaya	17	17	17	17	18	18	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Budaya	10	10	10	10	11	11		
		3 Dokumen Dokumentasi dan Publikasi Kebudayaan	12	12	12	12	13	13		
		4 Dokumen Pengelolaan Manajemen	7	7	7	7	7	7		
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	1 Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penelitian Arkeologi	5	5	5	7	7	7	Program Pelestarian Budaya	Kemdikbud
		2 Jumlah penelitian bidang arkeologi.	150	150	150	160	160	160		

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		3 Jumlah fasilitasi penelitian arkeologi	15	15	15	20	20	20		
		4 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan	20	20	20	25	25	25		
		5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	7	7	7	7	7	7		

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VII	Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial									
A	Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
1	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
B	Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi (jiwa)	148.778	148.778	149.582	150.588	153.600	156.672	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
		Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	47.204	47.204	48.760	49.689	50.682	51.696		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	50.491	50.491	51.310	52.337	53.384	54.451		
1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	148.778	148.778	149.582	150.588	153.600	156.672	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
2	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	47.204	47.204	48.760	49.689	50.682	51.696	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)	50.491	50.491	51.310	52.337	53.384	54.451	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
C	Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani (jiwa)	75.000	75.000	165.000	180.000	200.000	215.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
		Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dilayani (jiwa)	21.473	21.473	75.000	82.500	90.750	99.825		
1	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	75.000	75.000	130.000	141.413	141.413	141.413	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
2	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	21.473	21.473	27.000	30.000	35.000	40.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
D	Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE	111.940	111.940	111.090	111.090	111.090	111.090	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
		Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan	53.100	53.100	53.300	53.300	53.300	53.300		
		Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300		
		Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT (unit)	2.122	2.122	2.064	2.064	2.064	2.064		
		Jumlah KAT yang mendapatkan jaminan hidup (KK)	4.782	4.782	6.609	6.609	6.609	6.609		
1	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan	Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE	111.940	111.940	111.090	111.090	111.090	111.090	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
		Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
2	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan	53.100	53.100	53.300	53.300	53.300	53.300		
		Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2.122	2.122	2.064	2.064	2.064	2.064	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
		Pemberian jaminan hidup (KK)	4.782	4.782	6.609	6.609	6.609	6.609		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VIII	Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak									
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan	1. Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah	-	-	5	5	5	5	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat Nasional dan Daerah	-	-	10	10	10	10		
		3. Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan	-	-	8	8	8	8		
A.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pendidikan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	-	-	2	2	2	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pendidikan		-	-	1	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang Pendidikan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG(3 K/L dan 10 Prov)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yang distandarisasi (10 Lembaga dan 150 SDM)	Lemb	-	-	20	40	60	80		
			SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase K/L Bidang Pendidikan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pendidikan dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
A.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Kesehatan yang	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan		-	-	2	1	-	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan	Kementerian PP dan PA

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	responsif gender	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)	-	-	20	40	60	80	Perempuan	
		3. Jumlah model pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Kesehatan	-	-	1	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (5 K/L dan 10 Prov)	K/L	-	20	40	60	80		
			Prov	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yang distandarisasi (8 lembaga dan 60 SDM)	Lemb	-	-	25	50	75		
			SDM	-	-	-	33	67		
		6. Persentase K/L Bidang Kesehatan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov)	K/L	-	20	40	60	80		
			Prov	-	25	25	50	75		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (5 K/L dan 4 Prov)	K/L	-	20	40	65	80		
			Prov	-	25	25	50	75		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PIUG di K/L bidang	K/L	-	20	40	65	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pelaksanaan PUG di bidang Kesehatan dan Pemda yang ditindaklanjuti (5 K/L dan 4 Prov)	Prov	-	-	25	25	50	75		
A.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	3	2	2	2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)		-	-	33	67	100	33		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang SDA & Lingkungan		-	-	2	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (5 K/L dan 10 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yang distandarisasi (30 Lembaga dan 200 SDM)	Lemb	-	-	20	40	60	80		
			SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase K/L Bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang	K/L	-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Lingkungan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (5 K/L dan 4 Prov)	Prov	-	-	25	25	75	100		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (5 K/L dan 4 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	25	25	75	100		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA & Lingkungan dan Pemda yang ditindaklanjuti (5 K/L dan 4 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	25	25	75	100		
A.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	2	1	1	1	Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)		-	-	20	40	60	80		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Politik & Pengambilan Keputusan		-	-	1	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda	K/L	-	-	14	43	71	82		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (7 K/L dan 10 Prov)	Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yang distandarisasi (7 Lemb dan 60 SDM)	Lemb	-	-	-	14	43	82		
			SDM	-	-	-	-	33	67		
		6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan(7 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	14	43	71	82		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(7 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	14	43	71	82		
			Prov	-	-	14	43	71	82		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan dan Pemda yang ditindaklanjuti (7 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	14	43	71	82		
			Prov	-	-	14	43	71	82		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan		-	-	1	1	1	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)		-	-	20	40	60	80		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Hukum		-	-	1	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (10 K/L dan 10 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yang distandarisasi (8 Lembaga dan 60 SDM)	Lemb	-	-	-	25	50	75		
			SDM	-	-	-	-	33	67		
		6. Persentase K/L Bidang Hukum & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (10 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	33	33	67	67		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Hukum dan Pemda yang ditindaklanjuti (10 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	20	40	60	80		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
A.6	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	1	2	2	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)		-	-	33	33	67	67		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan		-	-	2	2	2	2		
		4. Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (3 K/L dan 3 Prov)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yang distandarisasi (3 lembaga dan 125 SDM)	Lemb	-	-	33	67	100	-		
			SDM	-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		6. Persentase K/L Bidang Ketenagakerjaan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda dianalisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
A.7	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	1	2	2	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan)		-	-	25	50	75	100		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan		-	-	2	2	2	2		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4. Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (4 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	25	50	75	100		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang distandarisasi (4 Lembaga dan 125 SDM)	Lemb	-	-	25	50	75	100		
			SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang memiliki sistem data terpilah (4 K/L dan 3 Pemda)	K/L	-	-	25	50	75	100		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (4 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	25	50	75	100		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L	K/L	-	-	25	50	75	100		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 3 Pemda)	Prov	-	-	33	33	67	67		
A.8	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang Reponsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	1	2	2	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)		-	-	33	33	67	67		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan		-	-	2	2	2	2		
		4. Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (3 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian,		-	-	33	33	67	67		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang distandarisasi PUG (3 Lembaga dan 125 SDM)	SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 4 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan(3 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda yang ditindaklanjuti. (3 K/L dan 4 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
A.9	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan		-	-	1	2	2	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang Responsif Gender	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang iptek dan sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (3 kebijakan)	-	-	33	33	67	67		
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG bidang iptek dan sumber daya ekonomi	-	-	2	2	2	2		
		4. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (3 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67	
			Prov	-	-	20	40	60	80	
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi yang distandarisasi (3 lembaga dan 125 SDM)	Lemb	-	-	33	67	100	-	
			SDM	-	-	20	40	60	80	
		6. Persentase K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (3 K/L dan 3 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67	
			Prov	-	-	33	33	67	67	
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan Sumber daya	K/L	-	-	33	33	67	67	

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Ekonomi dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (3 K/L dan 10 Pemda)	Prov	-	-	20	40	60	80		
		8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek dan Sumber daya Ekonomi dan Pemda yang ditindaklanjuti (3 K/L dan 3 Pemda)	K/L	-	-	33	33	67	67		
			Prov	-	-	33	33	67	67		
A.10	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan/atau yang diharmonisasikan		-	-	1	2	2	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan)		-	-	25	50	75	100		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur		-	-	2	2	2	2		
		4. Persentase K/L bidang Infrastruktur dan pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP dan PUG (6 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	17	17	50	83		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang	Lemb	-	-	17	17	50	83		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		penyelesaian masalah bidang Infrastruktur yang distandarisasi (6 lembaga dan 125 SDM)	SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase K/L bidang Infrastruktur & Pemda yang memiliki sistem data terpilah (6 K/L dan 4 Pemda)	K/L	-	-	17	17	50	83		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
		7. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (6 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	-	17	17	50	83		
			Prov	-	-	20	40	60	80		
		8. Persentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang infrastruktur dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 4 Pemda)	K/L	-	-	17	17	50	83		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
A.11	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	1. Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	1	1	1	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan)		-	-	20	40	60	8		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.	-	-	1	1	1	1		
		4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (6 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	17	33	50	83		
			Prov	-	20	40	60	80		
		5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi (19 Lembaga dan 100 SDM)	Lemb	-	-	47	68	79		
			SDM	-	20	40	60	80		
		6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda)	K/L	-	17	33	50	83		
		6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.(6 K/L dan 10 Pemda)	Prov	-	20	40	60	80		
			K/L	-	17	33	50	83		
		7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan	K/L	-	17	33	50	83		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (6 K/L dan 10 Pemda)	Prov	-	-	20	40	60	80		
A.12	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender	1. Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem manajemen informasi pimpinan (181, es 1 s/d 4)		-	-	10	30	60	90	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik (1 Perangkat Jaringan dan Sistem Aplikasi)		-	-	100	100	100	100		
		3. Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah, statistik gender dan anak (45 K/L)		-	-	20	40	60	80		
		4. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak (25 unit Pengelolan)		-	-	20	40	60	80		
		5. Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan Pemda tentang data terpilah, statistik gender dan anak		-	-	2	2	-	-		
		6. Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih (100 Orang)		-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		7. Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak	-	-	4	4	4	4		
		8. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti	-	-	6	8	8	6		
A.13	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan	1. Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	-	-	2	2	1	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)	-	-	20	40	60	80		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan	-	-	4	4	4	3		
		4. Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial	K/L	-	-	25	50	75	100	

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (4 K/L dan 6 Prov)	Prov	-	-	17	50	83	100		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang distandarisasi (5 Lemb dan 10 SDM)	Lemb	-	-	20	40	60	80		
			SDM	-	-	20	40	60	80		
		6. Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (4 K/L dan 4 prov)	K/L	-	-	25	50	75	100		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
		7. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda yang ditindaklanjuti (4 K/L dan 4 prov)	K/L	-	-	25	50	75	100		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
A.14	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	1. Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	2	2	-	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pekerja Perempuan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)	-	-	20	40	60	80	Perempuan	
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan	-	-	-	1	1	1		
		4. Persentase K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan (10 K/L dan 10 Prov)	K/L	-	-	20	40	60		
			Prov	-	-	20	40	60		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yang distandarisasi (5 Lembaga dan 75 SDM)	Lemb	-	-	-	30	35		
			SDM	-	-	-	30	35		
		6. Persentase data terpilah di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan (10 K/L dan 15 prov)	K/L	-	-	20	40	60		
			Prov	-	-	20	40	60		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		7. Persentase Laporan monev pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang perlindungan pekerja perempuan dan Pemda yang ditindaklanjuti (10 K/L dan 12 prov)	K/L	-	-	20	20	20	20		
			Prov	-	-	20	20	20	20		
A.15	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang	1. Jumlah kebijakan PPI bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan		-	-	3	1	1	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
		2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)		-	-	20	40	60	80		
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang PKPO		-	-	-	-	1	1		
		4. Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yang mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP (2 K/L dan 2 Pemda)	K/L	-	-	-	-	-	50		
			Prov	-	-	-	-	-	50		
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPPO yang distandarisasi (12 Lembaga dan 24 SDM)	Lemb	-	-	-	-	33	67		
			SDM	-	-	-	-	33	67		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		6. Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan Pemda yang dianalisis dan dimanfaatkan (22 K/L dan 4 prov)	K/L	-	-	23	45	68	91		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
		7. Persentase Laporan monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti (22 K/L dan 4 prov)	K/L	-	-	23	45	68	91		
			Prov	-	-	25	50	75	100		
A.16	Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	1. Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender		-	-	28	33	33	33	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PP dan PA
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	1. Jumlah Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan		-	-	87	113	133	112	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		-	-	9	30	9	2		
		3. Kabupaten/Kota Layak Anak		-	-	25	25	25	25		
B.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	11	15	15	10	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (40 Kebijakan)		-	-	20	40	60	80		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Model)		-	-	-	3	2	-		
		4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (28 kab/kota)		-	-	-	4	8	8		
		5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (14 kab/kota)		-	-	14	36	50	64		
		6 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi (60 Lembaga, 600 SDM)	Lemb	-	-	0	25	50	75		
			SDM	-	-	20	40	60	80		
		7 Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (5 Laporan)		-	-	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		8 Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (1 Sub Sistem)	-	-	50	50	100	100		
		9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)	-	-	1	2	1	2		
B.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	-	-	15	17	27	27	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan)	-	-	25	55	70	85		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (5 Model)	-	-	2	3	-	-		
		4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (28 Kab/Kota)	-	-	4	8	8	8		
		5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (14 Kab/Kota)	-	-	-	21	43	64		
		6 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak	Lemb	-	-	30	50	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kesehatan Anak yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM)	SDM	-	-	10	30	50	80		
		7 Jumlah laporan survei anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (4 lap)		-	-	1	1	1	1		
		8 Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (2 Sub Sistem data)		-	-	50	50	100	100		
		9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)		-	-	1	2	1	2		
B.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1 Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	18	21	21	15	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (46 Kebijakan)		-	-	20	39	59	78		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (5 Model)		-	-	2	3	-	-		
		4 Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (40 kab/kota)		-	-	0	10	15	15		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		5 Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak (20 Kab/Kota)		-	-	-	25	50	75		
		6 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi (8 Lembaga, 200 SDM)	Lemb	-	-	13	25	50	75		
			SDM	-	-	5	30	50	65		
		7 Jumlah laporan survei anak bidang Partisipasi Anak (5 laporan)		-	-	1	1	1	1		
		8 Persentase sub sistem data Partisipasi Anak (1 Sub Sistem)		-	-	50	50	100	100		
		9 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)		-	-	1	2	1	2		
B.4	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL	1 Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	15	20	31	22	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (67 Kebijakan)		-	-	25	55	70	85		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (5 Model)		-	-	2	3	-	-		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL (10 Kab/Kota)		-	-	0	10	10	10		
		5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi (30 Lembaga; 300 SDM)	Lemb	-	-	0	27	50	80		
			SDM	-	-	5	30	55	85		
		6 Jumlah laporan survei anak bidang Lingkungan dan PNLL (4 Laporan)		-	-	1	1	1	1		
		7 Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL (3 sub sistem)		-	-	50	50	100	100		
B.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	8 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu (7 Laporan)		-	-	1	2	1	2	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		1 Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	11	30	31	31		
		2 Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 Kebijakan)		-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (5 Model)		-	-	2	3	-	-		
		4 Jumlah pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (100 kab/kota)		-	-	5	25	25	25		
		5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi (100 lembaga ; 400 SDM)	Lemb	-	-	10	40	70	90		
			SDM	-	-	10	40	70	90		
		6 Jumlah laporan survei anak bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (4 laporan)		-	-	1	1	1	1		
		7 Persentase sub-sistem data Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (1 sub sistem data)		-	-	50	50	100	100		
		8 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu (6 Laporan)		-	-	1	2	1	2		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1	Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	-	-	5	2	2	-	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2	Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (10 kebijakan)	-	-	20	40	60	80		
		3	Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	-	-	1	5	2	-		
		4	Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	K/L	-	-	1	5	5		
				Pemda	-	-	1	12	14		
		5	Persentase SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi (33 SDM)	-	-	24	48	73	100		
		6	Jumlah laporan survei bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak	-	-	3	5	5	5		
		7	Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak (24 sub sistem)	-	-	17	38	54	75		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu	-	-	2	4	2	4		
B.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak	1 Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	-	-	3	4	3	4	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan)	-	-	20	40	60	80		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	-	-	-	3	3	-		
		4 Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	K/L	-	-	-	4	4		
			Pemda	-	-	-	6	8		
		5 Persentase lembaga penyedia layanan penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi (8 lembaga)	-	-	13	25	50	75		
		6 Jumlah laporan survei bidang Penanganan Masalah Sosial Anak	-	-	2	2	2	2		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		7 Persentase sub sistem data bidang penanganan masalah sosial anak (4 subsistem)		-	-	25	50	75	100		
		8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan tepat waktu		-	-	1	2	1	2		
B.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1 Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan		-	-	3	2	1	1	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 kebijakan)		-	-	20	40	60	80		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH		-	-	-	2	2	2		
		4 Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	KL	-	-	-	-	2	2		
			Prov	-	-	-	-	4	4		
		5 Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM)	Lemb	-	-	-	50	50	100		
			SDM	-	-	25	50	75	100		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		6 Jumlah laporan survei bidang Penanganan ABH	-	-	1	1	1	1		
		7 Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH (4 Sub sistem)	-	-	20	40	60	80		
		8 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu	-	-	1	1	1	1		
B.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1 Jumlah kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	-	-	1	1	1	1	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2 Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda (4 Kebijakan)	-	-	20	40	60	80		
		3 Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	-	2	-	-		
		4 Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	K/L	-	-	2	2	4		
			Pemda	-	-	4	6	8		
		5 Persentase lembaga dan SDM nenvedia lavanan Anak	Lemb	-	-	50	50	100		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		penyediaan layanan Anak Berkebutuhan Khusus yang distandarisasi (2 Lembaga dan 100 SDM	SDM	-	-	25	50	75	100		
		6	Jumlah laporan survei bidang penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	1	1	1	1		
		7	Persentase sub sistem data bidang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (4 Sub Sistem)	-	-	0	25	50	75		
		8	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang diselesaikan tepat waktu	-	-	1	1	1	1		
B.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak	1	Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	-	-	5	1	1	1	Program Perlindungan Anak	Kementerian PP dan PA
		2	Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi antar KL dan Pemda (5 Kebijakan)	-	-	20	40	60	80		
		3	Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	-	-	-	3	-	-		
		4	Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model	K/L	-	-	3	3	3		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		5	Indikator dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi (2 Lembaga)	-	-	-	10	10	10		
		6	Jumlah laporan survei bidang pemenuhan hak Sipil anak	-	-	2	2	2	2		
		7	Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak Sipil anak (Sub sistem)	-	-	25	50	75	100		
		8	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu	-	-	1	3	2	3		
B.11	Penguatan Kelembagaan PUHA di provinsi	1	Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan anak	-	-	28	33	33	33		
B.12	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)	1	Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA	-	-	9	15	20	26	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PP & PA	Kementerian PP dan PA
		2	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA	-	-	9	15	20	26		
		3	Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden	-	-	2	2	2	2		

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	RENCANA 2015	PERKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		4 Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (150 pengaduan)	-	-	20	40	60	80		

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara									
A	FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat									
1	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien	1,00	1,00	*	*	*	*	Pengelolaan Anggaran Negara	Kementerian Keuangan
		Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L			20%	20%	20%	20%		
2	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu	1,00	1,00	*	*	*	*	Pengelolaan Anggaran Negara	Kementerian Keuangan
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap			100%	100%	100%	100%		
3	Pengembangan Sistem Penganggaran	Tersedianya norma penganggaran PBK dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu	1,00	1,00	*	*	*	*	Pengelolaan Anggaran Negara	Kementerian Keuangan
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran			100%	100%	100%	100%		
B	FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan									
1	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah	Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah	100%	100%	*	*	*	*	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kementerian Keuangan
		Persentase Jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana	100%	100%						
		Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson)			0,76 (Skala 1)	0,76 (Skala 1)	0,76 (Skala 1)	0,76 (Skala 1)		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah			99%	99%	99%	99%		
2	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kementerian Keuangan
3	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kementerian Keuangan
		Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah aparat pemerintah daerah yang lulus kursus keuangan daerah sesuai rencana	100%	100%						
		Persentase kelulusan peserta KKD/KDK yang bersertifikat			95%	95%	95%	95%		
4	Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kementerian Keuangan
		Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah tepat waktu	100%	100%	*	*	*	*		
		Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, dan LO			50%	50%	50%	50%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
C	FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara									
1	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIP A K/L	91%	91%	91%	91%	91%	91%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
		Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran	90%	90%	*	*	*	*		
		Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	66,70%	66,70%						
		Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review			3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)		
		Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran			90%	90%	90%	90%		
2	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas	4.1T	4.1T	2.6 T	2.6 T	2.6 T	2.6 T	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
		Persentase (%) tingkat akurasi rencana penyediaan dana dengan pengeluaran dana pada rekening Kas Negara	99%	99%	*	*	*	*		
		Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan Kas	90%	90%						
		Indeks Deviasi Realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan			3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)		
		Persentase Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana untuk Membiayai Pengeluaran Negara			97%	97%	97%	97%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
		Persentase Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase (%) penyaluran dana di bidang investasi , subsidi, dan pembiayaan secara optimal	85%	85%	*	*	*	*		
		Persentase Penyaluran Dana di Bidang investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal (termasuk KUR)			90%	90%	90%	90%		
4	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu	3 (skala 4)	3 (skala 4)	*	*	*	*	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
		Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik	WTP:82LK, WDP:2LK	WTP:82LK, WDP:2LK	*	*	*	*		
		Persentase (%) monitoring dan evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	*	*	*	*		
		Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu			3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)		
		Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan Opini Audit yang Baik			WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88	WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88	WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88	WTP:77LK, WDP:10LK Indeks:3,88		
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Persentase (%) tingkat penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang mendukung SPAN	100%	100%	*	*	*	*	Pengelolaan Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
		Persentase (%) tingkat kesiapan implementasi aplikasi SPAN dan SAKTI	100%	100%	*	*	*	*		
		Persentase (%) tingkat penyelesaian rancangan (design) strategi pengelolaan perubahan	100%	100%	*	*	*	*		
		Persentase Tingkat Penyelesaian Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI			100%	100%	100%	100%		
		Persentase Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI			100%	100%	100%	100%		
		Persentase Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN			100%	100%	100%	100%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
D	FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara									
1	Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara	Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang BMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kementerian Keuangan
		Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat waktu	3,00	3,00						
		Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP			2%	2%	2%	1%		
		Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan	Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang KND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kementerian Keuangan
		Indeks opini BPK atas BA 999.03	WTP	WTP						
		Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan			90%	90%	90%	92%		
		Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu	90%	90%	95%	100%	100%	100%		
3	Perumusan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain	Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kementerian Keuangan
		Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	40,29M	40,29M	*	*	*	*		
		Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah	402M	402M	*	*	*	*		
		Recovery rate piutang K/L			11%	12%	13%	14%		
		Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara			47,17 M	43,54 M	47,36 M	52,16 M		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	Nilai Kekayaan Negara yang diutlisasi	75T	75T	90 T	95 T	100 T	105 T	Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang	Kementerian Keuangan
		Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN	375M	375M	350 M	325 M	300 M	183 M		
		Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis	80%	80%						
		Persentase pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara			80%	85%	90%	95%		
II	Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan									
A	FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko									
1	Penyusunan Rancangan APBN	Tersusunnya draft NK, RAPBN dan UU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu	1,00	1,00	*	*	*	*	Pengelolaan Anggaran Negara	Kementerian Keuangan
		Akurasi Perencanaan APBN			80%	80%	80%	80%		
2	Perumusan kebijakan APBN	Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Perumusan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan
		Persentase deviasi proyeksi APBN	6%	6%	*	*	*	*		
		Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN			5%	5%	5%	5%		
3	Perumusan kebijakan ekonomi	Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang diterima dan/atau ditetapkan Menteri Keuangan	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Perumusan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan
		Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro	6%	6%	*	*	*	*		
		Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro			5%	5%	5%	5%		
4	Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan	Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang diterima dan/atau ditetapkan Menteri Keuangan	86%	86%	86%	86%	86%	86%	Perumusan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan
		Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan	90%	90%	*	*	*	*		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal			23	23	23	23		
5	Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai dan PNPB	Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Perumusan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan
		Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan	80%	80%	*	*	*	*		
6	Pengelolaan Pinjaman	Persentase pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kementerian Keuangan
7	Pengelolaan Surat Utang Negara	Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kementerian Keuangan
8	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kementerian Keuangan
9	Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang	Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kementerian Keuangan
10	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen	Persentase pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	Kementerian Keuangan

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
B	FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara									
1	Pengelolaan PNPB dan subsidi	Tertindakannya penyempurnaan kebijakan dan peraturan di bidang PNPB dan subsidi energi agar lebih cepat dan efisien	1,00	1,00	*	*	*	*	Pengelolaan Anggaran Negara	Kementerian Keuangan
		Tertindakannya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah	1,00	1,00	*	*	*	*		
		Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNPB dan Subsidi Energi			100%	100%	100%	100%		
2	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP dan Bea Materai	Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I	100%	100%	*	*	*	*	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
		Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I	100%	100%	*	*	*	*		
		Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan			100%	100%	100%	100%		
		Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak			100%	100%	100%	100%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional	Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II	100%	100%	*	*	*	*	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
		Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II	100%	100%	*	*	*	*		
		Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan			100%	100%	100%	100%		
		Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak			100%	100%	100%	100%		
4	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	75%	75%					Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
		Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)			100%	100%	100%	100%		
		Persentase Pencairan Piutang Pajak	35%	35%	35%	35%	35%	35%		
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,94 (Skala 4)	3,94 (Skala 4)	3,94 (Skala 4)	3,94 (Skala 4)	3,94 (Skala 4)	3,94 (Skala 4)	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
6	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategi DIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
7	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat/diperbaharui	100%	100%	*	*	*	*	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
		Indeks Kepuasan Stakeholder			70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)		
8	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	Persentase penyelesaian jumlah data yang ditransfer	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
9	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan	100%	100%	*	*	*	*	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan
		Indeks ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean	3 (tepat waktu)	3 (tepat waktu)	3,1 (tepat waktu)	3,1 (tepat waktu)	3,1 (tepat waktu)	3,1 (tepat waktu)		
		Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan			3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)		
		Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi			50%	50%	50%	50%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
10	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	54%	54%	60%	60%	60%	60%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan
		Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP	40%	40%	55%	55%	55%	55%		
		Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan	60%	60%	75%	75%	75%	75%		
11	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan
		Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai	75%	75%	*	*	*	*		
		Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan			78%	78%	78%	78%		
		Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding			77%	77%	78%	78%		
		Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya			18%	18%	18%	18%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
C	FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN									
1	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Primer I	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer I	3	3	3	3	3	3	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer I tepat waktu	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer I	6,86T	6,86T	6,86T	7,54T	8,30T	8,30T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer I	1,97T	1,97T	1,97T	2,16T	2,38T	2,38T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer I	15,00%	15,00%	15,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer I	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
2	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Primer II	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer II	2	2	2	2	2	2	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer II tepat waktu	5	5	5	5	5	5		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer II	0,93T	0,93T	0,93T	1,03T	1,13T	1,13T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer II	14,78M	14,78M	14,78M	16,26M	7,88M	7,88M		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer II	14,00%	14,00%	14,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer II	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Primer III	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Primer III	0	0	0	1	1	1	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer III tepat waktu	6	6	6	6	6	6		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer III	2,70T	2,70T	2,70T	2,97T	3,26T	3,26T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer III	2,65T	2,65T	2,65T	2,91T	3,20T	3,20T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer III	29,40%	29,40%	29,40%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri primer III	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
4	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I	2	2	2	2	2	2	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu	8	8	8	8	8	8		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I	13,0T	13,0T	13,0T	14,3T	15,73T	15,73T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I	2,6T	2,6T	2,6T	2,86T	3,15T	3,15T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I	2,00%	2,00%	2,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
		Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II	2	2	2	2	2	2		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II	Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu	10	10	10	10	10	10	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II	60T	60T	60T	66T	72,6T	72,6T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II	8,82T	8,82T	8,82T	9,7T	10,67T	10,67T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II	6%	6%	6%	6,50%	7,00%	7,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
6	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III	2	2	2	2	2	2	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu	11	11	11	11	11	11		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III	10,4T	10,4T	10,4T	11,44T	12,58T	12,58T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III	2,25T	2,25T	2,25T	2,48T	2,72T	2,72T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III	16,40%	16,40%	16,40%	13,34%	14,00%	14,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
7	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumn Sektor Infrastruktur dan Logistik I	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I	0	0	0	0	0	0	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I tepat waktu	8	8	8	8	8	8		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I	3,28T	3,28T	3,28T	3,60T	3,96T	3,96T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I	3,25T	3,25T	3,25T	3,58T	3,93T	3,93T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I	27,90%	27,90%	27,90%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
8	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Infrastruktur dan Logistik II	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II	0	0	0	0	0	0	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II tepat waktu	11	11	11	11	11	11		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II	3,95T	3,95T	3,95T	4,35T	4,78T	4,78T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II	0,7M	0,7M	0,7M	0,77M	0,85M	0,85M		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II	-84,00%	16,00%	16,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik II	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
9	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Infrastruktur dan Logistik III	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III	0	0	0	0	0	0	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III tepat waktu	23	23	23	23	23	23		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III	6,10T	6,10T	6,10T	6,71T	7,39T	7,39T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III	0,56T	0,56T	0,56T	0,62T	0,68T	0,68T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III	20,00%	20,00%	20,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usahaInfrastruktur dan Logistik III	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
10	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa I	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa I	0	0	0	1	1	1	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa I tepat waktu	9	9	9	9	9	9		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa I	16,47T	16,47T	16,47T	18,41T	20,25T	20,25T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa I	8,93T	8,93T	8,93T	9,82T	10,8T	10,8T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa I	16,00%	16,00%	16,00%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa I	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
11	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa II	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa II	0	0	0	0	0	0	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa II tepat waktu	15	15	15	15	15	15		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa II	1,14T	1,14T	1,14T	1,26T	1,38T	1,38T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa II	0,53T	0,53T	0,53T	0,58T	0,64T	0,64T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa II	21,00%	21,00%	21,00%	21,21%	21,42%	21,42%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa II	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
12	Profitisasi dan Restrukturisasi Bumh Sektor Jasa III	Jumlah riset/kajian di Bidang Usaha Jasa III	3	3	3	3	3	3	Program Pembinaan BUMN	Kementerian BUMN
		Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa III tepat waktu	11	11	11	11	11	11		
		Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa III	3,06T	3,06T	3,06T	3,37T	3,7T	3,7T		
		Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa III	0,11T	0,11T	0,11T	0,13T	0,14T	0,14T		
		Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa III	14,32%	14,32%	14,32%	17,50%	20,00%	20,00%		
		Nilai Skor rata-rata GCG BUMN bidang usaha Jasa III	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
III	Prioritas: Stabilitas Moneter									
A	FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar									
1	Koordinasi Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan moneter, NP dan ketenagakerjaan yang tepat waktu	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
2	Koordinasi Kebijakan Pangan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
3	Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
4	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
5	Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi yang	75%	75%	75%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
6	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi	75%	75%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
IV	Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha									
A	FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi									BKPM
1	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	001 Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE	Pengembangan master data perijinan	Pengembangan master data perijinan	1 paket sistem	1 paket sistem	1 paket sistem	1 paket sistem	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	BKPM
		002 Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE dan <i>tracking system</i>	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota		
		003 Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE			1 paket sistem	1 paket sistem	1 paket sistem	1 paket sistem		
		004 Jumlah provinsi dan Kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Pengembangan 1 paket GIS, <i>data center</i> dan DRC	Pengembangan 1 paket GIS, <i>data center</i> dan DRC	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota		
2	Peningkatan Dereglulasi Kebijakan Penanaman Modal	001 Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur Penanaman Modal	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah Rumusan Penyempurnaan dan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	1 rumusan	1 rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan	1 paket rumusan		
		003 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	40 kegiatan	40 kegiatan	43 kegiatan	45 kegiatan	47 kegiatan	50 kegiatan		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional	001 Rekomendasi Pengembangan PTSP Nasional	-	-	1 rekomendasi	-	-	-	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	76,03 Triliun (15% dari 506,9 Triliun)	76,03 Triliun (15% dari 506,9 Triliun)	14% dari 555T	14% dari 555 T	14% dari 555 T	14% dari 555 T	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah aparaturnya daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan <i>workshop</i> LKPM online dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	10 Daerah	10 Daerah	700 orang di 10 provinsi	725 orang di 10 provinsi	750 orang di 10 provinsi	775 orang di 10 provinsi		
		003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	10 daerah	10 daerah	40 perusahaan di 10 daerah	45 perusahaan di 10 daerah	50 perusahaan di 10 daerah	55 perusahaan di 10 daerah		
		004 Terselenggaranya pemberian penghargaan investasi kepada perusahaan PMA dan PMDN	1 paket	1 paket	-	1 paket	-	1 paket		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	151,8 Triliun (30% dari 506,9 Triliun)	151,8 Triliun (30% dari 506,9 Triliun)	31% dari 555 T	31% dari 555 T	31% dari 555 T	31% dari 555 T	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah aparaturn daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan <i>workshop</i> LKPM <i>online</i> dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	6 Daerah	6 Daerah	540 orang di 7 provinsi	560 orang di 7 provinsi	580 orang di 7 provinsi	600 orang di 7 provinsi		
		003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	6 daerah	6 daerah	40 Perusahaan di 7 daerah	45 Perusahaan di 7 daerah	50 Perusahaan di 7 daerah	55 Perusahaan di 7 daerah		
6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wilayah III	001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	177,4 Triliun (35% dari 506,9 Triliun)	177,4 Triliun (35% dari 506,9 Triliun)	34% dari 555 T	34% dari 555 T	34% dari 555 T	34% dari 555 T	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah aparaturn daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan <i>workshop</i> LKPM <i>online</i> dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	9 Daerah	9 Daerah	1.050 orang di 9 provinsi	1.103 orang di 9 provinsi	1.158 orang di 9 provinsi	1.216 orang di 9 provinsi		
		003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	9 Daerah	9 Daerah	120 perusahaan di 9 daerah	132 perusahaan di 9 daerah	145 perusahaan di 9 daerah	160 perusahaan di 9 daerah		
		004 Penyediaan Sarana Data Realisasi Investasi Di Prov dan Kab/kota yang terhubung dengan database SPPIPISE			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	001 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	101,38 Triliun (20% dari 506,9 Triliun)	101,38 Triliun (20% dari 506,9 Triliun)	21% dari 555 T	21% dari 555 T	21% dari 555 T	21% dari 555 T	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah aparaturnya daerah dan penanam modal yang mendapatkan bimbingan/fasilitasi penyelesaian masalah dan <i>workshop</i> LKPM <i>online</i> dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	8 daerah	8 daerah	610 orang di 8 provinsi	740 orang di 8 provinsi	830 orang di 8 provinsi	920 orang di 8 provinsi		
		003 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	8 daerah	8 daerah	40 perusahaan di 8 daerah	60 perusahaan di 8 daerah	70 perusahaan di 8 daerah	80 perusahaan di 8 daerah		
		004 Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh kabupaten/kotapada 33 provinsi dalam rangka dekonsentrasi	32 Provinsi	32 Provinsi	1.428 proyek	1.428 proyek	1.904 proyek	1.904 proyek		
8	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	001 Jumlah PTSP-PM yang mendapatkan penilaian kualifikasi kelembagaannya	Peserta : 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: 1. Tingkat Pertama 2. Tingkat Lanjutan 3. Sektoral 4. Koprehensif	Peserta : 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: 1. Tingkat Pertama 2. Tingkat Lanjutan 3. Sektoral 4. Koprehensif	-	552 PTSP Provinsi/Kabupaten/kota	-	552 PTSP Provinsi/Kabupaten/kota	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
9	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
B.	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Investasi	Pertumbuhan PMDN(%)			13,3%					
		Pertumbuhan PMA (%)			7,4%					
1	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	001 Jumlah informasi Data Potensi Daerah Yang Mutakhir Yang Didokumentasikan Secara Elektronik	33 Provinsi	33 Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah <i>workshop</i> pengembangan potensi daerah	Sosialisasi 3 Daerah dan <i>Workshop</i> 5 Daerah	Sosialisasi 3 Daerah dan <i>Workshop</i> 5 Daerah	<i>Workshop</i> 5 Daerah	<i>Workshop</i> 5 Daerah	<i>Workshop</i> 5 Daerah	<i>Workshop</i> 5 Daerah		
		003 Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	1 Laporan Kajian dan 15 Peta Potensi Daerah	1 Laporan Kajian dan 15 Peta Potensi Daerah	Sosialisasi 5 daerah	Sosialisasi 5 daerah	Sosialisasi 5 daerah	Sosialisasi 5 daerah		
		004 Jumlah kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah			15 laporan kegiatan pemetaan	15 laporan kegiatan pemetaan	15 laporan kegiatan pemetaan	15 laporan kegiatan pemetaan		
2	Pemberdayaan Usaha Nasional	001 Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional	5 Daerah	5 Daerah	6 daerah	7 daerah	7 daerah	8 daerah	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah Pelaksanaan <i>Matchmaking</i> di Dalam dan Luar Negeri	6 Daerah dan 6 Negara	6 Daerah dan 6 Negara	6 daerah dan 6 negara	7 daerah dan 7 negara	7 daerah dan 7 negara	8 daerah dan 8 negara		
		003 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK	6 Daerah	6 Daerah	6 daerah	7 daerah	7 daerah	8 daerah		
		004 Jumlah UKM Potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	1 Set	1 Set	2 set kajian	2 set kajian	2 set kajian	2 set kajian		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	001 Pemetaan kebijakan dan insentif penanaman modal negara pesaing.	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Pemetaan kebijakan dan potensi penanaman modal negara target	250 target investor potensial	250 target investor potensial	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan		
		003 Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan		
		004 Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri IIPC/Indonesian Investment Promotion Center	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> (IIPC) di 11 negara	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> (IIPC) di 11 negara	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> (IIPC) di 11 negara	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> di (IIPC) di 11 negara	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> (IIPC) di 11 negara	Penyelenggaraan <i>the Indonesian Investment Promotion Center</i> (IIPC) di 11 negara		
		005 Perumusan kebijakan promosi penanaman modal			1 laporan rumusan	1 laporan rumusan	1 laporan rumusan	1 laporan rumusan		
4	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri	001 Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi <i>Stakeholder</i> di Tingkat Pusat dan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
		003 Kegiatan Rebranding Investasi Indonesia melalui Media Internasional dan Media Nasional	4 media internasional elektronik, 1 media internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak	4 media internasional elektronik, 1 media internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak	4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak	4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak	4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak	4 media internasional elektronik, 1 media Internasional cetak, 2 media nasional elektronik, 3 media nasional cetak		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal	001 Jumlah Fasilitas Promosi Investasi Daerah di Dalam Negeri dan Luar Negeri	33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	33 Instansi PM Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 jumlah Fasilitas Pelayananan Penerimaan Misi Penanaman Modal Luar Negeri di Pusat dan di Daerah Tempat tujuan Rencana Penanaman Modal	Misi Investasi 45 kali di pusat dan daerah	Misi Investasi 45 kali di pusat dan daerah	Misi investasi asing 45 kali	Misi investasi asing 45 kali	Misi investasi asing 45 kali	Misi investasi asing 45 kali		
		003 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam negeri	Promosi investasi di 10 negara	Promosi investasi di 10 negara	6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali <i>workshop</i>	6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali <i>workshop</i>	6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali <i>workshop</i>	6 kali talkshow di TV nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), 2 kali seminar investasi dan 2 kali <i>workshop</i>		
6	Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal	001 Jumlah Laporan Tentang Partisipasi Aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama regional	33 Laporan	33 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah Laporan Bahan Posisi Perundingan dalam rangka kerjasama regional	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
		003 Jumlah Peserta Sosialisasi Hasil-Hasil Perundingan Kerjasama Regional	225 Orang	225 Orang	225 orang	225 orang	225 orang	225 orang		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
7	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	001 Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan waktu tertentu	100%	100%	4000 Perizinan	4000 Perizinan	4000 Perizinan	4000 Perizinan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (<i>advising</i>) mengenai pelayanan perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	100%	100%	3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi	3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi	3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi	3 kali kunjungan (ke daerah) dan 12 penerimaan konsultasi		
		003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	100%	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali		
8	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal	001 Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu	100%	100%	1.000 persetujuan	1.100 persetujuan	1.210 persetujuan	1.330 persetujuan	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal	100%	100%	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali		
		003 Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal (<i>capacity building</i>)	100%	100%	8 materi (dalam negeri dan luar negeri)	8 materi (dalam negeri dan luar negeri)	8 materi (dalam negeri dan luar negeri)	8 materi (dalam negeri dan luar negeri)		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
9	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	001 Jumlah fasilitas persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur	1 paket kebijakan perencanaan investasi (5 rekomendasi)	1 paket kebijakan perencanaan investasi (5 rekomendasi)	Fasilitasi 10 proyek	Fasilitasi 10 proyek	Fasilitasi 10 proyek	Fasilitasi 10 proyek	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
		002 Jumlah proyek KPS Infrastruktur yang akan ditawarkan (<i>ready to offer</i>)	Fasilitasi 10 proyek	Fasilitasi 10 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek		
		003 jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur	3 proyek	3 proyek	7 kegiatan pemasaran	7 kegiatan pemasaran	7 kegiatan pemasaran	7 kegiatan pemasaran		
10	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur	001 Jumlah kajian perencanaan pengembangan penambahan modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di bidang infrastruktur	5 Rekomendasi/ Kajian	5 Rekomendasi/ Kajian	5 Rekomendasi/ Kajian	5 Rekomendasi/ Kajian	5 Rekomendasi/ Kajian	5 Rekomendasi/ Kajian	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
11	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan PDT	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
12	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI)	Persentase rekomendasi kebijakan MP3EI yang diimplementasikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
13	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Persentase Hasil Koordinasi Kebijakan/Peraturan KEK yang terselesaikan	75%	75%	75%	80%	85%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
		Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan	1	1	1	1	1	1		
14	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi terkait infrastruktur prioritas yang ditindak lanjuti	-	-	80%	80%	85%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
15	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi	Prosentase Rekomendasi Kebijakan pengembangan iklim investasi yang terimplementasikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
V	Prioritas: Peningkatan Ekspor Untuk Mendukung Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas									
A	FOKUS : Mengamankan Pangsa Ekspor di Pasar Tradisional									
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Persentase peningkatan pemanfaatan hasil perundingan			5%	5%	5%	5%	PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	KEMENDAG
		Rata-rata terbobot penurunan tarif di negara mitra			0,45	0,45	0,45	0,45		
		Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional	25 hasil perundingan	25 hasil perundingan	25 hasil perundingan	38 hasil perundingan	38 hasil perundingan	38 hasil perundingan		
		Jumlah posisi runding yang disusun	35 posisi runding	35 posisi runding	30 posisi runding	61 posisi runding	61 posisi runding	61 posisi runding		
		Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri	10 sidang	10 sidang	15 sidang	15 sidang	15 sidang	15 sidang		
		Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional	5 sosialisasi	5 sosialisasi	9 sosialisasi	9 sosialisasi	9 sosialisasi	9 sosialisasi		
		Jumlah Publikasi kerja sama perdagangan internasional	5 publikasi	5 publikasi	17 publikasi	17 publikasi	17 publikasi	17 publikasi		
		Pengembangan pusat AEC (AEC center)			1	1	1	1		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN	Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard	0,9	0,9	90				PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	KEMENDAG
		Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi)	80 hasil perundingan	80 hasil perundingan	80 hasil perundingan	80 hasil perundingan	80 hasil perundingan	80 hasil perundingan		
		Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan Negara anggota ASEAN	80 perundingan	80 perundingan	80 perundingan	80 perundingan	80 perundingan	80 perundingan		
		Jumlah posisi runding yang disusun	80 posisi runding	80 posisi runding	80 posisi runding	80 posisi runding	80 posisi runding	80 posisi runding		
		Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN	3 isu	3 isu	3 isu	3 isu	3 isu	3 isu		
		Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog dan bilateral dengan Negara anggota ASEAN yang diratifikasi	-	-	3 proses ratifikasi	3 proses ratifikasi	3 proses ratifikasi	3 proses ratifikasi		
3	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	Jumlah publikasi promosi ekspor			23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah UKM Daerah yang dibina			66 UKM	66 UKM	66 UKM	66 UKM		
		Jumlah dukungan teknis kantor ITPC			10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg		
		Jumlah pemenang penghargaan			40 Pemenang	40 Pemenang	40 Pemenang	40 Pemenang		
		Jumlah kebijakan	2	2	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan		
		Jumlah promosi ITPC	91	91	57 Pameran	57 Pameran	57 Pameran	57 Pameran		
		Jumlah pengamatan pasar ITPC	241	241	190 Laporan	190 Laporan	190 Laporan	190 Laporan		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
B.	FOKUS : Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional									
1	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral	Hasil perundingan kerja sama perdagangan bilateral	55 hasil perundingan	55 hasil perundingan	55 hasil perundingan	60 hasil perundingan	60 hasil perundingan	60 hasil perundingan	PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah posisi runding yang disusun	60 posisi runding	60 posisi runding	60 posisi runding	65 posisi runding	65 posisi runding	65 posisi runding		
		Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang diratifikasi	2 proses ratifikasi	2 proses ratifikasi	2 proses ratifikasi	2 proses ratifikasi	2 proses ratifikasi	2 proses ratifikasi		
		Jumlah konsultasi publik dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional	8 konsultasi publik	8 konsultasi publik	10 konsultasi publik	10 konsultasi publik	10 konsultasi publik	10 konsultasi publik		
2	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard	18 submisi	18 submisi	20 submisi	20 submisi	20 submisi	20 submisi	PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	KEMENDAG
		Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang	11 kali	11 kali	5 kali	13 kali	13 kali	13 kali		
		Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan	7 laporan	7 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan		
		Pembuatan dan pengelolaan database hambatan perdagangan	5 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis		
3	Pengembangan Promosi dan Citra	Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti	35	35	19 Promosi	19 Promosi	19 Promosi	19 Promosi	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah partisipasi pameran dagang di dalam negeri	8	8	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi		
		Jumlah kegiatan pencitraan	5	5	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg		
4	Koordinasi Kebijakan Perdagangan LN dan Kepariwisata	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perdagangan LN	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
C.	FOKUS : Mengidentifikasi Peluang Pasar Ekspor Produk dan Jasa Potensial									
1	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database	4500	4500	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran virtual Ditjen PEN	35	35	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap		
		Jumlah pengunjung website Ditjen PEN	65000	65000	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg		
2	Pengembangan Produk Ekspor	Jumlah Referensi produk ekspor	3	3	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah kegiatan pengembangan produk ekspor			62 Keg	62 Keg	62 Keg	62 Keg		
		Jumlah kegiatan pengembangan produk kreatif			5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg		
		Jumlah produk yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI	75	75	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg		
3	Pengembangan SDM Bidang Ekspor	Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor	100	100	120 angkatan	120 angkatan	120 angkatan	120 angkatan	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	KEMENDAG
		Jumlah kerjasama diklat ekspor			2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg		
		Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat	10	10	10 Kurikulum	10 Kurikulum	10 Kurikulum	10 Kurikulum		
		Jumlah kegiatan promosi kegiatan BBPPEI	50	50	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan		
		Jumlah kegiatan temu alumni	100	100	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
		Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni	7	7	7 Pameran	7 Pameran	7 Pameran	7 Pameran		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa	Persentase Peningkatan Ekspor Jasa			5%	5%	5%	5%	PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	KEMENDAG
		Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional			38 hasil perundingan	38 hasil perundingan	38 hasil perundingan	38 hasil perundingan		
		Jumlah posisi runding yang disusun			40 posisi runding	40 posisi runding	40 posisi runding	40 posisi runding		
5	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan integrasi dalam ASW	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
6	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah	Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan	80%	80%	85%	90%	90%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
7	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan	80%	80%	85%	90%	90%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
8	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Regional (ASEAN dan APEC) dan SubRegional	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Regional yang diimplementasikan	80%	80%	85%	90%	90%	90%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
D.	FOKUS : Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional									
1	Pengelolaan Impor	Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya	10 JENIS	10 JENIS	10 JENIS	10 JENIS	10 JENIS	10 JENIS		
		Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT)	5000 IT	5000 IT	2000 IT	5000 IT	5000 IT	5000 IT		
		Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)	2800 IP	2800 IP	1000 IP	2800 IP	2800 IP	2800 IP		
		Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)	4000 SPI	4000 SPI	3000 SPI	4000 SPI	4000 SPI	4000 SPI		
		Jumlah bimbingan teknis di bidang impor	5 KEG	5 KEG	5 KEG	5 KEG	5 KEG	5 KEG		
		Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
2	Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan	Jumlah Rumusan Standar Jasa Bidang Perdagangan	2 rumusan	2 rumusan	1 RSNI	1 RSNI	1 RSNI	1 RSNI	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KEMENDAG
		Jumlah Draft Regulasi Teknis Standardisasi Bidang Perdagangan	1	1	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft		
		Jumlah Contoh Standar Produk			2 Contoh Standar	2 Contoh Standar	2 Contoh Standar	2 Contoh Standar		
		Jumlah Identifikasi Pemenuhan Standar/Regulasi Teknis			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
		Jumlah Negosiasi Standardisasi			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		
		Jumlah Informasi Standar Negara Tujuan Ekspor			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Jumlah Peserta yang Memahami Standardisasi			400 Peserta	400 Peserta	400 Peserta	400 Peserta		
		Jangka Waktu Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)			5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
VI	Prioritas: Penguatan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Mendukung Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi									
A	FOKUS: Meningkatkan Fasilitas Perdagangan									
1	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah peraturan terkait dengan KEK	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan		
2	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor;	2 Peraturan	2 Peraturan	3Peraturan	3Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ;	2 KEG	2 KEG	2 KEG	2 KEG	2 KEG	2 KEG		
		Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE	4500 PERUS	4500 PERUS	6000 PERUS	4500 PERUS	4500 PERUS	4500 PERUS		
		Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan;	5 KEG	5 KEG	36 KEG	36 KEG	36 KEG	36 KEG		
		Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan;	30 KEG	30 KEG	42 KEG	60 KEG	60 KEG	60 KEG		
		Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri;	10 KEG	10 KEG	20 KEG	17 KEG	17 KEG	17 KEG		
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan	5 laporan	5 laporan	6 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan		
		Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi	900000 SKA	900000 SKA	900000 SKA	900000 SKA	900000 SKA	900000 SKA		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah	4 keg	4 keg	3keg	5 keg	5 keg	5 keg	PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	KEMENDAG
		Layanan fasilitas perdagangan luar negeri daerah	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		
		Fasilitas promosi dan diklat ekspor	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg		
		Tersedianya informasi produk potensial daerah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku		
		Sosialisasi AEC 2015	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
		Jumlah Penyelenggaraan P3ED			5 Kantor	5 Kantor	5 Kantor	5 Kantor		
4	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Tersedianya data dan informasi perdagangan dalam negeri	3 jenis	3 jenis	33	33	33	33	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Fasilitas Pemasaran Produk Unggulan Daerah	2 keg	2 keg	33	33	33	33		
		Penyelenggaraan Pasar Murah	2 kali	2 kali	33	33	33	33		
		Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah	1 keg	1 keg	11	11	11	11		
		Pemberdayaan perlindungan konsumen	3 keg	3 keg	2	2	2	2		
		Pengawasan metrologian	3 keg	3 keg	1	1	1	1		
		Pengawasan barang beredar dan jasa	1 keg	1 keg	2	2	2	2		
		Administrasi Penunjang Kegiatan			33	33	33	33		
		Pelaksanaan Pasar Lelang di daerah	6 kali	6 kali	13	13	14	14		
		Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	1 kali	1 kali	13	13	14	14		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
B	FOKUS: Meningkatkan Perlindungan Konsumen									
1	Peningkatan Tertib Ukur	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan pertengkapannya (UTTIP) yang telah di tera – tera ulang nasional			50 Persen	57 persen	64 persen	72 persen	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KEMENDAG
		Persentase Jumlah UPT dan UPTD yang telah mengimplementasikan Sistem Mutu			20 Persen	25 persen	30 persen	35 persen		
		Persentase pelayanan kemetrologian yang selesai tepat waktu			80 persen	85 persen	90 Persen	95 persen		
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengakuan Hukum di Bidang Metrologi Legal			5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan		
		Persentase peran serta masyarakat dalam metrologi legal			10 persen	13 persen	16 persen	19 persen		
2	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Pedoman/ Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			8 pedoman	8 pedoman	8 pedoman	8 pedoman	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KEMENDAG
		Jumlah produk yang diawasi yang sesuai ketentuan (SNI Wajib, Label, Manual Kartu Garansi, Distribusi, Jasa)	10 jenis (600 produk)	10 jenis (600 produk)	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis		
		Jumlah Forum Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Pengawasan			3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		
		Jumlah PPNS-PK dan PPBJ	1805 orang	1805 orang	120 Orang	120 orang	120 orang	120 orang		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Peningkatan Pengawasan Mutu Barang	Persentase penurunan pelanggaran di bidang pengawasan mutu barang			88%	86%	83%	81%	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KEMENDAG
		Jumlah barang teregistrasi yang SNI-nya diberlakukan secara wajib			23100 NPB,SPB,NRP	24750 NPB,SPB,NRP	26400 NPB,SPB,NRP	28000 NPB,SPB,NRP		
		Jumlah keberterimaan sertifikat kesesuaian			1 Sertifikat	2 Sertifikat	3 Sertifikat	4 Sertifikat		
		Jumlah SDM yang mampu melakukan pengawasan mutu barang			370 Orang	380 Orang	390 Orang	400 Orang		
		Persentase kepuasan pelanggan			65%	67%	69%	71%		
		Persentase keluhan pelanggan yang diselesaikan			80%	83%	85%	88%		
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan			70%	75%	75%	80%		
4	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen	5 rumusan	5 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KEMENDAG
		Jumlah motivator perlindungan konsumen	970 orang	970 orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	900 Orang		
		Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen	65	65	30 Forum	35 Forum	40 Forum	45 Forum		
		Publikasi informasi perlindungan konsumen			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PK			120 Orang	140 Orang	160 Orang	180 Orang		
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen			70 persen	75 persen	80 Persen	85 persen		
		Jumlah Pemerintah Daerah Terbaik Perlindungan Konsumen			6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	6 Daerah		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
C	FOKUS: Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik									
1	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis	4 jns	4 jns	4 jns	4 jns	4 jns	4 jns	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	5-9%	5-9%	5-9%	5-9%	5-9%	5-9%		
		Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
		Rasio variasi harga harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5		
		Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online	8	8	8	8	8	8		
		Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari		
		Tersedianya data harga harian dan stok bahan pokok tertentu setiap bulan			2	2	2	2		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat (Tipe A/Tipe B)			26	26	26	26	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun			2	2	2	2		
		Jumlah Pusat Distribusi Propinsi yang dibangun			1	1	1	1		
		Jumlah gudang non SRG	2	2	1	1	2	2		
3	Pengembangan kapasitas logistik perdagangan	Jumlah pasar yang diidentifikasi sebagai kandidat Pasar Percontohan	26	26	26	26	26	26	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah Pasar percontohan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan.	59	59	69	69	69	69		
		Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan sistem logistik	600	600	600	600	600	600		
		Tersedianya Informasi sarana Logistik	33	33	33	33	33	33		
		Jumlah Rekomendasi terkait penataan sistem logistik	6	6	6	6	6	6		
		Jumlah Perizinan dibidang Perdagangan			3	3	3	3		
		Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang Perdagangan			5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)	Jumlah gudang dalam SRG (kumulatif)	85	85	100 gudang	105 gudang	110 gudang	110 gudang	PENINGKATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	KEMENDAG
		Persentase penanganan masalah SRG dan PL (persen)	90	90	25 laporan	30 laporan	35 laporan	35 laporan		
		Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL	100 org	100 org	150 org	175org	180 org	180 org		
		Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL setelah dokumen lengkap			20 hari	20 hari	20 hari	20 hari		
		Jumlah Pengawasan SRG dan PL			20 laporan	25 laporan	25 laporan	25 laporan		
		Jumlah nilai resi gudang			120 Miliar	125 Miliar	130 Miliar	3 rumusan		
		Jumlah daerah potensi dalam pelaksanaan SRG			10 daerah	12 daerah	14 daerah	900 Orang		
		Jumlah transaksi di Pasar Lelang			1 triliun	1.1 triliun	1.2 triliun	45 Forum		
5	Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaku Usaha			10	11	12	13	PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	KPPU
		Jumlah Saran Pertimbangan Kepada Pemerintah	9	9	9	10	11	12		
		Jumlah Implementasi Manual Kebijakan Persaingan			5	7	9	10		
		Jumlah Kajian Industri dan Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan Perilaku Anti Persaingan			10	12	14	15		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
6	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Jumlah Laporan Klarifikasi	100	100	110	120	125	135	PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	KPPU
		Jumlah Laporan Hasil Penelitian Perkara Inisiatif	7	7	10	15	25	30		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan	10	10	40	50	60	70		
7	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat	Jumlah Laporan Pemberkasan	20	20	20	22	25	27	PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	KPPU
		Jumlah Laporan Litigasi	10	10	10	15	17	19		
		Jumlah Laporan Eksekusi	10	10	10	15	17	19		
8	Penilaian Merger dan Akuisisi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Notifikasi	40	40	45	50	55	60	PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	KPPU
		Jumlah Laporan Penilaian Merger dan Akuisisi	20	20	25	35	45	50		
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi	14	14	15	10	10	10		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
9	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU	Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif	12	12	15	20	25	30	PROGRAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	KPPU
		Jumlah Kegiatan Forum Diskusi Yang Dilaksanakan di Wilayah KPD	10	10	15	20	25	30		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Eksistensi KPPU/Kerjasama Kelengkapan di Wilayah Kerja KPD/Peningkatan Kompetensi KPD			20	25	30	35		
10	Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan yang diindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
11	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC	100%	100%	*	*	*	*	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kementerian Keuangan
		Persentase downtime sistem pelayanan	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
		Persentase aplikasi yang tersentralisasi	100%	100%						
		Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis			85%	85%	85%	85%		
		Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai			70%	70%	70%	70%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
12	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanaan	Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanaan	100%	100%	*	*	*	*	Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Kementerian Keuangan
		Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanaan			3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)		
		Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanaan	90%	90%	92%	92%	92%	92%		
13	Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitas Perdagangan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitas Perdagangan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
D	FOKUS: Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan									
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah	Jumlah pedoman/ Kebijakan untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan Dit. DKM dan PDN	6 jenis	6 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah UKM mitra binaan yang difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, kemitraan dan aspek pembiayaan)	1200 UKM	1200 UKM	1200UKM	1200 UKM	1200 UKM	1200 UKM		
		Data dan informasi UKM Binaan Dit. DKM dan PDN	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM		
		Proporsi pasokan barang konsumsi produksi dalam negeri			92,30%	92,50%	92,70%	92,90%		
		Layanan Perkantoran			12	12	12	12		
		Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan	2800 unit	2800 unit	2800 unit	2800 unit	2800 unit	2800 unit		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2	Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	Jumlah Pelaku Usaha PBK yang dievaluasi pelaporan keuangannya			10 prsh	12 prsh	14 prsh	14 prsh	PENINGKATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	KEMENDAG
		Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap	20 hari	20 hari	20 hari	19 hari	19 hari	19 hari		
		Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha PBK			20 laporan	20 laporan	22 laporan	22 laporan		
		jumlah pelaku usaha yang dievaluasi laporan kegiatannya			47 prsh	50 prsh	55 prsh	55 prsh		
		Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit	20 prsh	20 prsh	20 prsh	22 prsh	22 prsh	22 prsh		
		Jumlah pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran transaksi perdagangan berjangka komoditi			12 prsh	15 prsh	17 prsh	17 prsh		
3	Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang disusun	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEMENDAG
		Jumlah Perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online	4 Perijinan	4 Perijinan	4 Perijinan	4 Perijinan	4 Perijinan	4 Perijinan		
		Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari			
		Jumlah aparatur yang terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka harmonisasi kebijakan dibidang usaha perdagangan	200 Aparat	200 Aparat	700 Aparat	700Aparat	700 Aparat	700 Aparat		
		Jumlah waralaba lokal dan asing yang terdaftar	186	186	270	280	290	300		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
VII	Prioritas: Transformasi Struktur Industri									
A	FOKUS : Pembangunan Perwilayahan Industri									
1	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I	001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan			2	2	2	2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	Kemenperin
		002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan			2	2	2	2		
		003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan			0	10	15	20		
		004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan			4	6	8	10		
		005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan			15	15	15	15		
		006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan			22	27	32	37		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II	001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali			2	2	2	2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	Kemenperin
		002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali			2	2	2	2		
		003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali			0	10	15	20		
		004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Jawa dan Bali			12	12	12	12		
		005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Jawa dan Bali			7	7	7	7		
		006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Jawa dan Bali			2	2	2	2		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			2	2	2	2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	Kemenperin
		002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			2	2	2	2		
		003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			0	5	5	5		
		004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			3	4	4	5		
		005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			1	1	1	1		
		006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua			10	10	10	10		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
B	FOKUS : Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri									
1	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka	001 Tersusunnya Standar Produk			6	12	12	12	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Kemenperin
		002 Terstrukturisasinya perusahaan			100	175	175	175		
		003 Meningkatnya kemampuan SDM			600	1500	1500	1500		
		004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan entitas klaster			2	2	2	2		
		005 Lengkapnya struktur industri			1	2	2	2		
		006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi			2	5	5	5		
2	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir	001 Tersusunnya Standar Produk			18	18	18	18	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Kemenperin
		002 Meningkatnya kompetensi SDM Industri			120	200	200	200		
		003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir			3	3	3	3		
		004 Lengkapnya struktur industri			1	1	1	1		
		005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Hilir			2	2	2	2		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar	001 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri pupuk			5	5	5	5	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Kemenperin
		002 Tumbuh dan Berkembangnya Kluster Industri petrokimia			3	3	3	3		
		003 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional			2	3	3	3		
		004 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD			13	13	13	13		
		005 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)			1	1	1	1		
		006 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan investasi			5	5	5	5		
		007 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri petrokimia			1	1	1	1		
		008 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang menerapkan industri hijau			2	2	2	2		
		009 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia			1	1	1	1		
		010 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia (National Chemical Inventory)			1	1	1	1		
		011 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia dasar			6	6	6	6		
		012 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia dasar			2	2	1	1		
		013 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar			2	1	1	1		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam	001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam			5	5	5	5	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Kemenperin
		002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif			2	2	2	2		
		003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam			2	2	2	2		
		004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang terlatih			50	50	50	50		
		005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis Industri Hijau			20	20	20	20		
		006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus			1	1	1	1		
		007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam			1	1	1	1		
		008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian Isu Aktual			1	1	1	1		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	001 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pengembangan basis industri manufaktur			10	10	10	10	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Kemenperin
		002 Terfasilitasinya Penyusunan Regulasi serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha dan Daya Saing Industri Manufaktur			17	17	17	17		
		003 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen Basis Industri Manufaktur yang akuntabel			5	5	5	5		
		004 Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian dan Umum Ditjen Basis Industri Manufaktur			3	3	3	3		
		005 Terfasilitasinya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri			20	25	30	35		
		006 Tersedianya gaji dan sarana prasarana operasional perkantoran			12	12	12	12		
6	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi			2	2	2	2	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Kemenperin
		002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan Lainnya			3	3	3	3		
		003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI)			12	12	12	12		
		004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)			15	15	15	15		
		005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan			4	4	4	4		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
7	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan			2	2	2	2	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Kemenperin
		002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar			3	3	3	3		
		003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya			2	2	2	2		
		004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau			5	5	5	5		
		005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Penran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)			15	15	15	15		
		006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			3	3	3	3		
8	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan			1	1	1	1	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Kemenperin
		002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan			4	4	4	4		
		003 Tersusunnya Pengembangan Industri Pakan			1	1	1	1		
		004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar			1	1	1	1		
		005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood			1	1	1	1		
		006 Standardisasi			8	8	8	8		
		007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan			8	8	8	8		
		008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			3	3	3	3		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
9	Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan			5	5	5	5	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan	Kemenperin
		002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri			3	3	3	3		
		003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri			150	150	150	150		
		004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi			1	1	1	1		
		005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama			3	3	3	3		
		006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Data base			4	4	4	4		
		007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah			0	0	0	0		
10	Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri			6	6	6	6	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan	Kemenperin
		002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri			5	5	5	5		
		003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri			580	580	580	580		
		004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri			1	1	1	1		
		005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri			10	10	10	10		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
11	Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika	001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika			9	10	10	10	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan	Kemenperin
		002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika			56	46	46	46		
		003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika			380	400	400	400		
		004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika			2	2	2	2		
		005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri Elektronika dan Telematika			10	10	10	10		
		006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Data base			4	4	4	4		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
12	Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri			2	2	2	2	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mein, Elektronika Dan Alat Pertahanan	Kemenperin
		002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri			15	15	15	15		
		003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri			320	320	320	320		
		004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri			5	5	5	5		
		005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri			5	5	5	5		
		006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Databa se			2	2	2	2		
C	FOKUS : Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas									
1	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	001 Jumlah Produk yang dikembangkan			8	10	12	15	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemenperin
		002 Jumlah Sentra yang dikembangkan			15	18	21	24		
		003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan			20	25	30	35		
		004 Jumlah Unit Usaha IKM			200	240	280	340		
		005 Jumlah UPT yang difasilitasi			10	12	15	18		
		006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran			30	36	40	45		
		007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi			14	15	15	15		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II	001 Jumlah Produk yang dikembangkan			6	6	6	6	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemenperin
		002 Jumlah Sentra yang dikembangkan			10	15	20	25		
		003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan			20	25	30	35		
		004 Jumlah Unit Usaha IKM			30	40	50	60		
		005 Jumlah UPT yang difasilitasi			2	4	6	8		
		006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan Pameran			10	15	20	25		
		007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi			7	7	7	7		
3	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	001 Jumlah Produk yang dikembangkan			7	7	7	7	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemenperin
		002 Jumlah Sentra yang dikembangkan			12	15	18	21		
		003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan			12	15	18	21		
		004 Jumlah Unit Usaha IKM			90	110	120	140		
		005 Jumlah UPT yang difasilitasi			6	7	8	9		
		007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi			12	12	12	12		
		008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM			1	1	1	1		
		009 Jumlah Penyusunan Perencanaan Program			1	1	1	1		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri	001 Meningkatnya RSNI			100	100	100	100	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI			14	10	10	10		
		003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk			5	5	5	5		
		004 Terlaksananya pengawasan SNI			1	1	1	1		
		005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi			12	12	12	12		
		006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi khusus			1	1	1	1		
5	Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	001 Rumusan Kebijakan Teknologi Industri dan HKI			2	2	2	2	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Fasilitasi Kegiatan Litbang, Scale Up, dan Aplikasi Teknologi Industri			12	12	12	12		
		003 Paket Teknologi yang Diterapkan Industri			7	7	7	7		
		004 Paket Fasilitasi Pendaftaran Paten			5	5	5	5		
		005 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Pusat PTHKI			5	5	5	5		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
6	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			3	3	3	3	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			680	700	720	740		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Kimia Kemasan			12	12	12	12		
7	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	001 Industri yang menerapkan hasil litbang			1	1	2	2	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		003 Meningkatnya pemecahan masalah industri (Indikator manfaat untuk industri)			1	1	1	2		
		004 Meningkatnya kualitas dan standard produk industri (sertifikasi)			5	5	6	6		
		005 Terjaminnya kesesuaian alat ukur, takar dan timbang (kalibrasi)			1330	1450	1570	1680		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			3	3	3	3	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			2	2	2	2		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			365	400	440	484		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Kulit Karet Plastik			12	12	12	12		
9	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			10	10	10	10	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		003 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			14250	14400	14400	14400		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Industri Agro			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
10	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			2	2	2	2	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			10	10	10	10		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			7	7	7	7		
		004 Meningkatnya kemampuan LPK			12	12	12	12		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Pulp Kertas			12	12	12	12		
11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			4	4	4	4	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			2	2	2	2		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			140	140	140	140		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
12	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			2	2	2	2	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			2	2	2	2		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			420	420	30	30		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Logam Mesin			12	12	12	12		
13	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			1	1	1	1	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			1	1	1	1		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			9	9	9	9		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Keramik			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
14	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			1	1	1	1	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			1	1	1	1		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			1500	1500	1500	1500		
		004 Meningkatnya kemampuan LPK			5	5	5	5		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Bahan Barang Teknik			12	12	12	12		
15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			3	3	3	3	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
16	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	001 Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			3	3	3	3	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		002 Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha			2	2	2	2		
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha			555	560	565	570		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji BB Manajemen dan Gaji BB Kerajinan dan Batik			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
17	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	001 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Aceh yang siapditerapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			7	7	8	8	Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	Kemenperin
		003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Aceh kepada dunia usaha			25	30	35	40		
		005 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Aceh			12	12	12	12		
		006 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Medan yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			2	2	2	2		
		008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Medan kepada dunia usaha			216	216	216	216		
		010 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Medan			12	12	12	12		
		011 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Padang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			11	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Padang kepada dunia usaha			180	190	200	210		
		015 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Padang			12	12	12	12		
		016 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Palembang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			9	9	9	9		
		018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Palembang kepada dunia usaha			130	130	130	130		
		020 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Palembang			12	12	12	12		
		021 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Lampung yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			8	8	7	7		
		023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Lampung kepada dunia usaha			6	6	6	6		
		025 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Lampung			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		026 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Surabaya yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			1	1	1	1		
		028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Surabaya kepada dunia usaha			900	950	1050	1100		
		030 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Surabaya			12	12	12	12		
		031 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Samarinda yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			3	3	3	3		
		033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Samarinda kepada dunia usaha			135	145	150	150		
		035 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Samarinda			12	12	12	12		
		036 Terwujudnya hasil litbang Bst Industri Pontianak yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			4	4	4	4		
		038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Bst Industri Pontianak kepada dunia usaha			350	350	350	350		
		040 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Pontianak			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			12	12	12	12		
		043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Banjarbaru kepada dunia usaha			100	100	100	100		
		045 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Banjarbaru			12	12	12	12		
		046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			7	7	7	7		
		048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Manado kepada dunia usaha			80	80	80	80		
		050 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Manado			12	12	12	12		
		051 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri			5	5	5	5		
		053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Ambon kepada dunia usaha			210	220	230	240		
		055 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Gaji Baristand Ambon			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
VIII	Prioritas: Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
A	Pengembangan Pengungkit Rantai Nilai Pariwisata									
1	Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus	Jumlah Jejaring Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus (Asosiasi)			12	12	12	12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah Promosi Destinasi Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus pada Internasional Event (destinasi)			12	12	12	12		
		Jumlah Komunitas / Lembaga yang mendapat dukungan untuk penyelenggaraan event KIEMK (Komunitas)			10	10	10	10		
2	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Jumlah kajian pengembangan informasi pasar pariwisata dalam dan luar negeri (naskah)			14	14	14	14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah model perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah)			2	2	2	2		
		Jumlah informasi pariwisata melalui Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (media)			12	12	12	12		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri	Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (event)			13	13	13	13	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah event pariwisata berskala nasional dan internasional (event)			35	35	35	35		
		Jumlah even seni, budaya dan pariwisata daerah yang didukung (event)			45	45	45	45		
		Jumlah Pusat Informasi Pariwisata Dalam Negeri di Bandara bertaraf Internasional			1	1	1	1		
		Jumlah event pariwisata daerah (daerah)			33	33	33	33		
4	Peningkatan Promosi Pariwisata luar negeri	Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (event)			27	27	27	27	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah event misi penjualan (Sales Mission) di Fokus Pasar Wisatawan (event)			9	9	9	9		
		Jumlah event Festival Indonesia yang memperoleh dukungan (event)			7	7	7	7		
		Jumlah Promosi Pariwisata Indonesia (Visit Indonesia Tourism Officers) di luar negeri (kota)			14	14	14	14		
		Jumlah daerah yang mengikuti even Pariwisata Internasional (unit)			11	11	11	11		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Peningkatan Pencitraan Indonesia	Jumlah Kajian tentang Strategi Komunikasi Promosi Pariwisata Indonesia (Kajian)			5	5	5	5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah Materi Promosi Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 7 Minat Khusus)			16	16	16	16		
		Jumlah Diseminasi Promosi Pariwisata (Fokus Pasar Luar Negeri dan Dalam Negeri)			16	16	16	16		
		Jumlah Informasi Potensi Pariwisata Daerah (daerah)			32	32	32	32		
B	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata									
1	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Jumlah peserta sadar wisata (orang)			5.000	4.750	4.500	4.250	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah peserta bimbingan teknis pemberdayaan destinasi pariwisata (orang)			580	600	650	700		
2	Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata	Jumlah desa wisata (desa)			561	561	561	439	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemparekraf
3	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah lokasi daya tarik wisata nasional (lokasi)			16	16	16	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemparekraf
4	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Standar Usaha Pariwisata (naskah)			13	6	5	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah auditor usaha pariwisata (orang)			1.500	1.400	1.200	940		
		Jumlah fasilitasi pembentukan LSU (unit)			15	12	10	8		
		Jumlah industri/usaha pariwisata yang disertifikasi (Unit)			60.000	50.000	40.000	34.800		
		Jumlah industri / usaha pariwisata mikro dan kecil yang difasilitasi untuk meningkatkan nilai tambah (Unit)			5.400	4.500	4.500	3.600		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi, kerjasama, kepegawaian, hukum, keuangan dan umum (laporan)			33	33	33	33	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemparekraf
6	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional (daerah)			16	16	16	16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi)			16	16	16	16		
		Jumlah lokasi yang difasilitasi promosi Investasi pariwisata (lokasi)			16	16	16	16		
7	Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event	Jumlah lokasi yang difasilitasi kegiatan pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif ,dan Even (Lokasi)			10	10	10	10	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
		Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (Produk)			7	7	7	7		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
C	Sumber Daya Manusia Pariwisata									
1	Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Orang)			610	610	610	610	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
2	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)			1490	1490	1490	1490	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kemparekraf
D	Ekonomi Kreatif									
1	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkatkan jejaring di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang)			990	990	990	990	Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Kemparekraf
		Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkatkan akses pasarnya di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang)			800	800	800	800		
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkatkan kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang)			1.650	1.650	1.650	1.650		
		Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan ruang kreatif (daerah)			14	14	14	14		
2	Pengembangan Seni Rupa	Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkatkan aksesnya di bidang seni rupa (orang)			530	530	530	530	Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Kemparekraf
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkatkan akses pasarnya di bidang seni rupa (orang)			200	200	200	200		
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkatkan kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni rupa (orang)			575	575	575	575		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media	Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Media (orang)			794	794	794	794	Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	Kemparekraf
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Media (orang)			289	289	289	289		
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Media (orang)			928	928	928	928		
4	Pengembangan Desain dan Arsitektur	Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring ekonomi kreatif berbasis Desain dan Arsitektur (orang)			250	250	250	250	Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	Kemparekraf
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses pasar di bidang Desain dan Arsitektur (orang)			150	150	150	150		
		Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat kemampuan kreasi dan produksi di bidang Desain dan Arsitektur (orang)			500	500	500	500		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
IX	Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM									
A	FOKUS: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Sistem koordinasi dan konsultasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyiapan upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM <u>dilembagakan</u> .								
1	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan	Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang industri, kerajinan dan pertambangan	16 Koperasi	16 Koperasi	21 Koperasi	24 Koperasi	27 Koperasi	30 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha dalam industri pengolahan kelapa terpadu	-	-	2 Koperasi	2 Koperasi	3 Koperasi	3 Koperasi		
2	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang ketenagalistrikan, aneka usaha dan di bidang energi terbarukan	14 Koperasi	14 Koperasi	7 Koperasi	7 Koperasi	7 Koperasi	7 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha eco-tourism	-	-	1 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi		
3	Pengembangan dan Pematapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM	Skema Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil	1 Skim	1 Skim	2 Skim	2 Skim	2 Skim	2 Skim	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Fasilitasi Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Daerah	-	-	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga		
		Fasilitasi Pengembangan KSP/KSP Syariah yang Berjejaring	24 Jaringan	24 Jaringan	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah	250 KSP/KSP Syariah		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
4	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	UMKM dan Koperasi yang mendapat fasilitasi intermediasi pembiayaan	500 UMKM	500 UMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
5	Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitasi akses pembiayaan ke pasar modal, modal penertaan, anjak piutang dan modal ventura	-	-	600 KUMKM	600 KUMKM	600 KUMKM	600 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Pengembangan Clearing House KUMKM	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		
6	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM	Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi	4 RPP	4 RPP	7 Peraturan	7 Peraturan	7 Peraturan	7 Peraturan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Peraturan Perundang-undangan di Bidang UMKM	4 Provinsi	4 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
7	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kualitas Tatalaksana Koperasi	1000 Koperasi	1000 Koperasi	200 Koperasi	200 Koperasi	250 Koperasi	250 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Peningkatan Kualitas Tatalaksana UMKM melalui Registrasi Usaha	-	-	1 Sistem	1000 UMKM	1000 UMKM	1000 UMKM		
		Peningkatan Kualitas KUMKM melalui Klasifikasi KUMKM dan Revitalisasi Koperasi	300 Koperasi	300 Koperasi	400 KUMKM	450 KUMKM	500 KUMKM	500 KUMKM		
8	Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri	KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern	440 KUMKM	440 KUMKM	22 Koperasi	24 Koperasi	26 Koperasi	28 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
9	Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor	KUMKM yang mendapat fasilitasi akses ekspor (melalui pameran luar negeri, temu bisnis (business matching), forum bisnis/koordinasi)	150 KUKM	150 KUKM	300 KUKM	300 KUKM	300 KUKM	300 KUKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUMKM yang difasilitasi sebagai pengela ekspor	-	-	1 Konsep	50 KUKM	50 KUKM	50 KUKM		
		Uji Coba Sistem Konsolidasi Kargo	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
10	Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM	Pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi	45 Unit	45 Unit	45 Koperasi	45 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Fasilitasi pengembangan sarana promosi di tempat-tempat strategis	100 KUMKM	100 KUMKM	200 KUMKM	250 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM		
		Usaha mikro yang difasilitasi melalui identitas produk	300 Umi	300 Umi	300 UMi	350 UMi	350 UMi	350 UMi		
11	Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM	KUMKM yang terfasilitasi Kemitraan	10400 KUMKM	10400 KUMKM	1200 KUMKM	1200 KUMKM	1200 KUMKM	1200 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM		
12	Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Pameran Promosi Produk Koperasi dan UMKM	450 KUKM	450 KUKM	350 KUKM	400 KUKM	425 KUKM	450 KUKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Katalog Produk KUKM	65000 Katalog	65000 Katalog	50000 Katalog	55000 Katalog	60000 Katalog	65000 Katalog	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Fasilitasi KUMKM untuk partisipasi pada pameran nasional dan regional	1200 KUKM	1200 KUKM	200 KUKM	225 KUKM	250 KUKM	300 KUKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Peningkatan sistem akses pemasaran dan informasi bisnis KUMKM berbasis IT (trading board)	12 Bulan	12 Bulan	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM	Diklat Manajemen SDM KUMKM	150 Orang	150 Orang	270 Orang	300 Orang	330 Orang	360 Orang	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Kemitraan Diklat SDM	-	-	270 Orang	300 Orang	330 Orang	360 Orang		
14	Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	Diklat kewirausahaan dan technopreneur	-	-	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
15	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM	Monev Pengembangan SDM KUMKM	19 Laporan	19 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
16	Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	KUMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	900 KUMKM	900 KUMKM	450 KUMKM	450 KUMKM	450 KUMKM	450 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi mutu	7000 UMKM	7000 UMKM	500 KUMKM	500 KUMKM	500 KUMKM	500 KUMKM		
		KUMKM yang difasilitasi melalui sertifikasi produk	-	-	500 KUMKM	500 KUMKM	500 KUMKM	500 KUMKM		
17	Pengembangan Restrukturisasi Usaha	KUMKM yang mendapat fasilitasi restrukturisasi manajemen dan penanganan dampak bencana	-	-	130 KUMKM	130 KUMKM	130 KUMKM	130 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Koperasi produktif yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha	1300 KUKM	1300 KUKM	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi		
		Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sistem resi gudang	-	-	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi		
18	Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	Lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pengembang bisnis KUMKM	800 Lembaga	800 Lembaga	200 LPB	200 LPB	200 LPB	200 LPB	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUMKM yang dikembangkan usaha melalui Pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis	1750 UMKM	1750 UMKM	250 KUMKM	250 KUMKM	250 KUMKM	250 KUMKM		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
19	Pengembangan Fasilitas Investasi KUKM	KUKM yang mendapatkan fasilitas investasi	-	-	250 UKM	250 UKM	250 UKM	250 UKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUKM yang mendapatkan fasilitas kerjasama investasi	2000 KUKM	2000 KUKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM		
		Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi dan Penguatan Tenant Inkubasi	20 Inkubator	20 Inkubator	20 Inkubator	20 Inkubator	20 Inkubator	20 Inkubator		
20	Pengembangan Sistem Bisnis	KUMKM yang mendapatkan fasilitas transaksi bisnis	2000 KUMKM	2000 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	200 KUMKM	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		KUMKM yang mendapatkan fasilitas kerja sama bisnis	-	-	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM	300 KUMKM		
		KUMKM yang difasilitasi e-commerce dan aplikasi sistem bisnis	795 KUMKM	795 KUMKM	400 KUMKM	400 KUMKM	400 KUMKM	400 KUMKM		
21	Penelitian Kebijakan UMKM	Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan UMKM	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Penelitian dan pengembangan untuk penguatan bisnis UMKM	1 Model	1 Model	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
		Kerjasama penelitian dan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
22	Penelitian Kebijakan Sumber Daya	Penelitian dan pengembangan sistem pendukung KUMKM	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Penelitian kebijakan sumber daya KUMKM	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
		Kerjasama penelitian dan pengembangan sumber daya KUMKM	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
		Pengembangan expert pool di bidang KUMKM	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
23	Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM	Penelitian dan pengembangan perkaderan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Money Dampak Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
24	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Pelatihan Bagi SDM KUMKM	21.500 Orang	21.500 Orang	25000 Orang	27500 Orang	30250 Orang	33275 Orang	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Pelatihan Bagi SDM KUMKM di daerah			6000 Orang	6600 Orang	7260 Orang	8000 Orang		
		Pelatihan technopreneur	-	-	-	-	-	-		
		SDM KUMKM yang mengikuti magang	-	-	750 Orang	825 Orang	910 Orang	1000 Orang		
		Beasiswa Bagi Kader Koperasi	-	-	200 Orang	220 Orang	242 Orang	267 Orang		
		Lembaga Diklat yang Direvitalisasi dan Dibangun	4 Unit di daerah	4 Unit di daerah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		
		Pelatihan bagi Tenaga Pengelola dan Instruktur Lembaga Diklat	3.100 Orang	3.100 Orang	1000 Orang	1100 Orang	1210 Orang	1331 Orang		
		Kurikulum dan modul diklat	10 Modul	10 Modul	20 Kurikulum/Modul	20 Kurikulum/Modul	20 Kurikulum/Modul	20 Kurikulum/Modul		
		Peningkatan Kompetensi SDM KUKM melalui SKKNI	1000 orang	1000 orang	360 Orang	400 Orang	450 Orang	480 Orang		
		Monitoring dan Evaluasi	33 provinsi	33 provinsi	3000 Orang	3300 Orang	3630 Orang	3993 Orang		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
25	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM	PLUT-KUMKM	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
		Fasilitasi penguatan PLUT-KUMKM	21 Unit	21 Unit	21 Unit	58 Unit	73 Unit	88 Unit		
		Pedoman dan Modul PLUT-KUMKM	-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket		
		Advokasi dan penguatan PLUT-KUMKM	30 Lokasi	30 Lokasi	43 Lokasi	43 Lokasi	43 Lokasi	43 Lokasi		
		E-Business PLUT-KUMKM	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
		Monitoring dan Evaluasi PLUT-KUMKM	-	-	43 Lokasi	58 Lokasi	73 Lokasi	88 Lokasi		
26	Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Lembaga Pengawas KSP	1 Laporan	1 Laporan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga		
27	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Pelayanan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar	35 SK	35 SK	75 SK	75 SK	75 SK	75 SK	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Penataan Koperasi melalui Pembubaran dan Penggabungan	2000 Koperasi	2000 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi		
28	Pengembangan Keanggotaan Koperasi	Peningkatan Partisipasi Pengawasan	-	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Dukungan Kegiatan DEKOPIN	49 Laporan	49 Laporan	72 Laporan	79 Laporan	86 Laporan	93 Laporan		
29	Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi	Peningkatan Pengendalian Koperasi	3 Provinsi	3 Provinsi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Peningkatan Akuntabilitas dan Akuntansi	500 Orang	500 Orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang		
30	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pelatihan perkoperasian bagi penyuluh koperasi	1200 Orang	1200 Orang	120 Orang	130 Orang	140 Orang	150 Orang	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Pelatihan perkoperasian bagi	-	-	600 Orang	660 Orang	720 Orang	780 Orang		
31	Penelitian Kebijakan Koperasi	Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan Koperasi	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
		Penelitian dan pengembangan untuk penguatan usaha Koperasi	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
		Kerjasama penelitian dan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
32	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi	Persentase Rekomendasi Penggunaan Teknologi dalam rangka peningkatan daya saing produk UKM Berbasis Teknologi yang terimplementasikan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
X	Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan									
A	FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan									
1	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan	75%	75%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
2	Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan	75%	75%	85%	85%	85%	85%	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
3	Pengelolaan Bidang Hukum Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Jumlah rekomendasi PPATK yang disampaikan kepada pemerintah	10	10	12	14	16	16	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Persentase Pemenuhan	80	80	85	90	95	95		
4	Pelaksanaan Kerjasama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Jumlah issue strategis	7	7	8	9	10	10	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Jumlah pertemuan dengan jejaring organisasi dalam negeri	40	40	42	44	46	46		
		Jumlah MoU dengan	5	5	6	8	10	10		
		Jumlah kegiatan di forum internasional	10	10	11	12	13	13		
		Jumlah sosialisasi pada masyarakat tentang PP TPPU	25	25	26	27	28	28		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	Indeks kepatuhan pelapor	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Progress penyempurnaan pedoman audit kepatuhan pelapor	80%	80%	85%	90%	95%	95%		
6	Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor	Jumlah Pelapor Aktif	650	650	650	650	650	650	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Progress penyempurnaan	80%	80%	85%	90%	90%	90%		
		Persentase tanggapan tepat waktu terhadap pertanyaan	50%	60%	70%	80%	80%	80%		
7	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Jumlah LHA yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain	120	120	120	120	120	120	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Jumlah LHA yang dihasilkan	160	160	160	160	160	160		
		Persentase pemenuhan permintaan informasi yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	90%	95%	95%		
8	Pemeriksaan dan Pengembangan Riset Tindak Pidana Pencucian Uang	Jumlah LHP berindikasi TPPU dan tindak pidana lain	12	12	12	12	12	12	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	PPATK
		Jumlah LHP yang dihasilkan	16	16	16	16	16	16		
		Jumlah LHR yang dihasilkan	18	18	18	18	18	18		
		Jumlah materi obyek kajian terbaru	16	16	16	16	16	16		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
XI	PRIORITAS: Daya Saing Ketenagakerjaan									
A.	Fasilitasi Mobilitas Tenaga Kerja									
	Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri	a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan dokumen sesuai standar								
		b. Presentase TKI bermasalah yang mendapat penanganan sesuai prosedur								
		c. Presentase kasus TKI bermasalah yang ditangani								
1.	Pembinaan dan Pengembangan E-Government	Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Gov. Services Bus	12 instansi	12 instansi	9 instansi	9 instansi	9 instansi	9 instansi	Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
2.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu*	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk	2.000.000 Keping e-KTP Reguler	2.000.000 Keping e-KTP Reguler	2.000.000 Keping e-KTP Reguler	13.777.358	13.777.358	13.777.358	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri
		Jumlah penduduk yang mendapat KTP elektronik	497 Kab/Kota	498 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota		
3.	Pengelolaan Informasi Kependudukan*	Jumlah K/L yang dapat mengakses database	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	Penataan Administrasi Kependudukan	Kemendagri
4.	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian*	Persentase penerbitan dokumen perjalanan	100%	100%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	Kemenhukham
		Persentase kesesuaian visa yang sesuai ketentuan	100%	100%	75%	80%	85%	90%		
		Jumlah persetujuan fasilitas keimigrasian yang sesuai ketentuan	9	10	60	65	70	75		
		Jumlah persetujuan ijin masuk dan keluar yang sesuai ketentuan			3.150	3.200	3.250	3.300		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
5.	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI/UPTP3TKI)	Jumlah CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
6.	Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen	Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
7.	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI	Persentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri	45%	45%	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	90 % pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
8.	Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Kemenko Perekonomian
9	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	Atase yang memberi perlindungan Pekerja Migran	13 Atase	13Atase	13 Atase	13 Atase	13 Atase	13 Atase	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kemnakertrans
10	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Keksuleran	Kemenlu
		Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	60%	60%	60%	60%	60%	60%		
		Repatriasi WNI di Luar Negeri	4000	4000	1 ISO	1 ISO	1 ISO	1 ISO		
		Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWN dan BHI	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
11	Peningkatan Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan terlayani	100% pengaduan terproses	100% pengaduan terproses	100% pengaduan terproses	100% pengaduan terproses	100% pengaduan terproses	100% pengaduan terproses	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
12	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	Jumlah calon TKI/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
13	Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	Peningkatan jumlah kesiapan CTKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
14	Peningkatan Mediasi dan Advokasi	Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi	40% teradvokasi	40% teradvokasi	90% teradvokasi	90% teradvokasi	90% teradvokasi	90% teradvokasi	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
15	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI	Jumlah aparat pemda yang ditingkatkan kapasitasnya	275	275	275	275	275	275	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	BNP2TKI
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada TKI	436	436	34	34	34	34		
16	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	2 dokumen	2 dokumen	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	2 dok usulan rekomendasi kebijakan	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Menko Kesra
17	Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran *)	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya	747	747	1.750	1.750	1.750	1.750	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kemensos
		Jumlah Pekerja Migran yang dipulangkan Ke Provinsi Asal	4.694	4.694	10.000	11.000	11.000	11.000		
		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja	489	489	1.146	1.146	1.146	1.500		

BIDANG: EKONOMI

No	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
XII	Prioritas: Jaminan Sosial									
A	Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)	Angka kemiskinan, Angka HDI							1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
1	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Terlaksananya seluruh Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial	2	2	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemenko Kesra, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi SJSN	11	11	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi	1 Dokumen rekomendasi		
		Tersusunnya seluruh Perangkat hukum SJSN (Kebijakan Umum SJSN)	7	7	6 Dokumen rekomendasi	7 Dokumen rekomendasi	8 Dokumen rekomendasi	9 Dokumen rekomendasi		
		Telaksananya Studi dan Kajian di bidang Jaminan	6	6	5 dokumen Kajian	7 dokumen Kajian	10 dokumen Kajian	15 dokumen Kajian		
		Terlaksananya layanan umum pendukung tupoksi	0	0	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan		

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
A	Fokus: Penyelenggaraan Litbang									
1	Penelitian bioteknologi peternakan modern	Jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Pembangunan sarana penelitian							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
2	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler	Jumlah varietas Benih unggul							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
3	Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	Jumlah dokumen manajemen mutu nuklir			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Indeks kepuasan pelanggan			B	B	B	B	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
4	Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir	Jumlah kegiatan diseminasi hasil litbang iptek nuklir			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah mitra pengguna komersial hasil litbang iptek nuklir			1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
5	Pengkajian dan penerapan Sistem Energi Nuklir	Jumlah dokumen teknis kajian sistem energi nuklir			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah dokumen teknis persiapan infrastruktur pembangunan RDE			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
6	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir	Jumlah teknologi bahan bakar nuklir yang dikembangkan			1 Teknologi	1 Teknologi	1 Teknologi	1 Teknologi	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Indeks kepuasan pelanggan			B	B	B	B	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
7	Pengembangan PLTP Skala Kecil	Pengujian Kinerja PTLP 3 MW			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Pengujian Pilot Plant Pembangkit Listrik Energi Terbarukan			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Pilot Plant PLTP Binary Cycle 500 KW			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
8	Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-Obatan, dan Instrumentasi Medis	Jumlah paket penelitian			0	0	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL	KRT
9	Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi	Jumlah teknologi biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi yang dikembangkan			1 Teknologi	1 Teknologi	1 Teknologi	1 Teknologi	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Indeks kepuasan pelanggan			B	B	B	B	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
10	Pengembangan Teknologi Penerbangan	Jumlah Jenis Pesawat airbonde RS yang Dikembangkan			2	2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA	LAPAN
		Jumlah Jenis Pesawat Ringan yang Dikembangkan			1	1	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA	LAPAN
		Jumlah Jenis Spin Off Teknologi yang Diaplikasikan			3	3	3	0	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA	LAPAN
		Jumlah Publikasi Ilmiah Teknologi Penerbangan			35	35	35	0	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA	LAPAN
11	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Layanan Teknologi untuk konvergensi telematika berbasis multimedia digital network			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		002 Pemanfaatan layanan yang inovatif di bidang e-identification oleh instansi/lembaga			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Pemanfaatan layanan yang inovatif di bidang e-pemilu oleh instansi/lembaga			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 pemanfaatan rekomendasi dan layanan tik di bidang security, safety and defense untuk kemandirian dan ketahanan ruang cyber serta keamanan informasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		005 Pemanfaatan hasil litbangyasa dan rekomendasi teknologi sistem elektronika untuk keselamatan dan keamanan transportasi dan pengembangan teknologi alat kesehatan			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
12	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pemerintahan dan Industri	Rekomendasi Sistem Pemilu Elektronik			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Prototipe Sistem Aplikasi Perisalah			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
13	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	001 Prototipe Sistim PUNA Tipe jangkauan jarak menengah dengan Telemetry, Control and Command (TCC)			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Rekomendasi Teknologi Rancang Bangun Pesawat Nasional			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Teknologi Alat Material Khusus (Almatsus) POLRI			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Rekomendasi teknologi pengembangan Kapal Selam Nasional			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
14	Penelitian Fisika	Jumlah publikasi ilmiah							PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah prototipe							PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah usulan paten							PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah contoh produk/prototipe penelitian material dan rekayasa manufaktur							PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI							PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
15	Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir	Jumlah prototipe bahan unggul yang dikembangkan			1 Prototipe	1 Prototipe	1 Prototipe	1 Prototipe	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Jumlah bulan operasional kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
		Indeks kepuasan pelanggan			B	B	B	B	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI	BATAN
16	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material	Prototipe Produk Karet Modifikasi untuk Produk Hilir			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Rekomendasi Teknik Manufaktur material Armor untuk Alutsista			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Rekomendasi Teknologi energetic material dengan bahan baku lokal (FS)			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Prototipe teknologi pengolahan bahan mineral silikon untuk bahan baku ICT			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Pengembangan Teknologi Material untuk Bahan Baku Industri Alat Kesehatan			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
B	Fokus: Layanan Teknologi									
1	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi	001 Penerapan rekomendasi teknologi efisiensi energi peralatan dan system energi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Penerapan rekomendasiteknologi kogenerasi sampai dengan 2mw			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Penerapan rekomendasi teknologi pltu batubara peringkat rendah yang efisien			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
2	Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi Iptek	004 Penerapan rekomendasi teknologi hybrid charging station (pv-grid)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		005 Penerapan rekomendasi teknologi baterai baik untuk mobil listrik maupun aplikasi lainnya			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		006 Terlaksananya pilot project pabrik baterai lifepo4 skala mikro			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		007 Layanan Teknologi Energi (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		008 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		001 Meningkatkan kualitas layanan ubiquitous e-government berbasis internet dan jaringan sistem inovasi nasional instansi/ lembaga			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		002 Pemanfaatan layanan yang inovatif, dalam mendukung reformasi birokrasi, e-government berbasis internet dan jaringan sistem inovasi nasional			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan jaringan informasi IPTEK (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ipteknet)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		005 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ipteknet)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi	001 Pengujian Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi Dan Otomasi pada basis manufaktur, hankam dan transportasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
4	Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi	002 Layanan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran MEPPPO)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		001 Rekomendasi Teknologi produksi Penisilin G dan 6-APA serta Amoksilin untuk Mendukung Kemandirian Obat Generik Beta Laktam			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Pemanfaatan teknologi produksi untuk meningkatkan produktivitas karet melalui pendekatan bioteknologi			0	0	0	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Jasa Pengujian (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPB)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
5	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai	001 Pengujian Teknologi Pengkajian Dinamika Pantai pada basis manufaktur, hankam dan transportasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Layanan Teknologi Dinamika Pantai (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPDPP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
6	Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer	001 Pemanfaatan rekomendasi rekayasa material industri polimer di industri transportasi, konstruksi dan kemasan pangan			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Layanan Teknologi Polimer (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPPT)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
7	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi	001 Penerapan rekomendasi teknologi pembangkit listrik tenaga biomasa sampai dengan 5 mw			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Penerapan rekomendasi teknologi produksi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BRDST)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
8	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan	001 Pemanfaatan teknologi pengelolaan potensi dan kualitas sumberdaya air DAS Ciliwung Cisadane			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Pilot project teknologi pemantauan dan pengelolaan sumberdaya air (sungai dan danau)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		003 Layanan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
9	Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi	004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTL)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		001 Pengujian teknologi termodinamika, motor dan propulsi pada basis manufaktur, hankam dan transportasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Layanan Fasilitas Uji Emisi Gas Buang (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTMP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
10	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan	001 Rekomendasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Survei Kelautan			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Prototipe Pengolahan dan Pengelolaan Data Hasil Survei Laut			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
11	Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika	003 Rekomendasi teknologi unggulan kemaritiman yang dimanfaatkan untuk mendukung observasi dinamika laut dan pesisir, prediksi iklim maritim dan ITF			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Rekomendasi Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kelautan			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		005 Layanan Teknologi Survei Kelautan (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		006 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTSK)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		007 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BTSK)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		001 Pengujian Teknologi hidrodinamika pada basis manufaktur, hankam dan transportasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
12	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca	002 Layanan Teknologi Hidrodinamika(PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT BPPH)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		001 Pusat Unggulan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi bertaraf Internasional			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Meningkatkan Kapasitas Armada Nasional Penjinak Bencana Banjir dan kekeringan, Karlahut, kabut asap			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Terwujudnya Pilot Project pemanfaatan Armada Nasional Penjinak Bencana Hidrometeorologi oleh "Top 10" provinsi paling rawan bencana			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Rekomendasi pemodelan hidrologi untuk mendukung teknologi pengelolaan SDA			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		005 Layanan Teknologi Modifikasi Cuaca (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		006 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT HB)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
13	Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran	001 Pengujian teknologi aerodinamika dan getaran pada basis manufaktur, hankam dan transportasi			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Layanan teknologi aerogasdinamika dan getaran (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT LAGG)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
14	Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni	001 Pemanfaatan hasil perekayasa material pada industri keramik seni			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Layanan teknologi keramik seni (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
C	Fokus: Infrastruktur Mutu	003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT Keramik Bali)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		004 Layanan teknologi keramik seni (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
1	Peningkatan Penerapan Standar	001 Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian			4	4	4	4	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		002 Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya			25	25	25	25	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		003 Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI			172	172	172	172	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		004 Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya			5	5	5	5	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		005 Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis			100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
14	Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran	Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran PUNA			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Pesawat Tempur Nasional			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Kapal Selam Nasional			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran Industri Migas			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Technology Clearing House dan Audit Teknologi Aerodinamika dan Getaran JSS			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Layanan teknologi aerogasdinamika dan getaran (PNBP)			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT LAGG)			12	12	12	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
15	Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni	Rekomendasi Pemurnian dan Penyediaan Bahan Baku Keramik untuk			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Pilot Project Teknologi Proses Produksi untuk IKM/Unit Usaha keramik seni ramah lingkungan			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Prototipe Pembinaan Industri Kecil/Perajin keramik seni			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Layanan teknologi keramik seni (PNBP)			1	1	1	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT			12	12	12	0	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
C	Fokus: Infrastruktur Mutu									
1	Peningkatan Penerapan Standar	Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian			5	5	5	0	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya			50	50	50	0	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI			190	190	190	0	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya			8	8	8	0	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
		Persentase (%) SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis			100	100	100	0	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	BSN
D	Fokus: Pengawasan Tenaga Nuklir									

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir	Dokumen Sistem Manajemen Inspeksi Instalasi Nuklir			6	6	6	0	PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR	BAPETEN
		Laporan Hasil Evaluasi Dosis dan Operasi Instalasi Nuklir			2	2	2	0	PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR	BAPETEN
		Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir			24	24	24	0	PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR	BAPETEN
2	Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	Tersedianya dokumen Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir			1	1	1	0	PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR	BAPETEN
		Tersedianya dokumen Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir			1	1	1	0	PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR	BAPETEN
E	Fokus: Teknopreneur									
1	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi	001 Rekomendasi, Rujukan Teknis dan Kajian Strategis Pengembangan Teknopreneur			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Pemanfaatan hasil iptekin pada pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Layanan Inkubasi Teknologi (PNBP)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BIT)			12	12	12	12	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
F	Fokus: Sumber Daya Alam									
1	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru	Pengembangan Kebun Raya Daerah							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
2	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya	Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah basah terkonservasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi basah terkonservasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah kering terkonservasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering terkonservasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah publikasi ilmiah (nasional dan internasional)							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah jenis baru/catatan baru							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
3	Penelitian Oseanografi	Jumlah publikasi ilmiah							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah spesies/catatan baru							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah spesimen koleksi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah jenis biota budidaya							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah produk/paten							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah jaringan informasi terumbu karang yang dikelola							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah gedung dan peralatan laboratorium oseanografi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
4	Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)	Jumlah publikasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah rekomendasi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah prototipe							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah buku							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah basis data							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah konsep yang dihasilkan							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah paket teknologi							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
5	Penelitian Biologi	Jumlah publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional)							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah rekomendasi kebijakan hayati							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah spesies/catatan baru							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		Jumlah penambahan koleksi rujukan flora, fauna dan mikroba							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah varietas yang dihasilkan							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah formula pupuk							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
6	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam	001 Rekomendasi produk perekayasa teknologi eksplorasi SD Alam dengan penerapan teknologi penginderaan jauh maju			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		002 Rekomendasi perekayasa teknologi eksplorasi SD Alam dengan Satelit Inderaja Indonesia (InaSAT)			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
		003 Rekomendasi produk perekayasa teknologi eksplorasi SD kebumihan dengan penerapan teknologi geofisika			1	1	1	1	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
		004 Rekomendasi teknologi unggulan kemaritiman yang dimanfaatkan untuk mendukung observasi dinamika laut dan pesisir, prediksi iklim maritim dan ITF			1	1	1	1	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	BPPT
G	Fokus: Penyiapan Sosial Budaya Masyarakat									
1	Penelitian Masyarakat dan Budaya	Jumlah publikasi ilmiah							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
		Jumlah buku kajian bahasa dan budaya							PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK	LIPI
H	Fokus: Sumber Daya Manusia dan Prasarana Iptek									
1	Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)	Jumlah Karyasiswa Dalam Negeri			0	0	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL	KRT
		Jumlah Karyasiswa RISET PRO			0	0	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL	KRT

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						2016	2017	2018		
2	Peningkatan Sarana dan Prasaran Litbang	Jumlah rekomendasi kebijakan			1	1	1	1	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL	KRT
		Jumlah laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumberdaya Iptek			1	1	1	1	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL	KRT

MATRIKS 2.2.A
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL										
B. PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI										
A	KESDM									
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Bbm)	1	1	1	1	1	-	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
		Jumlah Laporan Kapasitas Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas)	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Laporan Produksi (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang Migas)	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan	1	1	4	4	4	-		
		Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng, Cng Serta Hasil Olahan	17	17	17	17	17	-		
		Laporan Persentase (%) Pengalihan Pemakaian Minyak Tanah Ke LPG	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	-		
		Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah)	4 kota; 16.000 SR	4 kota; 16.000 SR	4 kota; 16.000 SR	4 kota; 16.000 SR	4 kota; 16.000 SR	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pembangunan kilang mini plant LPG	1	1	-	-	-	-		
		Pembangunan Kilang BBM dan Petrokimia	1 lokasi (BED)	1 lokasi (BED)	FEED + Lahan	EPC	EPC	-		
		Penggunaan Gas Alam sebagai bahan bakar untuk transportasi (Pembangunan Infratraktur Gas bumi untuk transportasi)	2 SPBG online + 4 Mobine Refuelling Unit	2 SPBG online + 4 Mobine Refuelling Unit	0	0	0	-		
2	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM	1	1	1	1	1	-	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Kementerian ESDM
		Jumlah laporan pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Niaga terbatas pemegang ijin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non Subsidi	9	9	9	9	9	-		
		Jumlah Rancangan Peraturan/Juklak dan Juknis untu Penyediaan dan Pendistribusian BBM Nasional	2	2	2	2	2	-		
		Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas.	70	70	75	80	80	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Jumlah Peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan /atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha.	1	1	1	1	1	-	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Kementerian ESDM
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	Jumlah pembinaan keteknikan dan lingkungan bioenergi	16	16	16	16	16	-	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
		Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi	7985	7985	0	0	0	-		
5	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan			0	0	0	-		
		Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	154	154	90	80	80	-		
6	Perencanaan Energi, penerapan Konservasi energi dan Teknologi Energi Bersih	Jumlah Obyek Audit Energy			100	100	100	-		
		Jumlah Laporan Pengawasan Efisiensi Energi			13	13	13	-		
7	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	Jumlah Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi	7	7	7	3	15	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	Persentase (%) Pengurangan Volume Pembuangan Air Limbah Ke Lingkungan	75	75	0	0	0	-	Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas	Kementerian ESDM
		Persentase (%) Peningkatan Penggunaan Sistem Basis Data Usaha Penunjang Migas Dalam Operasi Internal	5	5	0	0	0	-		
		Jumlah Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia Untuk Kegiatan Usaha Migas	5	5	0	0	0	-		
		Persentase (%) Tingkat Kegagalan Operasi Kegiatan hilir Migas	24	24	0	0	0	-		
		Persentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan Kerja Kegiatan Usaha Migas	100	100	0	0	0	-		
		Persentase (%) Pengurangan Volume Pembakaran Gas Flare			0	0	0	-		
		Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan Mini LNG Plant dan L- CNG Station Untuk Kendaraan Bermotor (Tahap I))	Pengadaan lahan untuk : 1 unit Mini LNG Plant dan 8 unit LCNG	Pengadaan lahan untuk : 1 unit Mini LNG Plant dan 8 unit LCNG	Konstruksi 1 unit Mini LNG Plant dan 8 Unit LCNG	0	0	-		
		Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan SPBG CNG dan Infrastruktur Pipa di Semarang)	4 unit SPBG (1 mother station+ 3 daughter station)	4 unit SPBG (1 mother station+ 3 daughter station)	0	0	0	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	KEMENKOMINFO									
1	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	% pelayanan perijinan diproses tepat waktu	75%	75%	85%	85%	85%	85%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah operator radio yang bersertifikat	5050	5050	5150	5200	5200	5200		
		% Peningkatan perolehan PNBP	0,89%	0,89%	0,98%	0,94%	0,94%	0,94%		
2	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase (%) Utilitas Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
3	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
4	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
5	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		% penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	80%	80%	90%	90%	90%	90%		
		% ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian			100%	100%	100%	100%		
6	Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	% sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang ditertibkan	65%	65%	75%	80%	80%	80%	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah kebijakan dan regulasi standard Pos dan Informatika	10	10	8 Permen 2 RPM	8 Permen 2 RPM	8 Permen 2 RPM	8 Permen 2 RPM		
		Jumlah pra prototype dan atau prototype produk dalam negeri bidang informatika	3	3	3	3	3	3		
7	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	% pencapaian terhadap layanan pengamanan jaringan internet khususnya pada infrastruktur kritis	65%	65%	75%	75%	75%	75%	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		% dukungan sumber daya dan sistem dalam memberikan layanan pengamanan jaringan internet dan dukungan penegakan hukum	65%	65%	100%	100%	100%	100%		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	% desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72,800 desa di Indonesia)	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase (%) upgrading desa dering menjadi desa pintar	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		% penyelenggaraan MPLIK	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		Prosentase (%) pembangunan Internasional Internet Exchange	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		% pembangunan dan penyelenggaraan PLIK sentra produktif (1.235)	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		Prosentase (%) penyediaan Nusantara Internet Exchange	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS)	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten	100%	100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
		Prosentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan radio komunitas pada desa informasi (500 radio komunitas)	70%	70%	100%	100%	100%	100%		
		Prosentase (%) ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone nasional serat optik	100%	100%	80%	100%	100%	100%		
		Prosentase (%) ibukota kab/ kota yang mempunyai layanan broadband	88%	88%	88%	88%	100%	100%		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika	presentase (%) kebijakan dan regulasi dibidang telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		presentase (%) pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		presentase (%) implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi	35%	35%	50%	75%	90%	90%		
		Lokasi peningkatan pemancar TVRI (Proyek ITTS II)	-	-	50	-	-	-		
10	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos	% terpenuhinya regulasi bidang pos dan aturan turunannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase (%) layanan perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Prosentase (%) verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO pada lokasi uji petik KPC	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Prosentase (%) pemanfaatan prangko dan pembinaan filatelis	90%	90%	100%	100%	100%	100%		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Prosentase (%) terpenuhinya regulasi dan kebijakan di era konvergensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase (%) pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi yang tepat waktu	75%	75%	80%	80%	80%	80%		
12	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	Persentase (%) Pencapaian Terhadap Pembaharuan Kebijakan Regulasi dan Kelembagaan Akibat Adanya Digitalisasi dan Perkembangan Industri	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Perizinan Penyiaran Yang Tepat Waktu	95%	95%	100%	100%	100%	100%		
13	Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Prosentase (%) kepatuhan penyelenggara Pos dan Informatika	100 persen	100 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase (%) pencapaian evaluasi atas penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran dari keseluruhan penyelenggara yang telah memiliki izin yang dimonitoring	90 persen	90 persen	75%	80%	85%	85%		
		Prosentase (%) pencapaian PNBPN terhadap penyelenggaraan telekomunikasi	90 persen	90 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis	Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Bisnis	250 UKM	250 UKM	350 UKM	400 UKM	450 UKM	450 UKM	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah Pusat Layanan E-Bisnis	2unit	2unit	2unit	2unit	2unit	2unit		
15	Pembinaan dan Pengembangan E-Government	Jumlah Kebijakan dan Regulasi di bidang e-Government	1 Dokumen Regulasi	1 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Government Service Bus	12 Instansi	12 Instansi	12 Instansi	12 Instansi	12 Instansi	12 Instansi		
		Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement)	-	-	-	-	-	-		
		Nilai rata-rata e-Government Nasional	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
16	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar keamanan informasi	60	60	90 institusi/ lembaga	100 institusi/ lembaga	110 institusi/ lembaga	110 institusi/ lembaga	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut kasus pelanggaran keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika	Prosentase (%) pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source pada instansi pemerintah yang telah diberikan bimbingan	-	-	-	-	-	-	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah regulasi dan kajian teknis di bidang industri informatika	25%	25%	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi		
		jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional	1 keg	1 keg	30 karya	30 karya	30 karya	30 karya		
		jumlah Aplikasi/ Software/ konten/ Digital Indonesia	3 lokasi	3 lokasi	700 karya	700 karya	700 karya	700 karya		
		jumlah inkubator informatika di tingkat propinsi	600 karya	600 karya	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi		
18	Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat	3600 orang	3600 orang	3600 orang	3600 orang	3600 orang	3600 orang	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kemenkominfo
		Jumlah prototipe CAP yang dibangun	5 prototipe CAP dan 1 prototipe MCAP	5 prototipe CAP dan 1 prototipe MCAP	6 prototipe CAP	6 prototipe CAP	6 prototipe CAP	6 prototipe CAP		
		Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat	100 karya	100 karya	100 karya	100 karya	100 karya	100 karya		
C	RRI									

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	Prosentase (%) Infrastruktur Pemancar dan Sarana yang Menjangkau Wilayah NKRI dan Populasi dalam negeri	65 persen populasi	65 persen populasi	75 persen wilayah, 85 persen populasi	85 persen wilayah, 95 persen populasi	85 persen wilayah, 95 persen populasi		Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	LPP RRI
2	Pengembangan program dan Produksi Siaran Radio Publik	Jumlah Model Produksi Paket Siaran Informasi, Pendidikan, Pelestarian, Hiburan yang Sehat, Kontrol Sosial dan Membangun Citra positif Bangsa			10 paket	10 paket	10 paket			
		Jumlah Kebijakan Operational Program dan Produksi Siaran Pemberitaan			5 paket	5 paket	5 paket			
		Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional			15 lembaga	15 lembaga	15 lembaga			
3	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	Jumlah Kegiatan Layanan Publik Secara Langsung			43 kali	43 kali	43 kali			
		Jumlah Publikasi, Promosi dan Sosialisasi LPP RRI			5 paket	5 paket	5 paket			
		Jumlah Kegiatan Jasa Siaran dan Non Siaran			20 kali	20 kali	20 kali			

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	Jumlah Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Internasional			4 paket	4 paket	4 paket			
5	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	Jumlah Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional baik melalui Terrestrial, Digital maupun Media Baru			6 paket	8 paket	8 paket			
		Jumlah Pengembangan Materi Siaran informasi, Pendidikan, Pelestarian Budaya, Hiburan yang sehat dan kontrol sosial untuk siaran lokal, Regional, dan Nasional			5 paket	5 paket	5 paket			
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	Jumlah Paket Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan			5 paket	5 paket	5 paket			

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	TVRI									
1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik	Jumlah pengadaan teknik produksi dan penyiaran			5 unit	8 unit	10 unit		Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	LPP TVRI
		Jumlah pengadaan teknik transmisi			6 unit	6 unit	6 unit			
		Jumlah pengadaan teknologi informatika dan kerjasama teknik			3 unit	5 unit	5 unit			
		Jumlah pelaksanaan laporan kegiatan teknik			1 laporan	1 laporan	1 laporan			
		Jumlah sewa satelit			1 laporan	1 laporan	1 laporan			
		Persentase (%) jangkauan siaran TVRI terhadap wilayah NKRI dan populasi	40 % (wil), 68 % (pop)	40 % (wil), 68 % (pop)	60%	70%	80%			
2	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	Jumlah penyelenggaraan siaran berita			1300 jam siar	1300 jam siar	1300 jam siar			
		Jumlah penyelenggara siaran hiburan			6400 jam siar	6400 jam siar	6400 jam siar			
		Jumlah penyelenggara penunjang siaran			7700 jam siar	7700 jam siar	7700 jam siar			
		Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional			1 laporan	1 laporan	1 laporan			
		Jumlah penyelenggara operasional siaran			1 laporan	1 laporan	1 laporan			

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	Jumlah Materi Publikasi dan Promosi Kegiatan On Air dan Off Air			6 laporan	6 laporan	6 laporan			
		Jumlah kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Marketing			7 laporan	7 laporan	7 laporan			
		Jumlah laporan Inventarisasi aset			1 laporan	1 laporan	1 laporan			
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha			3 laporan	3 laporan	3 laporan			
4	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	Jumlah penyelenggara siaran berita dan hiburan			40000 jam siar	40000 jam siar	40000 jam siar			
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha			336 laporan	336 laporan	336 laporan			

MATRIKS 2.2.A
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapai an Tahun	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERSEDIAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR										
A. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL										
A	KESDM									
1	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Jumlah Laporan Penyusunan Penyiapan Program Ketenagalistrikan	20	20	20	20	20	-	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
		Jumlah Laporan Penyusunan Program Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik (laporan)	17	17	17	17	17	-		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Kerjasama Ketenagalistrikan	22	22	22	22	22	-		
		Jumlah laporan penyusunan program perencanaan listrik perdesaan	20	20	20	20	20	-		
		Jumlah Laporan Program Informasi dan Penyertaan Modal pemerintah bidang	17	17	17	17	17	-		
		Jumlah Kapasitas Pembangkit (MW)	164	164	62	4	0	-		
		Panjang Jaringan Transmisi (KMS)			4114	0	0	-		
		Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA)			960	120	1540	-		
		Panjang Jaringan Distribusi (KMS)	6,011	6,011	9521	10235	11034	-		
		Jumlah Kapasitas Gardu Distribusi (MVA)	137	137	3488	3763	4050	-		
		Jumlah Pelanggan Program Listrik Murah dan Hemat			88889	88889	88889	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapai an Tahun	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik	7	7	7	7	7	-	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
		Jumlah laporan Pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik	18	18	18	18	18	-		
		Jumlah laporan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	6	6	6	6	6	-		
		Jumlah Laporan Bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik	9	9	9	9	9	-		
		Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian perselisihan badan usaha dan konsumen tenaga listrik	4	4	4	4	4	-		
		Jumlah penyiapan harga dan subsidi listrik	4	4	4	4	4	-		
		Jumlah laporan bimbingan dan evaluasi harga dan subsidi listrik			17	17	17	-		
		Jumlah Laporan Bimbingan konsumen listrik	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah laporan pengawasan mutu pelayanan tenaga listrik	7	7	7	7	7	-		
		Jumlah laporan pengawasan penggunaan tenaga listrik	2	2	2	2	2	-		
		Jumlah laporan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	5	5	5	5	5	-		

Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapai an Tahun	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi	49	49	49	49	49	-	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
		Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan dan Keselamatan	48	48	48	48	48	-		
		Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	34	34	34	34	34	-		
		Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Lingkungan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	30	30	30	30	30	-		
		Jumlah laporan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Regulasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	33	33	33	33	33	-		
		Jumlah laporan pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	8	8	8	8	8	-		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
	FOKUS PRIORITAS									
I	PEMBANGUNAN DEMOKRASI									
1.1	Penguatan Peran Lembaga Demokrasi									
1.1.1	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	75%	75%	77,50%	77,50%	77,50%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
		Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	75%	75%	77,50%	77,50%	77,50%		
		Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	77,50%	77,50%	77,50%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100%	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)		
		Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia.	8 kali	8 kali	8 kali	1 kali/prov	1 kali/prov	1 kali/prov		
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi		
1.1.2	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	20 rancangan	20 rancangan	20 rancangan	20 rancangan	20 rancangan	20 rancangan	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	80%	80%	80%	80%	80%	80%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepeliluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
		Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis		
		Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi		
1.1.3	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	Persentase tingkat pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap aturan pengawasan pemilu	72%	72%	72%	75%	78%	80%	Program Pengawasan Penyelenggara n Pemilu	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
		Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu	4%	4%	4%	4%	4%	4%		
		Persentase jumlah layanan laporan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.1.4	Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaam Kehumasan dan Pengawasan Internal	Persentase proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilu	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
		Persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase pemberitaan positif tentang Bawaslu	82%	82%	82%	85%	90%	95%		
		Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu	75%	75%	75%	78%	80%	82%		
		Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi	65%	65%	65%	70%	75%	80%		
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	75%	75%	75%	78%	80%	82%		
		Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Hukum, Humas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.1.5	Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	Jumlah laporan rapat koordinasi kebijakan bidang demokratisasi dan kelembagaan	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi demokratisasi dan kelembagaan	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah laporan FGD pemantauan demokratisasi dan kelembagaan	3	3	3	3	3	3		
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang demokratisasi dan kelembagaan	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan demokrasi dan kelembagaan yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
		Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1	1	1	1	1	1		
1.1.6	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang ketahanan seni, budaya, agama serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan	1 PP 1 Modul	1 PP 1 Modul	1 PP 1 Modul	1 Permendagri 1 Modul	1 Modul	1 Modul	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Jumlah daerah yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan kinerja SDM ormas	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi		
		Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa dan evaluasi terhadap ormas	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	20 Forum	20 Forum	20 Forum	28 Forum	28 Forum	28 Forum		
		Jumlah daerah provinsi yang berkinerja baik pada implementasi kebijakan bidang Ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi		
		Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka penguatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	200 ormas	200 ormas	200 ormas	200 ormas	200 ormas	200 ormas		
1.1.7	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik dalam negeri yang akuntabel	1 PP dan 1 Permendagri	1 PP dan 1 Permendagri	1 PP dan 1 Permendagri	1 UU,1 Permendagri dan 1 Modul	1 UU,1 Permendagri dan 1 Modul	1 UU dan 1 Permendagri	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pengembangan politik dalam negeri	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas		
		Jumlah Fasilitasi forum, diseminasi, Monev dan pendampingan Bidang politik dalam negeri	13 Forum	13 Forum	13 Forum	15 Forum	17 Forum	20 Forum		
		Jumlah parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan peningkatan kapasitas	12 parpol	12 parpol	12 parpol	12 parpol	12 parpol	12 parpol		
		Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practise pendidikan politik	15 Provinsi	15 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi		
1.2	Jaminan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Politik Rakyat									
1.2.1	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Komisi Pemilihan Umum (KPU)

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		% proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota	9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota	9 Provinsi dan 30 Kab/ Kota	18 Provinsi dan 130 Kab/ Kota	27 Provinsi dan 270 Kab/ Kota	33 Provinsi dan 530 Kab/ Kota		
		Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja		
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja	65 Satuan Kerja		
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	531 Satuan Kerja	531 Satuan Kerja	531 Satuan Kerja	531 Satuan Kerja	531 Satuan Kerja	531 Satuan Kerja		
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah	200 Daerah		
		Jumlah pusat pendidikan pemilih	9 Provinsi	9 Provinsi	9 Provinsi	18 Provinsi	27 Provinsi	33 Provinsi		
		% penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	75%	75%	75%	75%	75%	75%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.3	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik									
1.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	Jumlah Kebijakan, Regulasi, dan Standardisasi di bidang Komunikasi dan Informasi Publik	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Jumlah strategi komunikasi dan diseminasi kebijakan publik dalam kerangka <i>government public relations</i>	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah pedoman petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengelolaan komunikasi publik	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah Pembinaan dan pengembangan SDM bidang layanan informasi dan komunikasi publik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		
		Jumlah advokasi dan edukasi komunikasi publik dalam rangka implementasi UU KIP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah laporan hasil pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan, regulasi, dan standarisasi di bidang komunikasi publik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.3.2	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	1. Jumlah Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra	300 Analisis	300 Analisis	300 Analisis	300 Analisis	300 Analisis	300 Analisis		
		3. Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		
		4. Jumlah pengelolaan umpan balik di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan		
1.3.3	Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik dan literasi media	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah <i>media center</i> lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi		
		3. Jumlah <i>media center</i> yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	15 lokasi		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		4. Jumlah Aktifitas Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik (termasuk pemanfaatan media sosial)	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan		
1.3.4	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	1. Jumlah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat di prov/kab/kota	na	na	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik	43 kegiatan	43 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan		
		3. Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP, TVRI, dan RRI)	160 laporan	160 laporan	160 laporan	160 laporan	160 laporan	160 laporan		
1.3.5	Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional	1. Jumlah kemitraan layanan informasi internasional dengan lembaga-lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing, dan masyarakat indonesia di luar negeri	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		2. Jumlah aktivitas komunikasi publik langsung ke masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di Luar Negeri	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan		
1.3.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat	1. Prosentase penyelesaian sengketa informasi publik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Prosentase PPID yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik (KIP)	90%	90%	95%	95%	95%	95%		
1.3.7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	1. Presentase (%) pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan			90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran			9	9	9	9		
		3. Presentase (%) tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI			80%	80%	80%	80%		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.3.8	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil litbang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
		3. Jumlah peserta Bimtek CIO	500	500	500 org	500 org	500 org	500 org		
		4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi	500	500	500 org	500 org	500 org	500 org		
		5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik	1.000	1.000	500 org	500 org	500 org	500 org		
		6. Jumlah Penerima Beasiswa S2/S3 Dalam dan Luar Negeri (PNS Kominfo Pusat dan Daerah, termasuk persiapannya)	445 org	445 org	200 org	200 org	200 org	200 org		
		7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		
		8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi	1.000 org	1.000 org	500 org	500 org	500 org	500 org		
1.4	Penguatan Sistem Presidensial									

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.5	Penanggulangan Terorisme									
1.5.1	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	Jumlah Pengoperasian Satgas Pencegahan dan kontra propaganda dalam Penanggulangan Terorisme	7	7	7	6	6	6	Program Penanggulan n Terorisme	Badan Nasional Penanggulang an Terorisme (BNPT)
		Jumlah Fasilitasi Pelatihan Penanggulangan Terorisme di <u>Bidang Pencegahan</u>	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah Laporan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan dan <u>Perlindungan</u>	11	11	11	11	11	11		
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terkait Upaya Pencegahan dalam rangka Meminimalkan Berkembangnya Paham Radikal <u>Terorisme</u>	29	29	29	29	29	29		
		Jumlah Sosialisasi dan Kajian di Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi	16	16	16	16	16	16		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1.5.2	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	Jumlah Pelaksanaan Penggalangan Intelijen, Pengoperasian Satgas Penindakan dan Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Dalam Penanggulangan Terorisme	81	81	81	81	81	81	Program Penanggulan n Terorisme	Badan Nasional Penanggulan an Terorisme (BNPT)
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan Organisasi Dalam Penanggulangan Terorisme	3	3	3	3	3	3		
		Jumlah Pengembangan Sistem Operasi dalam Penanggulangan Terorisme	5	5	5	5	5	5		
		Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban, Saksi, dan Aparat Penegak Hukum Terkait Ancaman Terorisme	19	19	19	19	19	19		
1.5.3	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama Internasional	Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Bilateral	12	12	12	12	12	12	Program Penanggulan n Terorisme	Badan Nasional Penanggulan an Terorisme (BNPT)
		Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Kerjasama Regional dan Multilateral	12	12	12	12	12	12		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
II	PENCEGAHAN KONFLIK	Jumlah Pelaksanaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Konvensi Internasional, Resolusi PBB dan Non PBB	6	6	6	6	6	6		
2.1	Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik									
2.1.1	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah laporan rapat koordinasi wawasan kebangsaan	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi wawasan kebangsaan	10	10	10	10	10	10		
		Jumlah laporan FGD wawasan kebangsaan	2	2	2	2	2	2		
		Jumlah laporan forum koordinasi dan konsultasi wawasan kebangsaan	3	3	3	3	3	3		
		Jumlah rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan	4	4	4	4	4	4		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
		Persentase rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
2.1.2	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional	1 PP	1 PP	1 PP	1 Permendagri 1 Modul	1 Modul	1 Modul	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri
		Jumlah Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik dan penanganan gangguan kamdagri) seluruh Indonesia	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Jumlah wilayah yang mendapatkan supervisi dalam penanganan konflik	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim)	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim)	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim)	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim)	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim)	· 8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT, Jatim)		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
			· 16 wilayah rawan konflik	· 16 wilayah rawan konflik	· 16 wilayah rawan konflik	· 16 wilayah rawan konflik	· 16 wilayah rawan konflik	· 16 wilayah rawan konflik		
			· 10 wilayah potensi konflik	· 10 wilayah potensi konflik	· 10 wilayah potensi konflik	· 10 wilayah potensi konflik	· 10 wilayah potensi konflik	· 10 wilayah potensi konflik		
		Jumlah Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pemantapan kewaspadaan nasional	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas	100 ormas		
		Jumlah Peningkatan kapasitas pemerintah daerah bidang kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
		Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	160 Rekomendasi	170 Rekomendasi	180 Rekomendasi		

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
2.1.3	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri
		Jumlah daerah melaksanakan penguatan karakter bangsa	10 Prov	10 Prov	10 Prov	8 Prov	7 Prov	5 Prov		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)		
		Jumlah rekomendasi penelitian bidang Idpoleksosbud dalam rangka kesatuan bangsa dan politik	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	160 Rekomendasi	170 Rekomendasi	180 Rekomendasi		
		Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas	100 Ormas		

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
PRIORITAS SUB BIDANG: PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL										
A	Pemantapan Komunitas ASEAN	1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
		2. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3. Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN.	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
1	Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	65%	65%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu/ Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Politik-Keamanan ASEAN
		Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	70%	70%	85%	85%	85%	85%		
		Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Polkam ASEAN	65%	65%	90%	90%	90%	90%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
2	Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN
		Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
		Persentase rekomendasi/ kontribusi yang diterima sebagai posisi Indonesia	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
3	Kerjasama ASEAN bidang Fungsional	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN
		Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
		Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action lines) Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	80%	80%	85%	85%	85%	85%	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	Kemenlu/Ditjen Kerja Sama ASEAN/Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan
		Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015	80%	80%	82%	82%	82%	82%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
6	Koordinasi Kerjasama ASEAN	Jumlah laporan rapat koordinasi kerjasama ASEAN	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi kerjasama ASEAN	8	8	8	8	8	8		
		Jumlah laporan FGD kerjasama ASEAN	2	2	2	2	2	2		
		Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama ASEAN	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama ASEAN yang	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
B	Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia	Persentase Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia			80%	80%	80%	80%		
1	Koordinasi Hubungan Multilateral	Jumlah laporan rapat koordinasi hubungan multilateral	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi hubungan multilateral	15	15	15	15	15	15		
		Jumlah laporan FGD hubungan multilateral	2	2	2	2	2	2		
		Jumlah rekomendasi kebijakan kerjasama multilateral	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama multilateral yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
2	Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	Jumlah laporan rapat koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan	6	6	6	6	6	6		
		Jumlah laporan penggalangan intelijen untuk wilayah perbatasan dan PPKT	10	10	10	10	10	10		
		Jumlah laporan FGD koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah rekomendasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
		Laporan Desk Wiltas dan PPKT	12	12	12	12	12	12		
3	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)	Jumlah laporan rapat koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam
		Jumlah pemantapan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	10	10	10	10	10	10		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah FGD koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	1	1	1	1	1	1		
		Laporan Pokja P2PMPS	12	12	12	12	12	12		
		Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
4	Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	<p>Jumlah inisiatif Indonesia untuk meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian</p> <p>Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme</p>	-	-	5	5	5	5	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu/Ditjen Multilateral/Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
			80%	80%	80%	80%	80%	80%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
		Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
		Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme pada tingkat nasional	25	25	25	25	25	25		
6	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah	10	10	10	11	12	12	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Timur Tengah
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya	7	7	7	8	9	9		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah	9	9	9	10	11	11		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan	10	10	10	11	12	12		
5	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	Kemenlu/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional/Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan
		Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders.	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
C	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
		Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	60%	60%	60%	60%	60%	60%		
1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	Kemenlu/Ditjen Protokol dan Konsuler/Direktorat Perlindungan WNI dan BHI
		Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	60%	60%	60%	60%	60%	60%		
		Repatriasi WNI di Luar Negeri	4000	4000	1 ISO	1 ISO	1 ISO	1 ISO		
		Persentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWN dan BHI	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
D	Penguatan Diplomasi Ekonomi	Persentase promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan kawasan Amerika dan Eropa			100%	100%	100%	100%		
		Persentase dokumen kerja sama yang disepakati di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan kawasan Amerika dan Eropa			80%	80%	80%	80%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
1	Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Jumlah laporan rapat koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam
		Jumlah laporan pemantauan koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	9	9	9	9	9	9		
		Jumlah laporan sosialisasi polhukam kepada para dubes asing di Indonesia	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah laporan FGD koordinasi Asia, Pasifik dan Afrika	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah rekomendasi kebijakan	4	4	4	4	4	4		
		Persentase rekomendasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%	85%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik	47	47	43	44	44	44	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Asia Timur dan Pasifik
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya	50	50	21	22	22	22		
		Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Timur dan Pasifik	43	43	10	11	11	11		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan	19	19	11	12	12	12		
		Persentase penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	70%	70%	80%	80%	80%	80%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah	40	40	40	42	44	44	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Asia Selatan dan Tengah
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya	12	12	13	15	17	17		
		Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Selatan dan Tengah	12	12	14	16	18	18		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan	14	14	16	18	19	19		
		Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking.	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Sub Sahara Afrika	75	75	17	17	17	17	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/Direktorat Afrika
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya	6	6	4	4	4	5		
		Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Sub Sahara Afrika	20	20	3	3	4	4		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan termasuk koordinasi <i>capacity building</i>	20	20	15	15	15	15		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah	10	10	10	11	12	12	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Timur Tengah
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya	7	7	7	8	9	9		
		Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah	9	9	9	10	11	11		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan	10	10	10	11	12	12		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
6	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kemenlu/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika/ Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Aspasaf
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati	21	21	22	23	24	24		
		Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia	1	1	2	3	4	4		
		Jumlah peserta seminar/sosialisasi yang memahami mengenai Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika	125	125	125	200	200	200		
7	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Amerika Utara dan Tengah	9	9	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Amerika Utara dan Tengah
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya	5	5	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah	5	5	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan	8	8	7 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan		
8	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	2	2	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Amerika Selatan dan Karibia
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya	4	4	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia	1	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan	7	7	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan		
9	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Eropa Barat	9	9	7 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Eropa Barat
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Barat	9	9	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan	6	6	3 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
10	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur	3	3	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Eropa Timur dan Tengah
		Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan serta sosial budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur	5	5	6 dokumen	7 dokumen	8 dokumen	7 dokumen		
		Jumlah kunjungan/pertemuan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur	4	4	5 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen		
		Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan pendidikan	12	12	13 laporan	14 laporan	15 laporan	14 laporan		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
11	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Amerika dan Eropa di Indonesia	7	7	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Kemenlu/Ditjen Amerika dan Eropa/ Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa
		Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa	20	20	9 dokumen	10 dokumen	11 dokumen	12 dokumen		
		Persentase peserta dari daerah yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar mengenai kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa	80% (3 kegiatan)	80% (3 kegiatan)	2%	2%	2%	2%		
12	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu/Ditjen Multilateral/ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI
		Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI pada tingkat nasional	27	27	25 implementasi	25 implementasi	25 implementasi	25 implementasi		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
13	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu/Ditjen Multilateral/ Direktorat Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
		Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
		Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup pada tingkat nasional	52	52	30 implementasi	30 implementasi	30 implementasi	30 implementasi		
E	Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular	Persentase pemenuhan permintaan kerjasama Selatan-Selatan dari negara lain yang dapat dipenuhi oleh Indonesia			60%	60%	60%	60%		
		Persentase pemenuhan permintaan kerjasama triangular yang dapat dipenuhi oleh Indonesia			60%	60%	60%	60%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik	Persentase peserta asing yang pemahaman terhadap materi yang diberikan	60%	60%	65%	65%	70%	70%	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	Kemenlu/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik/Direktorat Kerjasama Teknik
		Persentase peserta domestik yang pemahaman terhadap kebijakan Kerjasama Teknik	60%	60%	65%	65%	70%	70%		
		Jumlah peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima	10%	10%	15%	15%	20%	20%		
		Jumlah peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular	10%	10%	15%	15%	20%	20%		
		Jumlah peningkatan naskah Perjanjian Kerjasama Teknik yang ditandatangani	10%	10%	15%	15%	20%	20%		
		Persentase peserta domestik yang pemahamannya mengenai rencana induk dan cetak biru KSS dan Triangular	60%	60%	60%	65%	65%	65%		

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(9)	(9)	(9)	(10)	(11)
2	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	87%	87%	87%	87%	87%	87%	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Kemenlu/Ditjen Multilateral/Direkto rat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
		Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	-	-	70%	70%	70%	70%		
		Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada organisasi internasional tentang isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang pada tingkat nasional	31	31	26 implementasi	26 implementasi	26 implementasi	26 implementasi		

MATRIKS 2.2. A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces									
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel									
1	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/ Latma Internasional	Jumlah Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri	330 ribu	330 ribu	330 ribu	330 ribu	330 ribu	330 ribu	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	MABES TNI
2	Latihan Matra Darat	Jumlah Latihan Kematraan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	TNI AD
3	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	Jumlah kecukupan perumahan- asrama prajurit	800 Unit	800 Unit	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	TNI AD
4	Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut	Jumlah kecukupan perumahan- asrama prajurit	1 paket	1 paket	53%	53%	53%	53%	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	Jumlah latihan operasi matra TNI AL	1 paket	1 paket	47%	50%	52%	55%	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL
6	Latihan Matra Udara	Jumlah latihan matra udara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU
7	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	Jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU
B	Focus Prioritas Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara									
1	Pengadaan barang dan jasa militer	Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel	1 Paket	1 Paket	65%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	Kemhan

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengadaan MKB	Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI
3	Pembangunan Sarpras Pendukung	Pemenuhan Sarpras Pendukung Alutsista Integratif	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI
4	Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur	Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
5	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang	Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
6	Pemeliharaan/ Perawatan Alat Angkut Air	Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
7	Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/ Alpal	Jumlah senjata dan munisi/alpal yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur	Penambahan Ranpur terhadap MEF	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD
9	Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	Penambahan Sabang terhadap MEF	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD
10	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	Ketersediaan dan Kesiapan Fasilitas Sarana prasarana Pendukung Alutsista	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Komplek Matra Laut	Kesiapan peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
12	Pemeliharaan/Perawat an Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut	Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL	1 Paket	1 Paket	7%	7%	7%	7%	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
13	Pemeliharaan/Perawat an Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis	Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis TNI AL	1 Paket	1 Paket	25%	25%	25%	25%	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
14	Pemeliharaan/Perawat an Pesud	Kesiapan Pesud TNI AL	1 Paket	1 Paket	13%	13%	13%	13%	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	Jumlah fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL	1 paket	1 paket	90%	90%	90%	90%	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
16	Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	jumlah penambahan platform dan/atau penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL	1 Paket	1 Paket	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
17	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
18	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya	Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Pemeliharaan/ Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya	Jumlah Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU
20	Peningkatan/ Pengadaan Pesawat Udara	Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU
21	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	Jumlah sarpras pendukung Alutsista TNI AU	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU
C	Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara									

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar)									
1	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	13 Pos Perbatasan	13 Pos Perbatasan	24 Pos Perbatasan	24 Pos Perbatasan	24 Pos Perbatasan	24 Pos Perbatasan	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana <u>Matra Darat</u>	TNI AD
2	Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	Penambahan jumlah pos pulau terluar	6 Pos	6 Pos	6 Pos	6 Pos	6 Pos	6 Pos	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
II	Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional									

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional									
1	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pertahanan	Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel	Tahap TD	Tahap TD	Tahap EMD	Tahap EMD	Tahap EMD	Tahap EMD	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	Kemhan
2	Produksi Alutsista industri dalam negeri	% jenis alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri	6%	6%	8%	10%	10%	10%	Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan	Kemhan
3	Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan	Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri Pertahanan	persiapan	persiapan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Program Potensi Pertahanan	Kemhan
4	Pengkajian dan Rancan Bangun Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Peralatan Sandi	Jumlah hasil kajian dan rancang bangun produk sandi tepat guna			11	11	11	11	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lemsaneg
		Jumlah Aplikasi/ device/ modul perangkat keras dan atau perangkat lunak yang diaplikasikan dalam operasi kriptanalisis	2	2	1	1	1	1		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri	Jumlah prototype dan pengkajian yang dihasilkan	8	8	9	10	10	12	Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian	Polri
III	Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging)									
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka)									
1	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	Terbangunnya sarana dan prasarana pengamanan di laut beserta fasilitas pendukungnya	5 Paket	5 Paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia	9 Kali	9 Kali	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla
IV	Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat									
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri									
1	Pengembangan Peralatan Polri	Persentase penambahan ketersediaan Alut dan Alsus Kepolisian	4%	4%	4.61%	8.86%	13.43%	18.21%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	Polri
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri	Jumlah peserta pendidikan dan latihan Polri	20350 orang	20350 orang	102,711 orang	102,711 orang	102,711 orang	102,711 orang	Program Pendidikan dan latihan Polri	Polri
3	Pengendalian pegawai Polri	Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah	20350 orang	20350 orang	15,350 org	15,350 org	15,350 org	15,350 org	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Polri

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba									
1	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah	Jumlah desiminasi informasi melalui kegiatan tatap muka	3.031 wahana	3.031 wahana	4.226 Kali	4.268 Kali	4.311 Kali	4.354 Kali	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak nasional			1.027 Media	1.037 Media	1.048 Media	1.058 Media		
		Jumlah desiminasi informasi melalui TV dan radio			1.358 Kali	1.371 Kali	1.385 Kali	1.399 Kali		
		Jumlah desiminasi informasi melalui penayangan konten di media baru			2.583 Kali	2.609 Kali	2.635 Kali	2.662 Kali		
		Jumlah stakeholder yang memanfaatkan dan mengintegrasikan informasi P4GN bidang pencegahan dalam pengambilan kebijakan			710 Stake Holder	717 Stake Holder	724 Stake Holder	732 Stake Holder		
		Jumlah Katalisator Pencegahan Unit Keluarga (KPUK) P4GN dalam rangka program satu desa satu KPUK			617 KPUK	697 KPUK	704 KPUK	711 KPUK		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi			4.856 Satgas	4.904 Satgas	4.953 Satgas	5.003 Satgas		
		Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah daerah dan swasta			2.225 Satgas	2.247 Satgas	2.269 Satgas	2.292 Satgas		
		Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan			1.217 Fasilitator	1.229 Fasilitator	1.241 Fasilitator	1.254 Fasilitator		
		Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai			165 Fasilitator	182 Fasilitator	200 Fasilitator	219 Fasilitator		
		Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif			44 Lingkungan	45 Lingkungan	45 Lingkungan	45 Lingkungan		
		Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif			6 Lingkungan	7 Lingkungan	7 Lingkungan	7 Lingkungan		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba			204 Lembaga	206 Lembaga	208 Lembaga	210 Lembaga		
		Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba			143 Lembaga	145 Lembaga	146 Lembaga	148 Lembaga		
		Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		Jumlah mantan pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi di rumah dampingan			-	550 Orang	800 Orang	1.100 Orang		
		Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba dan jumlah berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan (P.21)			140 Berkas	141 Berkas	143 Berkas	144 Berkas		
		Jumlah laporan pemetaan jaringan di wilayah kabupaten/kota			389 Laporan	393 Laporan	397 Laporan	401 Laporan		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja unit kerja			301 Dokumen	324 Dokumen	327 Dokumen	331 Dokumen		
		Jumlah bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
2	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN	Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka	1.296 wahana	1.296 wahana	140 Kali	145 Kali	150 Kali	155 Kali	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional			4 Media	5 Media	6 Media	7 Media		
		Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik			24 Kali	30 Kali	36 Kali	42 Kali		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru			12 Kali	15 Kali	18 Kali	21 Kali		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
3	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan	20 jaringan	20 jaringan	20 Jaringan	22 Jaringan	24 Jaringan	24 Jaringan	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen			44 Prangkat	46 Prangkat	48 Prangkat	50 Prangkat		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang intelijen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Layanan Perkantoran			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
4	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah interdiksi yang diselesaikan (P.21)	65 dokumen	65 dokumen	40 Berkas	60 Berkas	70 Berkas	80 Berkas	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang Interdiksi wilayah udara. laut. darat dan lintas darat			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Layanan Perkantoran			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
5	Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat	28 Kerja sama	28 Kerja sama	29 Kerja Sama	31 Kerja Sama	33 Kerja Sama	35 Kerja Sama	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah pelaksanaan kerjasama pada forum bilateral. regional. dan multilateral	24 Kerja sama	24 Kerja sama	24 Kerja Sama	27 Kerja Sama	27 Kerja Sama	30 Kerja Sama		
6	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis	Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkotika sintetis yang diselesaikan (P.21)	16 Berkas	16 Berkas	38 Berkas	38 Berkas	40 Berkas	40 Berkas	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah satuan tugas (satgas) anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan tinggi			50 Satgas	55 Satgas	60 Satgas	65 Satgas	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah satgas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah pusat dan swasta			90 Satgas	100 Satgas	110 Satgas	120 Satgas		
		Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan			40 Fasilitator	45 Fasilitator	50 Fasilitator	55 Fasilitator		
		Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai			100 Fasilitator	105 Fasilitator	110 Fasilitator	115 Fasilitator		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pemberdayaan peran serta masyarakat yang diterbitkan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset	Jumlah bulan layanan perawatan tahanan dan pengawasan barang bukti BNN	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah berkas perkara penyidikan aset tersangka jaringan sindikat narkoba yang diselesaikan (P.21)			14 Berkas	16 Berkas	16 Berkas	16 Berkas		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang perawatan tahanan. barang bukti. dan penyidikan dan pengelolaan aset			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Layanan Perkantoran			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
9	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	2.796 lembaga	2.796 lembaga	100 Lembaga	105 Lembaga	110 Lembaga	115 Lembaga	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL			33 Lembaga	36 Lembaga	40 Lembaga	44 Lembaga		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
10	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	560 lembaga	560 lembaga	100 Lembaga	105 Lembaga	110 Lembaga	115 Lembaga	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan			2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman		
11	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social di balai rehabilitasi BNN (Rawat Inap)	1.430 orang		1.300 Orang	1.350 Orang	1.600 Orang	1.850 Orang	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah korban penyalahgunaan narkoba teratur pakai yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social rawat jalan			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		
		Jumlah laporan hasil penelitian rehabilitasi medis dan sosial			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
		Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi P4GN			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
		Jumlah laporan data informasi rekam jejak korban penyalahgunaan narkoba			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
		Jumlah layanan urusan tata usaha dan rumah tangga			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		Jumlah layanan perkantoran			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		Peralatan dan fasilitas perkantoran			1 Paket	-	-	-		
		Gedung/bangunan			1 Paket	-	-	1 Paket		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C	Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional									
1	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Persentase crime clearance di wilayah polda	59%	59%	52%	52%	53%	53%	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Polri
D	Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi									
1	Pembinaan Potensi Keamanan	Jumlah Forum Kemitraan Polmas : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif	54560 : 50 Polres	54560 : 50 Polres	54560 : 50 Polres	60000 : 50 Polres	60000 : 50 Polres	60000 : 50 Polres	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Polri
2	Pembinaan Pemeliharaan dan Ketertiban Kewilayahan	Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.	0.45	0.45	45%	45%	45%	45%	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	Jumlah layanan Turjawali dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat	5,000,000	5,000,000	5,128,500	5,384,925	5,654,171	5,936,880	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri
	Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bidang Lantas	Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas	12	12	12	12	12	12	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri
E	Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme									
1	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	12	12	7	7	7	7	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
					2,092	2,100	2,100	2,100		
					2,156	2,160	2,160	2,160		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Prioritas Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional									
A	Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri									
1	Operasi Intelijen Strategis	Persentase data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG pertahanan negara	200	200	80%	90%	90%	90%	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif	MABES TNI
2	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Laporan kegiatan intelijen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	Laporan intelijen TNI AL	1 Paket	1 Paket	84%	84%	84%	84%	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
4	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	Laporan kegiatan intelijen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU
5	Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri	Jumlah rencana operasi intelijen teknologi	9	9	8	8	8	8	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalian Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah kegiatan dan/atau operasi luar negeri			130	130	130	130		
		Jumlah laporan intelijen luar negeri yang disusun			2,010	2,010	2,010	2,010		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Kegiatan Operasi Kontra Intelijen	Jumlah rencana operasi kontra intelijen	9	9	6	6	6	6	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalian Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen			1,124	1,124	1,124	1,124		
		Jumlah laporan kontra intelijen			4,800	4,800	4,800	4,800		
7	Analisis dan Produksi Intelijen	Jumlah rencana analisis dan produksi intelijen	9	9	3	3	3	3	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalian Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah dokumen perkiraan intelijen			115	115	115	115		
		Jumlah produk intelijen yang disusun			1,084	1,084	1,084	1,084		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri									
1	Operasi Analisa sinyal	Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal dan ancaman pihak asing)	30	30	6	6	6	6	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara
2	Penyelenggaraan Fasilitas Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persentase pemanfaatan materiil sandi pada pengelolaan informasi rahasia	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara
3	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Nilai potensi kebocoran informasi rahasia	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
	FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM	Presentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Umum di Kepolisian								
		Presentase Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan								
		Jumlah Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Tk. II (Banding)								
		Jumlah Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung								
		Jumlah Aparat Penegak Hukum yang Mengikuti Diklat ABH								
1	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang -Undangan	Persentase (%) rancangan undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan global yang disusun sesuai dengan Prolegnas secara tepat waktu	-	-	20	40	60	80	Program Pembentukan Hukum	Kemenkumham
		Persentase (%) rancangan undang-undang hukum perdata dan hukum acara perdata yang disusun secara tepat waktu	-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu	100	100	20	40	60	80		
		Persentase (%) dibahasnya rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif Kemenkumham di DPR-RI	100	100	20	40	60	80		
		Persentase (%) dibahasnya RUU KUHAP/KUHP di DPR-RI			20	40	60	80		
		Jumlah tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi	100	100	20	40	60	80		
		Jumlah dokumen dan bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan up to date	100	100	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat							Program Pendidikan dan Pelatihan	Kemenkumham
		Jumlah dokumen kurikulum dan modul, tenaga pendidik dan tenaga pengajaran yang up to date, akuntabel dan efisien	-	-	6	7	8	9		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang Teknis	4.772 (96%)	4.772 (96%)	1,570	2,475	2,723	2,995		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	-	-	400	440	484	532		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS)	-	-	320	352	387	426		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya pada bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu	-	-	40	80	120	120		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat di bidang Teknis	-	-	23	25	28	31		
3	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan layanan informasi, komunikasi berbasis IT sesuai standar	-	-	30	40	50	60	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Kemenkumham
		Jumlah UPT Pemasarakatan yang mengisi data pemasarakatan di SDP sesuai standar	-	-	5	10	15	20		
		Jumlah standar pelaksanaan layanan informasi, komunikasi berbasis IT yang dibuat	-	-	2	2	2	2		
		Jumlah layanan pemasarakatan yang berbasis IT	-	-	36	41	46	51		
		Indeks pemahaman masyarakat mengenai pemasarakatan	-	-	0	50	0	0		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Divisi Pemasarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan	-	-	33	33	33	33		
		Jumlah MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri	1	1	10	15	20	25		
		Jumlah MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	-	-	5	8	10	13		
4	Kegiatan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang Terintegrasi Secara Online Dalam Jaringan Informasi Hukum Nasional	340 (50%)	340	88	100	110	120	Program Pembinaan Hukum Nasional	Kemenkumham
		Jumlah Data Dokumen Hukum Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah Yang Terintegrasi dan Dapat Diakses Melalui Pusat JDIHN dan Pusat Layanan Informasi Hukum di Daerah	-	-	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
5	Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar	-	-	30	50	70	90	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Kemenkumham
		Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan pelayanan pengaduan sesuai standar	-	-	5	10	15	20		
		Jumlah UPT Pemasarakatan yang memenuhi standar hunian	20%		5	10	15	20		
		Jumlah standar pengelolaan keamanan dan ketertiban yang dibuat	-	-	3	3	3	3		
		rekomendasi penegakan kode etik dan profesi yang ditindaklanjuti	60%		50	55	60	65		
		Jumlah Divisi Pemasarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keamanan dan ketertiban oleh UPT PAS di wilayah masing-masing	-	-	33	33	33	33		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	-	-	50	55	60	65	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Kemenkumham
		narapidanan yang memperoleh pelayanan pembinaan sesuai standar	-	-	60	65	70	75		
		narapidanan dan tahanan yang memperoleh pelayanan perawatan sesuai standar	-	-	60	65	70	75		
		penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP dan Tahanan	-	-	60	65	70	75		
		Jumlah usulan Asimilasi dan Integrasi (PB,CB,CMB, CMK)	-	-	60	65	70	75		
		Anak didik Pemasyarakatan yang memperoleh layanan pembimbingan dan pengentasan	-	-	60	65	70	75		
		Narapidana dan klien Pemasyarakatan yang mengikuti bimbingan kegiatan keterampilan dan latihan kerja	-	-	60	65	70	75		
		Layanan Informasi dan Komunikasi Pemasyarakatan yang diberikan sesuai standar	-	-	60	65	70	75		
		Basan Baran yang dikelola sesuai standar	-	-	60	65	70	75		
		Tahanan yang memperoleh Pelayanan Tahanan sesuai standar	-	-	60	65	70	75		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan standar	-	-	60	65	70	75		
		Layanan Perkantoran	-	-	85	90	95	100		
7	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Jumlah Rupbasan yang melaksanakan layanan Registrasi dan Identifikasi Basan Baran sesuai standar	-	-	2	4	6	8	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Kemenkumham
		Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Pengamanan dan Pemeliharaan Basan Baran sesuai standar	-	-	2	4	6	8		
		Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Mutasi dan Penghapusan Basan Baran sesuai standar	-	-	2	4	6	8		
		Jumlah standar pengelolaan basan dan baran yang dibuat	-	-	3	3	3	3		
		Jumlah Divisi Masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan basan dan baran oleh UPT PAS di wilayah masing-masing	-	-	33	33	33	33		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
8	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Pemasyarakatan							Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan	97% (195 org)	195	195	260	260	260		
		Persentase (%) Pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	-	-	12	12	12	12		
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Keimigrasian								
		Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian	65	65	194	195	195	195		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
9	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas	-	-	65 Kegiatan	68 Kegiatan	70 Kegiatan	73 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	100	100	50	60	70	80		
10	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas	-	-	65 Kegiatan	68 Kegiatan	70 Kegiatan	73 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	100	100	50	60	70	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
11	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini WTP	-	-	69 Kegiatan	72 Kegiatan	75 Kegiatan	78 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	100	100	50	60	70	80		
12	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP	-	-	65 Kegiatan	68 Kegiatan	70 Kegiatan	73 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	100	100	50	60	70	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
13	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas	-	-	65 Kegiatan	68 Kegiatan	70 Kegiatan	73 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	100	100	50	60	70	80		
14	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP	-	-	65 Kegiatan	68 Kegiatan	70 Kegiatan	73 Kegiatan	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	Kemenkumham

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	100	100	50	60	70	80		
15	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan dan Assessment Anak sesuai standar	-	-	7	7	9	11	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan	Kemenkumham
		Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan Assessment Klien Pemasyarakatan sesuai standar	-	-	5	7	9	11		
		Jumlah LPKA yang melaksanakan Pendidikan Anak sesuai standar	-	-	10	11	12	13		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	-	-	2	4	6	8		
		Jumlah Bapas yang melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan Klien sesuai standar	-	-	8	13	18	23		
		Jumlah Bapas yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan sesuai standar	-	-	8	13	18	23		
		Jumlah Divisi Pemasarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan Pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak oleh UPT PAS di wilayah masing-masing	-	-	33	33	33	33		
		Jumlah standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat	-	-	5	5	5	5		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
16	Kegiatan Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	Persentase tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	100%	Program Administrasi Hukum Umum	Kemenkumham
		Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	2	2	2	2		
		Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat bidang hukum internasional	-	-	7	7	7	7		
17	Kegiatan Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	Jumlah kebijakan di Peradilan Umum	-	-	1	1	1	1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Mahkamah Agung
18	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan	Terlaksananya Pelatihan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (magang & diklat)	420	420	312	312	312	312	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Mahkamah Agung
		Terlaksananya Pelatihan bagi Hakim dan Panitera Berkelanjutan	-	-	460	460	460	460		
		Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Hakim	-	-	640	640	640	640		
		Terlaksananya pelatihan bagi teknis fungsional Hakim?Pendalaman Materi	-	-	500	500	500	500		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
19	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	-	-	24	31	32	33	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung
		Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	-	-	44	46	47	48		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa	-	-	3	6	7	8		
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	-	-	30	36	37	38		
20	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	-	-	20	25	26	27	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung
		Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	-	-	68	69	70	71		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa	-	-	1	8	9	10		
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	-	-	35	39	40	41		
21	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	-	-	20	34	35	36	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung
		Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	-	-	42	43	44	45		
		Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa	-	-	4	6	7	8		
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	-	-	27	32	33	34		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
22	· Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	Jumlah Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	-	-	19	13	14	15	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung
		Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan sosialisasi system pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	-	-	16	20	21	22		
		Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa	-	-	3	4	5	6		
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	-	-	8	18	19	20		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
23	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi	59	59	1,000	1,000	1,000	1,000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Mahkamah Agung
		Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan bidang kepegawaian	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200		
		Jumlah penyusunan Laporan Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian	-	-	8	8	8	8		
24	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian administrasi berkas perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang di selesaikan tepat waktu	116,836	116,836	227,573	229,848	232,147	234,468	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Mahkamah Agung
		Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum	40	40	20,880	21,924	23,020	24,171		
		Pelaksanaan Zitting Plaatz (tempat siding tetap) dan pelaksanaan Pembebasan Perkara Prodeo	105	105	924	931	938	945		
		Jumlah Standar pelaksana tata kerja dan Tata Kelola pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum yang di susun	1	1	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum	140	140	151	151	151	151		
		Ketersediaan data dan Dokumen Statistik Perkara Dilingkungan Peradilan Umum Yang Akurat	1	1	2	2	2	2		
25	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	106,787	106,787	108,714	111,255	113,760	116,305	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Mahkamah Agung
		Jumlah penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Kesyar'iatan yang lengkap dan tepat waktu.	492	492	502	512	522	532		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Penyelesaian Perkara yang Kurang Dari Lima Bulan	97,637	97,637	98,137	98,637	99,137	97,637		
		Jumlah pelaksanaan sidang Keliling dan bantuan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama.	310	310	10,625	10,815	11,025	10,425		
		Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemen dan Tata Laksana di Lingkungan Peradilan Agama	2	2	3	2	2	2		
		Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi PA	180	180	144	240	240	240		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase ketersediaan data Yurisduksi dan dokumen statistik di lingkungan PA yang akurat	-	-	100	100	100	100		
		Jumlah lokasi oprasional pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu	74	74	120	160	220	280		
26	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan	Jumlah laporan penelitian dan kajian di bidang hukum dan peradilan	22	22	22	22	22	22	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Mahkamah Agung
		Terlaksananya studi banding untuk pengembangan bidang hukum dan peradilan	8	8	6	6	6	6		
		Tersedianya tenaga penelitian dan SDM penelitian yang memadai dan profesional	3	3	3	3	3	3		
		Diterbitkannya Jurnal Penelitian	-	-	3	3	3	3		
27	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Jumlah laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan kepegawaian	6	6	6	6	6	6	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksaan
28	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Pengelolaan Data Statistik Kriminal Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	1	1	1	1	1	1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksaan

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
29	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditidakanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah I	70	70	70	70	70	70	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan
30	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah II	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditidakanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah II	70	70	70	70	70	70	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
31	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditidakanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegaitan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah III	70	70	70	70	70	70	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan
32	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah IV	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditidakanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegaitan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah IV	70	70	70	70	70	70	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
33	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pada daerah wilayah V	70	70	70	70	70	70	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan
34	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran pengawasan di daerah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti	893	893	893	893	893	893	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan
		Pelaksanaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Cabjari	0	0	30	30	30	30		
35	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	39	39	28	28	28	28	Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Kejaksaan
36	Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru	-	-	37,957	61,957	73,957	86,937	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Kejaksaan

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
37	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi	Tersedianya Hardware dan Software Sistem dan TI KPK	500	500	615	615	615	615	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Beroperasinya Sistem dan Teknologi Informasi KPK	743	743	773	773	773	773		
		Tersedianya Layanan Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi KPK	12	12	12	12	12	12		
38	Kegiatan Pengawasan Internal KPK	Peningkatan Akuntabilitas Organisasi	-	-	3	3	3	3	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Organisasi	-	-	6	6	6	6		
		Peningkatan Integritas Organisasi	-	-	2	1	1	1		
39	Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara Tindak Pidana Korupsi	70	70	73	76	80	85	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Terlaksananya Supervisi Perkara yang lanjut ke tahap berikutnya	140	140	148	156	164	172		
		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM	800	800	900	1,000	1,100	1,100		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
40	Kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung	2	2	3	3	3	3	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	Komisi Yudisial
		Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan	100	100	300	330	330	330		
		Jumlah kegiatan pengukuran indeks keberhasilan PKH	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan advokasi hakim	-	-	2	2	2	2		
		jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim	-	-	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
41	Kegiatan Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus	Jumlah laporan penelusuran rekam jejak calon hakim terkait dengan seleksi calon hakim	90	90	100	110	121	133	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	Komisi Yudisial
		Jumlah laporan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	216	216	293	312	328	344		
42	Kegiatan Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim	Jumlah dokumen hasil anotasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH	-	-	440	460	480	500	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	Komisi Yudisial
		Jumlah dokumen hasil sidang atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	-	-	120	125	130	135		
		Jumlah usul penjatuhan sanksi yang dibahas sd. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	10	10	10	10	10	10		
		Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan	50	50	70	75	80	85		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
	FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)								
		Jumlah Penanganan Kasus Tipikor di KPK								
		Jumlah Penanganan Kasus Tipikor di Kejaksaan								
1	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Informasi Pemberantasan Korupsi	10	10	10	10	10	10	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Terlaksananya Perekaman Persidangan	120	120	120	120	120	120		
		Terlaksananya Kegiatan Implementasi Komitmen Global	17	17	17	17	17	17		
2	Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Kasus Potensial yang Dilakukan Penyelidikan	80	80	85	90	95	100	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
3	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Perkara yang Dilakukan Penyidikan	75	75	80	85	90	95	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor	75	75	80	85	90	95	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Pelaksanaan Pidana Badan terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	-	-	45	50	55	60		
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis Sektor Pendidikan	110	110	110	110	110	110	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK
		Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I)	26	26	26	26	26	26		
		Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi/ Pemerintah Daerah (KLOP)	10	10	10	10	10	10		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Terlaksananya Program Pembangunan Integritas pada Mitra Strategis (CSO)	35	35	35	35	35	35		
		Tersedianya Perangkat Sosialisasi	9050	9050	9,050	9,050	9,050	9,050		
		Terlaksananya Pendidikan Politik Berintegritas pada Partai Politik	10	10	10	10	10	10		
		Terlaksananya Program Pemilu Berintegritas pada Masyarakat, Penyelenggara dan Kandidat Pemilu/Kada	10	10	10	10	10	10		
6	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Jumlah Kegiatan Kerjasama Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi	1	1	8	8	8	8	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksanaan
		Operasional Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	-	-	12	12	12	12		
7	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara	Jumlah laporan yang terkait dengan penyelesaian tindakan penyelamatan dan pemulihan aset kepada korban dan atau negara	-	-	1	1	1	1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksanaan

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
8	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi kategori A yang diselesaikan	-	-	40	40	40	40	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksaan
		Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi kategori B yang diselesaikan	-	-	40	40	40	40		
		Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan	5	5	5	5	5	5		
		Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan	2	2	2	2	2	2		
9	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan dan penuntutan	80	80	80	80	80	80	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana	Kejaksaan
		Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	2	2	2	2	2	2		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	20	20	20	20	20	20		
10	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	Jumlah pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi Kategori A yang diberikan	-	-	40	40	40	40	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Kejaksanaan
		Jumlah pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi Kategori B yang diberikan	-	-	45	45	45	45		
11	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.	1440	1440	1,439	1,439	1,439	1,439	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak	Kejaksanaan
		Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (ZEE, Perikanan, Kepabeanan, dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	250	250	217	217	217	217		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
12	Kegiatan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan	-	-	1	1	1	1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPENAS
		Tersusunnya dokumen hasil evaluasi Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahunan	-	-	1	1	1	1		
	FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM	Prsentase Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM								
		Prsentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan								
		Jumlah Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Hukum								
1	Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	Jumlah pemerintahan daerah yang dipetakan dan dipublikasikan berdasarkan pembinaan dan fasilitasi perancangan peraturan daerahnya	-	-	20	40	60	80	Program Pembentukan Hukum	Kemenkumham

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah kantor wilayah dan Pemerintahan daerah yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi perancangan peraturan daerah	-	-	20	40	60	80		
2	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	100	100	20	40	60	80	Program Pembentukan Hukum	Kemenkumham
		Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	100	100	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	100	100	20	40	60	80		
		Persentase (%) penyelesaian permohonan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	100	100	20	40	60	80		
3	Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Persentase (%) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	-	-	20	40	60	80	Program Pembentukan Hukum	Kemenkumham
		Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapat pembinaan	-	-	20	40	60	80		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	-	-	20	40	60	80		
4	Kegiatan Kerja Sama dan Instrumen HAM	Meningkatnya kerja sama HAM di dalam dan dengan pihak luar negeri	-	-	15	15	15	15	Program Pemajuan HAM	Kemenkumham
		Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	-	-	16	16	16	16		
		Tersedianya laporan implementasi instrumen HAM Internasional	6	6	9	9	9	9		
		Tersedianya bahan naskah akademik instrumen HAM internasional yang akan disahkan	2	2	2	2	2	2		
5	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	-	-	60%	65%	70%	75%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	60%	65%	70%	75%		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dipublikasikan pada jurnal	-	-	60%	65%	70%	75%		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak kelompok khusus yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	-	-	60%	65%	70%	75%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak kelompok khusus yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	60%	65%	70%	75%		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak kelompok khusus yang dipublikasikan pada jurnal	-	-	60%	65%	70%	75%		
7	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak sipil dan politik yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	-	-	60%	65%	70%	75%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak sipil dan politik yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	60%	65%	70%	75%		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak sipil dan politik yang dipublikasikan pada jurnal	-	-	60%	65%	70%	75%		
8	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Transformasi Konflik	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	-	-	60%	65%	70%	75%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	60%	65%	70%	75%		
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi transformasi konflik yang dipublikasikan pada jurnal	-	-	60%	65%	70%	75%		
9	Kegiatan Penguatan HAM	Meningkatnya jumlah tenaga penguatan HAM	-	-	50	50	50	50	Program Pemajuan HAM	Kemenkumham
		Meningkatnya jumlah institusi di pusat dan daerah yang mendapat penguatan HAM	-	-	300	300	300	300		
10	Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan	480	480	320	320	320	320	Program Pemajuan HAM	Kemenkumham
		Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual	-	-	120	120	120	120		
11	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah	1500	1500	275	300	325	400	Program Pembinaan Hukum Nasional	Kemenkumham
		Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	-	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum di Tingkat Daerah	-	-	1	1	1	1	Program Pembinaan Hukum Nasional	Kemenkumham
		Tersedianya Hasil Kajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	-	-	1	1	1	1		
		Tersedianya Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Daerah	-	-	1	1	1	1		
		Meningkatnya Kadar Kesadaran Hukum Masyarakat	-	-	1	1	1	1		
		Terselenggaranya Bantuan Hukum Litigasi Kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin	-	-	33	33	33	33		
		Terselenggaranya Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin	-	-	33	33	33	33		
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM							Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Kemenkumham
		Jumlah dokumen kurikulum dan modul, tenaga pendidik dan tenaga pengajaran yang up to date, akuntabel dan efisien	-	-	2	3	4	5		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang Fungsional dan HAM	270 (96%)	270 (96%)	420	594	653	719		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum	-	-	180	198	218	240		
		Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	-	-	23	25	28	31		
14	Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Publikasi HAM	-	-	38	39	42	43	Program	Komnas HAM
		Jumlah Fasilitator HAM	70	70	51	51	101	101	Dukungan	
		JUMLAH Aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM	800	800	450	540	620	720	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	
		Jumlah rekomendasi yang Terkait Dengan Pembentukan/Perubahan/Pencabutan Peraturan Perundang Undangan Yang Berhubungan Dengan HAM	4	4	14	14	14	14		
15	Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	1 kajian dan konsep	1 kajian dan konsep	5	5	5	5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Komnas HAM

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP)		-	1	1	1	1		
		Jumlah Kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya		-	1	1	1	1		
		Jumlah Kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan Jender		-	1	1	1	1		
		Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP		-	20%	30%	40%	50%		
		Persentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindak lanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan ham perempuan		-	20%	30%	40%	50%		
		Persentase pengguna layanan Resource Centre KtP		-	20%	30%	40%	50%		
		Jumlah Konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban	20%	20%	1	1	1	1		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan	1	1	5	5	5	5		
		Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	20% dari Laporan	20% dari Laporan	90%	90%	90%	90%		
		Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah dokumen Penguatan fungsi kelembagaan Komnas perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	-	-	1	1	1	1		
		Layanan Perkantoran	-	-	12	12	12	12		
		Jumlah unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	10	60	60	60		
		Jumlah unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Baseline)	-	-	20	50	50	50		
16	Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang ditangani	2550 kasus ditangani dari 3000 kasus yg diterima	2550 kasus ditangani dari 3000 kasus yg diterima	400	500	600	700	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	Komnas HAM
		Jumlah Aplikasi Pengaduan Online dan Database Pengaduan	1	1	1	1	1	1		
		Rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti	7	7	7	8	9	10		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Penyelidikan Komnas HAM terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Diserahkan ke Jaksa Agung	1	1	3	3	4	4		
		Jumlah Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM dan Kondisi HAM	1500	1500	350	450	550	650		
		Jumlah Kasus Pelanggaran HAM yang Ditangani melalui Mekanisme Mediasi	157	157	172	222	272	322		
		Jumlah penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemilu kepala daerah	-	-	12	24	34	34		
17	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	Operasional Pos Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari	12	12	433	433	433	433	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Kejaksanaan
18	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian administrasi perkara) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan	1,671	1,671	2,225	2,336	2,453	2,576	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Mahkamah Agung
		Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu	269	269	1,228	1,248	1,268	1,288		
		Pembahasan Biaya Perkara Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN	84	84	87	91	96	101		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Penyelenggaraan Pos Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	15	15	28	28	28	28		
		Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Bimbingan teknis Kompetensi dan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan TUN	80	80	80	90	100	110		
		Jumlah Standar Pelaksanaan Tata Kerja dan Tata kelola Pengadilan di Lingkungan Peradilan TUN yang di susun	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan TUN yang akurat	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah Standar Tenaga Teknis yang di susun	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai kebutuhan		160	160	170	180	190		
		Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip tenaga Teknis Peradilan TUN	-	-	1	1	1	1		
19	Kegiatan Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	Jumlah penanganan perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya	247 perkara	247 perkara	116 perkara	121 perkara	126 perkara	131 perkara	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Mahkamah Konstitusi
		Jumlah penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU Walikota	-	-	170 perkara	124 perkara	103 perkara	207 perkara		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
I	FOKUS PRIORITAS 4: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL									
1	Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Jumlah RUU SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah)	1 RUU	1 RUU	1 Draft RUU	1 RUU	-	-	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
2	Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur	Jumlah Kebijakan di bidang pengaduan masyarakat dan aparatur	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I	Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah I yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik	95% K/L, 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	95% K/L, 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	98% K/L, 100% Prov Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov 50% Kab/ Kota	100% K/L, 100% Prov 60% Kab/ Kota	100% K/L, 100% Prov 70% Kab/ Kota	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah I yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota		
		Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh pre-dikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	30% K/L, 10% IPD	30% K/L, 10% IPD	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II	Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah II yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik	95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	50 Kab/ Kota 98% K/L 90% Prov 50% Kab/Kota	100% K/L 95% Prov 60% Kab/Kot	100% K/L 98% Prov 70% Kab/Kot	100% K/L 100% Prov 80% Kab/Kot	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah II yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota		
		Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	30% K/L, 10% IPD	30% K/L, 10% IPD	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja		
5	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III	Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah III yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik	95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	95% K/L 100 % Prov, 50 % Kab/Kota	98% K/L 70% Prov 35% Kab/Kota	100% K/L 80% Prov 45% Kab/Kota	100% K/L 80% Prov 55% Kab/Kota	100% K/L 90% Prov 65% Kab/Kota	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase K/L/Prov/Kab/Kota Wilayah III yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	95 % K/L, 100 % Prov, 80 % Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota	100% K/L, 100% Prov, 100% Kab/Kota		
		Jumlah Unit Kerja IP yang memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM	30% K/L, 10% IPD	30% K/L, 10% IPD	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.	Laporan Hasil Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.	-	-	30	30	30	30	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP
7	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP	Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP	-	-	33	33	33	33	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP
		Jumlah PNS yang diberikan rekomendasi persetujuan teknis Pengangkatan ke Dalam JFA	1500	1500	1000	1000	1000	1000		
		Laporan hasil Studi Banding JFA	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah Sertifikat Auditor yang terbit/tahun	2100	2100	2100	2100	2100	2100		
		Jumlah PAK/Tahun	1700	1700	2000	2000	2000	2000		
		Laporan Hasil Evaluasi Sertifikasi dan Penerapan JFA	-	-	33	33	33	33		
		Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit/Tahun	-	-	10	10	10	10		
		Jumlah Peraturan/Pedoman/SOP/Juklak JFA yang terbit	-	-	3	3	3	3		
		Penyediaan layanan informasi JFA	-	-	5	5	5	5		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah APIP yang kapabilitasnya mencapai level 2	-	-	88	88	88	88		
		Jumlah kegiatan sosialisasi/konsultasi/bimtek Tata kelola APIP	-	-	100	100	100	100		
		Jumlah pedoman tata kelola APIP	-	-	3	3	3	3		
		Laporan hasil evaluasi tata kelola dan Quality Assurance	-	-	66	66	66	66		
		Jumlah Penyelenggaraan Sidang Komite Sertifikasi	-	-	1	1	1	1		
		Jumlah APIP yang telah melakukan transparansi laporan hasil audit intern, atau telah melakukan peer review	-	-	4	4	4	4		
		Jumlah peserta Program Degree (Orang semester)- STAR	500	500	4422	2976	602	0		
		Jumlah peserta Training Overseas (Orang) - STAR	80	80	80	140	80	0		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Paket Implementasi Was Intern Lintas Sektoral - STAR	1	1	1	1	1	0		
		Jumlah Peserta TOT- STAR	40	40	40	70	40	0		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Internal BPKP dan APIP	Tingkat kelulusan Diklat kedinasan (%)	100	100	100	100	100	100	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP
		Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi	2770	2770	3450	3450	3450	3450		
		Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor	2100	2100	3000	2500	2500	2500		
		Jumlah peserta Diklat JFA (orang) STAR	960	960	960	960	960	960		
		Jumlah peserta Diklat substansi (orang) STAR	812	812	812	812	812	812		
		Jumlah Sertifikasi Non JFA STAR	108	108	108	108	108	108		
		Jumlah paket Pengembangan E- learning (Paket) STAR	1	1	1	1	1	1		
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan[Base Line] (PNBP)	-	-	20	20	20	20		
		Jumlah peserta Diklat JFA Pola PNB	-	-	2610	2610	2610	2610		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
9	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional	Jumlah LPSE terstandarisasi	280	280	180	60	60	60	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
10	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah pelayanan pembentukan ULP	70	70	70	70	70	70	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
		Jumlah dokumen sistem karir profesi pengadaan barang/jasa	4	4	3	3	3	3		
11	Pengembangan Sistem Katalog	Jumlah dokumen pengembangan bisnis process e-catalogue	2	2	2	2	2	2	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP
12	Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua-SPIP	Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Pengembangan SPIP	-	-	4	4	4	4	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
II.	FOKUS PRIORITAS 5: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF									
1	Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
2	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I	Indeks RB rata-rata wilayah I	—	—	35.0	37.0	40.0	44.0	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II	Indeks RB rata-rata wilayah II	—	—	35.7	38.0	42.0	45.0	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III	Indeks RB rata-rata wilayah III	—	—	29.8	32.0	35.0	39.0	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
5	Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Sistem PMPRB yang Disempurnakan	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
6	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana	Jumlah RUU tentang Administrasi Pemerintahan	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
7	Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	Jumlah naskah akademis dan RUU tentang organisasi/ kelembagaan pemerintah	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1 RUU	1 RUU	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Jumlah kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana	2 Kebijakan	2 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan		
8	Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government	Jumlah RUU di bidang e-government	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1 Naskah Akademis	1 Draft RUU	1 Draft RUU	1 Draft RUU	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
9	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I	Persentase K/L bidang polhukam yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II	Persentase K/L bidang perekonomian yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III	Persentase K/L bidang Kesra yang telah dilakukan penataan organisasi dan tatalaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase lembaga pemerintah yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
12	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah kebijakan Koordinasi Kebijakan dan Penyusunan Program SDM Aparatur	–	–	4 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase IP yang telah Menerapkan kebijakan disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah Kebijakan Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur	–	–	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase IP yang mengirim data usulan formasi CPNS sesuai Kebijakan	75%	75%	100%	100%	100%	100%		
14	Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah kebijakan Sistem Pengadaan ASN	1 Kebijakan	1 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan Pengadaan CPNS secara terbuka	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15	Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah kebijakan tentang Standarisasi jabatan berbasis kompetensi dan pengembangan karier dan pengembangan Kompetensi	—	—	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka untuk Eselon I dan II	20% K/L 5% Pemda	20% K/L 5% Pemda	50% K/L 10% Pemda	70% K/L 15% Pemda	80% K/L 20% Pemda	90% K/L 25% Pemda		
16	Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur	5 Kebijakan	5 Kebijakan	6 kebijakan	6 kebijakan	6 kebijakan	6 kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
17	Pembinaan Kearsipan Daerah	Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Asset sesuai dengan Peraturan Perundangan	33 Provinsi	33 Provinsi	7 Prov/ Kab/ Kota	7 Prov/ Kab/ Kota	10 Prov/ Kab/ Kota	10 Prov/ Kab/ Kota	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota yang Mendapat Monitoring Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis TIK (SIKD-SIKS)	16 Provinsi	16 Provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov		
18	Pembinaan Kearsipan Pusat	Jumlah instansi pusat yang telah menerapkan SIKD-TIK	15 Instansi	15 Instansi	11 Instansi Pusat	11 Instansi Pusat	11 Instansi Pusat	11 Instansi Pusat	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Arsip Nasional Republik Indonesia
19	Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil	Jumlah kebijakan tentang rekrutmen PNS yang diterbitkan	-	-	1 Perka	-	-	-	Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
		Jumlah station CAT yang diperluas kapasitas cliennya	10	10	3 station (BKN Pusat = 100 PC; 2 Kanreg @ 50 PC)	-	-	-		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah soal baru yang disusun dalam rangka rekrutmen/seleksi CPNS/PNS	15000	15000	15000	15000	15000	15000		
		Jumlah sertifikat lisensi database Oracle Kantor Pusat dan 12 Kanreg BKN			13 sertifikat	-	-	-		
		Jumlah aplikasi CAT System yang telah dikembangkan dan aplikasi registrasi online CPNS yang terbangun	1	1	2	-	-	-		
		Jumlah instansi yang difasilitasi menggunakan CAT system dalam pelaksanaan rekrutment CPNS	20	20	600	600	600	600		
20	Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian	Persentase berfungsinya sistem informasi dan database kepegawaian nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
		Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah disaster recovery center yang dibangun	-	-	1	-	-	-		
		Persentase penyelesaian verifikasi dan validasi data PNS tahun 2015	-	-	100%	-	-	-		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
21	Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS (Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah)	Jumlah dokumen/kebijakan pembentukan jabatan fungsional assesor	-	-	1 Perka	-	-	-	Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
		Jumlah Stasiun Assessment Center yang dibangun	-	-	2 Stasiun (Kanreg IV dan Kanreg X)	-	-	-		
		Persentase assesor yang terakreditasi	-	-	80	90	100	100		
		Persentase penyelenggaraan asesment center yang terakreditasi	-	-	80	90	100	100		
		Jumlah pegawai/pejabat/calon pejabat yang dinilai potensi dan kompetensinya	90	90	500	1000	1200	1400		
		Jumlah dokumen konsep sertifikasi assesor	1	1	1	-	-	-		
		Jumlah modul kurikulum pelatihan assesor	1	1	1	-	-	-		
22	Perencanaan Kepegawaian dan Formasi	Jumlah instansi pemerintah yang diimplementasikan penataan pegawai	12 instansi	12 instansi	12 instansi	-	-	-	Program Penyelenggaraan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
		Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya dalam rangka penataan kepegawaian	50	50	75	85	95	100		
		Jumlah instansi pemerintah yang dilakukan monitoring dan evaluasi penataan pegawai	12 instansi	12 instansi	12 instansi	-	-	-		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
23	Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat	Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	Lembaga Administrasi Negara
		Jumlah laporan kajian/pedoman Training Need Analysis (TNA)	-	-	1 Laporan	-	-	-		
24	Pengkajian Reformasi Administrasi	Jumlah kajian market survey profil pelamar CPNS	-	-	1 Laporan	-	-	-	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	Lembaga Administrasi Negara
25	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional	Jumlah peserta Diklatpim Tk I	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	Lembaga Administrasi Negara
26	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah peserta Diklat RLA	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	Lembaga Administrasi Negara

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
III.	FOKUS PRIORITAS 6: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.									
1	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	–	–	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang menerapkan Kebijakan bidang Pelayanan Publik	–	–	20 Prov, 50 Ka	15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota	20 Prov, 50 Ka	15 K/L, 20 Prov, 50 Kab/Kota		
		Presentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah Prov/Kab/Kota yang menerapkan sistem pengelolaan pengaduan	–	–	10 Prov, 50 Kab/Kota	10 Prov, 50 Kab/Kota	10 Prov, 50 Kab/Kota	10 Prov, 50 Kab/Kota		
2	Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi di bidang Pelayanan Publik	–	–	496 Inovasi	496 Inovasi	496 Inovasi	496 Inovasi	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Inovasi Pelayanan Publik	–	–	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I	Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	20 K/L, 10 Prov, 16 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 16 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	60%	60%	80%	85%	90%	95%		

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			PROGRAM	PELAKSANA
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II	Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kot	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	60%	60%	80%	85%	90%	95%		
5	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III	Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)	20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 17 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	20 K/L, 10 Prov, 60 Kab/Kota	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenPAN dan RB
		Presentase Unit Kerja yang nilai SKM nya Baik	60%	60%	80%	85%	90%	95%		
6	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah peserta Diklat TOT Pelayanan Publik	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	Lembaga Administrasi Negara

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III	PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA							
A.	Fokus 1: Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah							
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya	1.253.651 Hektar	1.253.651 Hektar	1.253.651 Hektar	1.253.651 Hektar	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Laporan Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan	51 Paket	51 Paket	51 Paket	51 Paket		
		Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pengukuran dengan JRSP/CORS	291 Orang	291 Orang	291 Orang	291 Orang		
		Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pemetaan Dasar	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang		
		Jumlah Bidang Tanah yang dilegalisasi	912.541 Bidang	912.541 Bidang	912.541 Bidang	912.541 Bidang		
		Legalisasi swadaya	1.044.762 Bidang	1.044.762 Bidang	1.044.762 Bidang	1.044.762 Bidang		
		Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi	32.019 Ha	32.019 Ha	32.019 Ha	32.019 Ha		
		Barang Milik Negara	5.000 Bidang	5.000 Bidang	5.000 Bidang	5.000 Bidang		
		Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	443 Satker	443 Satker	443 Satker	443 Satker		
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Penataan dan Inventarisasi P3WT	159 SP	159 SP	159 SP	159 SP		
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Konsolidasi Tanah	11.500 Bidang	11.500 Bidang	11.500 Bidang	11.500 Bidang		
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah	83 Kab/Kota	83 Kab/Kota	83 Kab/Kota	83 Kab/Kota		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Luas Aset tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis	78 SP	78 SP	78 SP	78 SP		
		Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus	1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus	1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus	1.355 Laporan/357 Perkara/879 Kasus		
		Jumlah Laporan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.708 Laporan	1.708 Laporan	1.708 Laporan	1.708 Laporan		
		Jumlah Laporan Penegakan Hukum	476 Satker	476 Satker	476 Satker	476 Satker		
2	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang terinventarisasi	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan Monev)	4 Rumusan	4 Rumusan	4 Rumusan	4 Rumusan		
3	Pengukuran Dasar	Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu, pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas wilayah administrasi yang dihasilkan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Layanan Informasi Pengukuran Dasar	138 bidang	138 bidang	138 bidang	138 bidang		
		Cakupan Wilayah Sistem JRSP Untuk Membangun Kerangka Dasar Kadastral Sesuai Standar Nasional (Unit)	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit		
4	Pemetaan Dasar	Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar	2.800.000 ha	2.800.000 ha	2.800.000 ha	2.800.000 ha	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Dokumen Standar dan Mekanisme Survei dan Pemetaan dasar	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan		
		Jumlah Supervisi/Monitoring Pemetaan Dasar	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		
5	Pengelolaan Konsolidasi Tanah	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Konsolidasi Tanah yang disusun	4 Rumusan	4 Rumusan	4 Rumusan	4 Rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan		
6	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah	Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah	100 SK	100 SK	100 SK	100 SK	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan		
		Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan		
7	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan	Jumlah rumusan kebijakan teknis perkara pertanahan yang disusun	1 Rumusan	1 Rumusan	1 Rumusan	1 Rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Pembinaan dan evaluasi perkara pertanahan di daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
		Jumlah Penyelesaian Perkara Pertanahan	105 Kasus	105 Kasus	105 Kasus	105 Kasus		
8	Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan	Jumlah Kebijakan Teknis Penetapan Batas Ruang dan Perairan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya (HGU)	2.682 bidang	2.682 bidang	2.682 bidang	2.682 bidang		
		Jumlah Sistem Informasi Bidang Tanah yang Dibangun ((HGU, HGB, HPL dan HP)	2 informasi	2 informasi	2 informasi	2 informasi		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan		
9	Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	Jumlah PPAT yang Ditetapkan	4.100 Orang	4.100 Orang	4.100 Orang	4.100 Orang	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Guna Ruang	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan		
		Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Wakaf, dan Guna Ruang serta Perairan	4 rumusan	4 rumusan	4 rumusan	4 rumusan		
10	Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Sengketa Pertanahan yang Disusun (Paket)	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Sengketa Pertanahan di Daerah	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan		
		Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus		
11	Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan	Jumlah penanganan konflik pertanahan	136 kasus	136 kasus	136 kasus	136 kasus	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis)	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan		
		Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Pemetaan Tematik	Jumlah Pemetaan Tematik Model untuk Penyusunan Standar Pemetaan Tematik Pertanahan pada Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan, Wilayah Ekonomi Khusus dan Bidang Tanah Atasupun untuk Tema Pertanahan Tertentu	8.062.453 Hektar	8.062.453 Hektar	8.062.453 Hektar	8.062.453 Hektar	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
			80.000 Bidang	80.000 Bidang	80.000 Bidang	80.000 Bidang		
		Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan		
		Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan	2 rumusan		
13	Survey Potensi Tanah	Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan strategis	1.939.163 Hektar	1.939.163 Hektar	1.939.163 Hektar	1.939.163 Hektar	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
			17.331 Bidang	17.331 Bidang	17.331 Bidang	17.331 Bidang		
		Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem aplikasi geodatabase BPN RI	1 lembar	1 lembar	1 lembar	1 lembar		
		Jumlah Pembinaan/Bimtek/Sosialisasi (Paket)	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan		
		Jumlah Peraturan/juklak/Juknis (Paket)	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan		
14	Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD	Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD	70 SK	70 SK	70 SK	70 SK	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang pertanahan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	4 unit Informasi	4 unit Informasi	4 unit Informasi	4 unit Informasi		
		Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan		
		Jumlah rumusan kebijakan pertanahan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
B.	Fokus 2: Semakin Baiknya Proporsi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Neraca penatagunaan Tanah kabupaten/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	75 Kab/Kota	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Inventarisasi P4T	142.400 Bidang	142.400 Bidang	142.400 Bidang	142.400 Bidang		
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Redistribusi Tanah	107.150 Bidang	107.150 Bidang	107.150 Bidang	107.150 Bidang		
		Luas Aset tanah terindikasi terlantar	185 SP	185 SP	185 SP	185 SP		
2	Pengelolaan Landreform	Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Landreform yang disusun	5 rumusan	5 rumusan	5 rumusan	5 rumusan		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Data dan Informasi P4T dan Redistribusi yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		
3	Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	Pedoman di Bidang Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di Pusat dan Daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus)	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi		
		Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Rencana Tata Ruang	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		
4	Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlarang dan Tanah Kritis	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlarang dan Tanah Kritis	4 rumusan	4 rumusan	4 rumusan	4 rumusan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlarang dan Tanah Kritis	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan		
5	Pengendalian Pertanahan	Jumlah Tanah Terlarang yang telah ditetapkan	153 SK	153 SK	153 SK	153 SK	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan	5 rumusan	5 rumusan	5 rumusan	5 rumusan		
		Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlarang yang Terintegrasi Dalam Basis Data	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem		
		Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakandan program pertanahan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan	Pengembangan Basis Data Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
		Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan	3 rumusan		
C.	Fokus 3: Meningkatnya Pelayanan Pertanahan							
1	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Ketersediaan Data dan Informasi Pertanahan Nasional Pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)	983.224 informasi	983.224 informasi	983.224 informasi	983.224 informasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
			6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan		
		Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang mencakup teknologi informasi, data dan informasi, perangkat lunak untuk internal dan eksternal, perangkat keras dan sistem keamanan jaringan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem		
		Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online	423 kantor	423 kantor	423 kantor	423 kantor		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian	9 pedoman	9 pedoman	9 pedoman	9 pedoman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan dukungan SIMPEG	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen		
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	Operasional perkantoran STPN	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		
			1331 Buku	1331 Buku	1331 Buku	1331 Buku		
			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		
		Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang		
		Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-3	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang		
		Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan		
		Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang		
		Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang		
		Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang		
		Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-1	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		
		Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga STPN	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pendidikan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		
		Jumlah gedung negara direhabilitasi	200 M2	200 M2	200 M2	200 M2		
4	Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
			104 Buku	104 Buku	104 Buku	104 Buku		
			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		
			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI	706 Pegawai	706 Pegawai	706 Pegawai	706 Pegawai		
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI	134 Pegawai	134 Pegawai	134 Pegawai	134 Pegawai		
		Fasilitasi Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang		
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat)	Jumlah gedung negara yang dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah)	Jumlah terbangunnya gedung negara	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
			53 Unit	53 Unit	53 Unit	53 Unit		
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	3.855 Unit	3.855 Unit	3.855 Unit	3.855 Unit		

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			130 Unit	130 Unit	130 Unit	130 Unit		
			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		
			95 Unit	95 Unit	95 Unit	95 Unit		
		Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit		
7	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan, Kerjasama Luar Negeri dan Monitoring serta Evaluasi	4 Pedoman	4 Pedoman	4 Pedoman	4 Pedoman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN RI dengan Pagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI.	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen		
		Persentase data dan informasi hasil inventarisasi pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam rangka penyusunan program dan anggaran.	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		
8	Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan, Pengamanan, dan Urusan Keprotokolan	Persentase penyelesaian konsep-konsep surat, keputusan, atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite Pertanahan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Jumlah pemberian penghargaan di bidang pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga	7 Buah	7 Buah	7 Buah	7 Buah		
9	Pengelolaan Administrasi Umum (BPN)	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Administrasi Umum	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga kantor	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		
		Pengadaan Blanko sertipikat	4.580.000 Set	4.580.000 Set	4.580.000 Set	4.580.000 Set		
10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanahan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
		16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan		
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Operasional perkantoran satker daerah	476 Satker	476 Satker	476 Satker	476 Satker	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Dukungan manajemen dan teknis satker daerah	476 Satker	476 Satker	476 Satker	476 Satker		
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Anggaran	4 Pedoman	4 Pedoman	4 Pedoman	4 Pedoman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN
		Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan yang berlaku	252 Orang	252 Orang	252 Orang	252 Orang		
		Terlayannya pelaksanaan APBN	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan		
		Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran sesuai dengan rencana	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		
D.	Fokus 4: Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum							

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU			PROGRAM	PELAKSANA
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pengembangan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah kajian teknis Bank Tanah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	BPN

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ISU STRATEGIS: KETAHANAN PANGAN										
A	Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein									
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Penerapan PTT Kedelai (Ha)	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (GAP) (Ha)	-	-	9,950	9,950	9,950	9,950		
		Laksanakan pembinaan dan pengawalan (Paket)	-	-	1	1	1	1		
2	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi (GAP) (Ha)	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Jagung (GAP) (Ha)	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000		
		Laksanakan pembinaan dan pengawalan (Paket)	-	-	1	1	1	1		
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai)	32	32	32	32	32	32	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Laksanakan pembinaan dan pengawalan (Paket)	33	33	1	1	1	1		
4	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha)	-	-	23,596	23,596	23,596	23,596	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Laksanakan pembinaan dan pengawalan (Paket)	-	-	1	1	1	1		
5	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen tanaman pangan (unit)	-	-	2,156	2,156	2,156	2,156	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Laksanakan pembinaan dan pengawalan (Paket)	352	352	1	1	1	1		
6	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	Laksananya Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Metode)	-	-	10	10	10	10	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Laksananya Laboratorium Yang Menerapkan Sistem Mutu (Lab)	-	-	8	8	8	8		
		Laksananya Laboratorium Peserta Uji Profisiensi (Lab)	-	-	35	35	35	35		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Lterlaksannya Penerapan dan pengembangan peramalan OPT (Provinsi)	-	-	24	24	24	24	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementan
		Lterlaksannya Informasi Peramalan Serangan OPT (Informasi)	-	-	48	48	48	48		
		Lterlaksannya Teknologi Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT (Model)	-	-	12	12	12	12		
8	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	Pengembangan tanaman Tebu (Ha)	79,000	79,000	60,000	60,000	60,000	60,000	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		Pengembangan Tanaman Kapas (Ha)	1,050	1,050	3,330	3,330	3,330	3,330		
		Pengembangan Tanaman Nilam (Ha)	50	50	100	100	100	100		
		Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim (bulan)	-	-	12	12	12	12		
9	Peningkatan Produksi Ternak	Pengembangan Budidaya Ternak Potong (kelompok)	320	320	470	585	730	910	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementan
		Pengembangan Budidaya Ternak Perah (kelompok)	36	36	75	95	115	145		
		Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok)	55	55	255	320	400	500		
		Penguatan Usaha dan Kelembagaan Budidaya Ternak (kelompok)	300	300	250	264	277	291		
10	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Pengembangan Pakan Hijauan (stek)	-	-	3,000,000	3,143,505	3,300,680	3,458,568	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementan
		Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton)	-	-	60,000	62,870	66,014	72,615		
		Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratorium Pakan (sampel)	5,000	5,000	4,250	4,453	4,676	5,000		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis)	8,976,802	8,976,802	5,590,515	5,680,516	5,750,510	5,860,500	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementan
		Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel)	-	-	130,000	132,000	132,500	133,000		
		Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (unit)	35	35	125	125	125	125		
		Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis)	9,000,000	9,000,000	6,377,775	6,427,775	6,477,775	6,527,775		
		Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional	200	200	34	34	34	34		
		/SISKEWANNAS (Provinsi)								
12	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis)	5,000,000	5,000,000	4,800,000	5,040,000	5,292,000	5,557,000	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementan
		Peningkatan Bibit Ternak (ekor)	-	-	312,260	327,873	344,267	361,480		
		Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok)	-	-	268	281	295	310		
		Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi)	-	-	32	32	32	32		
13	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha)	-	-	154	176	187	200	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementan
		Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha)	-	-	30	40	65	70		
		Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha)	-	-	11	15	19	25		
		Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit usaha)	-	-	22	25	32	36		
14	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	500,000	500,000	350,000	350,000	350,000	350,000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit)	50	50	50	50	50	50		
		Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	400	400	2,971	2,971	2,971	2,971		
		Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	280	280	300	300	300	300		
		Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	500	500	550	550	550	550		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket)	1	1	1	1	-	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan)	12	12	12	12	12	12		
15	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	260,000	260,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
		Jumlah (KM) Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	-	-	500	500	500	500		
		Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
		Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
		Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification)	250,000	250,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
		Jumlah (Ha) Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
		Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/ pasca sertifikasi	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
		Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian	12	12	50	50	50	50		
16	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi.	6,890	6,890	7,596	7,596	7,596	7,596	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Jumlah (Unit) Penguatan UPJA/Bengkel Alsintan (Perlengkapan Bengkel dan Keperluan Administrasi)	20	20	168	168	168	168		
		Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(1)	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	Terbangunnya Rumah Kompos	-	-	500	500	500	500	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
		Jumlah (Paket) Pengawalan Pupuk Bersubsidi	272	272	500	500	500	500		
		Jumlah (Paket) Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)	272	272	500	500	500	500		
		Jumlah (Paket) Penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida	-	-	41	41	41	41		
		Dukungan Fasilitas Pupuk dan Pestisida (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
18	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi (Akses)	-	-	1,340	1,340	1,350	1,350	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur)	42	42	18	19	22	23		
		Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (Teknologi)	4	4	5	5	5	5		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (Rekomendasi)	-	-	2	2	2	2		
		Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
19	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Teknologi)	17	17	13	15	17	19	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model)	-	-	2	2	2	3		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (Rekomendasi)	-	-	3	3	3	3		
		Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
20	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem Informasi)	-	-	7	7	7	9	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta)	14	14	60	60	60	60		
		Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi)	-	-	9	10	15	16		
		Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji dan instrument lainnya) yang ramah lingkungan (Formula)	-	-	9	9	11	6		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi)	-	-	6	6	6	6		
		Jumlah database dan informasi sumberdaya pertanian (Database)	-	-	10	12	13	14		
		Jumlah model pengembangan pertanian terpadu berbasis agroekologi/tipologi lahan (Model)	-	-	2	2	2	2		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dukungan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
21	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Jumlah teknologi spesifik lokasi (Teknologi)	-	-	66	70	80	90	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah model pengembangan inovasi teknologi pertanian biondustri (Model)	-	-	66	66	66	66		
		Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke pengguna (Teknologi)	198	198	96	96	100	100		
		Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	-	-	109	109	109	109		
		Jumlah produksi benih sumber (Ton)	1,300	1,300	1,802	1,802	1,802	1,802		
		Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
22	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi)	2	2	2	2	3	3	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi)	7	7	7	7	8	8		
		Jumlah prototipe alsintan yang siap didiseminasikan (Unit)	12	12	20	25	30	35		
		Dukungan penelitian/ perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
23	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (Rekomendasi)	22	22	12	12	12	12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian (Rekomendasi)	-	-	10	10	10	10		
		Dukungan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun)	13	13	16	16	16	16	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi)	30	30	34	34	34	34		
		Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)	6,230	6,230	11,675	13,905	14,235	14,570		
		Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang)	18,000	18,000	21,000	22,000	23,000	24,000		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi)	4	4	5	5	5	5		
		Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
25	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB)	14	14	11	11	12	12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi budi daya, panen, dan pascapanen primer tanaman pangan (Teknologi)	13	13	12	12	14	14		
		Jumlah model pembangunan pertanian bio-industri berbasis tanaman pangan di lahan sub-optimal (Model)	-	-	1	1	1	2		
		Jumlah produksi benih sumber padi, sereal, serta kacang dan umbi (Ton)	70	70	88	89	97	97		
		Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi)	-	-	5	5	6	6		
		Dukungan Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
26	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan (Judul)	188	188	189	191	193	195	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah tambahan koleksi perpustakaan (Judul)	-	-	650	800	950	1,100		
		Dukungan pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
27	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang)	10,000	10,000	3,276	3,425	3,550	3,720	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Kementan
		Non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	4,000	4,000	3,716	3,885	4,025	4,220		
		Kelembagaan pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	18	18	28	28	28	28		
		Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)	2,000	2,000	800	836	866	908		
		Kelembagaan pelatihan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi (Unit)	280	280	200	208	216	227		
		Pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian (Desa)	-	-	30	30	30	30		
		Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan yang dihasilkan (Dokumen)	163	163	136	142	147	154		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dukungan pementapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
28	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana (Orang)	230	230	230	300	300	300	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Kementan
		Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan pertanian (Orang)	2,500	2,500	2,776	3,000	3,000	3,000		
		Kelembagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	183	183	18	18	18	18		
		Ketenagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang ditingkatkan dan dikembangkan (Orang)	601	601	125	125	125	125		
		Profesi bidang pertanian yang distandarisasi (dokumen)	3	3	3	5	5	5		
		SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi (Orang)	750	750	600	1,000	1,000	1,000		
		Dukungan Revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM Pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
29	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (Unit)	1,417	1,417	1,645	1,745	2,045	2,145	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Kementan
		Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	6,500	6,500	4,471	4,870	5,260	5,260		
		Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi (Orang)	49,457	49,457	47,949	48,149	48,149	48,449		
		Materi Penyuluhan Yang dihasilkan (Judul)	2,988	2,988	3,236	3,336	3,636	3,636		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan utama (WKPP)	13,800	13,800	11,000	12,000	12,000	15,500		
		Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan, movev dan pembinaan ketenagaan penyuluhan (Dokumen)	-	-	46	46	46	46		
30	Pendidikan Menengah Pertanian	Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Kementan
		Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	384	384	84	84	84	84		
		Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	596	596	125	596	596	596		
		Dukungan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
31	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)	650	650	700	1,200	1,500	1,800	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP
		Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit)	-	-	200	400	600	800		
		Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit)	100 (130 kapal lainnya)	100 (130 kapal lainnya)	10	10	10	10		
		Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit)	65	65	37	37	37	37		
		Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan (buah)	1,552	1,552	2,929	3,150	3,300	3,500		
		Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	-	-	17,000	20,000	22,500	25,000		
		Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	210	210	700	1,200	1,700	1,900		
		Jumlah kapal perikanan yang terpantau dan terevaluasi (unit)	-	-	800	900	1,000	1,100		
		Jumlah dokumen teknis produktivitas perjenis alat penangkap ikan (dokumen)	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, dan kapal penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	20	20	23	25	26	28		
32	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi)	22	22	22	22	22	22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP
		Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)	5	5	3	3	3	3		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah idetifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (lokasi)	-	-	34	34	34	34		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)	-	-	22	23	25	30		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi)	-	-	55	57	59	61		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi)	72	72	102	110	120	130		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI (lokasi)	-	-	22	32	37	42		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang terpantau dan terevaluasi (lokasi)	50	50	90	120	150	180		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi dan konektivitas (lokasi)	-	-	22	30	35	41		
33	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui surveillance (kawasan)	-	-	3	4	6	8	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	KKP
		Jumlah data monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas strategis nasional (laporan)	-	-	35	35	35	35		
		Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang disusun (judul; kumulatif)	22	22	45	53	61	69		
		Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif)	242	242	250	260	271	282		
		Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96%	-	-	4,200	4,300	4,400	4,500		
		Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	-	-	25,235	29,025	33,285	36,935		
		Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi)	-	-	16	18	19	20		
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (lokasi)	-	-	17	18	23	24		
34	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	Jumlah produksi induk unggul (juta induk)	13	13	10	13	16	18	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	KKP
		Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit)	225	225	55	73	82	100		
		Jumlah unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi (unit)	-	-	45	47	48	50		
		Jumlah unit perbenihan bersertifikat (unit; kumulatif)	225	225	420	540	670	820		
		Jumlah data infomasi dan distribusi perbenihan (Laporan)	3	3	5	8	10	12		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem perbenihan (lokasi)	-	-	34	36	40	44		
35	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Data pengembangan kawasan perikanan budidaya (Kab./Kota; kumulatif)	-	-	170	190	210	230	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	KKP
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar (kawasan; kumulatif)	-	-	20	40	60	85		
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau (kawasan; kumulatif)	-	-	20	40	65	90		
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut (kawasan; kumulatif)	-	-	15	30	50	70		
		Jumlah Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya (Kab./Kota; kumulatif)	70	70	85	100	115	130		
		Jumlah RSNI 3 sub bidang Prasarana dan Sarana budidaya yang disusun (judul; kumulatif)	10	10	22	31	40	49		
		Hamparan pengelolaan saluran tambak partisipatif yang terlayani (m ²)	-	-	100,000	210,000	328,000	459,000		
		Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem prasarana (paket teknologi)	-	-	12	13	13	13		
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi)	-	-	12	12	13	13		
36	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB (kelompok)	-	-	200	250	300	350	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	KKP
		Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif)	8,000	8,000	8,000	9,200	10,700	12,300		
		Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutunya (jenis; kumulatif)	800	800	800	850	900	950		
		Jumlah RSNI3 sub bidang produksi yang disusun (judul)	18	18	6	7	8	9		
		Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan)	5	5	6	6	6	6		
		Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem produksi (paket teknologi)	-	-	14	14	14	18		
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (lokasi)	-	-	14	14	14	18		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	26,975	26,975	25,000	25,200	25,400	25,500	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah produksi garam KP1 (ton)	-	-	1,000,000	1,385,000	1,824,000	2,226,000		
		Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok)	3,500	3,500	2,500	2,520	2,540	2,550		
		Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	-	-	10	20	30	40		
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok)	-	-	793	945	1,223	1,840		
		Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit)	92	92	100	287	363	429		
		Jumlah Masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi (komunitas)	-	-	8	13	18	23		
38	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya	Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan perikanan budidaya (paket)	4	4	7	7	7	7	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Model penerapan Iptek Perikanan Budidaya (paket)	7	7	7	7	7	7		
		Jumlah Paket teknologi Iptek perikanan budidaya (paket)	13	13	19	19	19	19		
		Jumlah Inovasi litbang perikanan budidaya yang diusulkan HKI (paket)	1	1	3	3	3	3		
		Jumlah Komponen teknologi Iptek perikanan budidaya (paket)	28	28	30	30	30	30		
		Jumlah Data informasi Iptek perikanan budidaya (paket)	30	30	31	31	31	31		
		Jumlah Produk Biologi Iptek perikanan budidaya (paket)	35	35	38	38	38	38		
		Jumlah varietas unggul hasil litbang perikanan budidaya yang diusulkan untuk dirilis (jenis)	-	-	3	3	3	3		
39	Pelatihan kelautan dan Perikanan	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
		Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar			406	431	456	481		
40	Penyuluhan kelautan dan Perikanan	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	50,000	50,000	51,270	55,000	57,500	60,000	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang)	12,000	12,000	12,000	13,100	14,500	15,350		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI (%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	KKP
		Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan, yang diselesaikan (dokumen)	-	-	3	3	3	4		
		Jumlah drafft peraturan perundangan undangan bidang perkarantinaan ikan yang diselesaikan (dokumen)	-	-	2	2	2	3		
		Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	-	-	10	12	14	16		
		Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan sistem perkarantinaan ikan (negara)	-	-	2	2	3	4		
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	-	-	31,500	32,500	33,500	34,500		
		Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	-	-	92	138	184	230		
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	-	-	137,000	139,000	141,000	143,000		
		Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	-	-	220	230	240	250		
Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (%)	-	-	100	100	100	100				
B Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri										
1	Pengembangan Pemasaran Domestik	Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran bagi petani (unit)	120	120	60	60	60	60	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Kementan
		Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen)	-	-	4	4	4	4		
		Pengembangan akses pemasaran (kelompok)	-	-	45	45	50	55		
		Pasar lelang (unit)	-	-	5	5	5	5		
		Pengembangan informasi pasar (unit)	600	600	60	60	60	60		
		Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran domestik (Bulan)	12	12	12	12	12	12		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG SUMBER DATA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan)	396	396	327	310	349	334	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan
		Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan (Unit)	353	353	1,483	1,344	1,381	1,453		
		Laporan Kondisi harga pangan pokok (Laporan)	34	34	35	35	35	35		
		Laporan Pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (laporan)	1	1	1	1	1	1		
		Laporan Pengembangan model distribusi dan cadangan pangan (Laporan)	1	1	1	1	1	1		
C Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi										
1	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa)	1,328	1,328	429	108	172	223	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan)	-	-	144	141	188	97		
		Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan (Laporan)	-	-	456	456	456	456		
		Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan)	1	1	35	35	35	35		
		Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri Pangan (Laporan)	-	-	35	35	35	35		
		Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan)	1	1	35	35	35	35		
		Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan (Laporan)	1	1	35	35	35	35		
2	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa)	6,500	6,500	2,600	5,500	6,100	6,900	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementan
		Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP (laporan)	34	34	35	35	35	35		
		Laporan Promosi P2KP (laporan)	64	64	35	35	35	35		
		Situasi Konsumsi Pangan Penduduk (Laporan)	34	34	35	35	35	35		
		Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar (Laporan)	34	34	135	135	185	185		
		Pengembangan Pangan Lokal (Laporan)	-	-	11	12	12	13		
3	Peningkatan serapan pasar domestik hasil kelautan dan perikanan	Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi)	33	33	34	34	34	34	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SIDANG SUMBER DATA KEMERDIAAN LINGKUNGAN RIBDI

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi)	-	-	13	16	19	23		
		Jumlah pengembangan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga)	-	-	6	8	10	12		
		Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri (lokasi)	-	-	10	15	20	25		
		Jumlah lokasi pengembangan informasi Pasar Dalam Negeri (Provinsi)	-	-	34	34	34	34		
		Jumlah kebijakan bidang pemasaran dalam negeri	-	-	5	5	5	5		
D Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan										
1	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementan
	Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP	400	400	423	423	423	423			

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ISU STRATEGIS: KETAHANAN ENERGI									
A	Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar									
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu	Jumlah produksi: Minyak Bumi Gas Bumi	870 MBOPD 1240 MBOEPD	870 MBOPD 1240 MBOEPD	830 - 870 MBOPD 1248 MBOEPD	913 MBOPD 1248 MBOEPD	914 MBOPD 1248 MBOEPD	915 MBOPD 1248 MBOEPD	Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Jumlah Potensi Cadangan: Minyak Bumi Gas Bumi	7,06 Miliar STB 145,5 TSCE	7,06 Miliar STB 145,5 TSCE	6,92 Miliar STB 145,5 TSCE	6,92 Miliar STB 145,5 TSCE	6,92 Miliar STB 145,5 TSCE	6,92 Miliar STB 145,5 TSCE		
		Jumlah Persetujuan POD I	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah Persetujuan Amandeen atau perpanjangan kontrak	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah kontrak kerja sama Migas Nonkonvensional yang ditawarkan dan ditandatangani	13 WK	13 WK	6 WK	6 WK	6 WK	6 WK		
		Jumlah kontrak kerja sama Migas konvensional yang ditawarkan dan ditandatangani	10 WK	10 WK	4 WK	4 WK	4 WK	4 WK		
		Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi	Survei 2D: 13812 KM; Survei 3D: 5231 KM2; 80 Sumur eksplorasi		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir minyak dan Gas Bumi	Produksi Bahan Bakar: BBM LPG LNG	45,9 Juta KL 2 Juta Ton 23,15 MMTPA	45,9 Juta KL 2 Juta Ton 23,15 MMTPA	38 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA	39 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA	40 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA	41 Juta KL 2,39 Juta Ton 25,02 MMTPA	Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Volume BBM Bersubsidi Volume LPG Bersubsidi	48 Juta KL	48 Juta KL	51,663 Juta KL 5107943 Mton	53,730 Juta KL 5455283 Mton	55,342 Juta KL 5.826.243 Mton	56,448Juta KL 6.222.427 Mton		
3	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	Jumlah Produksi Batubara PKP2B	397 Juta Ton	397 Juta Ton	421 Juta Ton	421 Juta Ton	421 Juta Ton	421 Juta Ton	Program Pengusahaan Mineral dan Batubara	KESDM
		Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri	95 Juta Ton	95 Juta Ton						
		Jumlah neraca cadangan sumberdaya dan cadangan izin usaha PKP2B yang dievaluasi	64	64	76	76	76	76		
4	Survei dan Pelayanan Geologi	Jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	740	740	10	10	10	10		KESDM
B Peningkatan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur Energi										
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Kapasitas Kilang Dalam Negeri:							Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
		Kilang Minyak (MBCD)	1313,8	1313,8	1167	1167	1167	1167		
		Kilang LPG (juta Ton/tahun)	2,81	2,81	4,6	4,6	4,6	4,6		
		Kilang LNG (MMTPA)	43,9	43,10	44	45	46	47		
		Peningkatan Kapasitas pengangkutan Migas dalam Negeri:								
		Minyak Bumi, BBM dan Hasil olahan (ribu KL)	8000	8000	8000	8000	8000	8000		
			LPG (Ton)	300	300	300	300	300		
			CNG (M3)	500	500	500	501	502		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas:								
		Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	36	36	50	50	50	50		
		LPG	2	2	10	10	10	10		
		Gas Bumi melalui pipa	1	1	1	1	1	1		
			1	2						
		Penambahan Kapasitas Penyimpanan dalam Negeri:								
		Minyak Bumi, BBM dan hasil olahan (ribu KL)	48	48	400	400	400	400		
		LPG (Ribu Ton)	20	20	5	5	5	5		
		LNG (Ribu M3)	400	401	100	100	100	100		
		CNG (Ribu M3)			120	121	122	123		
		Jumlah Usaha Penyimpanan:								
		Minyak Bumi, BBM	3	3	4	4	4	4		
		LPG	1	1	5	5	5	5		
		LNG	1	2	1	1	1	1		
		CNG			1	2	3	4		
		Pembangunan Kilang Mini LPG Plant LPG	1	1	1	1	1	1		
		Pemenuhan BBM dalam negeri untuk indonesia bagian timur	73.60%	73.60%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%		
		Jumlah usaha Niaga gas bumi melalui pipa, niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan	20	20	20	20	20	20		
		Sambungan rumah yang terbangun jaringan gas bumi melalui pipa	20000	20000	8000	8000	8000	8000		
		C Efisiensi dalam Pengelolaan Energi								
1	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	Laporan Penyiapan Tekno Ekonomi Energi	9	9	6	6	6	6	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Laporan Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien	4	4	5	5	5	5		
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi	5	5	4	4	4	4		
		Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Kerjasama Konservasi Energi	11	11	11	11	11	11		
		Layanan Audit Energi	300	300	300					

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi, dan Usaha Penunjang Bidang Migas	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas	30	30	35	40	45	50	Program Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	KESDM
D	Peningkatan Peranan EBT di dalam Bauran Energi									
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	Jumlah Produksi uap panas bumi	80 Juta Ton	80 Juta Ton	83 Juta Ton	83 Juta Ton	83 Juta Ton	83 Juta Ton	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Kapasitas terpasang PLTP	1405,5 MW	1405,5 MW	1440,5 MW	1440,5 MW	1440,5 MW	1440,5 MW		
		Jumlah WKP Panas Bumi yang dilelang oleh Pemerintah Pusat	2	2	2	2	2	2		
		Jumlah lokasi pengembangan panas bumi	1	1	2	2	2	2		
2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Tambahan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	4,88 MW	4,88 MW	16 MW	17 MW	18 MW	19 MW	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN	25	25	20	20	20	20	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
		Jumlah Produksi Biofuel dan Biogas	Biodiesel: 4.02 Juta KL Bioethanol: 0.16 Juta KL	Biodiesel: 4.02 Juta KL Bioethanol: 0.16 Juta KL	Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3	Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3	Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3	Biofuel: 4.77 Juta KL Biogas: 81.000 M3		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ISU STRATEGIS: PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP										
A	Pertanian									
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha)	6,172	6,172	6,307	6,307	6,307	6,307	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Registrasi kebun tanaman buah (kebun)	870	870	870	870	870	870		
		Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah (Unit)	55,921	55,921	615	615	615	615		
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan	Kawasan Tanaman Florikultura (m2)	475,000	475,000	450,000	450,000	450,000	450,000	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Registrasi Lahan Usaha (LU)	60	60	50	50	50	50		
		Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura (Unit)	175	175	200	200	200	200		
3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)	5,450	5,450	5,553	5,553	5,553	5,553	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (LU)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
		Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)	550	550	742	742	742	742		
		Kawasan Tanaman Obat (Ha)	750	750	751	751	751	751		
4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga)	199	199	160	160	160	160	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)	862,319	862,319	950,000	950,000	950,000	950,000		
		Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)	9,132,452	9,132,452	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000		
		Benih Tanaman Obat (Kg)	37,128	37,128	35,000	35,000	35,000	35,000		
		Benih Tanaman Buah (Batang)	1,246,799	1,246,799	970,000	970,000	970,000	970,000		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
5	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	78	78	75	75	75	75	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	Kementan
		Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)	1,700	1,700	2,045	2,045	2,045	2,045		
		SLPHT (Kelompok)	660	660	660	660	660	660		
		Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)	310	310	310	310	310	310		
6	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar	Pengembangan Tanaman Kopi (Ha)	3,500	3,500	4,850	4,850	4,850	4,850	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		Pengembangan Tanaman Teh (Ha)	575	575	5,050	5,050	5,050	5,050		
		Pengembangan Tanaman Kakao (Ha)	7,700	7,700	20,950	20,950	20,950	20,950		
		Pengembangan Tanaman Lada (Ha)	282	282	1,650	1,650	1,650	1,650		
		Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha)	850	850	1,000	1,000	1,000	1,000		
		Pengembangan Tanaman Pala (Ha)	3,625	3,625	1,525	1,525	1,525	1,525		
		Pemberdayaan Pekebun Tanaman rempah dan Penyegar (Orang)	1,000	1,000	10,771	10,771	10,771	10,771		
		Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)	100	100	67	67	67	67		
		Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (bulan)	12	12	12	12	12	12		
7	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	Pengembangan Tanaman Karet (Ha)	9,600	9,600	19,550	19,550	19,550	19,550	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)	11,600	11,600	25,100	25,100	25,100	25,100		
		Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha)	-	-	5,450	5,450	5,450	5,450		
		Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha)	2,000	2,000	2,010	2,010	2,010	2,010		
		Pengembangan Tanaman Sagu (Ha)	800	800	1,400	1,400	1,400	1,400		
		Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan (Ha)	-	-	25	25	25	25		
		Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit, Kakao, Karet (Laporan)	60	60	88	88	88	88		
		Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT)	-	-	18	18	18	18		
		Pemberdayaan Pekebun tanaman tahunan (Orang)	5,960	5,960	9,080	9,080	9,080	9,080		
		Pengembangan kebun benih tanaman tahunan (Ha)	180	180	208	208	208	208		
		Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (bulan)	12	12	12	12	12	12		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
8	Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha	Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kasus)	173	173	42	40	38	36	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Provinsi)	242	242	32	32	32	32		
		Pembinaan Pascapanen Tanaman Perkebunan (KT)	-	-	254	270	286	303		
		Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (bulan)	12	12	12	12	12	12		
9	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Pemberdayaan perangkat (Unit)	48	48	74	74	74	74	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		SL-PHT Perkebunan (KT)	132	132	198	198	198	198		
		Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen)	56	56	45	45	45	45		
		Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha)	13,722	13,722	16,698	16,698	16,698	16,698		
		Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang)	30	30	984	984	984	984		
		Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan)	12	12	12	12	12	12		
10	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, Dll (Ha)	150	150	100	100	100	100	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
		Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih (Batang)	6,458,000	6,458,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
		Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi)	-	-	29	29	29	29		
		Pemanfaatan Agensi Hayati (Jenis)	-	-	15	15	15	15		
		Koordinasi, Pembinaan dan Movev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bulan)	-	-	12	12	12	12		
11	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	Rancangan SNI Produk Pertanian (dokumen)	27	27	28	28	28	28	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Kementan
		Penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian (unit)	-	-	60	60	60	60		
		Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium pengujian, OKKPD dan LS) (unit)	-	-	45	45	45	45		
		Kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu (dokumen)	6	6	7	7	7	7		
		Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan (unit)	30	30	60	60	60	60		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
12	Pengembangan Pemasaran Internasional	Pengujian dan sertifikasi alsintan (unit)	225	225	255	275	275	300	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Kementan
		Dukungan kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
		Bahan posisi DELRI dalam forum negosiasi dan diplomasi (dokumen)	36	36	30	30	30	30		
		Optimalnya Negosiasi/diplomasi/advokasi dalam memperjuangkan Indonesia di Forum Internasional (dokumen)	27	27	20	20	20	20		
		Bahan evaluasi kebijakan/regulasi (dokumen)	-	-	1	1	1	1		
		Analisa ekspor dan impor (dokumen)	-	-	10	10	10	10		
		Kelompok/gapoktan yang memasok ke pasar ekspor (kelompok)	-	-	35	35	35	35		
		Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran internasional (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
13	Pengembangan Usaha dan Investasi	Kawasan kapemba dan agrowisata (lokasi)	-	-	10	10	10	10	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Kementan
		Sertifikasi IG (sertifikat)	-	-	1	1	1	1		
		Peningkatan Jumlah Kerjasama/Kemitraan Pengembangan Usaha Agribisnis (dokumen MOU)	-	-	50	50	50	50		
		Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian (kegiatan)	32	32	11	11	11	11		
		Fasilitasi Promosi produk Pertanian dalam dan Luar negeri (kegiatan)	150	150	18	18	18	18		
		Dukungan kegiatan pengembangan usaha dan investasi (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
14	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	204	204	263	263	263	263	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Kementan
		Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit)	74	74	74	74	74	74		
		Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit)	110	110	155	155	155	155		
		Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit)	173	173	185	185	185	185		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian (bulan)	12	12	12	12	12	12		
15	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah tropika lainnya (Tanaman)	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah benih sumber anggrek dan tanaman hias lain (Planlet)	4,000	4,000	4,600	4,700	4,800	4,900		
		Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika (Tanaman)	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000		
		Jumlah benih sumber kentang (G0) (Planlet)	26,000	26,000	40,000	42,500	45,000	47,500		
		Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (Kg)	35,000	35,000	35,000	36,500	38,000	39,500		
		Jumlah benih sumber krisan (Stek)	250,000	250,000	420,000	440,000	460,000	480,000		
		Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri (Teknologi)	-	-	20	20	20	21		
		Jumlah VUB hortikultura (VUB)	34	34	22	23	25	28		
		Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	-	-	2	2	2	2		
		Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (Model)	-	-	1	1	1	1		
		Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
16	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (Varietas)	10	10	7	10	8	6	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Kementan
		Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan (Teknologi)	21	21	24	23	26	25		
		Jumlah produk / formula (Produk)	-	-	4	5	4	4		
		Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton)	-	-	375	414	450	450		
		Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur, temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, kenaf dan rosela (Kg)	-	-	35,400	38,450	44,500	52,100		
		Jumlah benih sumber: Lada, nilam, seraiwangi, teh (Setek)	-	-	405,000	470,000	525,000	535,000		
		Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete, pala (Pohon)	-	-	60,000	80,000	100,000	100,000		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah benih sumber: Kopi Arabika, lindak (Biji)	-	-	750,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000		
		Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet (Entres)	-	-	100,000	200,000	560,000	560,000		
		Jumlah benih sumber: Tebu (G2) (Budset)	2,500,000	250,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
		Jumlah benih sumber: Rami (Rizome)	-	-	100,000	100,000	100,000	150,000		
		Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	-	-	6	6	6	6		
		Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan (Model Teknologi)	-	-	5	7	7	7		
		Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
17	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan	Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Pengawasan dan Penindakan (Lap)	2	2	2	2	2	2	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kementan
		Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Kerjasama di Bidang SPS (Lap)	4	4	4	4	4	4		
		Dokumen Sistem dan Prosedur Informasi Perkarantinaaan Pertanian (Lap)	2	2	2	2	2	2		
18	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Lap)	6	6	3	3	3	3	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kementan
19	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Lap)	6	6	3	3	3	3	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kementan
20	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	Rekomendasi Teknik dan Metode Tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati (Dok)	2	2	3	3	3	3	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kementan
		Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Lap)	3	3	4	4	4	4		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Bulan)	12	12	12	12	12	12	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kementan
		Dukungan Manajemen UPT lingkup Badan Karantina Pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12	12		
B Perikanan										
1	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan prinsip <i>ecoport</i> (lokasi)	-	-	3	3	4	4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP
2	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap (lokasi)	43	43	57	57	57	57	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tanekao	KKP
		Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB)	1800	1800	2000	2100	2200	2300		
		Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang)	-	-	2040	4080	6120	8160		
		Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang)	-	-	1020	2040	3060	4080		
		Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi)	-	-	34	34	34	34		
		Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit)	-	-	3	5	7	9		
		Jumlah pembinaan dan perlindungan kenelayanan (orang)	-	-	20000	22500	25000	27500		
		Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi (KUB)	-	-	5000	5500	6000	6500		
		Jumlah nelayan yang terpantau dan terevaluasi (orang)	-	-	100000	130000	169000	219700		
3	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang)	-	-	168000	362000	584000	840000	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	KKP

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah judul Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Judul: kumulatif)	-	-	2	4	6	9		
		Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok)	-	-	630	662	695	729		
		Jumlah kelompok masyarakat usaha budidaya melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok)	4,000	4000	100	120	140	160		
		Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang; kumulatif)	-	-	2700	6500	11500	18500		
		Jumlah investor baru di bidang perikanan budidaya yang difasilitasi (orang; kumulatif)	-	-	30	70	120	180		
4	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi)	-	-	3	5	7	9	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	KKP
		Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan)	-	-	1	2	3	3		
		Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (dokumen)	-	-	1	1	2	2		
		Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	520	520	550	575	600	625		
		Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	20	20	25	27	29	31		
		Jumlah negara mitra yang harmonis dengan sistem , mutu dan keamanan hasil perikanan (MRA/ MoU)	-	-	34	35	36	37		
		Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	-	-	80,000	82,000	84,000	86,000		
		Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan	1115	1115	1,130	1,175	1,225	1,275		
		Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan (%)	-	-	90	95	95	95		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
5	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)	-	-	20	22	24	26	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	KKP
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)	-	-	12	13	14	15		
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	-	-	10	12	13	14		
		Jumlah laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 (unit)	-	-	15	17	19	21		
		Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)	-	-	20	23	26	28		
		Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	-	-	180	200	220	240		
		Peningkatan jumlah RSNI metode pengujian	-	-	3	4	5	6		
		Jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi	-	-	1000	1100	1200	1300		
		Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	-	-	4	4	4	4		
6	Penguatan dan perluasan akses pasar luar negeri hasil kelautan dan perikanan		-	-					Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UMKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing (UMKM)	30	30	60	70	80	90		
		Jumlah negara yang dilakukan penanganan hambatan ekspor hasil perikanan (negara)	1	1	3	3	4	4		
		Jumlah promosi pemasaran internasional dalam rangka penguatan branding "naturally diverse" hasil perikanan Indonesia (jumlah promosi)	-	-	6	6	7	7		
		Jumlah negara yang mengimplementasikan kerjasama pemasaran hasil perikanan (negara)	1	1	3	3	4	4		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah kesepakatan hasil perundingan internasional (dokumen kesepakatan)	-	-	4	4	4	4		
		Jumlah utilitas pemanfaatan hasil perundingan (%)	-	-	50	50	60	60		
		Jumlah negara yang terpetakan potensi dan daya saing pasar hasil perikanan (negara)	20	20	45	50	55	60		
		Jumlah jenis produk unggulan ekspor hasil perikanan Indonesia yang terpetakan potensi dan daya saing pasarnya di negara tujuan utama (jenis produk)	-	-	4	8	12	16		
		Nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri (miliar USD)	< 20 %	< 20 % terhadap nilai ekspor	< 1,17	< 1,36	< 1,52	< 1,71		
		Jumlah kebijakan bidang pemasaran luar negeri	-	-	5	5	5	5		
7	Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Jumlah lokasi Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)	37	37	47	52	57	62	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah lokasi akselerasi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)	-	-	8	18	28	38		
		Jumlah UMKM non – sentra yang dibina (UMKM)	-	-	102	102	102	102		
		Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun	5	5	10	12	14	16		
		Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang disosialisasikan dan diterapkan	-	-	15	18	30	44		
		Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP)	-	-	500	525	550	575		
		Jumlah UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)	249	249	269	289	309	329		
		Jumlah Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)	60	60	70	80	90	100		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi)	143	143	151	159	167	175		
		Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil	-	-	5	5	5	5		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
8	Pengembangan produk dan usaha pasca panen nonpangan hasil kelautan dan perikanan	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produk Non Pangan Hasil Perikanan yang dibina dan dikembangkan (UMKM)	50	50	200	250	300	350	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Industri Produk Non Pangan Hasil Perikanan yang dibina dan dikembangkan (Industri)	-	-	30	35	40	45		
		Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi)	65	65	80	95	110	125		
		Jumlah provinsi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (Provinsi)	33	33	34	34	34	34		
		Jumlah negara pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (Negara)	4	4	5	6	7	8		
		Jumlah Rancangan standar nasional indonesia yang disusun dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan. (RSND)	5	5	5	5	5	5		
		Jumlah Standar Nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan (SNI)	10	10	15	20	25	31		
		Jumlah kebijakan bidang pengembangan produk nonpangan	-	-	5	5	5	5		
9	Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan	Jumlah calon wirausaha baru pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	-	100	150	200	250	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah kebijakan bidang usaha dan investasi P2HP	-	-	5	5	5	5		
		Jumlah Penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi (provinsi)	-	-	34	34	34	34		
		Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar)	-	-	60	60	60	60		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (Entitas Usaha)	-	-	1340	1500	1600	1700		
		Jumlah Pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor Kelautan dan Perikanan (Provinsi)	-	-	34	34	34	34		
		Nilai permodalan usaha P2HP (Rp. Miliar)	200	200	320	336	353	370		
10	Pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)	-	-	10	13	16	19	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	KKP
		Penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran	-	-	5	5	5	5		
		Penerapan penggunaan Tanda SNI Produk (Sertifikat)	-	-	3	4	4	5		
		Uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data)	-	-	600	600	600	600		
		Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM)	-	-	14	16	18	20		
		Jumlah Rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	3	3	3	3		
11	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Paket penerapan Iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	3	3	6	6	6	6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Inovasi teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP yang diusulan HKI (paket)	1	1	1	1	1	1		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Jumlah Paket teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	4	4	2	2	2	2		
		Jumlah Komponen Teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	10	10	11	11	11	11		
		Jumlah Data dan Informasi litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	10	10	10	10	10	10		
		Jumlah Rancang bangun/model alat litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (model)	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah inovasi produk kelautan hasil litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (buah)	0	0	1	2	2	2		
12	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja /dokumen permohonan)	-	-	10	10	10	10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tanekan	KKP
		Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan)	-	-	7	7	7	7		
		Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit)	-	-	10000	12500	12600	12700		
		Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit)	-	-	9600	11250	11340	11430		
		Jumlah tindak lanjut rekomendasi pelanggaran perijinan usaha perikanan tangkap (%)	-	-	100	100	100	100		
		Jumlah penguatan sistem perizinan daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	11	22	33	66		
		Jumlah WPP yang menerapkan penataan perizinan berbasis zonasi (WPP)	-	-	2	4	6	8		
		Jumlah pelayanan usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (dokumen)	-	-	1	1	1	1		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
13	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan								Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Rekomendasi kebijakan pembangunan KP (paket)	4	4	6	6	7	8		
		Jumlah Model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model)	4	4	4	4	4	4		
		Jumlah Model kebijakan sosial ekonomi pembangunan sektor KP (model)	0	0	6	6	6	6		
		Jumlah Data dan Informasi Sosial Ekonomi KP (paket)	11	11	15	15	15	15		
14	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6,108	6,108	6250	6500	6500	6500	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)			110	110	110	110		
15	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah ekosistem perairan umum daratan (PUD) yang direvitalisasi (lokasi)	8	8	3	6	9	12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tanekan	KKP
		Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	11	11	5	7	9	11		
		Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	6	6	2	4	6	7		
		Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah)	-	-	3	3	3	3		
		Jumlah ketersediaan data statistik perikanan tangkap (dokumen)	-	-	7	7	7	7		
		Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	-	-	250	500	750	1000		
		Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit)	-	-	100	150	200	250		
		Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	-	-	3	6	9	10		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
16	Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI berbasis IPTEK (paket)	4	4	7	7	7	7	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI (paket)	2	2	4	4	4	4		
		Jumlah Wilayah Pengelolaan PerikananLaut yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP)	4	4	2	2	2	2		
		Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan PUD yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (PUD)	8	8	8	8	8	8		
		Jumlah Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya (KKP)	6	6	3	3	3	3		
		Jumlah data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan	0	0	10	10	10	10		
		Jumlah teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi SDI (paket)	0	0	3	3	3	3		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
C	Kehutanan									
1	Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya 100% Peta Permohonan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	80%	80%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut
		Tersedianya Peta Penetapan dan kelembagaan 409 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	-	-	109 KPH	209 KPH	309 KPH	409 KPH		
2	Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	-	-	35%	55%	65%	75%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut
		Terselenggaranya Pengukuhan Hutan Secara Parsial	-	-	100%	100%	100%	100%		
		Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan Minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	-	-	6.000 Km	14.000 Km	22.000 Km	32.000 Km		
3	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di 409 KPH (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran spasial)	-	-	109 KPH	209 KPH	309 KPH	409 KPH	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut
4	Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	Terjaminnya 600 KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK	-	-	258 KPH	358 KPH	458 KPH	600 KPH	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenhut

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Terjaminnya 600 KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTG	-	-	258 KPH	358 KPH	458 KPH	600 KPH		
5	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Tercapainya Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Kemenuh
6	Pemantapan Kawasan Hutan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 km dan terbangunnya kesepakatan publik serta pengendalian pemantapan kawasan hutan	-	-	6.000 Km	14.000 Km	22.000 Km	32.000 Km	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenuh
		Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	-	-	109 KPH	209 KPH	309 KPH	409 KPH		
		Terselesaikannya Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran)	-	-	330 Klaster	660 Klaster	990 Klaster	1.320 Klaster		
7	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Terjaminnya Penyelenggaraan Pengolaan Hutan Produksi di 347 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)			80 Unit	153 Unit	227 Unit	287 Unit	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenuh
		Tersedianya data arahan pemanfaatan dan investasi hutan produksi pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi	100%	100%	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi		
		Meningkatnya produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari kawasan hutan produksi sebesar 20% dari tahun 2013 (rata-rata 4% per tahun)	5%	5%	4%	8%	12%	16%		
8	Peningkatan Usaha Hutan Alam	Meningkatnya sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada 40 Unit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK HA/RE)	-	-	8 Unit	16 Unit	24 Unit	32 Unit	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenuh
		Meningkatnya penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) pada 50 unit IUPHHK-HA	-	-	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit		
		Total produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 50 juta m ³	-	-	7 Juta m ³	15 Juta m ³	25 Juta m ³	37 Juta m ³		
		Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 1 juta ha	5%	5%	200.000 Ha	400.000 Ha	600.000 Ha	800.000 Ha		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
9	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	Meningkatnya Kinerja Usaha Pemanfaatan pada 50 Unit Manajemen Hutan Tanaman	-	-	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenhut
		Total produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m ³	-	-	26 Juta m ³	58 Juta m ³	91 Juta m ³	125 Juta m ³		
		Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman untuk pertukangan dan <i>bioenergy</i> sebanyak 50 Unit (400 Ribu ha)	-	-	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit		
		Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakvat seluas 250 ribu Ha	-	-	50.000 Ha	100.000 Ha	150.000 Ha	200.000 Ha		
		Penyelesaian konflik lahan pada 50 lokasi	-	-	10 Lokasi	20 Lokasi	30 Lokasi	40 Lokasi		
10	Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Luran Hasil Hutan	Implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online pada 54 unit manajemen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	100%	100%	14 Unit	24 Unit	34 Unit	44 Unit	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenhut
		Penerimaan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 20 % dari tahun 2013	2%	2%	5%	10%	15%	20%		
11	Peningkatan Industri Primer Kehutanan	Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp2,5 Triliun	-	-	500 Miliar	1 Triliun	1,5 Triliun	2 Triliun	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenhut
		Meningkatnya Implementasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) <i>online</i> pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (710 unit)	-	-	746 Unit	781 Unit	817 Unit	852 Unit		
		Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 25% dari tahun 2013 (26,5 juta m ³)	10%	10%	27,9 Juta m ³	29,2 Juta m ³	30,5 Juta m ³	31,8 Juta m ³		
		Total nilai ekspor produk hasil hutan kayu menjadi sebesar USD32,5 miliar	-	-	USD6,5 Miliar	USD13 Miliar	USD19,5 Miliar	USD26 Miliar		
		Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 347 KPHP	-	-	80 KPHP	153 KPHP	227 KPHP	287 KPHP		
12	Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi	Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Usaha Hutan Alam di 18 Wilayah	-	-	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan	Kemenhut
		Meningkatnya Kinerja Produksi Hutan Tanaman pada 18 wilayah sebesar 160 Juta M ³	-	-	26 Juta m ³	58 Juta m ³	91 Juta m ³	125 Juta m ³		
		Terbinanya tenaga teknis kehutanan PHPL sebesar 100%	-	-	100%	100%	100%	100%		
		Meningkatnya Usaha Industri Primer Hasil Hutan di 18 Wilayah	-	-	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
13	Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Jumlah Tenaga Bakti Rimawan sebanyak 15.000 orang di 600 KPH	-	-	987 Orang	5.487 Orang	8.987 Orang	12.487 Orang	Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Kemenhut
		Jumlah sertifikat SDM KPH dan SDM Kehutanan Lainnya yang Kompeten, 10.000 orang	-	-	1.000 orang	2.500 Orang	4.500 Orang	7.000 Orang		
14	Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 5.000 KTH	-	-	600 KTH	1.700 KTH	2.800 KTH	3.900 KTH	Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Kemenhut
		Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di dalam KPH dan Hutan Rakyat	-	-	25 Unit	130 Unit	250 Unit	370 Unit		
		Terbentuknya kemitraan KTH yang <i>profitable</i> dengan pelaku usaha kehutanan, 150 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat	-	-	10 Unit	45 Unit	80 Unit	115 Unit		
15	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya	Jumlah SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang lulus diklat berbasis kompetensi minimal 41.800 orang	-	-	8.540 Orang	16.660 Orang	25060 Orang	33430 Orang	Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Kemenhut
		Tersedianya SDM Aparatur Kehutanan yang lulus pendidikan S2 dan S3, 290 orang (S3= 60 orang, S2= 230 orang)	-	-	35 Orang	95 Orang	160 Orang	225 Orang		
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan KHDTK di 7 BDK sebagai sarana kediklatan.	-	-	1 KHDTK	3 KHDTK	5 KHDTK	7 KHDTK		
16	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.300 orang lulusan	-	-	280 Orang	980 Orang	1.400 Orang	1.850 Orang	Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Kemenhut
17	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Kayu dan Bukan Kayu	Iptek dasar dan terapan bidang teknologi pengolahan hasil hutan untuk mendukung inovasi teknologi, diversifikasi produk, peningkatan kualitas, optimasi proses produksi, dan pemanenan hasil hutan di 7 KPHP dan 3 KPHL	-	-	20%	40%	65%	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Kemenhut
		<i>Pilot project</i> litbang di KPH Lakitan	-	-	30%	60%	100%	100%		
18	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi SDH (flora, fauna, mikroba dan kawasan)	Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan flora dan fauna langka.	-	-	20%	40%	65%	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Kemenhut
		<i>Pilot project</i> litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya	-	-	20%	40%	65%	80%		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
19	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan (Kayu dan Non Kayu)	Iptek dasar dan terapan bidang peningkatan produksi kayu dan HHBK di 29 KPHP, 3 KPHL, 2 KPHK	-	-	20%	40%	60%	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	Kemenhut
		<i>Pilot project</i> litbang di KPHP Biak Numfor, KPHP Bualemo, KPHP Jeneberang	-	-	20%	40%	60%	80%		
20	Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim	Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan dan pemanfaatan hutan, yang meliputi : (1) Kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan iklim; (2) Kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) Politik dan hukum pemanfaatan hutan; (4) Kebijakan tata kelola dan ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL	-	-	20%	40%	60%	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Kemenhut
		<i>Pilot project</i> litbang di KPH Yogyakarta	-	-	20%	40%	60%	80%		
D	Mineral dan Pertambangan									
1	Pembinaan Pengusahaan Mineral	Jumlah Produksi Mineral	Tembaga: 640 Ribu Ton Emas: 87 Ton Timah 88 Ribu Ton Bijih Nikel 3.5 Juta Ton Bauksit 1 Juta Ton Bijih dan Pasir Besi: 7 Juta Ton	Tembaga: 640 Ribu Ton Emas: 87 Ton Timah 88 Ribu Ton Bijih Nikel 3.5 Juta Ton Bauksit 1 Juta Ton Bijih dan Pasir Besi: 7 Juta Ton					Program Pengusahaan Mineral dan Batubara	KESDM
		Prosentase Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dalam pengembangan sub sektor pertambangan umum	58%	58%	58.50%	59%	59.50%	60%		
		Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang	-	-	33 smelter	59 melter	63 smelter	65 smelter		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ISU STRATEGIS: PENGUATAN TATA KELOLA, KONSERVASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN										
A	Konservasi Hutan									
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional	-	-	12 Unit	22 Unit	34 Unit	45 Unit	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen	-	-	30 Rencana Pengelolaan	31 Rencana Pengelolaan	32 Rencana Pengelolaan	33 Rencana Pengelolaan		
		Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi	2%	2%	3 KEE	6 KEE	10 KEE	13 KEE		
		Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar	-	-	50.000 Ha	100.000 Ha	150.000 Ha	200.000 Ha		
2	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Terjaminnya Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	3%	3%	2%	4%	6%	8%	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terjaminnya 60 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran Luar Negeri	5%	5%	10 unit	15 Unit	30 Unit	35 Unit		
		Terjaminnya Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 trilyun	-	-	5 Trilyun	10 Trilyun	15 Trilyun	20 Trilyun		
		Terjaminnya Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019)	-	-	10 Milyar	20 Milyar	30 Milyar	40 Milyar		
		Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013	-	-	2 jenis	4 Jenis	6 Jenis	8 Jenis		
3	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya pengusaha pariwisata alam meningkat sebesar 100 unit dari tahun 2013	60%	60%	20 unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan	5 unit	5 unit	5 Perusahaan	15 Perusahaan	20 Perusahaan	25 Perusahaan		
		Tercapainya registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard (VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD + pada 2 Kawasan Konservasi	-	-	0 KK	1 KK	1 KK	2 KK		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader	10%	10%	1.200 KK	2.400 KK	3.600 KK	4.800 KK		
		Terjaminnya kontribusi PNBPN dari perusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Triliun	100%	100%	200 Milyar	400 Milyar	600 Milyar	800 Milyar		
4	Pengendalian Kebakaran Hutan	Terjaminnya penurunan jumlah Hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun	67.20%	67.20%	17.464 HS	17.107 HS	16.751 HS	16.394 HS	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.475,2 Ha dalam 5 tahun	50.00%	50.00%	3.784 Ha	3.706 Ha	3.629 Ha	3.552 Ha		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun	-	-	600 Orang	1.200 Orang	1.800 Orang	2.400 Orang		
		Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun	-	-	20 Brigade	40 Brigade	60 Brigade	80 Brigade		
5	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselamatkan Minimal 75 kasus per tahun	25%	25%	75 Kasus	75 Kasus	75 Kasus	75 Kasus	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Terjaminnya Penanganan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA	-	-	15 Lokasi	30 Lokasi	45 Lokasi	60 Lokasi		
		Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana Pengamanan Hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC	-	-	50 Lokasi	38 Lokasi	50 Lokasi	38 Lokasi		
		Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang	-	-	2.000 Orang	4.000 Orang	6.000 Orang	8.000 Orang		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengelolaan Taman Nasional	Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Tersusun sebanyak 50 dokumen	-	-	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 6 Lokasi	2%	2%	1 KEE	3 KEE	4 KEE	5 KEE		
		Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar	-	-	30.000 Ha	70.000 Ha	100.000 Ha	120.000 Ha		
		Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	3%	3%	2%	4%	6%	8%		
		Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar 25 trilyun dalam 5 tahun (2015-2019)	-	-	2,5 Trilyun	5 Trilyun	7,5 Trilyun	10Trilyun		
		Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019)	-	-	5 Milyar	10 Milyar	15 Milyar	20 Milyar		
		Jumlah jenis satwa liar yang dikembangkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013	5%	5%	1 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	4 Jenis		
		Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100 Unit dari tahun 2013	60%	60%	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit		
		Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan dalam 5 tahun	5 unit	5 unit	2 Perusahaan	5 Perusahaan	10 Perusahaan	13 Perusahaan		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard (VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Kawasan Konservasi	-	-	0	1 KK	1 KK	2 KK		
		Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader	-	-	600 KK	1.200 KK	1.800 KK	2.400 KK		
		Kontribusi PNBP dari perusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Trilyun selama 5 tahun (2015-2019)	100%	100%	100 Milyar	200 Milyar	300 Milyar	400 Milyar		
		Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun	67.20%	67.20%	17.464 HS	17.107 HS	16.751 HS	16.394 HS		
		Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.475,2 Ha dalam 5 tahun	50%	50%	3.784 Ha	3.706 Ha	3.629 Ha	3.552 Ha		
		Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun	6 DAOPS	6 DAOPS	300 Orang	600 Orang	900 Orang	1.200 Orang		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun	-	-	2 Brigade	0 Brigade	0 Brigade	0 Brigade		
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselamatkan minimal 75 kasus per tahun	25%	25%	75 Kasus	75 Kasus	75 kasus	75 kasus		
		Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA	-	-	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi		
		Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC	-	-	50 Lokasi	38 Lokasi	50 Lokasi	38 Lokasi		
		Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang	6 DAOPS	6 DAOPS	1.000 Orang	2.000 Orang	3.000 Orang	4.000 Orang		
7	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Beroperasinya 50 Unit KPH Konservasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional	-	-	12 Unit	22 Unit	34 Unit	45 Unit	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kemenhut
		Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Tersusun sebanyak 150 dokumen	-	-	20 Dokumen	40 Dokumen	60 Dokumen	80 Dokumen		
		Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 10 Lokasi	2%	2%	2 KEE	4 KEE	6 KEE	8 KEE		
		Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar	-	-	20.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	3%	3%	2%	4%	6%	8%		
		Tersertifikasinya 60 unit penangkaran yang akan melakukan peredaran Luar Negeri.	5%	5%	10 Unit	15 Unit	30 Unit	35 Unit		
		Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp25 trilyun	-	-	2,5 Trilyun	5 Trilyun	7,5 Trilyun	10Trilyun		
		Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar Rp50 Milyar	-	-	5 Milyar	10 Milyar	15 Milyar	20 Milyar		
		Jumlah jenis satwa liar yang dikembangkan di Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013	5%	5%	1 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	4 Jenis		
		Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100 Unit dari tahun 2013	60%	60%	10 Unit	20 Unit	25 Unit	30 Unit		
		Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan	5 unit	5 unit	3 Perusahaan	6 Perusahaan	7 Perusahaan	9 Perusahaan		
		Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader	-	-	600 KK	1.200 KK	1.800 KK	2.400 KK		
		Kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp 1 Trilyun selama 5 tahun (2015-2019)	100%	100%	100 Milyar	200 Milyar	300 Milyar	400 Milyar		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot dalam 5 tahun	67.20%	67.20%	17.464 HS	17.107 HS	16.751 HS	16.394 HS		
		Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.475,2 Ha dalam 5 tahun	50%	50%	3.784 Ha	3.706 Ha	3.629 Ha	3.552 Ha		
		Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun	6 DAOPS	6 DAOPS	300 Orang	600 Orang	900 Orang	1.200 Orang		
		Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun	-	-	18 Brigade	40 Brigade	60 Brigade	80 Brigade		
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan terselesaikan minimal 75 kasus per tahun	-	-	75 Kasus	75 Kasus	75 Kasus	75 Kasus		
		Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT PHKA	-	-	10 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi		
		Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC	-	-	50 Lokasi	38 Lokasi	50 Lokasi	38 Lokasi		
		Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 10.000 orang dalam 5 tahun	6 DAOPS	6 DAOPS	1.000 Orang	2.000 Orang	3.000 Orang	4.000 Orang		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pembinaan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	Terjaminnya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL	-	-	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Pembuatan Tanaman Hutan Kota dan pemeliharannya seluas 1.000 Ha	-	-	200 Ha	400 Ha	600 Ha	800 Ha		
9	Pengembangan Perhutanan Sosial	Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014	6 Lokasi	6 Lokasi	11%	12%	13%	14%	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m ³	50.000 Ha	50.000 Ha	15 Juta m ³	34 Juta m ³	56 Juta m ³	78 Juta m ³		
		Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit	500.000 Ha	500.000 Ha	100 Unit	200 Unit	300 Unit	400 Unit		
10	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS	3 DAS	3 DAS	36 DAS	72 DAS	108 DAS	144 DAS	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja DAS 108 DAS	36 BPDAS	36 BPDAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS		
		Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS			34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
11	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Terjaminnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha	610 Ha	610 Ha	170 Ha	250 Ha	330 Ha	410 Ha	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR	37 Lokasi	37 Lokasi	37,5 Juta Batang	75 Juta Batang	112,5 Juta Batang	150 Juta Batang		
		Areal sumber benih seluas 10.500 Ha terkelola	4.500 Ha	4.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha		
12	Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS	Terlaksananya Pengelolaan Hutan Lindung di 182 KPHL	-	-	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Pembuatan Tanaman hutan Kota dan pemeliharanya seluas 1.000 Ha	-	-	200 Ha	400 Ha	600 Ha	800 Ha		
		Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun 2014	6 Lokasi	6 Lokasi	11%	12%	13%	14%		
		Produksi kayu di hutan rakyat selama 5 tahun menjadi 100 Juta m3	-	-	15 Juta m3	34 Juta m3	56 Juta m3	78 juta m3		
		Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 500 unit	-	-	100 Unit	200 Unit	300 Unit	400 Unit		
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu sebanyak 180 DAS	3 DAS	3 DAS	36 DAS	72 DAS	108 DAS	144 DAS		
		Tersedianya data dan informasi kinerja 108 DAS	36 BPDAS	36 BPDAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS	108 DAS		
		Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS	-	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR	4.000 Unit	4.000 Unit	27 Juta Batang	54 Juta Batang	81 Juta Batang	108 Juta Batang		
13	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha	610 Ha	610 Ha	170 Ha	250 Ha	330 Ha	410 Ha	Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS	Kemenhut
		Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR	37 Lokasi	37 Lokasi	10,5 Juta Batang	21 Juta Batang	31,5 Juta Batang	42 Juta Batang		
		Areal sumber benih seluas 10.500 Ha terkelola	4.500 Ha	4.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha	10.500 Ha		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Tata Kelola, Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan									
1	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha)	300.000	300.000	500.000	600.000	800.000	900.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan)	4.5 jt Ha	4.5 jt Ha	17	28	30	33		
		Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan)	-	-	10	20	25	30		
		Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)	15	15	10	15	19	19		
		Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring)	-	-	3	3	3	5		
2	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terluar berpenduduk terfasilitasi sarpras dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau)	64 ppk, 5 ppkt	64 ppk, 5 ppkt	15	16	21	26	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk yang dikelola (pulau)	-	-	7	20	35	55		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (Gugus Pulau)	-	-	3	5	7	9		
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya (pulau)	5	5	5	30	60	90		
		Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau)	-	-	750	500	250	-		
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau)	21	21	20	70	120	170		
3	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk)	3	3	3	4	5	6	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin)	-	-	4	10	15	20		
		Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan)	22	22	22	65	80	95		
		Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan)	120 ha	120 ha	7	20	30	40		
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan)	-	-	7	15	20	25		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasaranya (kawasan)	-	-	3	10	15	20		
4	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	-	-	36	54	54	37	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	-	-	3	4	4	2		
		Jumlah dokumen Tata Ruang WP3K di Wilayah Nasional dan Lintas Wilayah yang telah dievaluasi substansinya (dokumen)	-	-		39	58	58		
		Jumlah dokumen RZWP3K yang diakselerasi legalitasnya (dokumen)	-	-	5	72	90	50		
		Jumlah dokumen final RZWP3K kab/kota dan prov yang telah dievaluasi substansinya (lokasi)	-	-	72	90	50	50		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (lokasi)	65	65	50	50	50	30		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas	90 Hari operasi	60 Hari operasi	116 hari operasi	73 hari operasi	73 hari operasi	75 hari operasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Kapal Pengawas yang siap Beroperasi	27 unit	27 unit	27 unit	31 Unit	31 unit	32 unit		
		Jumlah Awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi	-	-	108 orang	124 orang	124 orang	128 orang		
6	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu	79%	79%	80%	82%	85%	90%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik secara akuntabel	79%	79%	80%	82%	85%	90%		
		Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Inpres 15 tahun 2011)	-	-	80%	80%	80%	80%		
		Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan baru yang kompeten (orang)	60	60	30	30	30	30		
7	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan)	-	-	5	6	7	8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah jenis ikan yang dilindungi, yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	-	-	6	8	10	14		
		Jumlah Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan	32%	32%	30	40	50	60		
		Persentase penurunan tingkat pencemaran akibat aktifitas perikanan [UPI] (%)	28	28	60	72	78	84		
		Persentase survey BMKT yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perijinan yang diberikan (%)	-	-	45	55	60	75		
		Jumlah usaha garam yang sesuai ketentuan perijinan yang diberikan (usaha garam)	-	-	70	80	90	100		
		Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	-	-	100	100	100	100		
8	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	90	95,35	96,31	97,27	98,24	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	90	89,61	90,46	93,17	95,97		
		Persentase Ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	80	80	80,00	91,25	92,37	93,50		
		Persentase Ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	80	80	75,37	80,23	84,74	88,96		
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif Dalam Pengawasan SDKP (POKMASWAS)	800	800	1,128	1.539	1.585	1.632		
		Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan	-	-	90,00	92,00	94,00	96,00		
		Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan (%)	-	-	30,50	32,50	34,50	37,50		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang	-	-	6	3	3	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	KKP
		Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator], Gudang barang bukti, Rumah penampungan sementara ABK Non Justitia, Pos Pengawas) (unit)	20	20	10	10	10	10		
		Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%)	-	-	75,00	80,00	85,00	90,00		
		Kawasan konservasi yang dapat dipantau (lokasi)	-	-	12	24	36	48		
10	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)	2	2	4	4	4	4	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan (paket)	2	2	3	3	3	3		
		Jumlah Inovasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)	6	6	5	5	5	5		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Data dan /atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iK/Lim (paket)	0	0	2	2	2	2		
		Jumlah Data dan informasi teknologi kelautan dan perikanan, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Paket)	0	0	4	4	4	4		
		jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil pengkajian dan perekayasa teknologi KP (buah)	0	0	1	1	1	1		
		Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	0	0		
11	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket)	3	3	8	8	8	8	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	KKP
		Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket)	2	2	3	3	3	3		
		Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan sumberdayanya (SDLP)	7	7	5	5	5	5		
		Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP)	2	2	5	5	5	5		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen data dan/atau informasi sumberdaya dan kerentanan Pesisir dan Laut (paket)	3	3	5	5	5	5		
		Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil litbang sumberdaya laut dan pesisir (buah)	0	0	1	1	1	1		
12	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi)	25	25	11	15	18	20	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	KKP
13	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan sesuai roadmap RB KKP	56	56	25	26	27	29	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
C Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup										
1	Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim	Tersusunnya posisi pemerintah Indonesia yang kuat dalam negosiasi maupun tindak lanjut komitmen UNFCCC	-	-	1 kertas kerja pemerintah	1 kertas kerja pemerintah	1 kertas kerja pemerintah	1 kertas kerja pemerintah		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tersusunnya masukan kebijakan nasional tentang perubahan iklim dan penyelenggaraan pendanaannya secara efektif dan antisipatif	-	-	2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon	2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon	2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon	2 dokumen masukan kebijakan perubahan iklim nasional dan mekanisme pendanaan & perdagangan karbon		
2	Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pedoman dan kebijakan pengelolaan limbah B3 kegiatan tertentu	-	-	1 pedoman/kebijakan	2 pedoman/kebijakan	0 pedoman/kebijakan	0 pedoman/kebijakan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pelayanan verifikasi perijinan limbah B3, serta penerbitan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3	-	-	500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu	500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu	1000 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu	1000 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur, dan tepat waktu		
		Kapasitas pelayanan verifikasi dan penerbitan ijin dumping limbah B3	-	-	200 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu	200 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu	500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu	500 unit yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah kabupaten/kota yang kapasitasnya memenuhi syarat dalam melaksanakan perizinan penyimpanan limbah B3	-	-	0 kabupaten/ kota prioritas	10 kabupaten/ kota prioritas	20 kabupaten/ kota prioritas	30 kabupaten/ kota prioritas		
		Persentase target dan sasaran kerja Basel Convention Regional Center for South East Asia yang <u>ditetapkan terpenuhi</u>	-	-	100%	100%	100%	100%		
3	Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Informasi kualitas lingkungan hidup nasional setiap tahun ter-update dan didiseminasikan	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		Persentase prasarana, data, dan informasi berfungsi optimal dan terjadi peningkatan pemanfaatan oleh publik	-	-	20%	50%	100%	100%		
		Jumlah sistem Informasi Lingkungan Hidup di tingkat daerah yang terselenggara optimal	-	-	5 provinsi prioritas	10 provinsi prioritas	10 provinsi prioritas	15 provinsi prioritas		
4	Peningkatan Komunikasi Lingkungan	Jumlah tema yang disusun strateginya dan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran <u>prioritas</u>	-	-	3 tema kampanye	3 tema kampanye	3 tema kampanye	3 tema kampanye	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		Persentase peningkatan persepsi positif dan kesadaran kelompok sasaran <u>prioritas</u>	-	-	10%	15%	20%	25%		
5	Pengembangan Ekonomi Lingkungan	Jumlah rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan <u>valuasi SDA & LH</u>	-	-	6 rumusan yang efektif diacu	3 rumusan yang efektif diacu	2 rumusan yang efektif diacu	2 rumusan yang efektif diacu	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan jumlah provinsi yang telah menerapkan PDRB Hijau dalam perencanaan pembangunannya	-	-	5 provinsi yang menerapkan	8 provinsi yang menerapkan	10 provinsi yang menerapkan	15 provinsi yang menerapkan		
6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya penataan pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup	-	-	2 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah	3 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah	0 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah	0 kebijakan/ ketentuan tentang pembagian kewenangan maupun pelimpahan urusan pusat ke daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Peningkatan pencapaian target SPM provinsi/kabupaten/kota	-	-	66 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target	66 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target	75 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target	100 daerah yang terus meningkat dan memenuhi target		
		Jumlah SDM fungsional institusi LH di daerah meningkat dan dilaksanakan efektif	-	-	50 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif	100 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif	150 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif	200 orang/tahun dibina dan berfungsi efektif		
7	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah rumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati dan genetik	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	1 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kapasitas optimal pemberian rekomendasi keamanan hayati/genetik	10 rekomendasi	10 rekomendasi	5 rekomendasi/tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur	10 rekomendasi/tahun yang diberikan tepat waktu dan sesuai prosedur		
		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem hutan dan lahan	202 kabupaten	202 kabupaten	200 kabupaten sebagai peserta program MIH	202 kabupaten	202 kabupaten	202 kabupaten		
8	Peningkatan Peran Masyarakat	Jumlah fasilitasi penyusunan strategi dan model peningkatan peran masyarakat	20 kegiatan/komunitas	20 kegiatan/komunitas	20 kegiatan/komunitas yang difasilitasi	20 kegiatan/komunitas yang difasilitasi	20 kegiatan/komunitas yang difasilitasi	20 kegiatan/komunitas yang difasilitasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah target revitalisasi Kalpataru	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang		
9	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	Tersedianya tata cara dan pedoman referensi untuk pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah B3	4 peraturan/pedoman	4 peraturan/pedoman	4 pedoman/referensi untuk kegiatan tertentu	0 pedoman/referensi untuk kegiatan tertentu	0 pedoman/referensi untuk kegiatan tertentu	0 pedoman/referensi untuk kegiatan tertentu	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil dan pengolah limbah B3 yang mendapat izin dipantau dan diawasi	-	-	250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya	250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya	250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya	250 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan meningkat ketaatannya		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah lokasi lahan terkontaminasi yang dipulihkan	20 lokasi	20 lokasi	10 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi		
10	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tersusunnya RPPLH nasional dan daerah	-	-	1 RPPLH nasional dan daerah prioritas	5 RPPLH nasional dan daerah prioritas	5 RPPLH nasional dan daerah prioritas	5 RPPLH nasional dan daerah prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Tersusun dan diintegrasikannya muatan KLHS dalam KRP prioritas nasional dan daerah	-	-	33 daerah prioritas yang difasilitasi	33 daerah prioritas yang difasilitasi	33 daerah prioritas yang difasilitasi	33 daerah prioritas yang difasilitasi		
11	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir	Tersedianya pedoman pelaksanaan MRV dan inventarisasi profil emisi GRK kegiatan tertentu nasional dan dijadikan acuan	-	-	2 pedoman	0 pedoman	0 pedoman	0 pedoman	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Meningkatnya implementasi RAD perubahan iklim	-	-	10 daerah prioritas yang difasilitasi	10 daerah prioritas yang difasilitasi	10 daerah prioritas yang difasilitasi	10 daerah prioritas yang difasilitasi		
		Terlaksananya penghapusan BPO	-	-	3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis	3 program kerjasama teknis		
		Kapasitas optimal verifikasi laporan inventori GRK daerah dan sektor agar memenuhi standar	-	-	0 laporan profil emisi GRK/tahun	5 laporan profil emisi GRK/tahun	10 laporan profil emisi GRK/tahun	20 laporan profil emisi GRK/tahun		
12	Adaptasi Perubahan Iklim	Terfasilitasinya sektor dan daerah dalam melaksanakan kajian kerentanan dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan	-	-	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	5 sektor dan daerah yang difasilitasi dan dibina	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim (termasuk SPARC-UNDP)	-	-	0 lokasi	100 lokasi	100 lokasi	100 lokasi		
13	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Terselenggara-nya fasilitasi provinsi/kabupa-ten/kota yang ingin mengim-plementasikan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut	10 kabupaten/ kota	10 kabupaten/ kota	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi	10 daerah yang difasilitasi		
14	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan sungai	-	-	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	13 daerah prioritas dalam wilayah sungai prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan gambut dan ekosistem lahan basah	-	-	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut	5 daerah prioritas dalam ekosistem gambut		
		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan dan pemulihan danau	-	-	2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas	2 daerah dalam wilayah danau prioritas		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Tersedianya tata cara penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan B3 referensi nasional	-	-	3 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait	0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait	0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait	0 dokumen yang memenuhi ketentuan konvensi terkait	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas registrasi dan inventarisasi jenis dan jumlah B3 yang boleh beredar maupun peredarannya dibatasi dan dipantau berkala	-	-	300 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau	500 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau	500 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau	300 unit yang teregistrasi secara tepat waktu dan dipantau		
16	Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	Tersedianya rumusan kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak	-	-	3 rumusan kebijakan	3 rumusan kebijakan	0 rumusan kebijakan	0 rumusan kebijakan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Terinventarisir-nya profil emisi sumber bergerak dan kualitas udara kota prioritas	45 kota	45 kota	45 kota yang terinventarisir secara berkala	45 kota	45 kota	45 kota		
		Kapasitas fasilitasi peningkatan ketaatan dan inisiatif pengurangan emisi sumber bergerak daerah	-	-	0 daerah yang difasilitasi	3 daerah yang difasilitasi	6 daerah yang difasilitasi	8 daerah yang difasilitasi		
17	Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya rumusan kebijakan dan pedoman pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R nasional	-	-	6 rumusan yang menjadi acuan nasional	1 rumusan yang menjadi acuan nasional	0 rumusan yang menjadi acuan nasional	0 rumusan yang menjadi acuan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah kota yang meningkat kinerja pengelolaan dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota	382 kota	382 kota	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA	382 kota melalui program ADIPURA		
18	Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil	Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH agroindustri dan USK	200 industri	200 industri	200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	200 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan USK nasional	2 kebijakan/ ketentuan	2 kebijakan/ ketentuan	2 pedoman yang menjadi acuan nasional	3 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional		
		Turunnya beban pencemaran dan diterapkannya green production sentra-sentra agroindustri dan USK	77 lokasi/ kabupaten/ kota	77 lokasi/ kabupaten/ kota	0 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif	10 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif	20 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif	30 lokasi sentra yang difasilitasi dan diberi insentif		
19	Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa	257 industri/ kabupaten/ kota	257 industri/ kabupaten/ kota	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut secara tepat waktu dan sesuai prosedur	-	-	30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	50 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	60 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	70 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industri MPJ	9 kebijakan/ ketentuan	9 kebijakan/ ketentuan	2 pedoman yang menjadi acuan nasional	8 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional		
20	Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas	Meningkatnya ketaatan dan kualitas pengelolaan LH (beyond PROPER) industri manufaktur, prasarana dan jasa	250 industri	250 industri	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	250 industri yang dipantau dan meningkat ketaatannya	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pemberian rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan reinjeksi secara tepat waktu dan sesuai prosedur	-	-	30 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	50 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	60 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu	70 proses verifikasi dan pemberian rekomendasi secara tepat waktu		
		Tersedianya pedoman pengendalian dan pemanfaatan limbah industri PEM	3 kebijakan/ ketentuan	3 kebijakan/ ketentuan	2 pedoman yang menjadi acuan nasional	3 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional	0 pedoman yang menjadi acuan nasional		
21	Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Meningkatnya mutu dan efektivitas AMDAL sebagai dasar penetapan izin lingkungan	-	-	4 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH	4 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH	0 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH	0 rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen kajian LH	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kapasitas optimal fasilitasi sertifikasi penyusun AMDAL dan lisensi Komisi Penilai AMDAL daerah	-	-	1500 orang/komisi/institusi yang dimonev dan difasilitasi	2000 orang/komisi/institusi yang dimonev dan difasilitasi	2000 orang/komisi/institusi yang dimonev dan difasilitasi	2000 orang/komisi/institusi yang dimonev dan difasilitasi		
		Kapasitas pelayanan penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	-	-	100 dokumen/tahun	100 dokumen/tahun	150 dokumen/tahun	150 dokumen/tahun		
22	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kapasitas penelaahan dan klarifikasi sengketa lingkungan kepada KLH	75 sengketa	75 sengketa	75 sengketa	75 sengketa	75 sengketa	75 sengketa	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Kapasitas pelayanan mediasi kasus sengketa oleh KLH diluar pengadilan	10 sengketa	10 sengketa	10 kasus sengketa hingga selesai	10 kasus sengketa hingga selesai	10 kasus sengketa hingga selesai	10 kasus sengketa hingga selesai		
		Kapasitas pendaftaran gugatan dan monitoring putusan perkara perdata serta TUN	8 perkara	8 perkara	8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan	8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan	8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan	8 perkara sengketa hingga diputuskan pengadilan		
		Jumlah aparat pemerintah daerah dan penegak hukum yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang		
23	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	Kapasitas optimal PULBAKET indikasi kasus pidana yang ditangani KLH	65 kasus	65 kasus	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai	65 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai	75 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai	75 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kapasitas penyidikan kasus pidana hingga dibuatkannya dukungan penuntutan	-	-	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum	-	-	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan	60 kasus secara terbuka, tepat waktu, dan sesuai peraturan		
		Tersedianya standar dan panduan teknologi ramah lingkungan, serta rekomendasi alih teknologi, dan pengembangan teknologi lokal	4 kebijakan/ ketentuan	4 kebijakan/ ketentuan	4 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	4 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional	10 rumusan kebijakan/rekomendasi yang menjadi acuan nasional		
		Kapasitas pelayanan registrasi produk dan kompetensi	-	-	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai peraturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan	400 orang/ lembaga secara tepat waktu dan sesuai aturan		
		Meningkatnya jumlah jenis kompetensi yang distandarkan dan protokol pelaksanaan SCP	-	-	20 jenis kompetensi/protokol	30 jenis kompetensi/protokol	50 jenis kompetensi/protokol	60 jenis kompetensi/protokol		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan	Terinventarisir-nya data kualitas ambien lingkungan hidup di lokasi strategis nasional	421 lokasi	421 lokasi	421 paket data ambien pada lokus strategis	421 paket data ambien pada lokus strategis	421 paket data ambien pada lokus strategis	421 paket data ambien pada lokus strategis	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah laboratorium lingkungan pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi	64 laboratorium	64 laboratorium	17 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi	118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi	118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi	118 laboratorium daerah prioritas untuk mencapai akreditasi		
		Kapasitas pelayanan laboratorium Pusarpedal dan sumbangan PNPB	-	-	100 paket pelayanan/tahun	200 paket pelayanan/tahun	300 paket pelayanan/tahun	350 paket pelayanan/tahun		
26	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan pengendalian pencemaran lingkungan	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan pengendalian kerusakan lingkungan	32 Provinsi	32 Provinsi	0 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi		
		Jumlah provinsi yang menyelenggara-kan peningkatan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup	32 Provinsi	32 Provinsi	0 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi		
27	Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan	Kapasitas optimal verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada KLH	120 pengaduan	120 pengaduan	100 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu	120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu	120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu	120 pengaduan yang diverifikasi secara tepat waktu	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah subyek yang terkena sanksi administratif dan harus dipantau/diawasi	70 orang/ organisasi	70 orang/ organisasi	70 orang/ organisasi	70 orang/ organisasi	70 orang/ organisasi	70 orang/ organisasi		
		Kapasitas penetapan sanksi administratif oleh KLH	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		
28	Pengelolaan Ekoregion Sumatera	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	6 dokumen	6 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota		
29	Pengelolaan Ekoregion Jawa	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	6 dokumen	6 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	6 provinsi	6 provinsi	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota	6 provinsi/ kabupaten/ kota		
30	Pengelolaan Ekoregion Kalimantan	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH keseluruhan ekoregion per tahun	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	4 provinsi	4 provinsi	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota	4 provinsi/ kabupaten/ kota		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	3 provinsi	3 provinsi	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota	3 provinsi/ kabupaten/ kota		
32	Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	8 provinsi/ kabupaten/ kota	8 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	8 provinsi	8 provinsi	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota	10 provinsi/ kabupaten/ kota		

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Pengelolaan Ekoregion Papua	Terlaksananya koordinasi penyusunan Informasi status dan kualitas lingkungan hidup daerah dalam satu ekoregion setiap tahun	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	2 dokumen informasi tentang status dan kualitas LH	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dikoordinasikan dalam mengembangkan infrastruktur dan sarana lingkungan hidup	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota		
		Jumlah provinsi/kabupa-ten/kota yang dibina dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan di lapangan	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota	2 provinsi/kabupaten/kota		

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA									
1	Pengelolaan Database BMKG	Jumlah lokasi pengelolaan database MKGU yang terintegrasi	-	-	36 Lokasi	72 Lokasi	108 Lokasi	144 Lokasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Jumlah lokasi sistem pengelolaan database MKGU yang dikembangkan	-	-	36 Lokasi	72 Lokasi	108 Lokasi	144 Lokasi		
		Jumlah lokasi sarana pendukung pengelolaan database MKGU yang beroperasi dengan baik	-	-	36 Lokasi	72 Lokasi	108 Lokasi	144 Lokasi		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami BMKG	Prosentase akurasi informasi gempa bumi	-	-	75%	80%	80%	85%	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Prosentase akurasi peringatan dini tsunami	-	-	75%	80%	80%	85%		
		Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi gempabumi.	-	-	60%	70%	75%	80%		
		Prosentase jumlah kabupaten potensi terdampak yang memperoleh pelayanan mitigasi tsunami	-	-	60%	70%	75%	80%		
		Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Gempabumi.	-	-	70%	75%	80%	85%		
		Prosentase ketersediaan data untuk monitoring Tsunami	-	-	50%	60%	65%	70%		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
3	Pengelolaan Iklim. Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Tingkat akurasi prakiraan hujan bulanan	-	-	72%	72%	75%	75%	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Tingkat akurasi prakiraan musim	-	-	70%	70%	70%	70%		
		Kecepatan diseminasi informasi iklim sampai di pengguna tingkat kecamatan	-	-	20 Hari	10 Hari	10 Hari	10 Hari		
		Kecepatan diseminasi informasi agroklimat sampai di pengguna tingkat kecamatan	-	-	15 Hari	10 Hari	10 Hari	10 Hari		
		Kecepatan diseminasi informasi iklim maritim sampai di instansi kelautan dan pelabuhan	-	-	10 Hari	10 Hari	7 Hari	7 Hari		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
4	Pengelolaan Instrumentasi. Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	Jumlah lokasi peralatan operasional meteorologi di Stasiun Meteorologi, peralatan meteorologi hasil rekayasa yang dapat dioperasikan dengan baik dan lokasi stasiun meteorologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan	-	-	107 Lokasi	160 Lokasi	193 Lokasi	193 Lokasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Jumlah lokasi peralatan operasional klimatologi di Stasiun klimatologi, peralatan klimatologi hasil rekayasa yang dapat dioperasikan dengan baik dan lokasi stasiun klimatologi yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan	-	-	324 Lokasi	362 Lokasi	430 Lokasi	430 Lokasi		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU				Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Jumlah lokasi peralatan operasional Geofisika di Stasiun Geofisika, peralatan Geofisika hasil rekayasa yang dapat dioperasikan dengan baik dan lokasi stasiun Geofisika yang peralatannya terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan	-	-	53 Lokasi	64 Lokasi	79 Lokasi	80 Lokasi			
5	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	Prosentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi dan internet	-	-	87%	87.3%	87.5%	90%	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	
		Prosentase ketersediaan layanan sistem operasi jaringan komunikasi	-	-	86%	86.5%	87%	90%			
		Tersedianya layanan administrasi dan pengembangan jaringan komunikasi ter-update	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
6	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	Jumlah Bandara yang memperoleh layanan informasi cuaca penerbangan dengan akurasi 80 %	-	-	2 Bandara	4 Bandara	6 Bandara	8 Bandara	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Jumlah Bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas secara online dan realtime dengan akurasi 100%	-	-	32 Bandara	40 Bandara	47 Bandara	52 Bandara		
		Jumlah sistem pengamatan otomatis di Stasiun/Pos	-	-	15 Stasiun/ Pos	30 Stasiun/ Pos	60 Stasiun/ Pos	90 Stasiun/ Pos		
		Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 %	-	-	10 Pelabuhan	20 Pelabuhan	30 Pelabuhan	40 Pelabuhan		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
7	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia yang memperoleh prakiraan cuaca skala kecamatan melalui media elektronik dan cetak lokal (setempat) dengan tingkat akurasi 65-75 %	-	-	68 Kabupaten	136 Kabupaten	204 Kabupaten	272 Kabupaten	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Jumlah Kabupaten yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kecamatan dengan tingkat akurasi 65-75 %	-	-	58 Kabupaten	136 Kabupaten	204 Kabupaten	272 Kabupaten		
		Jumlah Propinsi yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi melalui strengthening BMKG	-	-	33 Propinsi	-	-	-		
8	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Kecepatan layanan informasi konsentrasi partikulate matter	-	-	24 Jam	12 Jam	6 Jam	3 Jam	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Kecepatan layanan informasi kualitas udara	-	-	3 Bulan	2 Bulan	1 Bulan	20 Hari		
		Ragam jenis informasi perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat	-	-	3 Ragam	6 Ragam	9 Ragam	12 Ragam		
		Ragam sektor yang terlayani informasi perubahan iklim	-	-	2 Ragam	4 Ragam	6 Ragam	8 Ragam		

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
9	Pengelolaan Seismologi teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	Terpenuhinya target prosentase informasi seismologi teknik untuk daerah rawan bencana gempa bumi	-	-	65%	70%	71%	72%	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Tercapainya target prosentase informasi geofisika potensial dan tanda waktu untuk data dukung instansi terkait	-	-	60%	70%	75%	80%		
		Tercapainya target prosentase ketersediaan data di bidang seismologi teknik dan geofisika potensial & tanda waktu	-	-	70%	72%	74%	76%		
10	Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG	Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke kantor pusat/stakeholder	178 laporan	178 laporan	178 Laporan	178 Laporan	178 Laporan	178 Laporan	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG
		Jumlah UPT yang dikembangkan	155 UPT	155 UPT	155 UPT	155 UPT	155 UPT	155 UPT		

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

(dalam milyar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan				
	Fokus Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia				
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	161,9	170,0	178,5	187,5
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	252,1	264,7	277,9	291,8
3	Bantuan Operasional Kesehatan	1.410,5	1.481,0	1.555,0	1.632,8
	Fokus Prioritas : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak				
4	Pembinaan Gizi Masyarakat	500	525	551,3	578,8
	Fokus Prioritas : Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan				
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	225,0	247,5	272,3	299,5
	Fokus Prioritas : Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi				
6	Penyehatan Lingkungan	341,5	358,5	376,5	395,3
	Fokus Prioritas : Peningkatan pengawasan obat dan makanan				

Lintas Bidang : Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

(dalam milyar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
7	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	726,7	885,68	929,64	889,95
8	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	14,9	15,6	16,4	17,2
9	Penilaian Makanan	10,3	11,1	11,7	12,3
II Prioritas : Perkuatan Ketahanan pangan					
Fokus Prioritas : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
1	Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	108,4	203,5	214,7	219,0
III Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan					
Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal					
1	Penyediaan Layanan PAUD	571,2	1.393,4	1.688,7	1.992,6
IV Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk					
Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga					
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	5.238,6	5.500,5	5.775,6	6.064,3
2	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	7.169,0	7.527,4	7.903,8	8.299,0
V Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial					
Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan					
¹	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	5.222,16	7.661,54	8.038,72	8.434,76

MATRIKS BUKU 2.2.B
ALOKASI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
A.	Fokus Prioritas: Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif								
1	Bantuan Tunai Bersyarat	5.224,3	5.224,3	5.222,2	7.661,5	8.038,7	8.434,8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	305,4	305,4	327,5	348,7	367,1	386,6	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
3	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	139,2	139,2	150,5	249,7	267,8	326,4	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
4	Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	292,5	292,5	332,4	350,3	370,6	392,0	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
5	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	167,2	167,2	235,4	300,2	360,5	408,3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
6	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	75,2	75,2	99,1	121,0	150,8	200,9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
7	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	340,4	340,4	342,7	359,8	377,8	396,7	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
8	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	186,5	186,5	188,9	198,3	208,2	218,6	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
9	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	119,6	119,6	121,1	127,2	133,6	140,2	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
10	Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	18.882,2	18.882,2	20.549,8	21.353,7	18.890,2	15.238,8	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian Sosial
B	Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan								
1	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	510,2	510,2	532,3	558,9	586,8	616,1	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
2	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	11,8	11,8	6,3	6,6	7,0	7,3	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
3	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5,5	5,5	5,0	5,3	5,5	5,8	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
4	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (KB dan Pembangunan Keluarga)	921,1 *) angka seluruh kegiatan provinsi	921,1	253,6	266,3	252,6	265,2	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
5	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	6.626,1	5.575,9	2.841,9	3.333,3	3.833,3	4.408,2	Program Pendidikan Dasar	Kemendikbud
6	Penjaminan Kepastian Layanan SMP	5.071,3	4.267,5	2.910,0	3.393,8	3.902,8	4.488,3	Program Pendidikan Dasar	Kemendikbud
7	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	6.280,7	5.801,2	5.243,7	5.744,9	6.027,0	6.328,2	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
8	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	6.771,6	6.288,3	5.360,0	5.622,4	5.971,0	6.352,1	Program Pendidikan Menengah	Kemendikbud
9	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	4.537,0	7.973,9	4.250,4	2.553,4	2.292,8	2.261,4	Program Pendidikan Tinggi	Kemendikbud
10	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan madrasah	14.595,3	13.901,7	13.265,8	13.601,0	14.286,6	15.017,3	Program Pendidikan Islam	Kemenag
11	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	3.130,0	3.158,8	3.499,4	3.025,2	3.229,2	3.426,7	Program Pendidikan Islam	Kemenag
12	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan		213.999	210.000	210.003	210.003	210.003	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kemen ESDM
13	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya			400,00	400,00	400,00	400,00	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemen Perumahan Rakyat
14	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya			833,40	833,40	833,40	833,40	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kemen Perumahan Rakyat
C	Fokus Prioritas: Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan								
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan penataan Bangunan dan Lingkungan, pengelolaan Gedung dan Rumah Negara							Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	KemenPU
	Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	1.189	1.189	1.198 (*)	144,845 (**)	102,81 (**)	126,93 (**)		
	Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (kecamatan)			180,00	580,95	848,95	640,70		
	Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (dengan pendekatan pemberdayaan) - kecamatan			630,00	629,50	898,25	808,87		

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
2	Cakupan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan:							Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri
	Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	10.492,80	10.492,80	6.278 (*)	837.722 (**)	628.449 (**)	747.944 (**)		
	- Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan			721,00	2.323,81	3.395,81	2.562,81		
	- Kegiatan Pendukung Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan			2.523,00	2.518,00	3.593,00	3.235,00		
3	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (PNPM-MP Generasi)			716,7	716,7	716,7	750,5	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kemendagri
4	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman							Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemen PU
	Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE)			550,35	550,35	550,35	550,35		
	Infrastruktur Perdesaan (PIPP)			330,39	330,39	330,39	330,39		
5	Pengelolaan Pertanahan Provinsi Redistribusi Tanah	113,89	113,79	81,02	89,12	98,03	107,83	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
6	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
	Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha.			560,0	586,0	608,6	638,1		
	Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan			11,1	11,6	12,1	12,6		
	Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/ PUAP			12,4	13,0	13,5	14,1		
7	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	67,60	67,60	69,63	73,11	76,77	80,61	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kemenparekraf
8	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	190,00	184,52	153,00	156,65	124,58	56,71	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	KKP
9	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	258,00	252,50	44,0	46,2	48,5	50,9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	KKP
10	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	290,00	311,59	55,88	58,67	61,60	64,68	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	KKP
11	Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan	79,65	93,14	16,94	17,78	18,67	19,61	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	KKP

Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
D	Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan								
1	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura	3,875	3,875	6,38	7,02	7,72	8,50	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
2	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	2,1	2,1	7,83	8,61	9,47	10,42	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
3	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan	3,1	3,1	6,79	7,47	8,22	9,04	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
4	Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM	0,8	0,8	1,47	1,62	1,78	1,96	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
5	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	96,3	96,3	126,30	138,93	152,83	168,11	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
6	Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri	32,0	32,0	11,80	12,98	14,27	15,70	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
7	Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	3,3	3,3	5,16	5,68	6,24	6,87	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM	11,9	11,9	13,06	14,37	15,81	17,39	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
9	Perluasan KUR	17,2	17,2	17,92	19,71	21,68	23,85	Peningkatan Daya Saing UMKM	Kementerian KUKM
10	Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM	0,5	0,5	2,85	3,14	3,45	3,79	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
11	Pengembangan Keanggotaan Koperasi	22,8	22,8	13,38	14,72	16,19	17,81	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kementerian KUKM
E	Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi Antarpelaku								
1	Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	1,7	1,7	1,8	2,1	2,1	2,2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemeko Kesra
2	Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemeko Kesra
3	Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemeko Kesra
4	Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan	11,0	11,0	11,5	13,3	13,9	14,4	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kemeko Kesra
5	Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1,6	1,6	1,5	1,7	1,8	1,8	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakvat	Kemeko Kesra

Catatan:

(*) : Khusus pada tahun 2015, alokasi anggaran juga mencakup dana BLM selain untuk pendampingan

(**) : Alokasi Tahun Anggaran 2016-2019 adalah tanpa BLM (BLM masuk dalam dana desa). Kegiatan pendampingan termasuk untuk transfer knowledge kepada aparatur dan masyarakat desa

MATRIKS 2.2B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar)	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Konektivitas Laut						
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian	494,9	494,9	553,8	585,8	585,8	585,8
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	477,5	421,9	534,4	565,3	565,3	565,3
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	480,1	898,6	537,3	568,4	568,4	568,4
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	6.195,0	5.619,0	6.745,2	7.135,3	7.135,3	7.135,3
6	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	298,8	329,9	422,2	501,8	501,8	501,8

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar)	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
B	Peningkatan dan Penguatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari						
1	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	0,0	0,0	9,4	9,9	10,4	10,9
2	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	11,8	11,8	11,9	12,6	13,2	13,9
3	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	127,5	123,8	103,9	115,6	45,8	48,1
4	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	29,8	30,0	29,8	32,6	37,7	39,6
5	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	79,5	105,7	92,6	95,8	100,7	105,4
6	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	105,0	106,8	117,0	122,9	129,0	135,4
7	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	252,0	252,9	281,0	305,6	320,8	336,9
8	Penelitian Oceanografi	70,0	70,0	158,9	166,9	175,2	184,0
C	Penetapan batas wilayah NKRI, Aset-aset dan Peningkatan Tata Kelola serta Percepatan Penyusunan Zonasi untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir						
1	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	11,8	11,8	9,0	12,5	13,1	13,8
2	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35,0	39,2	50,0	47,3	49,6	52,1
3	Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	21,7	21,7	25,5	26,4	27,7	29,2

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2015 (Rp Milyar)	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
4	Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	6,2	6,2	0,0	0,0	9,3	9,3
5	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	18,0	15,0	18,0	18,9	19,8	20,8
D	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut						
1	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	87,8	87,8	220,5	250,8	283,6	319,0
2	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	164,1	164,1	5,5	5,7	6,0	6,3
3	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	26,0	26,3	27,0	28,4	29,8	31,3
4	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	16,0	15,3	17,0	17,9	18,7	19,7
5	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	141,0	139,0	259,0	267,8	262,9	275,6
6	Operasional Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	288,0	290,0	410,0	45,8	58,3	63,1
7	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	18,0	18,0	18,3	19,2	20,2	21,2
E	Peningkatan Pemanfaatan Keekonomian Bioresources dan Potensi Pulau-pulau Kecil						
1	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	75,0	179,1	63,0	69,5	73,2	77,0
2	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.034,3	1.034,3	769,7	808,2	848,6	891,0
F	Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan						
1	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	7,0	7,0	8,0	8,3	8,7	9,1
2	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	127,5	123,8	280,0	307,0	310,7	308,4
3	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	55,0	109,1	55,0	56,0	62,2	65,5
		2.132,3	2.287,6	2.235,5	1.989,4	2.102,4	2.212,3

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Rp Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak	38.938,9	44.698,1	47.356,4	51.620,0
1.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹⁾	252,1	264,7	277,9	291,8
1.2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak ¹⁾	161,9	170,0	178,5	187,5
1.3	Pembinaan Gizi Masyarakat ¹⁾	500,0	525,0	551,3	578,8
1.4	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra ¹⁾	295,7	393,8	413,4	434,1
1.5	Pengendalian penyakit bersumber binatang ¹⁾	240,0	252,0	264,6	277,8
1.6	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ¹⁾	260,0	273,0	286,7	301,0
1.7	Penyehatan Lingkungan ¹⁾	341,5	358,5	376,472,8	395,3
1.8	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ¹⁾	225,0	247,5	272,3	299,5

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Rp Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.9	Pembinaan Ketahanan Remaja ¹⁾	7,2	7,5	7,9	8,3
1.10	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak ¹⁾	7,8	8,2	8,6	9,0
1.11	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi ¹⁾	5,5	5,8	6,0	6,3
1.12	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN ⁴⁾	16,5	18,4	20,6	23,1
1.13	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ⁴⁾	32,6	32,8	33,0	33,2
1.14	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat ⁴⁾	7,0	7,8	8,8	9,8
1.15	Penyediaan Layanan PAUD ¹⁾	571,2	1.393,4	1.688,7	1.992,6
1.16	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD ¹⁾	2.841,9	3.333,3	3.833,3	4.408,2
1.17	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP ¹⁾	2.910,0	3.393,8	3.902,8	4.488,3
1.18	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB ¹⁾	364,0	493,7	567,7	652,9
1.19	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK ¹⁾	5.360,0	5.622,4	5.971,0	6.352,1
1.20	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾	5.243,7	5.744,9	6.027,0	6.328,2
1.21	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB ¹⁾	189,5	217,9	250,6	288,1
1.22	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan ¹⁾	187,7	261,4	20,8	336,8
1.23	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah ¹⁾	13.265,8	13.601,0	14.286,6	15.017,3

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Rp Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.24	Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	290,8	290,9	314,738	334,0
1.25	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ³⁾	63,2	39,1	41,1	43,1
1.26	Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih ³⁾	76,1	79,9	83,8851	88,0794
1.27	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) ¹⁾	5.222,2	7.661,5	8.038,7	8434,8
2	Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Diskriminasi	502,0	529,0	557,0	586,0
2.1	Penanggulangan Krisis Kesehatan ¹⁾	75,0	78,8	82,7	86,8
2.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ³⁾	5,8	6,1	6,4	6,7
2.3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ³⁾	3,5	3,7	3,9	4,0
2.4	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak ²⁾	105,8	111,1	116,7	122,5
2.5	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak ¹⁾	307,0	324,1	341,9	360,1

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Rp Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.6	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Perawatan ⁵⁾	1,7	1,8	1,9	2
2.7	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak ⁵⁾	3,2	3,4	3,6	3,8
3	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak	109,9	122,6	130,7	134,8
3.1	Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi ⁵⁾	35,4	35,4	35,4	35,4
3.2	Kerjasama dan Instrumen HAM ⁵⁾	2,4	2,5	2,6	2,7
3.3	Perancangan Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	16,3	17,2	18,3	19,4
3.4	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan ⁵⁾	5,3	5,6	6,0	6,3
3.5	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak ¹⁾	3,1	5,1	5,7	5,3
3.6	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak ¹⁾	2,6	5,3	4,4	4,8
3.7	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak ¹⁾	2,6	5,2	5,0	5,2

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam Rp Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.8	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak untuk Anak ¹⁾	3,0	5,5	5,6	7,5
3.9	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ¹⁾	8,4	5,8	9,5	8,0
3.10	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak ¹⁾	4,3	5,3	5,4	5,4
3.11	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak ¹⁾	2,9	3,8	4,3	4,4
3.12	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ¹⁾	4,7	5,7	5,7	5,7
3.13	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus ¹⁾	2,6	3,3	3,8	3,8
3.14	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak ¹⁾	4,4	5,3	5,8	5,8
3.15	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) ¹⁾	12,0	11,7	13,3	15,3

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Prakiraan Maju (Rp Milyar)			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
KEGIATAN ADAPTASI							
BIDANG KESEHATAN							
1	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	0,11	0,11	0,24	0,25	0,26	0,28
2	Penyehatan Lingkungan	0,31	0,31	0,34	0,36	0,38	0,40
BIDANG EKONOMI							
1	Koordinasi Kebijakan Pangan	2,60	2,60	2,70	2,84	3,09	3,24
BIDANG SARANA DAN PRASARANA							
1	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya	4.217,08	4.217,08	5.823,84	11.001,66	11.378,67	10.232,52
2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	5.088,00	5.088,00	4.478,99	10.160,50	9.656,27	8.223,24
3	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai	5.621,53	5.621,53	3.887,00	28.910,54	22.669,74	18.578,69
BIDANG KETAHANAN PANGAN							
1	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	192,29	192,29	192,29	200,96	208,21	218,30
2	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	105,82	105,82	105,82	110,58	115,56	120,76
3	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1.330,61	1.330,61	1.330,61	1.392,45	1.446,08	1.516,16
4	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	536,97	536,97	536,97	552,83	565,90	593,32
5	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	13,36	13,36	13,36	13,96	14,46	15,17

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Prakiraan Maju (Rp Milyar)			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	95,81	95,81	95,81	100,60	105,63	110,91
7	pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	108,36	108,36	108,36	113,23	117,31	122,94
8	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	108,35	108,35	108,35	203,45	214,75	218,96
9	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	40,26	40,26	40,26	41,86	43,75	45,71
10	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	1.236,31	1.236,31	1.236,31	1.299,00	1.345,84	1.411,06
11	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	134,96	134,96	134,96	130,44	128,67	128,40
12	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	120,20	120,20	120,20	125,61	131,27	137,17
13	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	203,00	203,00	203,00	212,71	223,35	234,51
14	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	27,96	27,96	27,96	29,22	30,53	31,90
15	Dukungan Perlindungan Perkebunan	95,68	95,68	95,68	99,82	103,42	108,43
16	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	24,33	24,33	24,33	25,42	26,56	27,76
BIDANG SISTEM PENDUKUNG DAN KETAHANAN EKOSISTEM							
1	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	75,46	75,46	76,77	80,61	84,64	88,87
2	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	37,30	37,30	40,63	42,66	44,79	47,03
3	Kesiapaspasangan dalam menghadapi bencana	174,05	174,05	84,42	190,78	200,31	210,33
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	87,35	87,35	48,21	81,36	81,64	81,94
5	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	56,40	56,40	44,00	46,20	48,51	50,94
6	Peta Tematik Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional			7,20	7,40	7,60	7,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Prakiraan Maju (Rp Milyar)			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	9,00	9,00	8,00	8,30	8,71	9,15
2	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	6,29	6,29	10,87	17,74	18,62	19,55
3	Adaptasi Perubahan Iklim	22,52	22,52	4,00	6,32	6,37	6,97
4	Pendayagunaan pesisir dan lautan	32,10	32,10	10,00	11,75	12,54	13,36
5	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan	1,76	1,76	2,09	3,59	3,95	4,15
	TOTAL	19.768,83	19.768,83	18.855,72	55.174,94	48.995,00	42.565,08
KEGIATAN MITIGASI							
BIDANG EKONOMI							
1	Koordinasi Kebijakan Bidang Minyak dan Gas Bumi	1,60	1,60	2,50	2,60	2,80	2,90
2	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	11,50	11,50	7,20	7,20	7,20	7,20
BIDANG SARANA DAN PRASARANA							
1	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	2.482,60	2.482,60	1.834,50	2.425,70	2.554,80	2.678,80
2	Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	122,06	122,06	666,14	194,05	210,10	210,10
3	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	9.593,67	9.593,67	13.925,50	8.821,32	8.242,53	8.242,53
4	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	280,75	280,75	502,17	502,17	502,17	502,17
5	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	33.163,30	33.163,30	36.372,40	41.828,30	48.102,50	48.102,50
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	17,71	17,71	12,00	16,16	16,96	17,81
2	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir	29,31	29,31	12,00	19,45	20,42	21,44
3	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah	120,00	120,00	57,53	129,51	135,98	142,78
4	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	14,00	14,00	10,00	10,94	11,49	12,06
5	Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS	1.886,53	1.886,53	611,65	642,24	674,35	708,07
6	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	30,00	30,00	15,04	16,09	17,24	18,47
7	Pengendalian Kebakaran Hutan	49,00	49,00	30,00	32,03	34,27	36,67

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Prakiraan Maju (Rp Milyar)			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
8	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1.189,60	1.189,60	210,47	250,08	268,79	289,42
9	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	102,90	102,90	48,13	51,49	55,29	59,37
10	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	71,20	71,20	342,78	42,99	43,52	43,23
11	Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi	257,30	257,30	217,36	228,23	239,64	251,63
12	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	862,70	862,70	672,71	683,20	683,20	683,20
13	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	103,80	103,80	44,93	64,44	67,66	71,04
14	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	58,50	58,50	38,85	45,30	48,80	52,22
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	159,70	159,70	1.003,02	1.075,39	1.103,26	1.135,45
16	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	69,40	69,40	46,80	47,57	50,42	53,44
	TOTAL	50.677,13	50.677,13	56.683,67	57.136,43	63.093,39	63.342,51

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2014 (Rp Milyar)	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Prakiraan Maju (Rp Milyar)			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
KEGIATAN PENDUKUNG							
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI							
1	Pengembangan Kebun Raya Daerah	7,00	7,00	7,095	7,449	7,813	8,213
2	Penelitian Geoteknologi	14,50	14,50	39,605	41,585	43,665	45,848
BIDANG TATA RUANG							
1	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	32,70	32,70	12,40	13,75	15,20	16,70
2	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	15,25	15,25	38,23	40,18	44,58	49,48
3	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1	3,00	3,00	7,50	7,50	8,25	9,08
4	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2	5,50	5,50	5,00	8,80	9,75	10,70
5	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	43,3	43,27	75,2	47,3	49,6	52,1
6	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi			15,5	17,1	18,8	20,7
7	Fasilitasi Penataan Perkotaan	6,9	6,9	7,2	7,9	8,7	9,6
	TOTAL	128,09	128,09	207,78	191,55	206,41	222,40
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pengelolaan Sampah	21,84	21,84	15,00	21,54	22,62	23,75
2	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	13,21	13,21	10,00	4,48	4,71	4,94
4	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Laut dan Pesisir	4,41	4,41	5,87	5,87	6,46	6,78
5	Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil	0	0	4,00	4,20	4,41	4,63
	TOTAL	295,6	295,6	450,4	419,2	451,0	484,9

MATRIKS 2.2.B TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju (Milyar Rupiah)		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
A	Pola Produksi Berkelanjutan						
1	Kajian Kesiapan Pasar dalam Penerapan Sustainable Public Procurement (SPP)			1,00	-	-	-
2	Layanan kerekayasaan Teknologi Hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon			1,50	1,52	1,58	1,61
3	Pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup			10,74	15,53	20,09	24,58
4	Kaji Ulang dan SNI kategorisasi SNI green product			0,05	0,15	0,20	0,25
5	Fasiltasi SNI			0,10	0,40	0,50	0,50
6	Sosialisasi Kriteria SNI utk "green product"			0,05	0,20	0,30	0,30

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju (Milyar Rupiah)		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
7	Sosialisasi dan mendorong pertumbuhan LS yang pro SCP			0,05	0,10	0,10	0,10
8	Pengembangan infrastruktur baru LPK untuk SNI pro SCP			0,05	0,10	0,10	1,00
9	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	9,00	9,00	10,87	17,74	18,62	19,55
10	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan			1,83	2,42	2,55	2,67
11	pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan			19,08	19,93,375	20,65	21,64
12	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan			95,80	93,18	90,06	87,93
13	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan			98,50	103,43	108,60	114,03
14	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan			100,90	105,95	111,24	116,80

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju (Milyar Rupiah)		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
15	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura			27,50	28,88	30,32	31,83
16	Peningkatan Produksi Ternak			424,40	440,99	438,84	458,01
23	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan			8,45	8,87	9,31	9,78
24	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			110,30	115,58	121,35	127,42
25	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit			318,34	335,70	352,48	370,11
26	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura			1,10	1,14	1,20	1,25
27	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan			6,30	6,58	6,88	7,19
28	Penelitian dan Pengembangan Peternakan			9,74	10,17	10,63	11,11
29	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan			12,45	13,01	13,60	14,21

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PENGEMBANGAN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju (Milyar Rupiah)		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
B	Pola Konsumsi Berkelanjutan						
1	Pelatihan dan Sosialisasi <i>Life Cycle Costing</i>			-	2,00	1,50	1,00
2	Peningkatan <i>Capacity Building</i> bagi <i>Stakeholder</i> Pengadaan			-	2,00	2,50	2,00
3	<i>Pilot Project</i> Penerapan <i>Green Procurement</i> (GPP/SPP) Tahap I			-	-	1,50	-
4	<i>Pilot Project</i> Penerapan <i>Green Procurement</i> (GPP/SPP) Tahap II			-	-	-	3,50
5	Rancangan Peraturan tentang Implementasi <i>Sustainable Public Procurement</i> (SPP)			-	-	-	-
6	Penghematan penggunaan sumber daya (material input, energi, air) industri			10,74	15,53	20,09	24,58
7	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			69,35	162,70	172,52	174,72
8	Peningkatan <i>Public Awareness</i> tentang <i>Sustainable Public Procurement</i> (SPP)			2,00	-	-	-

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)
I	Prioritas Pengendalian Kuantitas Penduduk						
A	Fokus Prioritas : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, serta penguatan pembangunan keluarga	840,6	840,6	1.529,3	1.606,3	1.659,6	1.742,6
1	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB	207,3	207,3	170,3	178,8	187,7	197,1
2	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	510,2	510,2	532,3	558,9	586,8	616,1
3	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	5,2	5,2	5,5	5,8	6,0	6,3
4	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	11,8	11,8	6,3	7,2	7,5	7,9
5	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta	7,2	7,2	6,0	6,3	6,6	7,0
6	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	8,2	8,2	7,8	8,2	8,6	9,0
7	Pembinaan Ketahanan Remaja	7,5	7,5	7,2	7,5	7,9	8,3
8	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5,5	5,5	5,0	5,3	5,5	5,8

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)
9	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	5,5	5,5	6,3	6,6	7,0	7,3
10	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (KB dan Pembangunan Keluarga)	72,0	72,0	782,7	821,8	835,9	877,6
B	Fokus Prioritas: Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk	73,2	73,2	72,7	76,3	80,2	84,2
1	Kerjasama Pendidikan kependudukan	5,5	5,5	5,5	5,8	6,1	6,4
2	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	5,4	5,4	5,4	5,7	6,0	6,3
3	Analisis Dampak Kependudukan	5,9	5,9	5,9	6,2	6,5	6,9
4	Perencanaan Pengendalian Penduduk	6,2	6,2	5,7	5,9	6,2	6,6
5	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (kependudukan)	50,2	50,2	50,2	52,7	55,3	58,1
C	Fokus Prioritas : Peningkatan Ketersedian dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	215,7	215,7	576,2	585,5	595,2	605,4
1	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	104,7	104,7	382,2	382,2	382,2	382,2
2	Pengelolaan Informasi Kependudukan	5,7	5,7	9,1	9,1	9,1	9,1
3	Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB	6,6	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)
4	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	9,0	9,0	7,8	8,2	8,6	9,0
5	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (data dan informasi)	89,7	89,7	170,0	178,5	187,4	196,8
D	Fokus Prioritas : Penguatan Kelembagaan Kependudukan dan KB	374,8	374,8	255,6	268,4	281,8	295,9
1	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah	6,6	6,6	6,6	7,0	7,3	7,7
2	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	9,5	9,5	7,9	8,3	8,8	9,2
3	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi (kelembagaan)	358,7	358,7	241,0	253,1	265,7	279,0

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam milyar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
A	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia						
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	124,2	124,2	161,9	170,0	178,5	187,5
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	124,0	124,0	252,1	264,7	277,9	291,8
3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.228,6	1.228,6	1.410,5	1.481,0	1.555,0	1.632,8
4	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1.040,5	1.040,5	902,5	992,7	1.042,4	1.094,5
5	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	317,5	317,5	295,7	393,8	413,4	434,1

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
B	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat						
1	Pembinaan Gizi Masyarakat	288,0	288,0	500,0	525,0	551,3	578,8
C	Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan						
1	Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	317,5	317,5	295,7	393,8	413,4	434,1
2	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	109,2	109,2	240,0	252,0	264,6	277,8
3	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	124,6	124,6	260,0	273,0	286,7	301,0
4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	104,4	104,4	325,0	341,3	358,3	376,2
5	Penyehatan Lingkungan	310,3	310,3	341,5	358,5	376,5	395,3
D	Fokus Prioritas: Peningkatan Tersedianya Obat yang Bermutu serta Terjaminnya Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Sesuai dengan Standar dan Persyaratan bagi Pelayanan Kesehatan di Setiap Tahap Kehidupan (continuum of care)						
1	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	1.243,0	1.243,0	1.508,9	2.491,9	3.081,1	3.296,6

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
E	Fokus Prioritas: Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko						
1	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	65,2	65,2	75,8	130,5	187,9	278,0
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	9,3	9,3	6,0	10,0	10,5	11,0
3	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	616,2	616,2	726,7	885,7	929,6	890,0
4	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	12,1	12,1	16,9	17,9	18,7	19,7
5	Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	6,6	6,6	9,8	15,0	20,5	27,2
6	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	7,3	7,3	11,5	12,1	12,7	13,3

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
7	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	25,6	25,6	27,7	29,2	31,4	33,8
8	Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	12,5	12,5	13,5	14,2	14,9	15,6
9	Penilaian Makanan	9,1	9,1	10,3	11,1	11,7	12,3
10	Penilaian Obat dan Produk Biologi	8,2	8,2	15,0	15,8	16,5	17,4
11	Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen	9,6	9,6	12,9	13,5	14,2	14,9
12	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	19,2	19,2	21,5	22,7	23,8	25,1
13	Standardisasi Makanan	8,1	8,1	8,8	9,5	9,9	10,4
14	Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	27,1	27,1	30,0	30,8	31,8	32,7
15	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	15,1	15,1	14,9	15,6	16,4	17,2

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
16	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	47,3	47,3	50,0	56,8	61,6	66,5
F	Fokus Prioritas: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat						
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	199,8	199,8	225,0	247,5	272,3	299,5
G	Fokus Prioritas: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional						
1	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	117,7	117,7	20.056,6	21.059,4	22.112,4	23.218,0
H	Fokus Prioritas: Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	91,4	91,4	100,0	105,0	110,3	115,8
2	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji	2.503,6	2.503,6	2.650,0	2.782,5	2.921,6	3.067,7
3	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	506,6	506,6	446,0	468,3	491,7	516,3

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
4	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	23,8	23,8	24,0	25,2	26,5	27,8
5	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	647,5	647,5	580,0	624,8	656,0	688,8
6	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	143	143	250,0	262,5	275,6	289,4
I	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas						
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	1.040,5	1.040,5	902,5	992,7	1.042,4	1.094,5
J	Fokus Prioritas: Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas						
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1.758,8	1.758,8	9.371,6	10.308,7	11.339,6	12.473,5

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Perkiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Perkiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
K	Fokus Prioritas: Memperkuat Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi						
1	Penanggulangan Krisis Kesehatan	70,5	70,5	75,0	78,8	82,7	86,8
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	199,8	199,8	225,0	247,5	272,3	299,5
3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat	100,0	100,0	84,1	127,2	104,2	442,0
4	Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	66,2	66,2	69,7	196,1	223,2	229,2
5	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional	46,8	46,8	113,6	41,8	148,9	36,8

MATRIKS 2.2.B. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Prioritas: Reformasi Pembangunan Pendidikan						
A	Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata	26.845,5	24.207,9	19.486,6	20.847,0	22.574,4	24.489,0
A.1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	5.071,3	4.267,5	2.910,0	3.393,8	3.902,8	4.488,3
A.2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	6.626,1	5.575,9	2.841,9	3.333,3	3.833,3	4.408,2
A.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	14.595,3	13.901,7	13.265,8	13.601,0	14.286,6	15.017,3
A.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	552,8	462,8	468,8	519,0	551,7	575,2
B	Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU)	13.568,7	12.552,1	10.971,8	11.781,7	12.464,8	13.206,3
B.1	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	6.280,7	5.801,2	5.243,7	5.744,9	6.027,0	6.328,2
B.2	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	6.771,6	6.288,3	5.360,0	5.622,4	5.971,0	6.352,1
B.3	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB	432,1	378,2	189,5	217,9	250,6	288,1
B.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)
B.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	84,4	84,4	178,7	196,6	216,2	237,9
C	Fokus Prioritas: Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi	39.911,9	43.206,5	34.410,5	33.041,0	33.761,3	34.755,3
C.1	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	678,5	608,9	93,8	95,0	99,7	104,7
C.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu	3.568,3	3.011,7	2.461,7	2.584,4	2.710,6	2.845,9
C.3	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	337,0	1.096,9	940,4	987,4	987,4	987,4

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
C.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	14.482,0	11.720,0	11.926,4	12.519,4	13.142,0	13.795,8
C.5	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	4.537,0	7.973,9	4.250,4	2.553,4	2.292,8	2.261,4
C.6	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi	12.145,0	14.602,3	11.018,1	11.018,1	11.018,1	11.018,1
C.7	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	3.130,0	3.158,8	3.499,4	3.025,2	3.229,2	3.426,7
C.8	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	780,7	780,7	70,5	88,8	98,2	109,5
C.9	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	39,3	39,3	79,9	91,9	105,7	121,5
C.10	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)
C.11	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	91,6	91,6	29,9	35,4	33,7	38,0
C.12	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	122,4	122,4	39,9	41,9	44,0	46,2
D	Fokus Prioritas: Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan	12.682,2	9.814,0	8.080,0	11.937,0	13.130,7	14.570,1
D.1	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar	6.844,9	5.366,8	4.357,3	5.010,9	5.762,6	6.627,0
D.2	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah	2.423,3	2.215,4	2.213,9	2.548,9	2.886,9	3.274,9
D.3	Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.310,3	994,1	974,5	3.726,5	3.786,1	3.931,9

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
D.4	Peningkatan Layanan Pendidik Untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti	769,8	41,0	85,0	92,3	100,4	109,6
D.5	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)
D.6	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	C.7)	C.7)	C.7)	C.7)	C.7)	C.7)
D.7	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	428,2	290,8	290,9	314,7	334,0	346,5
D.8	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	780,7	780,7	70,5	88,8	98,2	109,5
D.9	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)	B.4)
D.10	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	32,4	32,4	30,3	94,4	99,2	104,1
D.11	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha	92,7	92,7	57,5	60,3	63,4	66,5
E	Fokus Prioritas: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal	1.946,3	1.081,7	1.028,5	2.073,7	2.178,7	2.849,3
E.1	Penyediaan Layanan Paud	1.334,1	608,1	571,2	1.393,4	1.688,7	1.992,6
E.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)	A.3)
E.3	Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	259,4	198,0	187,7	261,4	20,8	336,8
E.4	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	352,8	275,6	269,6	418,9	469,3	520,0
F	Fokus Prioritas: Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan						
F.1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	D.7)	D.7)	D.7)	D.7)	D.7)	D.7)
F.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam	A.4)	A.4)	A.4)	A.4)	A.4)	A.4)

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
F.3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	D.8)	D.8)	D.8)	D.8)	D.8)	D.8)
F.4	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	D.9)	D.9)	D.9)	D.9)	D.9)	D.9)
F.5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	D.10)	D.10)	D.10)	D.10)	D.10)	D.10)
F.6	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Buddha	D.11)	D.11)	D.11)	D.11)	D.11)	D.11)
G	Fokus Prioritas: Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan	307,9	307,9	330,6	347,1	364,5	382,7
G.1	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	7,5	7,5	7,5	7,9	8,3	8,7
G.2	Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	40,7	40,7	41,7	43,8	46,0	48,3
G.3	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	10,1	10,1	10,2	10,7	11,2	11,8
G.4	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	15,0	15,0	15,5	16,3	17,1	17,9
G.5	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	207,6	207,6	220,5	231,6	243,1	255,3
G.6	Pengembangan Pustakawan	6,3	6,3	7,0	7,4	7,7	8,1
G.7	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	12,3	12,3	13,4	14,0	14,7	15,5
G.8	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	8,5	8,5	8,5	8,9	9,4	9,9
G.9	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	-	-	6,3	6,6	6,9	7,3
H	Fokus Prioritas: Peningkatan Pendidikan Karakter						
H.1	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	B.1)	B.1)	B.1)	B.1)	B.1)	B.1)
H.2	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	B.2)	B.2)	B.2)	B.2)	B.2)	B.2)
I	Fokus Prioritas: Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Anggaran Pendidikan						
I.1	Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	678,2	678,2	86,1	91	93,6	94,9
I.2	Pendidikan Menengah Pertanian	55,6	55,6	57,0	58,3	60,4	63,3

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
I.3	Peningkatan Kualitas SDM Industri	421,4	421,4	278,4	430,7	431,4	432,1
I.4	Pendidikan dan Pelatihan Geologi			76,3	79,5	85,8	93,2
I.5	Pendidikan Perhubungan Darat	254,3	254,3	407,68	1.510,7	960,7	767,93
I.6	Pendidikan Perhubungan Laut	827,7	827,7	1.289,6	2.035,95	1.805,6	1.924,9
I.7	Pendidikan Perhubungan Udara	618,0	618,0	1.032,4	2.536,4	1.466,5	1.347,3
I.8	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	506,6	506,6	446,0	468,3	491,7	516,3
I.9	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	23,8	23,8	24,0	25,2	26,5	27,8
I.10	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	647,5	647,5	580,0	624,8	656,0	688,8
I.11	Pelaksanaan <i>Internship</i> Tenaga Kesehatan	143,0	143,0	250,0	262,5	275,6	289,4
I.12	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	57,5	57,5	60,4	62,0	65,1	68,3
I.13	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	252,9	252,9	281,0	305,6	320,8	336,9
I.14	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	250,0	250,0	271,2	284,8	299,0	313,9
I.15	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	17,0	17,0	16,3	18,1	18,9	19,8
I.16	Pengembangan Tenaga Kepemudaan	18,3	18,3	15,0	23,4	24,5	25,8
I.17	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	45,0	45,0	63,0	66,2	74,0	75,0
I.18	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	20,0	20,0	8,3	8,7	9,1	9,6
I.19	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	114,5	114,5	150,9	158,4	161,8	172,6
I.20	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	34,2	34,2	60,9	63,9	67,1	70,4
I.21	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	12,0	12,0	4,5	2,7	2,8	3,0
I.22	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	65,0	65,0	37,5	45,0	47,2	49,6
I.23	Pengembangan Kepramukaan	80,0	80,0	74,2	72,3	75,9	79,7
I.24	Peningkatan Kapasitas Pemuda	17,0	17,0	8,3	8,7	9,1	9,6
I.25	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	20,0	20,0	12,8	11,3	11,9	12,4
I.26	Peningkatan Wawasan Pemuda	45,0	45,0	33,6	36,3	38,1	40,1
I.27	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	48,4	48,4	18,8	18,6	19,6	20,5

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
I.28	Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	8,6	8,6	6,0	8,7	9,1	9,6
I.29	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	25,0	25,0	24,9	36,6	38,4	40,3
I.30	Pengembangan Olahraga Pendidikan	25,0	25,0	17,0	12,6	13,2	13,9
I.31	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	30,3	30,3	28,1	29,5	31,0	32,5
I.32	Pengembangan Sentra Keolahragaan	145,0	145,0	148,9	151,0	158,6	166,5
I.33	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	158,6	158,6	68,8	72,2	75,8	79,6
I.34	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	52,1	52,1	101,1	106,1	111,4	117,0
I.35	Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan	11,0	11,0	6,1	6,4	6,7	7,1
I.36	Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga	8,8	8,8	5,0	4,7	5,0	5,2
I.37	Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga	17,1	17,1	8,8	9,2	9,6	10,1
I.38	Pengembangan Pembibitan Olahragawan	85,4	85,4	83,4	71,8	75,4	79,1
I.39	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	17,3	17,3	20,9	32,4	34,0	35,7
I.40	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	130,9	130,9	159,8	167,8	176,2	185,0
I.41	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Bina Lattas	9,8	9,8	25,1	27,5	28,5	29,5

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
I.42	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan tenaga Kepelatihan Bina Lattas	22,5	22,5	34,0	35,6	36,8	37,8
I.43	Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas	302,4	302,4	267,3	263,0	265,8	270,6
I.44	Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri bina lattas	52,5	52,5	41,7	44,5	46,6	49,9
I.45	Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas	41,3	41,3	53,3	53,7	56,2	56,8
I.46	Peningkatan Kapasitas Lembaga, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas			31,1	31,5	32,2	32,7
I.47	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM	215	215	362,7	392,9	432,2	475,4
I.48	Pendidikan dan Pelatihan Multi Media	23,1	23,1	45.465,1	27.716,5	28.681,8	28.479,0

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV	Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga						
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan	527,9	527,9	493,5	524,0	550,2	577,7
1	Pengembangan Tenaga Kepemudaan	18,3	18,3	15,0	23,4	24,5	25,8
2	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	45,0	45,0	63,0	66,2	74,0	75,0
3	Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda	20,0	20,0	8,3	8,7	9,1	9,6
4	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	114,5	114,5	150,9	158,4	161,8	172,6
5	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	34,2	34,2	60,9	63,9	67,1	70,4
6	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	12,0	12,0	4,5	2,7	2,8	3,0
7	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	65,0	65,0	37,5	45,0	47,2	49,6
8	Pengembangan Kepramukaan	80,0	80,0	74,2	72,3	75,9	79,7

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama*(dalam miliar Rupiah)*

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Peningkatan Kapasitas Pemuda	17,0	17,0	8,3	8,7	9,1	9,6
10	Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda	20,0	20,0	12,8	11,3	11,9	12,4
11	Peningkatan Wawasan Pemuda	45,0	45,0	33,6	36,3	38,1	40,1
12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	48,4	48,4	18,8	18,6	19,6	20,5
13	Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	8,6	8,6	6,0	8,7	9,1	9,6
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga	1.070,2	1.070,2	986,7	1.030,2	1.081,7	1.135,8
3.14	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	25,0	25,0	24,9	36,6	38,4	40,3
3.15	Pengembangan Olahraga Pendidikan	25,0	25,0	17,0	12,6	13,2	13,9
3.16	Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	30,3	30,3	28,1	29,5	31,0	32,5
3.17	Pengembangan Sentra Keolahragaan	145,0	145,0	148,9	151,0	158,6	166,5
3.18	Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan	158,6	158,6	68,8	72,2	75,8	79,6

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama*(dalam miliar Rupiah)*

No	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.19	Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	52,1	52,1	101,1	106,1	111,4	117,0
3.20	Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan	11,0	11,0	6,1	6,4	6,7	7,1
3.21	Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga	8,8	8,8	5,0	4,7	5,0	5,2
3.22	Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga	17,1	17,1	8,8	9,2	9,6	10,1
3.23	Pengembangan Pembibitan Olahragawan	85,4	85,4	83,4	71,8	75,4	79,1
3.24	Pengembangan Tenaga Keolahragaan	17,3	17,3	20,85	32,39	34,01	35,71
4.1	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan	41,9	41,9	37,5	39,4	41,4	43,5
4.2	Pengembangan Industri Olahraga	13,0	13,0	6,8	8,2	8,6	9,0
4.3	Pengembangan Olahraga Prestasi	439,7	439,7	429,7	450,1	472,6	496,2
TOTAL		1.598,1	1.598,1	1.480,2	1.554,2	1.632,0	1.713,6

MATRIKS 2.2 B. ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V	Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama						
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama	748,9	748,9	1.626,8	2.873,3	3.016,9	3.167,8
1	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	272,1	272,1	434,5	456,3	479,1	503,0
2	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah	298,9	298,9	579,4	1.773,4	1.862,1	1.955,2
3	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf	15,0	15,0	108,5	114,0	119,7	125,6

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama*(dalam miliar Rupiah)*

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
4	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat	0,0	0,0	107,2	112,6	118,2	124,1
5	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	100,1	100,1	125,3	131,6	138,2	145,1
6	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	26,5	26,5	89,9	94,4	99,2	104,1
7	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	28,1	28,1	114,2	119,9	125,9	132,2
8	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	7,8	7,8	67,3	70,6	74,2	77,9
9	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Konghucu	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat	37,5	37,5	167,0	175,4	184,1	193,3

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama*(dalam miliar Rupiah)*

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	37,5	37,5	167,0	175,4	184,1	193,3
C	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji	729,3	729,3	1.060,0	1.113,0	1.168,7	1.227,1
1	Pelayanan Haji Dalam Negeri	216,4	216,4	495,9	520,7	546,8	574,1
2	Pelayanan Haji Luar Negeri	0,0	0,0	7,3	7,7	8,1	8,5
3	Pengelolaan Dana Haji	12,0	12,0	11,5	12,1	12,7	13,3
4	Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	273,3	273,3	266,9	280,3	294,3	309,0
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHU	227,6	227,6	278,3	292,2	306,8	322,2

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI	Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya	1.333,25	1.333,25	1.111,47	1.167,39	1.226,50	1.288,99
A	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	161,42	161,42	149,99	155,22	160,71	166,47
1	Peningkatan Sensor Film	39,70	39,70	45,44	45,44	45,44	45,44
2	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	60,00	60,00	51,13	53,69	56,37	59,19
3	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	61,72	61,72	53,42	56,09	58,90	61,84
B	Peningkatan apresiasi karya budaya.	183,51	183,51	155,53	163,31	171,47	180,05
1	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	141,95	141,95	134,53	141,26	148,32	155,74

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam miliar Rupiah)

No.	Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
2	Pengembangan Galeri Nasional	41,56	41,56	21,00	22,05	23,15	24,31
C	Peningkatan pengelolaan warisan budaya	814,17	814,17	619,43	650,41	682,93	717,07
1	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	194,10	194,10	85,29	89,55	94,03	98,73
2	Pengelolaan Permuseuman	140,51	140,51	95,20	99,96	104,96	110,21
3	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	326,76	326,76	283,47	297,64	312,53	328,15
4	Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	88,60	88,60	88,77	93,21	97,87	102,76
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan)	64,20	64,20	66,70	70,04	73,54	77,22
D	Peningkatan diplomasi budaya	63,35	63,35	65,58	68,86	72,30	75,92
1	Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	63,35	63,35	65,58	68,86	72,30	75,92
E	Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan	110,80	110,80	120,93	129,60	139,09	149,49
1	Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	23,70	23,70	25,78	25,78	25,78	25,78
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi	67,50	67,50	78,20	86,02	94,62	104,09
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	19,60	19,60	16,95	17,79	18,68	19,62

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam Rp miliar)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII	Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
A	Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan	5.224,32	5.224,32	5.222,16	7.661,54	8.038,72	8.434,76
1	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	5.224,32	5.224,32	5.222,16	7.661,54	8.038,72	8.434,76
B	Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat	737,14	737,14	810,40	948,71	1005,48	1105,05

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

(dalam Rp miliar)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	305,36	305,36	327,51	348,68	367,15	386,60
2	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	139,24	139,24	150,51	249,73	267,78	326,43
3	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	292,54	292,54	332,38	350,30	370,56	392,02
C	Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	242,38	242,38	334,52	421,18	511,29	609,20
1	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	167,17	167,17	235,39	300,21	360,47	408,30
2	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	75,21	75,21	99,13	120,97	150,82	200,91
		646,49	646,49	652,69	685,32	719,59	755,57
D	Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)						
1	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	340,37	340,37	342,67	359,81	377,80	396,69
2	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	186,52	186,52	188,87	198,31	208,23	218,64
3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	119,60	119,60	121,14	127,20	133,56	140,24

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

(dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII	Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan	24,9	24,9	66,8	83,3	95,5	103,8
A.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	1,1	1,1	3,2	3,4	3,8	4,1
A.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	1,0	1,0	2,6	5,3	4,4	4,8
A.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	1,0	1,0	6,0	6,5	7,1	7,8
A.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1,5	1,5	2,9	3,2	3,6	4,0
A.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender	1,4	1,4	3,2	3,5	4,0	4,4

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA*(dalam miliar Rupiah)*

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender	1,2	1,2	4,3	5,0	6,1	5,8
A.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender	1,2	1,2	4,9	5,7	6,3	6,3
A.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender	1,2	1,2	3,7	4,4	5,2	5,1
A.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender	1,2	1,2	3,2	3,8	4,5	4,2
A.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender	1,2	1,2	3,7	4,4	5,2	5,1
A.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	3,1	3,1	4,4	5,7	6,1	5,6

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA*(dalam miliar Rupiah)*

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender	1,2	1,2	3,5	4,6	4,4	5,1
A.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	0,9	0,9	3,9	4,3	4,4	4,1
A.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	0,9	0,9	3,7	4,7	4,8	5,3
A.15	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	1,8	1,8	3,8	4,0	5,7	7,1
A.16	Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	5,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	27,0	27,0	57,9	80,6	86,8	96,5
B.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	1,2	1,2	3,1	5,1	5,7	5,3
B.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	1,0	1,0	2,6	5,3	4,4	4,8
B.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	1,3	1,3	2,6	5,2	5,0	5,2

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA*(dalam miliar Rupiah)*

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.4	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan dan PNNL	1,0	1,0	3,0	5,5	5,6	7,5
B.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)	1,5	1,5	5,8	9,5	8,0	8,5
B.6	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1,4	1,4	4,3	5,3	5,4	5,4
B.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak	1,0	1,0	2,9	3,8	4,3	4,4
B.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	1,3	1,3	4,7	5,7	5,7	5,7
B.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus	1,0	1,0	2,6	3,3	3,8	3,8
B.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak	1,3	1,3	4,4	5,3	5,8	5,8
B.11	Penguatan Kelembagaan PUHA di provinsi	5,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
B.12	Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)	10,0	10,0	12,0	11,7	13,3	15,3

MATRIKS 2.2.B
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
I	Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara						
A	FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat						
1	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	6,6	7,5	7,3	7,7	8,1	8,5
2	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0
3	Penyusunan Rancangan APBN	3,3	5,6	5,5	5,7	6,0	6,3
4	Pengelolaan PNBPN dan subsidi	4,4	5,9	5,8	6,1	6,4	6,7
5	Pengembangan Sistem Penganggaran	8,6	8,8	8,6	9,1	9,5	10,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
B	FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan						
1	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah	9,6	9,7	9,5	9,9	10,4	10,9
2	Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	8,2	12,1	11,0	11,5	12,1	12,7
3	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	8,2	4,7	2,1	2,2	2,4	2,5
4	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	17,3	17,4	16,3	17,1	17,9	18,8

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
C	FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara						
1	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	56,7	26,4	25,7	27,0	28,3	29,7
2	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	9,5	8,0	7,8	8,2	8,6	9,0
3	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	15,9	227,4	221,7	232,7	244,4	256,6
4	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	69,3	69,3	67,6	70,9	74,5	78,2
6	Pengembangan Sistem Perbendaharaan	96,5	97,6	129,4	135,9	142,7	149,8

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
D	FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara						
1	Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara	5,3	5,5	5,4	5,6	5,9	6,2
2	Perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan	3,5	4,8	4,6	4,9	5,1	5,4
3	Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	36,3	43,5	42,4	44,6	46,8	49,1
4	Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain	4,7	5,1	5,0	5,2	5,5	5,7

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
II	Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan						
A	FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko						
1	Perumusan kebijakan APBN	5,9	7,7	7,5	7,8	8,2	8,6
2	Perumusan kebijakan ekonomi	8,4	13,4	12,9	13,5	14,2	14,9
3	Perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai dan PNPB	8,1	8,9	8,6	9,1	9,5	10,0
4	Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan	7,3	8,7	8,5	8,9	9,3	9,8
5	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan Setelmen	4,2	4,6	2,0	2,1	2,2	2,4
6	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	5,2	5,6	5,5	5,8	6,0	6,4
7	Pengelolaan Pinjaman	5,0	5,5	4,8	5,0	5,3	5,6
8	Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang	6,7	7,2	7,0	7,4	7,8	8,2

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
9	Pengelolaan Surat Utang Negara	6,7	7,3	5,6	5,9	6,2	6,5
B	FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara						
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan	77,8	85,5	83,4	87,6	91,9	96,5
2	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	1,8	3,0	17,6	18,5	19,4	20,4
3	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	9,9	13,0	12,7	13,4	14,0	14,7
4	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai	3,0	9,5	9,3	9,7	10,2	10,7
5	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional	10,3	13,0	12,7	13,4	14,0	14,7
6	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	98,2	146,0	142,4	149,6	157,0	164,9
7	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	52,5	66,2	64,5	67,8	71,1	74,7
C	FOKUS : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Keuangan						

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
1	Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan program Diploma Keuangan	77,5	88,4	86,1	90,4	94,9	99,7
D	FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN						
1	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer I	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
2	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer II	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
3	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Primer III	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0
4	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur I	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
5	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur II	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
6	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Industri Strategis dan Manufaktur III	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
7	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik I	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
8	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik II	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
9	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Infrastruktur dan Logistik III	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
10	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,1
11	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa II	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
12	Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa III	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
III	Prioritas: Stabilitas Moneter						
A	FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar						
1	Koordinasi Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja	1,6	1,6	2,0	2,1	2,2	2,3
2	Koordinasi Kebijakan Pangan	3,7	3,7	2,7	2,8	3,1	3,2

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
3	Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	2,3	2,3	2,3	2,4	2,6	2,8
4	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8
5	Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi	10,6	10,6	2,5	2,6	2,8	2,9
6	Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi	12,5	12,5	7,3	7,7	8,0	8,5
IV	Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha						
A	FOKUS : Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi						
1	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)	20,8	20,8	20,9	21,9	23,0	24,0
2	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (Prioritas Nasional)	18,0	18,0	11,5	12,0	12,7	13,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (Prioritas Bidang)	7,4	7,4	7,4	7,7	8,1	8,5
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (Prioritas Bidang)	11,1	11,1	9,8	10,3	10,8	11,3
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (Prioritas Bidang)	8,9	8,9	8,9	9,4	9,9	10,3
6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (Prioritas Bidang)	21,6	21,6	30,4	31,9	33,5	35,0
7	Pengembangan PTSP Nasional (Prioritas Nasional)	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
8	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	22,8	22,8	0,0	15,0	0,0	18,0
9	Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)	8,0	8,0	2,1	2,2	2,3	2,4

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
B	FOKUS : Peningkatan Fasilitas Investasi						
1	Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	6,6	6,6	6,6	6,9	7,3	7,7
2	Fasilitas Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (Prioritas Nasional)	15,0	15,0	12,0	12,6	13,2	13,9
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (P)	2,9	2,9	2,9	3,9	4,0	4,2
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Pri	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	4,0
5	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (Prioritas Bidang)	7,2	7,2	7,2	7,5	7,9	8,3
6	Pemberdayaan Usaha Nasional (Prioritas Bidang)	7,4	7,4	8,7	9,0	9,6	10,0
7	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	61,6	61,6	65,1	67,0	71,8	75,0
8	Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (Prioritas Bidang)	188,1	188,1	176,8	184,3	195,0	201,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
9	Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas Bidang)	15,0	15,0	15,4	16,0	17,0	17,8
10	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Infrastruktur (Prioritas Bidang)	0,0	0,0	2,4	2,4	2,6	2,6
11	Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	6,3	6,3	5,4	5,7	6,0	6,3
12	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI)	19,5	19,5	17,5	18,4	19,3	20,3
13	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	14,6	14,6	10,8	11,3	11,9	12,5
14	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi	1,6	1,6	3,5	3,7	3,9	4,1
15	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infra struktur Prioritas	-	-	56,4	59,4	62,6	66,0
V	Prioritas: Peningkatan Ekspor Untuk Mendukung Transformasi Sektor Industri dalam Arti Luas						
A	FOKUS : Mengamankan Pangsa Ekspor di Pasar Tradisional	172,1	172,1	187,0	214,6	223,0	226,9

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Internasional	47,5	47,5	42,0	49,4	51,9	54,5
2	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN	11,0	11,0	10,0	10,7	11,2	11,8
3	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	113,6	113,6	135,0	154,5	159,9	160,7
B.	FOKUS : Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Non Tradisional	17,0	17,0	58,7	195,2	209,5	214,4
1	Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral	8,0	8,0	7,0	7,4	7,7	8,1
2	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	9,0	9,0	8,0	8,4	8,8	9,3
3	Pengembangan Promosi dan Citra			43,7	179,5	193,0	197,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
C.	FOKUS : Mengidentifikasi Peluang Pasar Ekspor Produk dan Jasa Potensial	40,5	40,5	52,6	69,0	76,5	84,1
1	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	7,5	7,5	8,0	10,0	11,5	13,5
2	Pengembangan Produk Ekspor	10,0	10,0	10,1	11,4	12,7	14,1
3	Pengembangan SDM Bidang Ekspor	23,0	23,0	22,5	31,7	34,3	37,5
4	Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa			12,0	16,0	18,0	19,0
5	Koordinasi Kebijakan Perdagangan LN dan Kepariwisata	2,6	2,6	2,0	2,1	2,2	2,3
D.	FOKUS : Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional	23,9	23,9	22,0	23,7	24,8	25,9
1	Pengelolaan impor	12,4	12,4	9,9	12,5	13,1	13,8
2	Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan	11,5	11,5	12,1	11,2	11,7	12,1

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
VI	Prioritas: Penguatan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Mendukung Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi						
A	FOKUS: Meningkatkan Fasilitas Perdagangan	162,0	162,0	147,1	154,1	158,5	163,2
1	Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
2	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	25,0	25,0	23,0	24,4	25,7	27,0
3	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	55,0	55,0	47,2	52,1	54,7	57,5
4	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
5	Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan integrasi dalam ASW	5,1	5,1	3,0	3,2	3,3	3,5
6	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah	2,6	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1
7	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia	3,1	3,1	2,7	2,8	3,0	3,1
8	Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub regional	5,2	5,2	2,5	2,6	2,8	2,9

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
B	FOKUS: Meningkatkan Perlindungan Konsumen	151,1	151,1	120,8	132,4	137,9	143,2
1	Peningkatan Tertib Ukur	63,0	63,0	58,1	59,1	59,1	59,1
2	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	30,0	30,0	18,5	21,9	24,0	26,3
3	Peningkatan Pengawasan Mutu Barang	31,0	31,0	23,5	26,3	27,3	27,6
4	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	27,1	27,1	20,6	25,1	27,5	30,2
C	FOKUS: Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi dan Logistik	487,1	487,1	517,4	532,1	543,5	555,3
1	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	70,7	70,7	40,0	44,0	48,4	53,2
2	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	315,0	315,0	353,4	355,0	355,0	355,0
3	Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan	57,5	57,5	75,0	75,0	75,0	75,0
4	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	9,0	9,0	13,5	14,2	14,9	15,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
5	Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha	4,2	4,2	11,4	13,5	15,8	17,0
6	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	9,3	9,3	7,0	9,0	11,0	14,0
7	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Yang Sehat	8,4	8,4	2,6	5,4	6,1	6,9
8	Penilaian Merger dan Akuisisi	4,2	4,2	4,3	5,0	5,5	5,8
9	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU	4,6	4,6	4,7	5,3	5,8	6,4
10	Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional dan Fasilitasi Perdagangan	4,3	4,3	5,5	5,8	6,1	6,4
D	FOKUS: Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan	144,7	144,7	85,0	131,1	131,4	131,7
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah	118,0	118,0	55,2	104,8	104,8	104,8
2	Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	6,4	6,4	5,7	6,0	6,3	6,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
3	Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan	20,3	20,3	24,1	20,3	20,3	20,3
VII	Prioritas: Transformasi Struktur Industri	1.802,3	1.802,3	1.551,1	1.628,7	1.710,1	1.795,6
A	FOKUS : Pembangunan Perwilayahan Industri	65,5	65,5	91,8	96,4	101,2	106,3
1	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I	21,2	21,2	15,5	16,3	17,1	17,9
2	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II	21,8	21,8	21,7	22,7	23,9	25,1
3	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	22,5	22,5	54,6	57,4	60,3	63,3
B	FOKUS: Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri	851,4	851,4	782,9	822,0	863,1	906,3
1	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka	141,0	141,0	174,6	183,3	192,5	202,1
2	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Kimia Hilir	19,3	19,3	21,1	22,1	23,2	24,4
3	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Kimia Dasar	54,9	54,9	62,8	66,0	69,3	72,7

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
4	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Material Dasar Logam	17,2	17,2	29,2	30,6	32,2	33,8
5	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	66,9	66,9	70,4	74,0	77,7	81,6
6	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	36,9	36,9	115,3	121,1	127,1	133,5
7	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau	43,0	43,0	42,9	45,0	47,3	49,6
8	Revitalisasi dan penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	139,8	139,8	139,4	146,4	153,7	161,4
9	Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	263,2	263,2	43,4	45,5	47,8	50,2
10	Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	11,6	11,6	26,6	28,0	29,3	30,8
11	Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika	13,2	13,2	13,2	13,8	14,5	15,2
12	Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	44,2	44,2	44,1	46,3	48,6	51,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
C	FOKUS: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas	885,5	885,5	676,4	710,2	745,8	783,0
1	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	117,5	117,5	86,9	91,3	95,8	100,6
2	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II	161,5	161,5	109,9	115,4	121,1	127,2
3	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	90,2	90,2	90,7	95,2	100,0	105,0
4	Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri	85,6	85,6	80,1	84,1	88,3	92,7
5	Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	11,6	11,6	4,8	5,0	5,2	5,5
6	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan	23,4	23,4	23,4	24,6	25,8	27,1
7	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil	20,9	20,9	21,1	22,2	23,3	24,5
8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	24,1	24,1	24,0	25,2	26,5	27,8
9	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro	38,1	38,1	37,1	38,9	40,9	42,9

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
10	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	19,7	19,7	19,9	20,9	22,0	23,1
11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan	15,2	15,2	14,9	15,6	16,4	17,2
12	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin	23,0	23,0	23,3	24,4	25,7	26,9
13	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik	20,6	20,6	20,7	21,7	22,8	23,9
14	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik	40,1	40,1	39,0	41,0	43,0	45,2
15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	26,3	26,3	25,6	26,9	28,3	29,7
16	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik	21,5	21,5	20,6	21,6	22,7	23,8
17	Riset dan Standardisasi Bidang Industri	146,2	146,2	34,5	36,2	38,1	40,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
VIII	Prioritas: Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.132,9	1.132,9	1.876,9	1.970,8	2.069,3	2.172,8
A	Fokus: Pengembangan Pengungkit Rantai Nilai Pariwisata	324,3	324,3	1.046,4	1.098,7	1.153,7	1.211,4
1	Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus	47,9	47,9	47,6	50,0	52,5	55,1
2	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	25,3	25,3	25,1	26,4	27,7	29,1
3	Peningkatan Promosi Pariwisata dalam negeri	52,2	52,2	51,5	54,1	56,8	59,7
4	Peningkatan Promosi Pariwisata luar negeri	104,3	104,3	86,6	90,9	95,4	100,2
5	Peningkatan Pencitraan Pariwisata	94,7	94,7	94,1	98,8	103,8	109,0
B	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	372,7	372,7	370,7	389,3	408,7	429,2
1	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	42,3	42,3	42,0	44,1	46,3	48,7
2	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	70,0	70,0	69,6	73,1	76,8	80,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
3	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	130,9	130,9	130,2	136,7	143,5	150,7
4	Pengembangan Industri Pariwisata	18,5	18,5	18,4	19,3	20,3	21,3
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata	32,9	32,9	32,7	34,4	36,1	37,9
6	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	45,7	45,7	45,5	47,7	50,1	52,6
7	Pengembangan Wisata Minat Khusus Konvensi, Insentif, dan Event	32,5	32,5	32,3	33,9	35,6	37,4
C	Sumber Daya Manusia Pariwisata	259,7	259,7	279,7	293,7	308,4	323,8
1	Pengembangan Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9,7	9,7	9,7	10,2	10,7	11,2
2	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	250,0	250,0	270,0	283,5	297,7	312,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
D	Ekonomi Kreatif	176,2	176,2	180,1	189,1	198,6	208,5
1	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	86,0	86,0	93,5	98,2	103,1	108,3
2	Pengembangan Seni Rupa	40,0	40,0	42,5	44,7	46,9	49,2
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media	25,1	25,1	20,0	21,0	22,0	23,1
4	Pengembangan Desain dan Arsitektur	25,1	25,1	24,1	25,3	26,5	27,9
IX	Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM						
1	Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi	5,1	5,1	2,8	3,0	3,1	3,3
2	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan	3,2	3,2	8,3	9,1	10,0	11,0
3	Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	3,1	3,1	4,2	4,6	5,1	5,6
4	Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM	1,4	1,4	4,8	5,3	5,9	6,5

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
5	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	0,4	0,4	1,4	1,6	1,7	1,9
6	Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM	0,0	0,0	3,7	4,0	4,4	4,9
7	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM	5,0	5,0	3,1	3,4	3,7	4,1
8	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM	9,5	9,5	15,2	16,7	18,4	20,2
9	Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri	5,8	5,8	4,4	4,9	5,4	5,9
10	Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitas Impor	6,8	6,8	8,5	9,3	10,2	11,3
11	Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM	42,3	42,3	45,7	50,2	55,3	60,8
12	Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM	8,0	8,0	7,8	8,6	9,5	10,4
13	Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	12,9	12,9	11,3	12,5	13,7	15,1

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM	0,8	0,8	4,3	4,7	5,2	5,7
15	Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan	0,0	0,0	9,0	9,9	10,9	12,0
16	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM	1,2	1,2	6,1	6,7	7,4	8,2
17	Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	11,3	11,3	12,3	13,5	14,9	16,4
18	Pengembangan Restrukturisasi Usaha	2,6	2,6	8,6	9,5	10,4	11,5
19	Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	5,5	5,5	4,7	5,2	5,7	6,3
20	Pengembangan Fasilitas Investasi KUKM	10,7	10,7	9,1	10,0	11,0	12,1
21	Pengembangan Sistem Bisnis	4,3	4,3	7,9	8,7	9,6	10,6

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
22	Penelitian Kebijakan UMKM	2,7	2,7	5,4	5,9	6,5	7,2
23	Penelitian Kebijakan Sumber Daya	2,1	2,1	8,1	8,9	9,8	10,8
24	Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM	1,5	1,5	3,0	3,3	3,6	4,0
25	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	215,0	215,0	215,0	236,5	260,2	286,2
26	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM	94,8	94,8	96,0	105,5	116,1	127,7
27	Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM	2,3	2,3	44,3	48,8	53,7	59,0
28	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	4,6	4,6	4,6	5,0	5,5	6,1

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
29	Pengembangan Keanggotaan Koperasi	70,0	70,0	51,0	56,2	61,8	67,9
30	Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi	6,9	6,9	5,7	6,3	6,9	7,6
31	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	1,7	1,7	7,5	8,2	9,1	10,0
32	Penelitian Kebijakan Koperasi	0,8	0,8	5,2	5,7	6,2	6,9
X	Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan						
A	FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan						
1	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1,6	1,6	1,0	1,1	1,1	1,2
2	Pengelolaan Bidang Hukum Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3,0	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3
3	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan	4,5	4,5	1,9	2,0	2,1	2,2

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
4	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4
5	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
6	Pemeriksaan dan Pengembangan Riset Tindak Pidana Pencucian Uang	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
XI	Prioritas : Daya Saing Ketenagakerjaan						
A	Fasilitasi Mobilitas Tenaga Kerja	1.265,4	1.265,4	1.693,6	1.786,2	1.857,0	1.938,7
1	Pembinaan dan Pengembangan E-Government *)	19,3	19,3	19,3	32,6	32,6	35,9
2	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	382,2	382,2	382,2	382,2	382,2	382,2
3	Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
4	Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian	432,9	432,9	819,7	860,7	903,7	948,9

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
5	Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI/UPTP3TKI)	134,5	134,5	106,6	111,5	117,5	123,4
6	Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen	5,0	5,0	16,8	17,7	18,6	19,3
7	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI	4,0	4,0	5,9	6,2	6,5	6,8
8	Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran	1,6	1,6	1,0	1,1	1,1	1,2
9	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	78,4	78,4	65,3	68,5	72,0	75,6
10	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	98,4	98,4	130,9	138,1	145,7	153,7
11	Peningkatan Pelayanan Pengaduan	13,0	13,0	13,8	14,5	15,2	16,0
12	Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	14,0	14,0	14,9	15,6	16,4	17,2
13	Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	21,4	21,4	45,2	47,4	49,8	52,3
14	Peningkatan Mediasi dan Advokasi	4,0	4,0	9,5	10,0	10,5	11,0

BIDANG: EKONOMI

(Dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	TARGET			
				Rencana 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					2016	2017	2018
15	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI	10,0	10,0	3,0	3,2	3,3	3,5
17	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	2,7	2,7	2,1	2,4	2,5	2,6
18	Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	34,9	34,9	48,5	65,6	70,4	80,3
XII	Prioritas: Jaminan Sosial						
A	Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)						
1	Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	19,6	19,6	18,1	20,8	21,7	22,6

MATRIKS 2.2 B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR)		
					2016	2017	2018
A	Fokus: Penyelenggaraan Litbang						
1	Penelitian bioteknologi peternakan modern	7.000,0		0	0	0	0
2	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler			0	0	0	0
3	Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	75.434,4		87,2	91,5	96,1	100,9
4	Diseminasi dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir			30,3	31,8	33,4	35,1
5	Pengkajian dan penerapan Sistem Energi Nuklir			21,5	22,6	23,7	24,9
6	Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir			36,9	38,8	40,7	42,7
7	Pengembangan PLTP Skala Kecil			-	-	-	-
8	Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obat-Obatan, dan Instrumentasi Medis			0	0	0	0
9	Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan Metrologi			37,5	39,4	41,4	43,4
10	Pengembangan Teknologi Penerbangan			268,8	282,2	296,3	311,1
11	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi			6,5	5,6	5,8	5,9

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR)		
					2016	2017	2018
12	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pemerintahan dan Industri			-	-	-	-
13	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan			7,6	7,9	8,3	8,8
14	Penelitian Fisika			28,7	30,1	31,6	33,2
15	Pengembangan Sains dan Teknologi Bahan Maju dengan Iptek Nuklir			28,4	29,8	31,3	32,9
16	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material			4,5	4,1	4,2	4,3
B	Fokus: Layanan Teknologi			-	-	-	-
1	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi			12,5	11,0	11,0	11,1
2	Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi Iptek			9,9	10,0	10,0	10,1
3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi			3,3	3,3	3,4	3,4
4	Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi			14,1	14,1	14,1	14,2
5	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dinamika Pantai			5,0	5,0	5,1	5,1
6	Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer			8,7	8,7	8,7	8,8
7	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi			4,5	4,5	4,5	4,5

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR)		
					2016	2017	2018
8	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Remediasi Lingkungan			4,2	4,4	4,7	4,9
9	Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi			11,1	11,1	11,1	11,1
10	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan			33,6	33,9	34,5	35,0
11	Pengkajian dan Penelitian Teknologi Hidrodinamika			8,5	8,5	8,5	8,5
12	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca			48,1	48,5	49,4	50,1
13	Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran			8,7	8,7	8,8	8,8
14	Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Teknologi Keramik Seni			6,1	6,4	6,7	7,0
C	Fokus: Infrastruktur Mutu			-	-	-	-
1	Peningkatan Penerapan Standar			6,0	6,3	6,6	6,9
D	Fokus: Pengawasan Tenaga Nuklir			-	-	-	-
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir			3,4	7,8	8,6	9,6

BIDANG: PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK (P3-IPTEK) SERTA SISTEM INOVASI NASIONAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA 2015	PRAKIRAAN MAJU (DALAM MILIAR)		
					2016	2017	2018
2	Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir			2,4	5,8	6,5	7,2
E	Fokus: Teknopreneur			-	-	-	-
1	Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi			5,6	5,7	5,9	6,0
F	Fokus: Sumber Daya Alam			-	-	-	-
1	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya Baru			7,0	10,0	12,0	15,0
2	Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya			81,6	85,6	89,9	94,4
3	Penelitian Oseanografi			65,6	60,0	76,2	69,0
4	Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)			15,0	17,0	12,4	12,9
5	Penelitian Biologi			24,5	13,5	13,0	13,0
6	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam			2,5	2,6	2,7	2,9
G	Fokus: Penyiapan Sosial Budaya Masyarakat			-	-	-	-
1	Penelitian Masyarakat dan Budaya			5,0	5,5	5,5	5,5
H	Fokus: Sumber Daya Manusia dan Prasarana Iptek			-	-	-	-
1	Peningkatan Kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)			0	0	0	0
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang			2,5	2,8	2,8	2,8

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL							
B. PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI							
A	KESDM						
I	Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas	1,590.03	1,590.03	2,202.23	2,312.34	2,427.95	2,549.35
1.1	Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional (DMB)	74.20	74.20	31.87	33.47	35.14	36.90
1.2	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)	836.60	836.60	968.25	1,017	1,067	1,121
1.3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME)	102.90	102.90	25.89	27.18	28.54	29.97
1.4	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas (DMT)	424.16	424.16	1,078.80	1,132.74	1,189.38	1,248.85
1.5	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas (SDM)	152.17	152.17	97.42	102.29	107.40	112.77

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	368.82	368.82	371.80	390.39	409.91	430.40
2.1	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	189.50	189.50	156.77	164.61	172.84	181.49
2.2	Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	32.50	32.50	119.38	125.35	131.62	138.20
2.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPH Migas	146.82	146.82	95.64	100.42	105.44	110.72
III	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1,300.02	1,300.02	797.30	837.16	879.02	922.97
3.1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	159.65	159.65	88.43	92.86	97.50	102.37
3.2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	862.70	862.70	571.22	599.78	629.76	661.25
3.3	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	103.76	103.76	49.53	52.01	54.61	57.34
3.4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	58.50	58.50	27.47	28.84	30.28	31.80

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	115.41	115.41	60.64	63.68	66.86	70.20
B	KEMENKOMINFO						
I	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	762.09	762.09	1,047.23	1,099.59	1,154.57	1,212.29
1.1	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	27.98	27.98	49.98	52.48	55.11	57.86
1.2	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	329.99	329.99	401.99	422.09	443.19	465.35
1.3	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	32.31	32.31	53.71	56.40	59.22	62.18
1.4	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	139.81	139.81	144.00	151.20	158.76	166.70
1.5	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	26.71	26.71	35.02	36.77	38.61	40.54
1.6	Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	19.92	19.92	29.64	31.12	32.68	34.31

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	185.36	185.36	332.88	349.52	367.00	385.35
II	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2,067.69	2,067.69	2,921.52	3,067.59	3,220.97	3,382.02
2.1	Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet	19.50	19.50	41.00	43.05	45.20	47.46
2.2	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	1,801.72	1,801.72	2,034.57	2,136.30	2,243.12	2,355.27
2.3	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika	29.75	29.75	429.97	451.46	474.04	497.74
2.4	Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika	21.59	21.59	45.68	47.96	50.36	52.88
2.5	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos	23.82	23.82	45.55	47.83	50.22	52.73
2.6	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi	27.48	27.48	52.70	55.34	58.10	61.01
2.7	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran	23.46	23.46	46.85	49.19	51.65	54.23
2.8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	120.36	120.36	225.20	236.46	248.28	260.70

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105.70	105.70	107.00	112.35	117.97	123.86
3.1	Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis	12.50	12.50	12.50	13.13	13.78	14.47
3.2	Pembinaan dan Pengembangan E-Government	19.27	19.27	11.42	11.99	12.59	13.22
3.3	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika	10.83	10.83	10.83	11.37	11.94	12.54
3.4	Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat	16.33	16.33	15.64	16.42	17.24	18.11
3.5	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	21.10	21.10	21.14	22.20	23.31	24.47
3.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika	38.17	38.17	35.46	37.24	39.10	41.06
C	RRI						
I	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	206.76	206.76	215.08	230.84	13,361.74	257.91
1.1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	110.91	110.91	105.99	111.28	116.85	122.69
1.2	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	10.65	10.65	11.91	12.51	13,131.00	13.79
1.3	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	14.23	14.23	6.89	7.24	7.60	7.98

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	3.35	3.35	4.18	4.39	4.61	4.84
1.5	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	62.57	62.57	81.06	85.12	89.37	93.84
1.6	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	5.05	5.05	5.05	10.30	12.30	14.76
D	TVRI						
I	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Televisi Publik	380.455	380.455	414.871	435.615	457.395	480.265
1.1	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik	116.730	116.730	126.188	132.498	139.123	146.079
1.2	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	167.076	167.076	200.396	210.415	220.936	231.983
1.3	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	3.227	3.227	3.847	4.039	4.241	4.453
1.4	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	93.422	93.422	84.440	88.662	93.095	97.750
ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERSEDIAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR							
A. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL							
II	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5,231.85	5,231.85	4,964.62	2,839.42	2,981.39	3,130.46

Bidang: Sarana dan Prasarana

(Miliar Rupiah)

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	31.61	31.61	16.95	17.80	18.69	19.62
2.2	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	5,065.96	5,065.96	4,873.98	2,744.24	2,881.46	3,025.53
2.3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	47.68	47.68	20.54	21.57	22.65	23.78
2.4	Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	86.60	86.60	53.14	55.80	58.59	61.52

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
	<u>FOKUS PRIORITAS</u>						
I	PEMBANGUNAN DEMOKRASI						
1.1	Penguatan Peran Lembaga Demokrasi	376,45	376,45	244,04	263,44	281,06	300,02
1.1.1	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	50,00	50,00	50,32	52,84	55,48	58,25
1.1.2	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	13,00	13,00	20,94	21,99	23,09	24,25
1.1.3	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	156,69	156,69	43,03	47,33	52,06	57,27
1.1.4	Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaam Kehumasan dan Pengawasan Internal	52,24	52,24	37,90	41,69	45,86	50,45

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.1.5	Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan	8,73	8,73	10,35	10,87	11,41	11,98
1.1.6	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	45,10	45,10	37,00	40,43	42,45	44,57
1.1.7	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	50,70	50,70	44,50	48,30	50,71	53,25
1.2	Jaminan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Politik Rakyat	91,00	91,00	76,09	79,89	83,89	88,08
1.2.1	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	91,00	91,00	76,09	79,89	83,89	88,08
1.3	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik	192,09	192,09	160,95	193,89	193,89	213,28
1.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	16,86	16,86	14,97	16,86	16,86	18,55
1.3.2	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	20,03	20,03	18,61	18,63	18,63	20,50
1.3.3	Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik	36,23	36,23	30,23	31,93	31,93	35,12
1.3.4	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	20,49	20,49	18,49	25,59	25,59	28,15
1.3.5	Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional	18,74	18,74	16,32	19,84	19,84	21,82

BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI

NO.	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.3.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat	14,37	14,37	21,70	14,12	14,12	15,53
1.3.7	Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan Komunikasi publik	4,01	4,01	4,01	4,54	4,54	4,99
1.3.8	Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	61,35	61,35	36,62	62,38	62,38	68,62
1.4	Penguatan Sistem Presidensial						
1.5	Penanggulangan Terorisme	113,00	113,00	253,45	273,93	218,25	303,55
1.5.1	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	51,00	51,00	136,00	143,45	81,25	159,70
1.5.2	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	45,30	45,30	98,48	113,89	119,59	125,56
1.5.3	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerjasama Internasional	16,70	16,70	18,97	16,59	17,42	18,29
II	PENCEGAHAN KONFLIK						
2.1	Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik	114,93	114,93	98,677152	77,09449	80,9492495	84,996727
2.1.1	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	0,73	0,73	1,99	2,09	2,19	2,30
2.1.2	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	74,50	74,50	33,44	35,90	37,69	39,57
2.1.3	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	39,70	39,70	63,25	39,11	41,07	43,12
TOTAL		887,47	887,47	833,21	888,24	858,04	989,92

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PRIORITAS SUB BIDANG: PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL						
A	Pemantapan Komunitas ASEAN	Rp70,88	Rp70,88	Rp87,19	Rp90,43	Rp93,84	Rp94,10
1	Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan	Rp12,77	Rp12,77	Rp11,77	Rp12,36	Rp12,97	Rp13,62
2	Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi	Rp6,84	Rp6,84	Rp6,76	Rp7,14	Rp7,53	Rp7,94
3	Kerjasama ASEAN bidang Fungsional	Rp4,61	Rp4,61	Rp5,60	Rp5,91	Rp6,24	Rp6,58
4	Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan	Rp4,89	Rp4,89	Rp5,69	Rp5,97	Rp6,27	Rp6,58
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerjasama ASEAN	Rp22,75	Rp22,75	Rp32,74	Rp34,38	Rp36,10	Rp37,94
6	Koordinasi Kerjasama ASEAN	Rp1,03	Rp1,03	Rp1,02	Rp1,07	Rp1,12	Rp1,18
B	Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia	Rp31,43	Rp31,43	Rp29,20	Rp33,71	Rp35,40	Rp37,17

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Koordinasi Hubungan Multilateral	Rp1,63	Rp1,63	Rp1,24	Rp1,30	Rp1,36	Rp1,43
2	Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan	Rp3,00	Rp3,00	Rp2,19	Rp2,30	Rp2,41	Rp2,53
3	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)	Rp2,22	Rp2,22	Rp1,54	Rp1,62	Rp1,70	Rp1,78
4	Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	Rp9,11	Rp9,11	Rp11,50	Rp12,08	Rp12,68	Rp13,32
5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Rp3,68	Rp3,68	Rp3,73	Rp3,92	Rp4,11	Rp4,32
6	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan	Rp11,79	Rp11,79	Rp9,00	Rp12,51	Rp13,14	Rp13,79
C	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Rp98,36	Rp98,36	Rp81,00	Rp85,05	Rp89,30	Rp93,77
1	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Rp98,36	Rp98,36	Rp81,00	Rp85,05	Rp89,30	Rp93,77
D	Penguatan Diplomasi Ekonomi	Rp49,11	Rp49,11	Rp45,46	Rp49,13	Rp51,58	Rp54,18

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Rp1,03	Rp1,03	Rp0,87	Rp0,91	Rp0,96	Rp1,00
2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Rp5,73	Rp5,73	Rp5,81	Rp6,10	Rp6,40	Rp6,72
3	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Rp3,45	Rp3,45	Rp3,50	Rp3,67	Rp3,85	Rp4,05
4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	Rp4,14	Rp4,14	Rp4,20	Rp4,41	Rp4,63	Rp4,86
5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah	Rp3,68	Rp3,68	Rp3,73	Rp3,92	Rp4,11	Rp4,32
6	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Rp9,47	Rp9,47	Rp9,60	Rp10,08	Rp10,58	Rp11,13
7	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Rp2,86	Rp2,86	Rp2,25	Rp2,36	Rp2,48	Rp2,61
8	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Rp1,99	Rp1,99	Rp1,66	Rp1,75	Rp1,83	Rp1,92
9	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Rp2,85	Rp2,85	Rp1,99	Rp3,48	Rp3,66	Rp3,84
10	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Rp2,02	Rp2,02	Rp1,78	Rp1,87	Rp1,97	Rp2,07

BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2014	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
11	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Rp4,46	Rp4,46	Rp2,40	Rp2,51	Rp2,64	Rp2,77
12	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI	Rp4,4	Rp4,4	Rp4,25	Rp4,46	Rp4,69	Rp4,92
13	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Rp4,11	Rp4,11	Rp4,30	Rp4,51	Rp4,74	Rp4,97
E	Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Rp15,09	Rp15,09	Rp14,28	Rp14,99	Rp15,74	Rp16,53
1	Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik	Rp8,87	Rp8,87	Rp8,45	Rp8,87	Rp9,32	Rp9,78
2	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Rp6,22	Rp6,22	Rp5,83	Rp6,12	Rp6,43	Rp6,75
TOTAL		Rp264,88	Rp264,88	Rp257,13	Rp273,32	Rp285,87	Rp295,75

MATRIKS 2.2. B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces									
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel									
1	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/ Latma Internasional	Jumlah Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri	48.6	48.6	51.0	53.6	56.2	59.1	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	KEMHAN
2	Latihan Matra Darat	Jumlah Latihan Kematraan	331	331	397.2	400.0	400.0	400.0	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	TNI AD
3	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat	Jumlah kecukupan perumahan-asrama prajurit	30	30	35.0	35.0	35.0	35.0	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	TNI AD

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut	Jumlah kecukupan perumahan-asrama prajurit	56.3	56.3	120.0	126.0	132.3	138.9	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL
5	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	Jumlah latihan operasi matra TNI AL	67.4	67.4	80.5	84.5	88.8	93.2	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	TNI AL
6	Latihan Matra Udara	Jumlah latihan matra udara	51.9	51.9	80.0	100.0	100.0	100.0	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU
7	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara	Jmlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit	71.4	71.4	225.1	120.0	120.0	120.0	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	TNI AU
B	Focus Prioritas Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara									
1	Pengadaan barang dan jasa militer	Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel			15,337.1	16,104.0	16,909.2	17,754.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	Kemhan

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengadaan MKB	Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB	49.1	49.1	330.4	346.9	364.2	382.4	Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI
3	Pembangunan Sarpras Pendukung	Pemenuhan Sarpras Pendukung Alutsista Integratif	17.0	17.0	204.4	214.6	225.3	236.6	Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif	MABES TNI
4	Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur	Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya			150.0	150.0	150.0	150.0	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
5	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang	Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan kesiapannya			250.0	250.0	250.0	250.0	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
6	Pemeliharaan/ Perawatan Alat Angkut Air	Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan kesiapannya			100.0	100.0	100.0	100.0	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
7	Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/ Alpal	Jumlah senjata dan munisi/alpal yang ditingkatkan kesiapannya			829.0	829.0	829.0	829.0	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
8	Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur	Penambahan Ranpur terhadap MEF	81.0	81.0	77.0	100.0	100.0	100.0	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD
9	Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	Penambahan Sabang terhadap MEF	138.8	138.8	131.9	800.0	800.0	800.0	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	Ketersediaan dan Kesiapan Fasilitas Sarana prasarana Pendukung Alutsista	741.4	741.4	614.1	614.1	614.1	614.1	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD
11	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut	Kesiapan peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL			67.0	82.6	86.8	91.1	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
12	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut	Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL			65.0	80.2	84.2	88.4	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
13	Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis	Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis TNI AL			1,980.0	2,442.6	2,564.5	2,692.7	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
14	Pemeliharaan/Perawatan Pesud	Kesiapan Pesud TNI AL			125.0	154.2	161.9	170.0	Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
15	Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	Jumlah fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL	333.6	333.6	1,000.0	1,322.7	1,388.9	1,458.3	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis	jumlah penambahan platform dan/atau penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL	275.0	275.0	1,000.0	1,322.7	1,388.9	1,458.3	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
17	Peningkatan/ Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut	352.8	352.8	800.0	1,058.2	1,111.1	1,166.7	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
18	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya	Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya			2,078.5	1,000.0	1,000.0	1,000.0	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU
19	Pemeliharaan/ Perawatan Radar, Psu, dan Almatsus Komlek Lainnya	Jumlah Radar, Psu, dan Almatsus Komlek Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya			900.0	900.0	900.0	900.0	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU
20	Peningkatan/ Pengadaan Pesawat Udara	Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara	1,167.4	1,167.4	15.0	8.0	8.0	8.0	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU
21	Peningkatan/ Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	Jumlah sarpras pendukung Alutsista TNI AU	231.2	231.2	447.5	447.5	447.5	447.5	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	TNI AU

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C	Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara									
D	Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar)									
1	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan			240.0	240.0	240.0	240.0	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	TNI AD
2	Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	Penambahan jumlah pos pulau terluar	-	-	60.0	79.4	83.3	87.5	Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut	TNI AL
II	Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional									
A	Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional									

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pertahanan	Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel	42.3	42.3	1,517.0	1,593.0	1,672.6	1,756.2	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	Kemhan
2	Produksi Alutsista industri dalam negeri	Jumlah dan Jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri	1,580.0	1,580.0	2,159.1	1,000.0	1,000.0	1,000.0	Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan	Kemhan
3	Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan	Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri Pertahanan	persiapan	persiapan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Program Potensi Pertahanan	Kemhan
4	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil kajian dan rancang bangun produk sandi tepat guna	7.5	7.5	4.5	4.7	4.9	5.2	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lemsaneg
		Jumlah Aplikasi/ device/ modul perangkat keras dan atau perangkat lunak yang diaplikasikan dalam operasi kriptanalisis			5.1	5.4	5.7	6.0		
4	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri	Jumlah prototype dan pengkajian yang dihasilkan	8.0	8.0	8.0	12.6	13.3	14.0	Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian	Polri
III	Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging)									

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka)									
1	Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut	Terbangunnya sarana dan prasarana pengamanan di laut beserta fasilitas pendukungnya	164.1	164.1	30.93	172.06	348.06	209.06	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla
2	Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut	Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia	86.8	86.8	96.46	111.14	121.19	131.28	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	Bakorkamla
IV	Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat									
A	Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri									
1	Pengembangan Peralatan Polri	Persentase penambahan ketersediaan Alut dan Alsus Kepolisian	5,562.3	5,562.3	3,631.2	3,580.0	3,627.9	3,475.8	Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri	Polri
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Polri	Jumlah peserta pendidikan dan latihan Polri	647.8	647.8	522.1	818.1	863.0	912.8	Program Pendidikan dan latihan Polri	Polri

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pengendalian Pegawai Polri	Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah	134.3	134.3	108.8	170.8	180.2	190.6	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	Polri
B	Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba									
1	Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah	Jumlah desiminasi informasi melalui kegiatan tatap muka	290	290	48.3	53.1	58.4	64.3	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak nasional			0.5	0.6	0.6	0.7		
		Jumlah desiminasi informasi melalui TV dan radio			3.7	4.1	4.5	4.9		
		Jumlah desiminasi informasi melalui penayangan konten di media baru			0.5	0.6	0.6	0.7		
		Jumlah stakeholder yang memanfaatkan dan mengintegrasikan informasi P4GN bidang pencegahan dalam pengambilan kebijakan			14.2	15.6	17.2	18.9		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Katalisator Pencegahan Unit Keluarga (KPUK) P4GN dalam rangka program satu desa satu KPUK			24.7	30.4	33.4	36.7		
		Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi			48.5	53.3	58.7	64.5		
		Jumlah satuan tugas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah daerah dan swasta			24.5	26.9	29.6	32.6		
		Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan			12.2	13.4	14.8	16.3		
		Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba nakai			2.9	3.5	3.9	4.2		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif			2.4	2.6	2.9	3.1		
		Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang beralih dari usaha ilegal menjadi usaha legal produktif			2.5	2.8	3.1	3.4		
		Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba			6.1	6.7	7.4	8.2		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba			4.3	4.7	5.2	5.7		
		Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi			0.6	0.7	0.8	0.9		
		Jumlah mantan pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi di rumah dampingan			-	5.0	7.2	9.9		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba dan jumlah berkas penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan (P.21)			10.5	11.6	12.7	14.0		
		Jumlah laporan pemetaan jaringan di wilayah kabupaten/kota			15.6	17.1	18.8	20.7		
		Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja unit kerja			18.8	24.0	26.4	29.0		
		Jumlah bulan layanan dukungan manajemen dan operasional unit kerja			63.2	66.2	72.8	80.1		
2	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN	Jumlah diseminasi informasi melalui kegiatan tatap muka	20	20	8.2	9.1	10.0	11.0	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak nasional			2.6	2.9	3.2	3.5		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah diseminasi informasi melalui konten di media elektronik			2.6	3.1	3.7	4.5		
		Jumlah diseminasi informasi melalui penayangan konten di media baru			0.2	0.2	0.3	0.3		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang diseminasi informasi P4GN yang diterbitkan			2.9	3.2	3.5	3.8		
3	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terpetakan	11	11	3.9	4.2	4.7	5.1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Dukungan perangkat sistem teknologi intelijen			6.4	7.0	7.7	8.5		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang intelijen			0.3	0.3	0.3	0.4		
		Layanan Perkantoran			0.4	0.5	0.5	0.6		
4	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah interdiksi yang diselesaikan (P.21)	14	14	13.1	19.0	21.0	23.0	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang Interdiksi wilayah udara, laut, darat dan <u>lintas darat</u>			0.1	0.2	0.2	0.2		
		Layanan Perkantoran			0.2	0.2	0.2	0.3		
5	Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen <u>masvarakat</u>	6	6	1.6	1.8	2.0	2.1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah pelaksanaan kerjasama pada forum bilateral, regional, dan <u>multilateral</u>			3.8	4.2	4.6	5.1		
6	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis	Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkotika sintetis yang diselesaikan (P.21)	5	5	4.7	5.2	5.7	6.1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penyidikan jaringan peredaran gelap <u>narkotika sintetis</u>			0.1	0.1	0.1	0.1		
		Layanan Perkantoran			0.2	0.2	0.2	0.3		
7	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah satuan tugas (satgas) anti narkoba aktif di lingkungan pendidikan tinggi	11	11	2.9	3.2	3.5	3.9	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah satgas anti narkoba aktif di lingkungan kerja pemerintah pusat dan swasta			2.8	3.1	3.4	3.8		
		Jumlah fasilitator anti narkoba aktif di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan			4.1	4.5	4.9	5.4		
		Jumlah fasilitator anti narkoba yang melakukan guidance & counselling terhadap korban penyalahgunaan narkoba coba pakai			0.7	0.7	0.8	0.9		
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pemberdayaan peran serta masyarakat yang diterbitkan			0.9	1.0	1.1	1.2		
		Layanan Perkantoran			0.6	0.6	0.7	0.8		
8	Pengawasan Tahanan. Barang Bukti. dan Pengelolaan Aset	Jumlah bulan layanan perawatan tahanan dan pengawasan barang bukti BNN	5	5	1.0	1.2	1.3	1.4	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah berkas perkara penyidikan aset tersangka jaringan sindikat narkoba yang diselesaikan (P.21)			2.2	2.5	2.7	3.0		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang perawatan tahanan. barang bukti. dan penyidikan dan pengelolaan aset			0.1	0.2	0.2	0.2		
		Layanan Perkantoran			1.7	1.8	2.0	2.2		
9	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	9	9	5.1	5.2	5.4	5.5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah lembaga instansi pemerintah yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi menjadi IPWL			0.4	0.5	0.5	0.5		
		Jumlah bulan layanan pelaksanaan IPWL dan pelaksanaan assesment korban penyalah guna narkoba terkait program asesmen terpadu yang mengikuti program rehabilitasi			25.3	25.3	25.3	25.4		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan			1.8	1.8	1.8	1.8		
10	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh penguatan. dorongan. atau fasilitasi di bidang rehabilitasi narkoba	7	7	5.8	6.5	7.5	8.5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah kebijakan dan regulasi bidang penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang diterbitkan			1.2	1.2	1.3	1.3		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah korban penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social di balai rehabilitasi BNN (Rawat Inan)	62	62	35.6	37.0	43.9	50.7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	BNN
		Jumlah korban penyalahgunaan narkoba teratur pakai yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan social rawat jalan			0.3	0.6	0.9	1.2		
		Jumlah laporan hasil penelitian rehabilitasi medis dan sosial			0.2	0.2	0.3	0.3		
		Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi P4GN			0.1	0.1	0.1	0.1		
		Jumlah laporan data informasi rekam jejak korban penyalahgunaan narkoba			0.3	0.4	0.4	0.4		

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah layanan urusan tata usaha dan rumah tangga			6.0	6.7	7.5	8.2		
		Jumlah layanan perkantoran			25.9	30.6	32.0	35.2		
		Peralatan dan fasilitas perkantoran			1.6	-	-	-		
		Gedung/bangunan			1.3	-	-	5.0		
C	Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional									
1	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Persentase crime clearance di wilayah polda	682.3	682.3	140.9	221.2	233.4	246.9	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Polri
D	Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi									
1	Pembinaan Potensi Keamanan	Jumlah Forum Kemitraan Polmas : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif	200.5	200.5	445.2	699.0	737.6	780.4	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Polri
2	Pembinaan Pemeliharaan dan Ketertiban Kewilayahan	Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.	1,188.0	1,188.0	1,524.5	1,666.3	1,740.2	1,822.3	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	Jumlah layanan Turjawali dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat	19.4	19.4	19.9	28.6	29.9	31.3	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri
4	Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bidang Lantas	Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas	2,650.8	2,650.8	2,735.5	2,623.4	2,627.2	2,631.2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Polri
E	Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme									
3	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Jumlah rencana operasi intelijen teknologi	354.0	354.0	475.5	485.0	514.0	544.9	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah kegiatan dan/atau operasi dalam negeri								
		Jumlah laporan intelijen dalam negeri yang disusun								

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Prioritas Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional									
A	Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri									
1	Operasi Intelijen Strategis	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Strategis TNI	36.0	36.0	39.7	39.7	39.7	39.7	Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif	MABES TNI
2	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Laporan kegiatan intelijen	219.1	219.1	251.9	251.9	251.9	251.9	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	TNI AD
3	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	Laporan intelijen TNI AL	38.7	38.7	44.9	55.4	58.2	61.1	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	TNI AL
4	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	Laporan kegiatan intelijen	7.7	7.7	15.0	8.0	8.0	8.0	Dukungan Kesiapan Matra Udara	TNI AU

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri	Jumlah rencana operasi intelijen teknologi	133	133	133.0	141.0	149.5	158.4	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah kegiatan dan/atau operasi luar negeri								
		Jumlah laporan intelijen luar negeri yang disusun								
6	Kegiatan Operasi Kontra Intelijen	Jumlah rencana operasi kontra intelijen	225	225	225.0	238.5	252.8	268.0	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen								
		Jumlah laporan kontra intelijen								
7	Analisis dan Produksi Intelijen	Jumlah rencana analisis dan produksi intelijen	18	18	24.0	25.4	27.0	28.6	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	Badan Intelijen Negara
		Jumlah dokumen perkiraan intelijen								
		Jumlah produk intelijen yang disusun								

Bidang: Pertahanan dan Keamanan

No	Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri									
1	Operasi Analisa sinyal	Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal dan ancaman pihak asing)	712.387	712.387	463.2	486.3	510.6	536.2	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara
2	Penyelenggaraan Fasilitas Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persentase pemanfaatan materiil sandi pada pengelolaan informasi rahasia	389	389	120.4	126.4	132.7	139.4	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara
3	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Nilai potensi kebocoran informasi rahasia	301	301	170.6	179.2	188.1	197.5	Program Pengembangan Persandian Nasional	Lembaga Sandi Negara

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR

(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
I	FOKUS PRIORITAS I: PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM						
1	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	7.3	7.3	16.2	17.2	18.3	19.4
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	3.1	3.1	8.2	9.0	10.0	12.0
3	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi	0.9	0.9	4.2	4.5	4.7	5.0
4	Kegiatan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.5	1.5	2.6	2.8	3.0	3.2
5	Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban	1	1	2.2	2.3	2.5	2.6
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	-	3,383.1	3,599.0	3,801.5	4,029.7
7	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	0.8	0.8	1.6	1.7	1.8	1.9
8	Kegiatan Pendidikan Kedinasan	20.5	20.5	23.6	26.0	28.6	31.4
9	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	0.7	0.7	2.1	2.2	2.3	2.4

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
10	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	0.7	0.7	2.1	2.2	2.3	2.4
11	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	0.7	0.7	2.7	2.9	3.0	3.1
12	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	0.7	0.7	2.1	2.2	2.3	2.4
13	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	0.7	0.7	2.1	2.2	2.3	2.4
14	Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	1.4	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4
15	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	1.2	1.2	3.2	3.4	3.6	3.8
16	Kegiatan Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	4	4	20.0	20.0	20.0	20.0
17	Kegiatan Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	-	-	197.0	197.0	197.0	197.0
18	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan	80.1	80.1	31.0	34.1	37.5	41.3
19	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	-	-	3.8	4.4	4.8	5.3

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
20	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	-	-	3.2	4.4	4.9	5.4
21	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	-	-	4.1	4.3	4.8	5.2
22	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	-	-	2.6	3.1	3.4	3.8
23	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.5	7.5	7.8	8.6	9.4	10.4
24	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.8	92.8	54.7	64.2	67.4	70.3
25	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.7	94.7	27.6	151.4	160.2	169.1
26	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan	5.3	5.3	6.1	6.7	7.4	8.1

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
27	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
28	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	33.6	33.6	35.4	35.4	35.4	35.4

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
29	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
30	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah II	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
31	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
32	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah IV	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
33	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
34	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran pengawasan di daerah	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
35	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
36	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	155.7	155.7	189.7	309.7	369.7	429.7
37	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi	40.5	40.5	54.4	76.2	80.0	84.0
38	Kegiatan Pengawasan Internal KPK	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
39	Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi	9.9	9.9	10.0	10.7	11.8	12.9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
40	Kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	7	7	20.6	22.7	25.0	27.4
41	Kegiatan Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus	3.1	3.1	7.6	8.3	9.1	10.0
42	Kegiatan Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim	20.3	20.3	22.2	25.8	30.1	35.1
II.	FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI						
1	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)	9	9	8.8	9.1	9.6	10.0
2	Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	9.4	9.4	10.0	11.3	12.5	13.7
3	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	9.2	9.2	10.1	11.2	12.3	13.5
4	Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi	13.0	13.0	25.8	25.0	26.9	28.9
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi	17.2	17.2	17.2	18.9	19.9	20.9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
6	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	3.4	3.4	8.2	8.2	8.2	8.2
7	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara	0	0	11	11	11	11

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
8	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung	9.9	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7
9	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	3.59	3.59	4.42	4.42	4.42	4.42

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
10	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	1.04	1.04	3.12	3.12	3.12	3.12
11	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.	325.8	325.8	325.8	325.8	325.8	325.8
12	Kegiatan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	2	2	2	2
III.	FOKUS PRIORITAS 3: PENINGKATAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM						
1	Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	0.9	0.9	1.7	1.9	1.9	2.0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
2	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	2.9	2.9	5.3	5.7	6.0	6.4
3	Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	-	5.7	6.0	6.4	6.8
4	Kegiatan Kerja Sama dan Instrumen HAM	0.9	0.9	2.4	2.5	2.6	2.7
5	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	0.6	0.6	1.5	1.7	1.8	2.0
6	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus	0.6	0.6	1.5	1.7	1.8	2.0
7	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik	0.6	0.6	1.5	1.7	1.8	2.0
8	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Transformasi Konflik	0.6	0.6	1.5	1.7	1.8	2.0
9	Kegiatan Penguatan HAM	1.1	1.1	2.8	2.9	3.0	3.2
10	Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat	0.6	0.6	1.6	1.7	1.8	1.9
11	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	1.8	1.8	3.6	3.7	4.1	4.5
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	-	62.3	62.3	62.3	62.3
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM	1	1	7.7	8.5	9.4	10.3
14	Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5.4	5.4	6.9	8.4	10.8	13.0

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
15	Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	9.1	9.1	9.7	15.2	16.7	20.1
16	Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	14.5	14.5	12.2	19.6	27.9	36.3
17	Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	20.6	20.6	5.75	5.75	5.75	5.75
18	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	6.0	6.0	4.8	8.2	9.8	11.3
19	Kegiatan Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	86.7	86.7	100.1	85.1	79.3	118.3
SUB TOTAL		1,241.3	1,241.3	4,920.8	5,441.1	5,757.1	6,149.0
I	FOKUS PRIORITAS 4: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	85.7	85.7	268.8	309.5	186.7	143.2

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6.5	6.5	2.4	2.5	0.0	0.0
2	Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur	2.2	2.2	0.5	0.5	0.5	0.6
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I	4.3	4.3	2.2	2.4	2.5	2.7
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II	4.3	4.3	0.2	0.2	0.2	0.2
5	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III	4.3	4.3	2.5	2.6	2.8	2.9
6	Pengawasan Intern Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.	-	-	13.9	14.7	15.5	16.3
7	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP	7.0	7.0	156.0	189.7	62.8	12.8
8	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Bagi Internal BPKP dan APIP	48.8	48.8	75.7	80.1	84.6	89.1
9	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional	3.8	3.8	6.6	5.2	5.5	5.8
10	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.8	2.8	4.6	7.1	7.5	7.9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
11	Pengembangan Sistem Katalog	1.7	1.7	3.2	3.4	3.6	3.8
12	Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua-SPIP	-	-	1.0	1.1	1.1	1.2
II.	FOKUS PRIORITAS 5: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF	75.7	75.7	83.2	48.9	54.2	56.8
1	Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6.5	6.5	3.6	3.8	6.7	6.9
2	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I	4.3	4.3	0.9	1.0	1.0	1.1
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II	4.3	4.3	1.3	1.4	1.5	1.5
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III	4.3	4.3	0.8	0.9	0.9	0.9
5	Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5.0	5.0	1.1	1.1	1.2	1.3
6	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tata Laksana	2.0	2.0	0.6	0.6	0.7	0.7

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR**(Dalam Miliar Rupiah)**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
7	Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	3.0	3.0	2.3	2.4	2.5	2.6
8	Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government	1.7	1.7	1.3	1.3	1.4	1.5
9	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8
10	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II	2.4	2.4	1.0	1.0	1.1	1.2
11	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III	1.7	1.7	0.8	0.8	0.9	0.9
12	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur	2.1	2.1	2.9	3.1	3.2	3.4
13	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur	2.3	2.3	1.9	2.1	2.2	2.3
14	Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	8.2	8.2	2.5	2.7	2.8	2.9
15	Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2.1	2.1	1.6	1.7	1.8	1.9
16	Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	2.7	2.7	1.0	1.1	1.1	1.2
17	Pembinaan Kearsipan Daerah	2.4	2.4	1.1	1.1	1.2	1.3
18	Pembinaan Kearsipan Pusat	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
19	Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil	3.0	3.0	15.6	3.0	3.2	3.4
20	Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian	6.6	6.6	28.8	8.0	8.4	8.9

BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
(Dalam Miliar Rupiah)

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	Prakiraan Maju		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
21	Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS (Sub Kegiatan Pembinaan Assessment Center Pada Instansi Pemerintah)	1.7	1.7	3.1	1.1	1.2	1.2
22	Perencanaan Kepegawaian dan Formasi	1.9	1.9	2.1	2.0	2.2	2.5
23	Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat	-	-	1.0	1.1	1.1	1.2
24	Pengkajian Reformasi Administrasi	-	-	0.5	0.0	0.0	0.0
25	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
26	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
III.	FOKUS PRIORITAS 6: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	14.2	14.2	8.2	8.4	8.9	9.2
1	Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	1.8	1.8	2.3	2.4	2.5	2.7
2	Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik	2.8	2.8	2.2	2.3	2.4	2.5
3	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I	3.1	3.1	1.1	1.1	1.2	1.2
4	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II	3.0	3.0	1.1	1.1	1.2	1.2
5	Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III	3.1	3.1	1.1	1.1	1.2	1.2
6	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG

Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA					
A.	Fokus 1: Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah					
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Luas Wilayah yang Dipetakan dan Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya	19.32	21.26	23.38	25.72
		Jumlah Laporan Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan	4.51	4.96	5.46	6.00
		Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pengukuran dengan JRSP/CORS	1.88	2.07	2.27	2.50
		Jumlah SDM yang terlatih di Bidang Pemetaan Dasar	0.85	0.94	1.03	1.13
		Jumlah Bidang Tanah yang dilegalisasi	423.73	466.11	512.72	563.99
		Legalisasi swadaya	887.99	976.79	1,074.47	1,181.92
		Pemeriksaan Tanah HPL Transmigrasi	7.84	8.63	9.49	10.44
		Barang Milik Negara	9.00	9.90	10.89	11.98
		Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	10.94	12.04	13.24	14.57
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Penataan dan Inventarisasi P3WT	14.59	16.05	17.65	19.42
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Konsolidasi Tanah	11.47	12.62	13.88	15.27

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penataan dan pengaturan pertanahan : Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah	7.46	8.20	9.02	9.93
		Luas Aset tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis	2.79	3.07	3.38	3.72
		Jumlah pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	36.96	40.66	44.72	49.20
		Jumlah Laporan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	53.00	58.30	64.13	70.55
		Jumlah Laporan Penegakan Hukum	132.38	145.62	160.18	176.20
2	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang terinventarisasi	4.97	5.47	6.02	6.62
		Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan Monev)	0.80	0.88	0.97	1.07
3	Pengukuran Dasar	Tersedianya standar dan mekanisme kendali mutu, pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral nasional, koridor batas kawasan dan koridor batas wilayah administrasi yang dihasilkan	6.35	6.99	7.69	8.45
		Jumlah Layanan Informasi Pengukuran Dasar	0.04	0.04	0.05	0.05
		Cakupan Wilayah Sistem JRSP Untuk Membangun Kerangka Dasar Kadastral Sesuai Standar Nasional (Unit)	4.12	4.53	4.99	5.49
4	Pemetaan Dasar	Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar	33.95	37.35	41.08	45.19
			0.04	0.05	0.05	0.06

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Dokumen Standar dan Mekanisme Survei dan Pemetaan dasar	0.02	0.03	0.03	0.03
		Jumlah Supervisi/Monitoring Pemetaan Dasar	2.50	2.75	3.02	3.33
5	Pengelolaan Konsolidasi Tanah	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Konsolidasi Tanah yang disusun	0.37	0.41	0.45	0.50
		Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah	2.91	3.20	3.52	3.87
6	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah	Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah	-	-	-	-
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah	1.56	1.71	1.88	2.07
		Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah (Paket)	0.20	0.21	0.24	0.26
7	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Perkara yang disusun (Surat Edaran/Juknis)	0.01	0.01	0.01	0.01
		Jumlah obyek perkara dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya	4.66	5.12	5.64	6.20
		Jumlah Perkara yang ditangani dan dimenangkan oleh pihak BPN RI	0.35	0.39	0.43	0.47
8	Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan	Jumlah Kebijakan Teknis Penetapan Batas Ruang dan Perairan	0.53	0.58	0.64	0.71
		Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Batasnya (HGU)	20.01	22.01	24.21	26.63
		Jumlah Sistem Informasi Bidang Tanah yang Dibangun ((HGU, HGB, HPL dan HP)	1.36	1.50	1.65	1.81

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang	3.22	3.54	3.89	4.28
9	Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	Jumlah PPAT yang Ditetapkan	0.39	0.43	0.47	0.52
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Guna Ruang	3.39	3.73	4.11	4.52
		Jumlah Kebijakan Teknis, Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Wakaf, dan Guna Ruang serta Perairan	0.23	0.25	0.27	0.30
10	Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Sengketa Pertanahan yang Disusun	0.20	0.22	0.25	0.27
		Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Sengketa Pertanahan di Daerah	1.76	1.94	2.13	2.35
		Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1.08	1.19	1.31	1.44
11	Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan	Jumlah penanganan konflik pertanahan	6.58	7.24	7.97	8.76
		Jumlah rumusan kebijakan teknis konflik pertanahan yang disusun (Surat Edaran/Juknis)	0.06	0.06	0.07	0.07
		Jumlah Obyek konflik yang dapat dikaji dan dipetakan akar masalahnya	2.07	2.28	2.51	2.76

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Pemetaan Tematik	Jumlah Pemetaan Tematik Model untuk Penyusunan Standar Pemetaan Tematik Pertanahan pada Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan, Wilayah Ekonomi Khusus dan Bidang Tanah Atau pun untuk Tema Pertanahan Tertentu	8.64	9.51	10.46	11.51
			3.42	3.76	4.14	4.55
		Jumlah supervisi/monitoring pemetaan tematik	2.12	2.33	2.57	2.82
		Jumlah peraturan/juklak/juknis NSPM untuk survei dan pemetaan tematik pertanahan yang ditetapkan	0.54	0.59	0.65	0.71
13	Survey Potensi Tanah	Jumlah survei potensi tanah di wilayah khusus dan strategis	4.52	4.97	5.47	6.02
			0.38	0.42	0.46	0.51
		Jumlah pengintegrasian peta ZNT, ZNEK, dan penyebaran data transaksi tanah ke dalam sistem aplikasi geodatabase BPN RI	0.20	0.22	0.24	0.27
		Jumlah Pembinaan/Bimtek/Sosialisasi (Paket)	3.54	3.89	4.28	4.71
		Jumlah Peraturan/juklak/Juknis (Paket)	0.44	0.48	0.53	0.58
14	Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD	Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD	-	-	-	-
		Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah	5.25	5.77	6.35	6.98
15	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang pertanahan	3.00	3.30	3.63	3.99

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang terdokumentasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	2.40	2.64	2.90	3.19
		Jumlah Penyampaian informasi di bidang pertanahan	7.10	7.81	8.59	9.44
		Jumlah rumusan kebijakan pertanahan	1.00	1.10	1.21	1.33
B.	Fokus 2: Semakin Baiknya Proporsi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah	5.33	5.86	6.44	7.09
		Inventarisasi P4T	47.25	51.98	57.18	62.89
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	81.02	89.12	98.03	107.83
		Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar	7.32	8.05	8.86	9.74
2	Pengelolaan Landreform	Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	0.25	0.27	0.30	0.33
		Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Landreform yang disusun	2.47	2.72	2.99	3.29
		Jumlah Data dan Informasi P4T dan Redistribusi yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Landreform	3.84	4.22	4.64	5.11
3	Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	Pedoman di Bidang Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0.29	0.32	0.35	0.39
		Tersusunnya Neraca Penatagunaan Tanah di Pusat dan Daerah (Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi, Kawasan Khusus)	0.78	0.86	0.95	1.04

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Rencana Tata Ruang	6.56	7.22	7.94	8.73
			0.09	0.09	0.10	0.11
4	Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis	0.49	0.54	0.59	0.65
		Jumlah Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis	6.07	6.68	7.35	8.08
5	Pengendalian Pertanahan	Jumlah Tanah Terlantar yang telah ditetapkan	0.09	0.10	0.11	0.12
		Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penerapan Kebijakan Program Pertanahan	0.45	0.50	0.55	0.60
		Jumlah Data dan Informasi Hak Atas Tanah dan Perijinan yang Diindikasikan Terlantar yang Terintegrasi Dalam Basis Data	3.61	3.97	4.37	4.80
		Jumlah pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan	5.24	5.77	6.35	6.98
6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan	Pengembangan Basis Data Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan bidang pertanahan	2.00	2.20	2.42	2.66
		Norma, Standar, Pedoman dan Mekanisme	0.40	0.44	0.48	0.53
C.	Fokus 3: Meningkatnya Pelayanan Pertanahan					
1	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Ketersediaan Data dan Informasi Pertanahan Nasional Pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS)	2.98	3.28	3.61	3.97
			2.22	2.44	2.69	2.95

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Lima (5) standar sistem informasi pertanahan yang mencakup teknologi informasi, data dan informasi, perangkat lunak untuk internal dan eksternal, perangkat keras dan sistem keamanan jaringan	8.82	9.71	10.68	11.74
		Kantor Pertanahan dan Layanan informasi pertanahan online	40.05	44.05	48.46	53.30
2	Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian	8.25	9.08	9.99	10.99
		Proporsi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan dukungan SIMPEG	7.33	8.06	8.86	9.75
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	operasional perkantoran STPN	1.42	1.57	1.72	1.89
		Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2	0.10	0.11	0.12	0.14
		Jumlah Peserta Tugas belajar Dosen dan Staf Administrasi Pasca Sarjana S-3	0.16	0.17	0.19	0.21
		Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	1.00	1.10	1.21	1.33
		Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus PPAT	0.53	0.58	0.64	0.70
		Jumlah Lulusan Program Spesialis Penilaian Tanah / S-2 Penilaian Tanah / S-2 Pertanahan	-	-	-	-
		Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	3.47	3.82	4.20	4.62
		Jumlah Lulusan Program Diploma IV Pertanahan/ S-1	4.03	4.44	4.88	5.37

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga STPN	15.65	17.21	18.93	20.83
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pendidikan	1.25	1.37	1.51	1.66
		Jumlah gedung negara direhabilitasi	0.40	0.44	0.48	0.53
4	Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BPN RI	9.54	10.49	11.54	12.69
			0.70	0.77	0.84	0.93
			0.05	0.06	0.06	0.07
			0.34	0.38	0.42	0.46
			0.41	0.45	0.49	0.54
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI	10.10	11.11	12.22	13.44
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi pegawai di lingkungan BPN RI	0.83	0.91	1.00	1.10
		Fasilitasi Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI	0.06	0.07	0.08	0.09
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat)	Jumlah gedung negara yang dibangun	90.49	99.54	109.49	120.44
6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah)	Jumlah terbangunnya gedung negara	54.97	60.46	66.51	73.16
			85.08	93.58	102.94	113.24
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	76.95	84.65	93.11	102.42
			4.75	5.23	5.75	6.32
			0.04	0.04	0.04	0.05
			1.88	2.07	2.28	2.50
		Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor	26.98	29.68	32.64	35.91
			10.13	11.15	12.26	13.49

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
Milyar Rupiah

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanahan	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan, Kerjasama Luar Negeri dan Monitoring serta Evaluasi	0.91	1.01	1.11	1.22
		Persentase pemenuhan anggaran yang direncanakan BPN RI dengan Pagu yang dialokasi Pemerintah kepada BPN RI.	4.42	4.86	5.35	5.88
		Persentase data dan informasi hasil inventarisasi pemantauan dan evaluasi dimanfaatkan dalam rangka penyusunan program dan anggaran.	4.59	5.05	5.55	6.11
8	Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Pimpinan, Pengamanan, dan Urusan Keprotokolan	Persentase penyelesaian konsep-konsep surat, keputusan, atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh KBPN RI, eselon I dan komite Pertanahan	5.50	6.05	6.66	7.32
		Jumlah pemberian penghargaan di bidang pertanahan kepada perseorangan dan atau lembaga	0.60	0.66	0.73	0.80
9	Pengelolaan Administrasi Umum (BPN)	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Administrasi Umum	6.39	7.02	7.73	8.50
		Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga kantor	134.58	148.04	162.85	179.13
		Pengadaan Blanko sertipikat	9.00	9.90	10.89	11.98
10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanahan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	5.15	5.67	6.23	6.86
			0.40	0.44	0.48	0.53
			1.25	1.38	1.51	1.67
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tugas Teknis lainnya	Operasional perkantoran satker daerah	1,474.59	1,622.05	1,784.25	1,962.68
		Dukungan manajemen dan teknis satker daerah	165.96	182.55	200.81	220.89

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG**Milyar Rupiah**

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2015	PRAKIRAAN MAJU		
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional	Tersusunnya Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Anggaran	1.31	1.44	1.58	1.74
		Persentase pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan yang berlaku	0.63	0.69	0.76	0.84
		Terlayannya pelaksanaan APBN	4.63	5.09	5.60	6.16
		Persentase pelaksanaan dan Daya Serap anggaran sesuai dengan rencana	7.14	7.85	8.64	9.50
D.	Fokus 4: Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum					
1	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah kajian teknis Bank Tanah	1.00	1.10	1.21	1.33

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ISU STRATEGIS: KETAHANAN PANGAN						
A	Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein						
1	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	740.7	740.7	765.4	799.9	828.8	868.9
2	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia	1,272.6	1,272.6	1,236.3	1,299.0	1,345.8	1,411.1
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	202.6	202.6	135.0	130.4	128.7	128.4
4	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	174.4	174.4	192.3	201.0	208.2	218.3
5	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	175.9	175.9	216.4	226.1	240.8	252.4
6	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	7.7	7.7	7.9	8.2	8.5	8.9
7	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	11.4	11.4	13.4	14.0	14.5	15.2

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
8	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	906.5	906.5	507.4	529.3	548.4	575.0
9	Peningkatan Produksi Ternak	400.3	400.3	424.4	441.0	438.8	458.0
10	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	203.0	203.0	203.0	212.7	223.3	234.5
11	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	356.5	356.5	274.1	289.9	304.4	319.6
12	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	383.8	383.8	318.3	335.7	352.5	370.1
13	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	169.5	169.5	170.8	180.2	189.2	198.7
14	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	738.6	738.6	537.0	552.8	565.9	593.3
15	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1,634.6	1,634.6	1,330.6	1,392.5	1,446.1	1,516.2
16	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	201.9	201.9	238.5	249.6	259.2	271.8
17	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	120.9	120.9	272.0	284.6	295.6	309.9
18	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	53.9	53.9	40.3	41.9	43.7	45.7
19	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	28.1	28.1	28.0	29.2	30.5	31.9
20	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	104.7	104.7	105.8	110.6	115.6	120.8
21	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	479.0	479.0	512.9	531.3	555.2	580.2
22	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	22.0	22.0	24.3	25.4	26.6	27.8

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
23	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	37.6	37.6	37.2	43.7	33.2	33.0
24	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	114.3	114.3	120.2	125.6	131.3	137.2
25	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	130.2	130.2	132.2	138.1	144.3	150.8
26	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	17.5	17.5	22.5	23.5	24.6	25.7
27	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	223.6	223.6	227.6	235.3	243.8	255.6
28	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	129.2	129.2	135.6	141.7	146.8	154.0
29	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	682.3	682.3	684.2	715.1	740.9	776.9
30	Pendidikan Menengah Pertanian	55.6	55.6	57.0	58.3	60.4	63.3
31	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	268.3	254.3	140.0	144.5	152.3	158.9
32	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	505.0	1121.0	559.4	563.3	579.0	607.6
33	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	47.0	68.1	74.6	78.4	82.3	86.4
34	Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	85.0	67.0	100.4	105.4	110.7	116.2
35	Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	255.0	265.9	217.4	228.3	239.7	251.7
36	Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	85.0	97.7	152.2	159.8	167.8	176.2

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
37	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	190.0	184.5	195.0	206.0	176.4	111.1
38	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya	134.7	137.3	146.3	153.4	165.7	174.0
39	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	105.0	106.8	117.0	122.9	129.0	135.4
40	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	74.1	74.1	81.3	78.1	82.0	86.1
41	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan	10.4	10.7	47.7	56.6	62.9	69.2
B	Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri						
1	Pengembangan Pemasaran Domestik	90.3	90.3	110.6	115.6	119.8	125.6
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	57.8	57.8	99.3	103.8	107.5	112.7
C	Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi						
1	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	101.5	101.5	108.4	113.2	117.3	122.9
2	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	176.2	176.2	108.4	203.5	214.7	219.0
3	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan	69.57	93.47	77.3	81.2	85.2	89.5
D	Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan						
1	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	368.2	368.2	583.5	610.6	634.1	664.9

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ISU STRATEGIS: KETAHANAN ENERGI						
A	Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar						
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	102.9	102.9	48.1	51.5	55.3	59.4
2	Survei dan Pelayanan Geologi	361.9	361.9	276.4	289.0	302.2	316.1
3	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	77.4	77.4	44.1	62.4	66.2	70.2
B	Peningkatan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur Energi						
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1189.6	1189.6	210.5	250.1	268.8	289.4
C	Efisiensi dalam pengelolaan energi						
1	Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih	103.8	103.8	44.9	64.4	67.7	71.0
2	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	71.2	71.2	342.8	43.0	43.5	43.2
D	Peningkatan Peranan EBT di dalam Bauran Energi						
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	58.5	58.5	38.8	45.3	48.8	52.2
2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	925.3	925.3	672.7	683.2	683.2	683.2
3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi	143.3	136.1	125.1	179.5	197.5	217.2

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ISU STRATEGIS: PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP							
A	Pertanian						
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan	101.6	101.6	119.9	125.8	132.1	138.7
2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan	41.8	41.8	48.9	51.4	54.0	56.7
3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	78.0	78.0	139.3	146.2	153.6	161.2
4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	79.6	79.6	87.4	91.7	96.3	101.1
5	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	82.9	82.9	95.8	100.6	105.6	110.9
6	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar	139.1	139.1	350.1	365.3	378.4	396.8
7	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	144.7	144.7	321.0	337.8	350.0	366.9
8	Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha	37.6	37.6	52.1	54.4	56.3	59.1
9	Dukungan Perlindungan Perkebunan	65.8	65.8	95.7	99.8	103.4	108.4
10	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	68.7	68.7	70.3	73.3	76.0	79.6
11	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	64.0	64.0	50.0	52.3	54.2	56.8
12	Pengembangan Pemasaran Internasional	32.4	32.4	22.8	23.8	24.7	25.9
13	Pengembangan Usaha dan Investasi	39.1	39.1	38.8	40.6	42.0	44.1

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	238.4	238.4	234.8	245.3	254.2	266.5
15	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	89.1	89.1	100.5	105.0	109.7	114.7
16	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	113.4	113.4	117.2	122.5	128.0	133.8
17	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan	9.7	9.7	8.9	9.3	9.6	10.1
18	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	8.0	8.0	7.1	7.4	7.6	8.0
19	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	9.0	9.0	7.2	7.6	7.8	8.2
20	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	58.6	58.6	40.1	41.9	43.4	45.5
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	456.7	456.7	527.5	551.3	571.2	599.0

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Perikanan						
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	65.4	60.4	119.1	123.6	123.6	121.0
2	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	-	94.5	95.4	96.4	97.4
3	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	23.2	22.7	50.0	53.0	56.2	59.5
4	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	258.0	252.5	110.0	115.5	121.3	127.3
5	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	290.0	311.6	89.0	93.4	98.1	103.0
6	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	223.1	223.3	246.4	252.4	260.3	270.0
7	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	16.4	16.5	26.7	29.5	31.2	32.5
8	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.1	9.3	19.8	19.1	20.9	22.5
9	Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan	17.8	18.3	26.0	27.3	28.7	30.1
10	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	129.5	191.2	130.0	136.5	143.3	150.5
11	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Nonpangan Hasil Perikanan	33.3	37.5	53.0	55.7	58.4	61.4
12	Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan	79.7	93.1	41.5	43.6	45.8	48.0
13	Pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	-	-	38.5	40.4	42.4	44.6

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP	40.1	33.9	45.2	48.6	50.8	53.4
15	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	21.8	20.5	23.9	24.7	27.1	28.4
16	Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	79.5	105.7	90.6	95.8	100.7	105.4
17	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	252.0	252.9	281.0	305.6	320.8	336.9
C	Kehutanan						
1	Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	62.5	65.7	69.0	72.4
2	Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	10.2	10.2	78.2	82.1	86.2	90.5
3	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	6.7	6.7	93.8	98.5	103.4	108.6
4	Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	10.3	10.3	46.9	49.3	51.7	54.3
5	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	5.8	5.8	31.3	32.8	34.5	36.2
6	Pemantapan Kawasan Hutan	473.4	473.4	375.3	394.0	413.8	434.5
7	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi	15.0	15.0	218.6	229.5	241.0	253.0
8	Peningkatan Usaha Hutan Alam	12.0	12.0	174.8	183.6	192.8	202.4
9	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	11.5	11.5	174.8	183.6	192.8	202.4
10	Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	15.0	15.0	174.8	183.6	192.8	202.4
11	Peningkatan Industri Primer Kehutanan	15.0	15.0	131.1	137.7	144.6	151.8
12	Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi	215.4	215.4	882.7	854.2	896.9	941.6
13	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	14.0	14.0	142.8	149.9	157.4	165.3
14	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	14.0	14.0	142.8	149.9	157.4	165.3
15	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya	147.5	147.5	266.1	288.3	302.7	317.9

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	57.5	57.5	60.4	62.0	65.1	68.3
17	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan Untuk Peningkatan Daya Saing Produk Kayu dan Bukan Kayu	-	-	18.2	19.1	20.0	21.1
18	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi SDH (flora, fauna, mikroba dan kawasan)	-	-	42.5	61.7	47.7	50.2
19	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan (Kayu dan Non Kayu)	-	-	42.5	45.7	48.7	51.1
20	Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim	-	-	18.2	19.5	20.8	22.0
D	Mineral dan Pertambangan						
1	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	68.5	68.5	34.0	39.6	39.4	39.7

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ISU STRATEGIS: PENGUATAN KONSERVASI, PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN						
A	Konservasi Hutan						
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	30.0	30.0	15.0	16.1	17.2	18.4
2	Konservasi Keanekaragaman Hayati	15.0	15.0	10.5	11.2	12.0	12.9
3	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	21.0	21.0	10.0	10.7	11.4	12.3
4	Pengendalian Kebakaran Hutan	49.0	49.0	30.0	32.1	34.3	36.8
5	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	35.0	35.0	30.0	32.1	34.3	36.8
6	Pengelolaan Taman Nasional	592.6	592.6	626.4	670.2	717.2	767.4
7	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	535.7	535.7	621.7	665.2	711.8	761.6
8	Pembinaan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	23.0	23.0	13.1	13.8	14.4	15.2
9	Pengembangan Perhutanan Sosial	16.0	16.0	7.4	7.8	8.2	8.6
10	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	14.0	14.0	7.0	7.4	7.7	8.1
11	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	14.0	14.0	6.5	6.8	7.2	7.5
12	Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS	23.0	23.0	611.7	642.2	674.3	708.1
13	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	14.0	14.0	25.8	27.1	28.4	29.9

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Tata Kelola, Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta Pengawasan Pemanfaatan SD Kelautan						
1	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	85.0	83.9	280.0	307.0	310.7	308.4
2	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	75.0	179.1	63.0	69.5	73.2	77.0
3	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	55.0	109.1	55.0	59.0	62.2	65.5
4	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	35.0	39.2	50.0	47.3	49.6	52.1
5	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	141.0	139.0	259.0	260.8	262.9	275.6
6	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	18.0	18.0	18.3	19.2	20.2	21.2
7	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	16.0	15.3	17.0	17.9	18.7	19.7
8	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	26.0	26.3	27.0	28.4	29.8	31.3
9	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	288.0	290.0	410.0	45.8	58.3	63.1
10	Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan	127.5	123.8	103.9	115.6	45.8	48.1
11	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir	29.8	30.0	32.6	38.4	37.7	39.6
12	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	18.0	15.0	18.0	19.9	19.8	20.8
13	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	18.0	10.0	4.6	4.8	5.1	5.3
C	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
1	Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim	35.0	35.0	20.9	21.9	23.0	24.1

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3	11.0	11.0	9.0	9.1	9.5	10.0
3	Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	10.0	10.0	10.0	16.2	17.0	17.8
4	Peningkatan komunikasi lingkungan	8.6	8.6	8.0	8.0	8.4	8.8
5	Pengembangan Ekonomi Lingkungan	7.5	7.5	7.5	8.1	8.6	9.0
6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.5	5.5	7.5	6.0	6.3	6.6
7	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	11.0	11.0	10.0	10.9	11.5	12.1
8	Peningkatan Peran Masyarakat	7.5	7.5	10.0	24.9	26.1	27.4
9	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	15.5	15.5	15.0	17.2	18.1	19.0
10	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor	10.8	10.8	10.0	14.3	15.0	15.7
11	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir	8.0	8.0	12.0	19.5	20.4	21.4
12	Adaptasi perubahan iklim	9.6	9.6	4.0	6.3	6.4	7.0
13	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	7.0	7.0	8.0	8.3	8.7	9.1
14	Pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat	19.2	19.2	10.0	4.5	4.7	4.9
15	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	12.0	12.0	8.8	9.4	9.9	10.4
16	Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	18.0	18.0	12.0	16.2	17.0	17.8
17	Pengelolaan Sampah Bidang Lingkungan Hidup	20.0	20.0	15.0	21.5	22.6	23.7
18	Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil	13.0	13.0	12.0	18.5	19.4	20.4

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa	15.0	15.0	12.0	16.3	17.1	18.0
20	Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas	16.0	16.0	12.0	15.0	15.7	16.5
21	Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	10.5	10.5	10.0	11.4	11.9	12.5
22	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8.5	8.5	15.0	24.4	25.7	26.9
23	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	8.0	8.0	16.0	19.4	20.4	21.4
24	Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.3	5.3	10.9	17.7	18.6	19.6
25	Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan	21.0	21.0	40.0	42.9	45.0	47.3
26	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	120.0	120.0	57.5	129.5	136.0	142.8
27	Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan	7.0	7.0	10.0	8.2	8.6	9.1
28	Pengelolaan Ekoregion Sumatera	19.2	19.2	27.9	30.5	32.0	33.6
29	Pengelolaan Ekoregion Jawa	12.1	12.1	23.6	30.3	31.8	33.4
30	Pengelolaan Ekoregion Kalimantan	15.4	15.4	17.7	16.8	17.7	18.5
31	Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	12.5	12.5	17.3	17.0	17.8	18.7
32	Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku	13.8	13.8	22.0	21.0	22.0	23.2
33	Pengelolaan Ekoregion Papua	7.1	7.1	10.9	18.3	19.2	20.2

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

BIDANG: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah)

No.	Isu Strategis/ Sub Isu Strategis/ Kegiatan Strategis	Rencana Tahun 2014	Prakiraan Pencapaian Tahun 2014	Rencana Tahun 2015	PERKIRAAN MAJU		
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA							
1	Pengelolaan Database BMKG	31.1	31.1	30.0	27.9	29.3	30.7
2	Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami BMKG	96.7	96.7	108.8	114.3	120.0	126.0
3	Pengelolaan Iklim. Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	75.5	75.5	76.8	80.6	84.6	88.9
4	Pengelolaan Instrumentasi. Rekayasa dan Kalibrasi BMKG	53.7	53.7	59.1	78.2	82.1	86.2
5	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG	60.1	60.1	58.1	67.8	71.1	74.7
6	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG	147.8	147.8	164.4	173.8	182.5	191.6
7	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	284.8	284.8	300.7	195.2	204.9	215.2
8	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	37.3	37.3	40.6	42.7	44.8	47.0
9	Pengelolaan Seismologi teknik. geofisika potensial dan tanda waktu BMKG	32.5	32.5	35.0	35.0	36.8	38.6
10	Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG	159.3	159.3	145.2	145.4	152.6	160.3